

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
PRODUKTIF MELALUI KREDIT MIKRO OLEH PEMERINTAH
DAERAH DAN LSM UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
DI DKI JAKARTA (STUDY PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM
PPMK PEMDA DAN LSM MASYARAKAT MANDIRI)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial**

**NAMA : WA ODE ASMAWATI
NPM : 690 5510 253**



T


23180

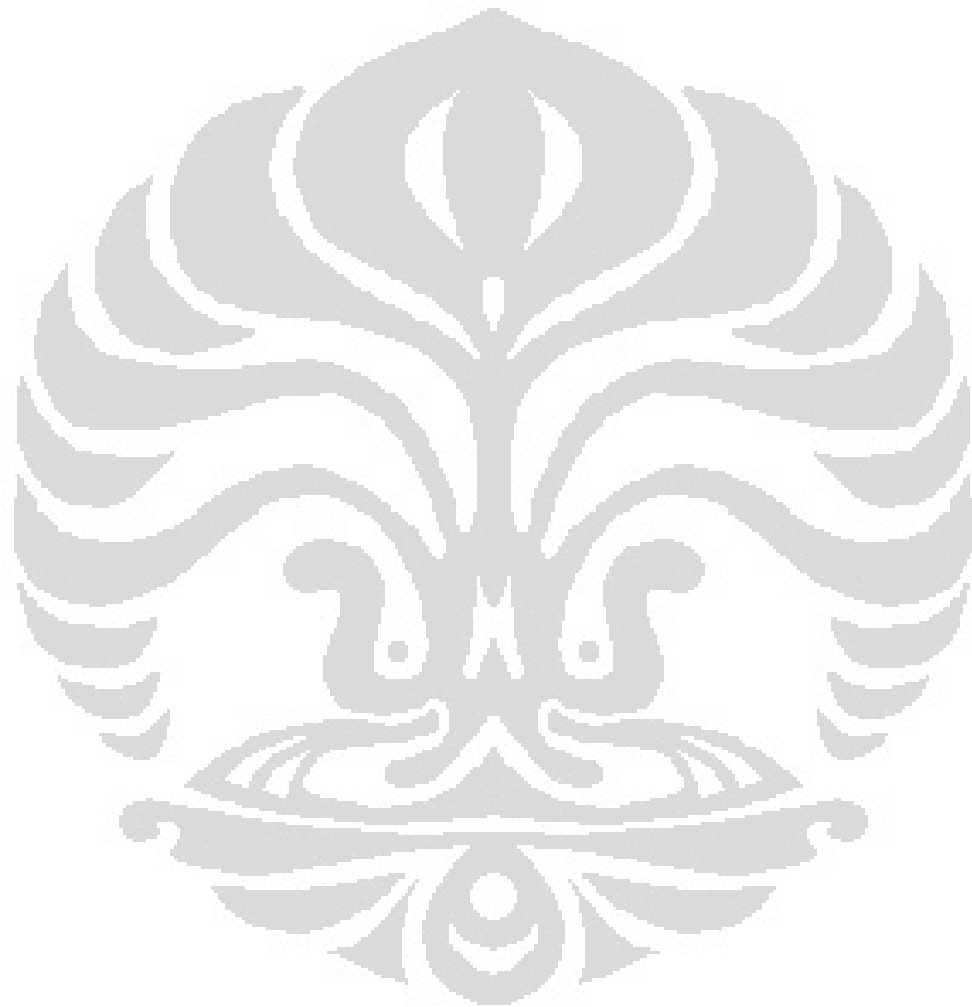
**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PASCA SARJANA
DEPOK
JULY 2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Wa Ode Asmawati
NPM : 690 5510 253
Tanda Tangan : 
Tanggal : 18 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wa Ode Asmawati
NPM : 690 5510 253
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

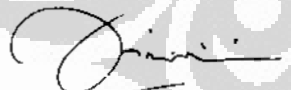
demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

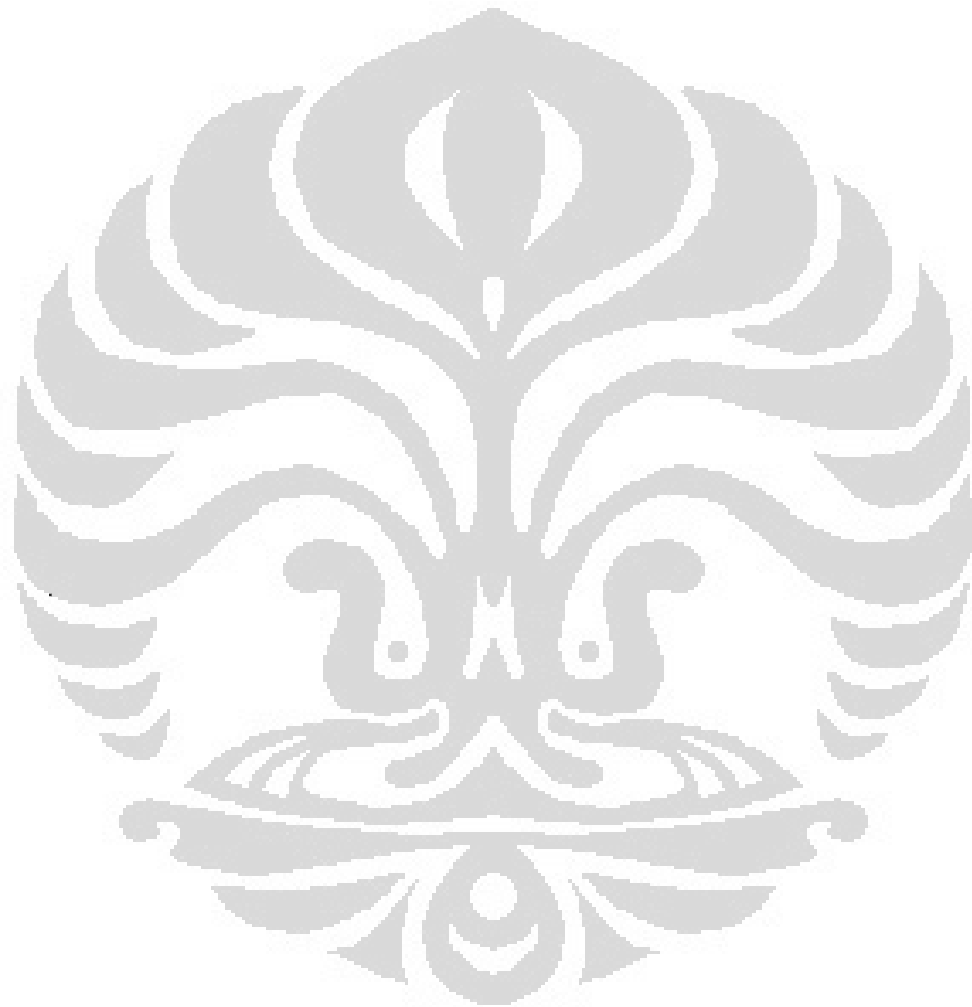
Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Produktif melalui Kredit Mikro oleh Pemerintah Daerah dan LSM untuk Pengentasan Kemiskinan di DKI Jakarta (Study Perbandingan antara Program Pemda dan LSM Masyarakat Mandiri)

beserta perangkat yang ada, jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal : 23 Juli 2008
Yang menyatakan


(Wa Ode Asmawati)

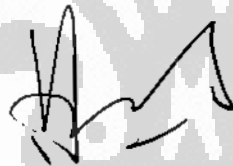


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS :

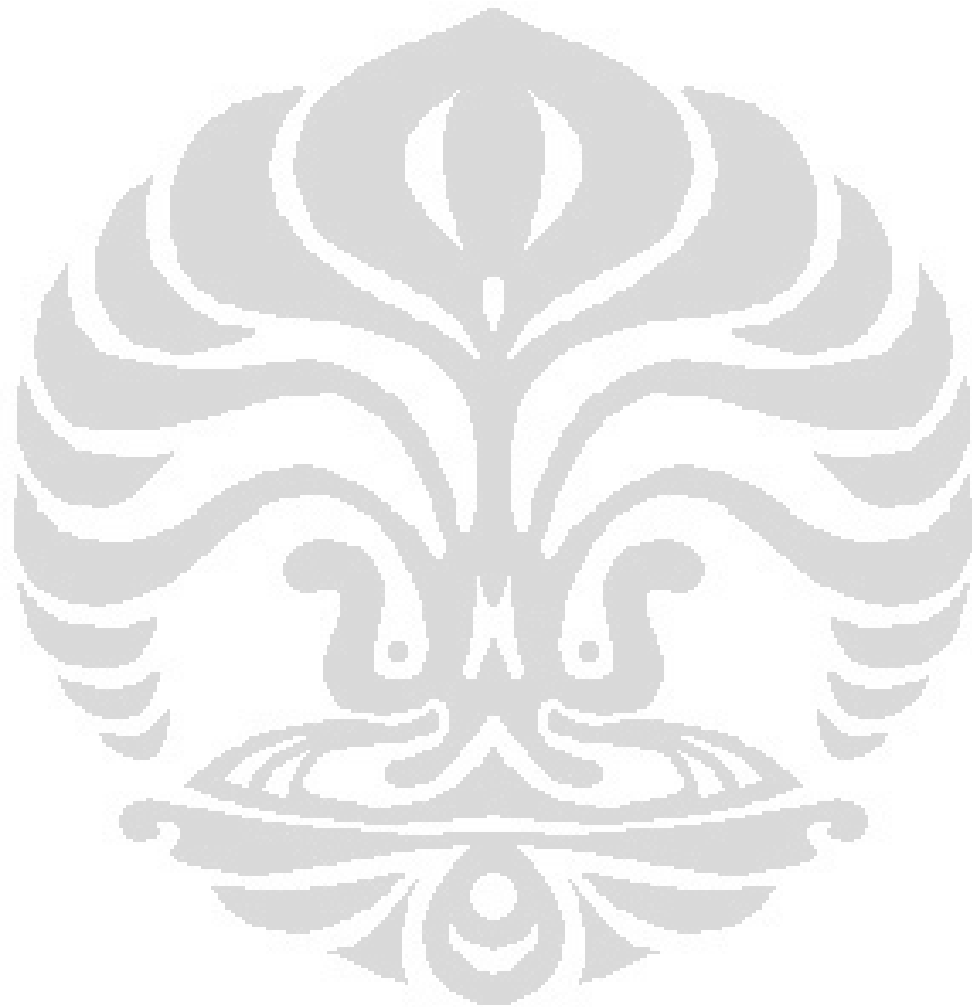
Nama : Wa Ode Asmawati
NPM : 690 5510 253
Judul : Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Produktif melalui
Kredit Mikro Pemerintah Daerah dan LSM untuk Pengentasan
Kemiskinan di DKI Jakarta (Study Perbandingan antara Program
PPMK Pemda dan LSM Masyarakat Mandiri)

Telah memenuhi syarat, baik dari segi isi maupun teknis.

Jakarta, Juni 2008
Dosen Pembimbing,



(Fentiny Nugroho, Ph.D)

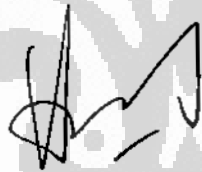


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS :

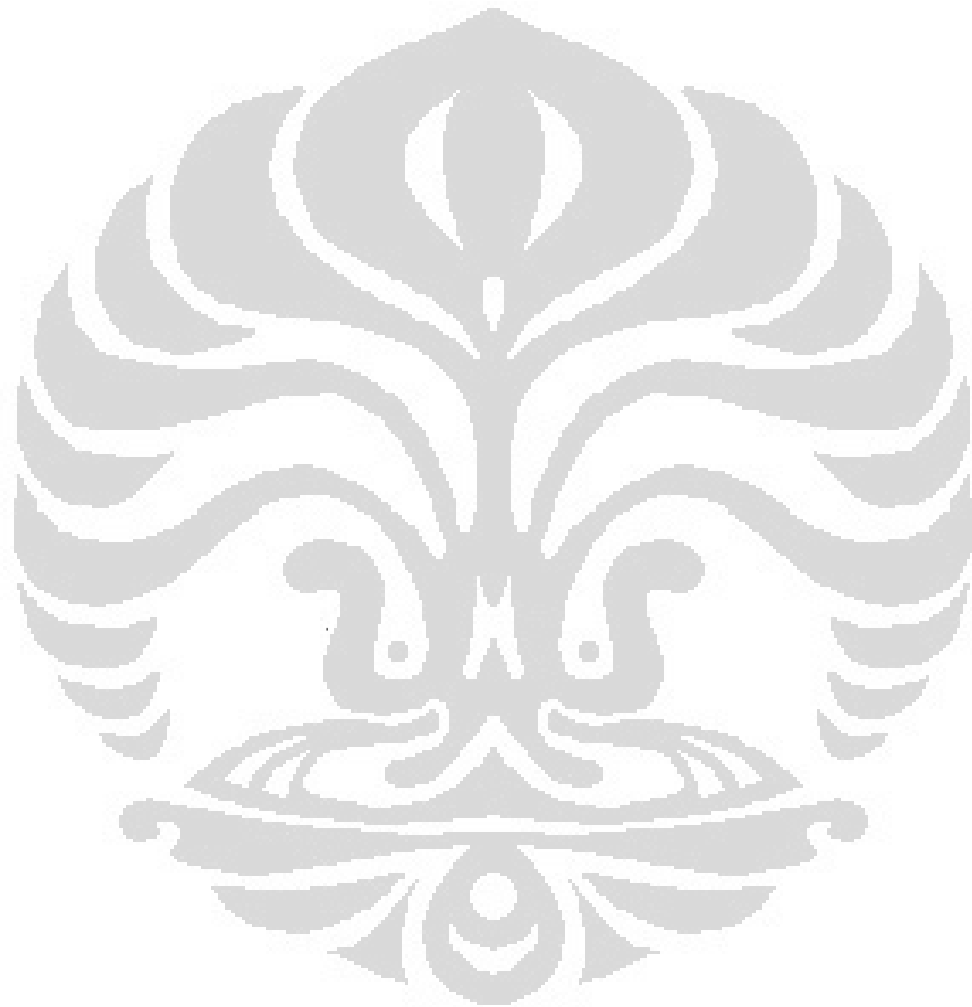
Nama : Wa Ode Asmawati
NPM : 690 5510 253
Judul : Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Produktif melalui
Kredit Mikro Pemerintah Daerah dan LSM untuk Pengentasan
Kemiskinan di DKI Jakarta (Study Perbandingan antara Program
PPMK Pemda dan LSM Masyarakat Mandiri)

Telah memenuhi syarat, baik dari segi isi maupun teknis.

Jakarta, Juni 2008
Dosen Pembimbing,



(Fentiny Nugroho, Ph.D)



Kata Pengantar

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga tesis ini yang berjudul "Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Produktif Melalui Kredit Mikro oleh Pemerintah Daerah dan LSM Untuk Pengentasan Kemiskinan Di DKI Jakarta (Study Perbandingan antara Program PPMK Pemda dan LSM Masyarakat Mandiri)" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Paradigma pembangunan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh modernisasi mengakibatkan tidak meratanya pembangunan dan melahirkan banyak kemiskinan. Ketergantungan sebagai dampak menciptakan wilayah sentral dan periferi merupakan dampak normal dari pemberlakuan pola pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan. Arus urbanisasi yang besar, merupakan salah satu dampaknya, menumbuhkan banyak sektor informal/usaha mikro di kota-kota besar seperti Jakarta. Besarnya usaha mikro yang 98% lebih menyusun perekonomian Indonesia dimana rata-rata usaha ini digeluti oleh kaum miskin menjadikan tema ini menarik sebagai topik penelitian. Kegelisahan peneliti melihat kemiskinan kota yang begitu meluas di Jakarta, mendorong peneliti untuk mengkaji persoalan ini. Usaha mikro yang berkembang di perkotaan yang sering disebut sebagai sektor informal bukannya tanpa kendala. Lemahnya permodalan dan keamanan berusaha juga akibat lemahnya pemihakan kebijakan menjadikan makin terpuruknya kaum miskin perkotaan. Kenyataannya, kebijakan perekonomian dalam hal permodalan baik oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya masih sangat lemah pemihakannya.

Syukurnya, saat ini ada beberapa program pemerintah seperti PPMK bidang ekonomi dan lembaga keuangan mikro seperti LSM MM yang mau membantu beberapa pengusaha mikro, dalam beberapa hal bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Peningkatan pendapatan dan perubahan perilaku sasaran sangat membantu pengembangan usaha mereka meskipun saat ini masih banyak yang subsisten. Dalam menjalankan program, kedua lembaga memiliki kekhasan dan sistem sendiri yang layak dikaji. Sejauhmana perbedaan dan manfaat masing-masing program dikaji pada penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pembimbing "**Ibu Fentiny Nugroho, Ph.D**" yang selalu memberikan support terbaik dan bimbingan hingga penyelesaian studi ini. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada :

- 1) Seluruh Staff Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia terutama Ibu Bunda Sri Sugiri, Ibu Ety Rahayu, Ibu Fitriyah, Pak Prof. Bambang Shergi Laksmono, dan Staff Pengajar lainnya yang selama ini telah banyak membantu penulis memahami berbagai ilmu yang dapat menunjang aktivitas penulis sebagai pegiat sosial;
- 2) Mbak Valen, Mbak Yessi serta Pak Wardiyo, banyak membantu proses penyelesaian studi, pihak perpustakaan yang tidak jenuh melayani penulis dalam mencari literatur;
- 3) Pihak BPM DKI Jakarta dan Dewan Kelurahan Duri Utara yaitu Bapak Maksum, Pak Aries, Pak Yusuf, Pak Trisna, Pak Dede, Pak Maman, Pak Dulyadi, Pak Imam, Pak Ustad, Mbak Yuni dan Seluruh pelaksana PPMK serta para informan Duri Utara yang sudah sangat berjasa membantu kemudahan penelitian ini;
- 4) Pihak Masyarakat Mandiri (MM) utamanya Mbak Was, Mbak Leni, Pak Ahmad dan Pak Ponco serta para informan yang telah memberikan ruang bagi kemudahan penelitian ini;
- 5) Saudara-saudara yang berada di aras perjuangan keadilan sosial dan teman sepemikiran di JIMM yang banyak menginspirasi fikir dan gerak saya untuk banyak belajar pada "kearifan orang miskin" dan bagaimana "menjadi manusia otentik";
- 6) Saudara – saudara saya yang tengah berjuang untuk *survival* di level akar rumput, kepadamu aku persembahkan tulisan ini, sebagai wujud kepedulian terhadap ketertindasan yang kamu alami;
- 7) Kepada Alm.Papa La Ode Abdul Kadir dan Alm.Mama Wa Ode Maemuna yang telah tiada, semangatmu menuntunku untuk senantiasa menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi sesama;
- 8) Kepada Bibi (mama) Alm.Wa Ode Naha dan Om Angka, tulisan ini merupakan refleksi dalam perjuangan hidupmu;
- 9) Kepada Saudaraku tercinta, Uci, Kaisa, Ahmad, Ulin, Zul dan Riati yang selalu memotivasi untuk terus berjuang dan pantang menyerah;
- 10) Untuk Kak Rana, Rinusu, Mama lin, Pak Rudi Wahyono, Leeq, Pak Azis, Ka Mia dan Tika yang senantiasa mensupport dan berdiskusi tentang berbagai persoalan yang dihadapi;
- 11) Teman-teman se-angkatan di Pasca Kessos UI 2005, Ivech, Edwin, Pak Haji Syamsul, Rini, Mulyana, Lusi dan Puji; terima kasih untuk mau berbagi waktu dan kesempatan denganku selama di bangku Kuliah. Semoga persahabatan kita tetap abadi;
- 12) Adik-adiku Jojo, Hafiz, Azizah, lin, Igo, Dhea, Daffa, Fani, Irwan, Tuti, dan Leni yang selalu menyemangati;

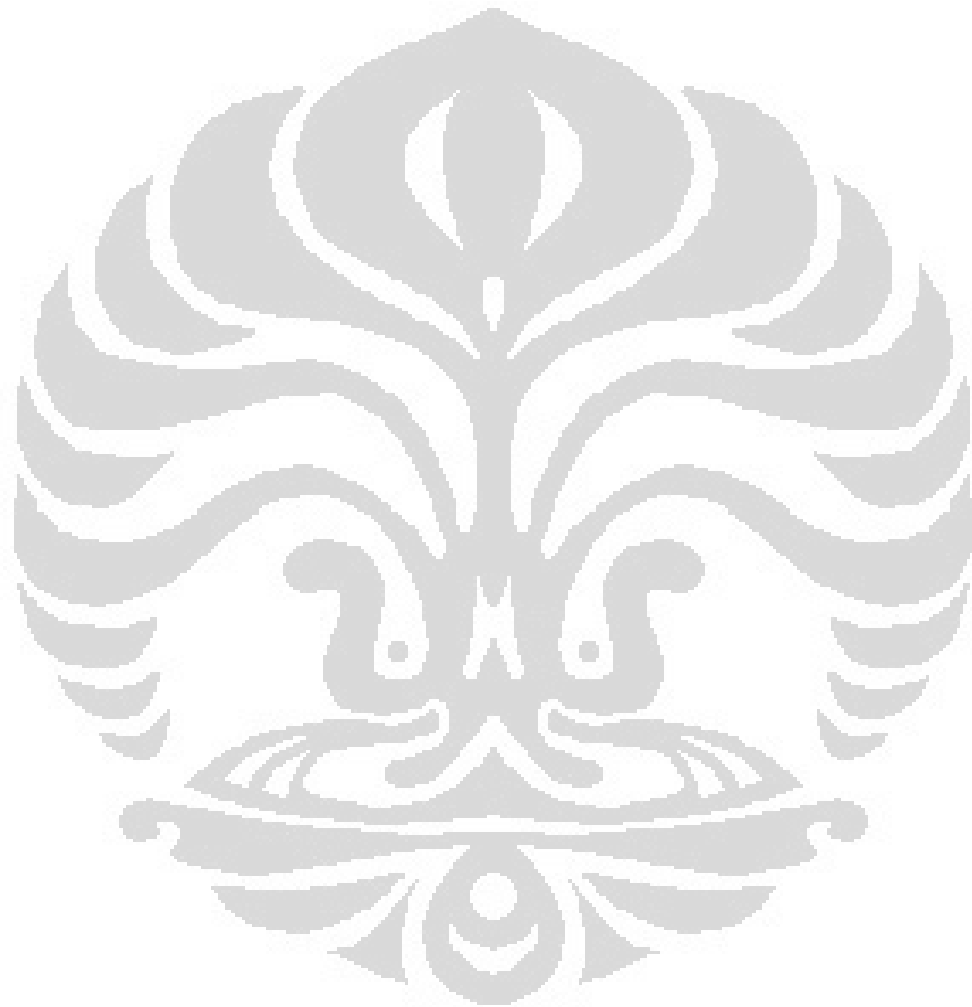
13) Ibu-Ibu Aisyiyah, IMM, IRM dan Saudara di Nasyyatul Aisyiyah, semoga segala aktivitas kita selalu mengikuti "otentisitas" yang diperjuangkan Ahmad Dahlan.

14) Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga do'a dan bantuan selama ini menjadi berkah dan bemiilai ibadah di Sisi-Nya, Amien.

Penulis menyadari, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, baik kedalaman materi maupun penggunaan bahasa. Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyempumaan penulisan ini. Tak ada gading yang tak retak, apa yang kita usahakan dan lakukan semoga selalu menjadi yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi kita semua, amien ya Robbal alamin. *Fastabiqul Khaerat (beramai-ramai berbuat kebaikan).*

Salam Penulis,

Wa Ode Asmawati



ABSTRAK

Nama : Wa Ode Asmawati
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Produktif melalui Kredit Mikro oleh Pemerintah Daerah dan LSM untuk Pengentasan Kemiskinan di DKI Jakarta (Study Perbandingan antara Program PPMK Pemda dan LSM Masyarakat Mandiri)

Tesis ini membahas tentang bagaimana program-program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemda dan LSM dalam bentuk intervensi kredit mikro dapat bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Upaya pengentasan kemiskinan melahirkan berbagai kebijakan dan program melalui strategi pemberdayaan maupun teknik-teknik pengorganisasian masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Kesepakatan Internasional untuk penghapusan kemiskinan dari *United Nations (UN)* tentang kemiskinan adalah melalui *Millenium Development Goals (MDG's)* dengan tujuan pertama yaitu "*Eradicated Extrim Poverty and Hunger*". Target pertamanya adalah "*Halves, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day*". Sebagai *state obligation*, di DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ditujukan pada program-program pengentasan kemiskinan seperti PPMK bina ekonomi melalui program pengembangan usaha mikro-produktif. Kondisi kemiskinan kota terkait erat dengan pendapatan masyarakat, karena makin sempitnya lahan untuk produksi/perumahan dan ketergantungan yang kuat pada uang sebagai alat tukar, tingginya angka urbanisasi, yang tidak terserap disektor formal, menggeluti usaha mikro-subsisten, dan memiliki kerentanan (*vulnerability*) yang cukup tinggi. Kaum miskin membutuhkan akses-akses untuk mencapai kebutuhan hidup minimum seperti modal dalam bentuk kredit mikro, informasi usaha yang memadai, dan teknologi tepat guna. Mereka sulit tersentuh lembaga perbankan/keuangan karena syarat agunan dan syarat formal lainnya masih sulit dipenuhi..

Penelitian ini dilakukan di wilayah perkotaan DKI Jakarta yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu pada Maret 2007 sebesar 405.700 jiwa atau sekitar 4,48 % dari total penduduk. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan dianalisa secara deskriptif. Tipe sampel purposive dengan jumlah informan 20 orang. penelitian melalui studi literatur, wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengambilan foto. Program PPMK yang dipilih adalah program terbaik tahun 2007 di Kelurahan Duri Utara, Tambora Jakarta Barat. Untuk LSM sebagai sasaran penelitian ini adalah Masyarakat Mandiri di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, DKI Jakarta.

Hasil yang ditemukan adalah secara umum kondisi kemiskinan akibat kebijakan yang banyak menerapkan teori modernisasi, memacu pertumbuhan sektor industri besar dan melahirkan banyak kesenjangan, mengabaikan ekonomi kecil yang menyangga 98% lebih perekonomian Indonesia. Penciptaan wilayah sentral/metropolis dan satelit/pinggiran seperti yang dialami Jakarta sebagai pusat utama pertumbuhan memacu urbanisasi dari desa ke kota. Lembaga keuangan/perbankan masih kurang memihak kaum miskin yang menggeluti usaha mikro. Kesulitan permodalan menjadi faktor yang mempercepat kemiskinan. Pihak perbankan/lembaga keuangan lebih condong mensupport usaha besar (0,005%) dan usaha menengah (0,146%).

Lahirnya kebijakan Pemda DKI Jakarta *bottom-up* sebagai respon akibat krisis moneter 1997, melalui progam PPMK sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan perkotaan utamanya program bina ekonomi dengan intervensi kredit mikro patut mendapatkan apresiasi

karena bermanfaat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan kekeluargaan, sistem rekrutmen pemanfaat bersifat formal, menjadi faktor penghambat akses masyarakat urban yang kebanyakan tidak ber-KTP dan tempat tinggal tetap. Sifat program masih terlihat sebagai upaya melibatkan masyarakat dengan kebijakan yang sudah ada di tingkat pengambil keputusan, mengakibatkan jebakan partisipasi. Umumnya kebijakan dan program pemerintah yang bersifat struktural sehingga seringkali membuat pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaiknya pola sosialisasi lebih bersifat konsultatif sehingga dapat membangun proses pembelajaran dan meningkatkan *trust* masyarakat.

MM mengembangkan program-program pendampingan dan perguliran kredit mikro guna menjawab persoalan-persoalan kemiskinan. Kriteria ditetapkan namun masih bersifat lentur sesuai kondisi sasaran. Mitra dididik untuk menjadi kader, membentuk lembaga lokal guna meneruskan perguliran dana. Peran program sejak dari pendampingan hingga pembentukan lembaga lokal, juga merupakan upaya untuk memberikan pemampuan (*to give ability*) pada masyarakat. Perda 11 Tahun 1988 cukup menghambat program MM di komunitas urban, meskipun telah membayar retribusi. Distorsi pasar karena lemahnya bergaining akibat kebijakan yang tidak memahami kelompok miskin menjadikan usaha yang menyangga hidup mereka harus hilang.

Masih lemahnya bergaining pasar, usaha sasaran menyangkut kualitas dan kemasan, juga *lay out* usaha. Pendekatan program juga dapat dikatakan lebih bersifat profesional dan belum bersifat transformatif. Proses pendampingan yang dilakukan oleh MM sebagai lembaga eksternal merupakan suatu langkah pengembangan masyarakat. Sistem kelembagaan dan kader yang lahir dari proses pendampingan merupakan bagian dari proses menuju kemandirian masyarakat untuk membangun dan mendapatkan akses pemodalangan dilingkungan mereka sendiri. Untuk program pemerintah melalui PPMK lebih memampukan insider sebagai pelaksana dan juga pendamping (meskipun makna pendamping lebih pada proses sosialisasi, penagihan dan pengusulan program. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM dan Pemerintah merupakan suatu solusi ditengah ketidakberdayaan masyarakat miskin. Beberapa kendala di atas menyebabkan lemahnya akses pengusaha mikro pada permodalan dan membutuhkan perhatian khusus untuk dapat memperbaiki perkembangan usaha masyarakat kecil. Meskipun usaha mikro sudah membuktikan ketahanannya setelah Indonesia digoyang krisis pada tahun 1997. Sebagaimana kredit adalah HAM, dapat membantu membuka peluang-peluang baru bagi si miskin untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Lahirnya kepercayaan dari pihak sasaran adalah proses integritas yang dibangun melalui program ketika menjadikan suatu proses pembangunan menjadi suatu proses populis, menyatu dan saling melengkapi diantara pihak fasilitator dan sasaran.

Kata Kunci :

Mikro. usaha mikro subsisten, kredit mikro
Produktif. ekonomi Produktif. usaha mikro-produktif.
Modernisasi. modernisasi klasik. *economic growth*
Dependensia. *central-pheriferal*. Metropolis-Satelit
Partisipasi. *participation traps*, participation, semi partisipasi
Empowerment. To give ability, to empower

ABSTRACT

Nama : Wa Ode Asmawati
Student Number : 690 5510 253
Thesis Title : The Implementation of Productive Economics Development Program Through Micro Credit by Local Government And LSM to Poverty Alleviation in DKI Jakarta (The Comparison Study between Program PPMK Local District Authority and NGO of Masyarakat Mandiri)

Poverty alleviation bears various policies and program through empowering strategy and also public organization techniques, expected to be able to increase the quality of public life exist in poverty line. International Agreement for poverty disposal from United Nations (UN) about poverty is through Millennium Development Goals (MDGS) with its first aim which is " Eradicated Extreme Poverty and Hunger". Its first target is " Halves, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day". As state obligation, in DKI Jakarta according to the Governor of DKI Jakarta Province Regulation Number 53 in The year of 2007 about the Course, Policy and Strategy in Handling Poverty made by some programs addressed as poverty alleviation programs with the development of public productive economy like PPMK economy development through the development of micro productive business programs. The Condition of urban poverty is tightly related with public earnings, because the narrower of farm for production/housing and stronger dependency with money as a means of conversion, the high number of urbanization, a great number that is not permeated by formal sector, business seizing micro-subsistent, and the level of vulnerability. The Poor cluster requires access to reach requirement of a minimum life like capital in the form of micro credit, an adequate information of business, and the usage of precise technology. They are difficult to be touched by banking/financial institute because of the difficulty in fulfilling the condition of collateral and other formal condition.

This research was conducted in urban region of DKI Jakarta having an adequate level of high poverty at March 2007 with the population of 405.700 people or around 4,48 % from total resident. The research approach is qualitative and was analyzed descriptively. The Sample type is purposive with 20 informan. Research through literature study, in-depth interview, observation of field and photograph retrieval. Program PPMK selected is the best program of the year 2007 in Kelurahan Duri Utara, Tambora West Jakarta. For the target NGO in research target Masyarakat Mandiri in Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, DKI Jakarta.

The Result found is generally the condition of poverty as the result of policy which applied many of the theory of modernization, encouraging the growth of large industrial sector and bears many differences, disregards to the small economy supporting more than 98% of Indonesian economy. The Creation of central/metropolis and satellite/suburban region like the one experienced by Jakarta as the main center of growth encouraging urbanization from countryside to town. The banking/financial Institute still unable to side poor cluster seizing micro business. Difficulty of capital becomes the factor of rapid poverty. The banking/financial Institute tends to support large business (0,005%) and middle business (0,146%). The birth of Local District Authority of DKI Jakarta policy bottom-up as a response caused by the monetary crisis in 1997, through PPMK program. One of the Course of The policy is reducing the number poverty to 2% per year,

reduces unemployment to 3% in the year of 2009 through improvement in public earnings. Familiarity approach, formally beneficial recruitment system, are the factor of formal distraction to access the urban citizen mostly with no ID and no permanent residence. The program character is still seen as an effort to entangle public with policy which has present in the level of decision maker, resulting participation trap. Generally policy and government program having the character of structural often makes the government not sensitive to the public needs. It is advisable that the socialization pattern is more consultative hence building learning process and increases public trust.

MM develops associate programs and the role on of micro credit to answer poverty problems. The criterion is specified but still flexible according to the target condition. The partner is educated to be cadre, forms local institute to continue to roll on fund. The role of program is from association to forming finite local institute, also striving to give ability to public. The Application of local authority regulation number 11 in the year 1988 quite pursuing the MM program in Jakarta urban community though has paid retribution. Distortion of the market because of the poor bargaining as a result of policy that is not realize poor cluster makes them have to loose the business which supporting their life.

The poor bargaining target effort concerns the quality and packaging, also business lay out. Also weak market network because the production is more pointed to local public region consumers. There are no market extension, though some has tried to start opening their own market access. The Approach of the program also said to have more professional character where as the program having the technical, traditional, and neutral character; also having the perspective to care for public, establishing and organizing them and has not been transformative. The Association process carried out by MM as an external institution is a step to public development. Institutional system and cadre bearing from associate process is a part of process towards independence of public to build and gets capitalization access in their own area. For governmental program trough PPMK is more slovenly insider as an executor as well as associate (though the meaning of association is more to process of socialization, addiction and program proposing) but the government should give training which more strengthening in associating the TPK RW side. The efforts done by NGO and the Government is the solution in the middle of the disability of people poor. Some of the constraints above causing the poor access of micro entrepreneur to capital access and requires special notice to be able to improve the development of business for small public. Though the business for micro has proved its resilience after Indonesia was shaken by crisis in the year of 1997. As credit is part of the human rights, it can assist to open new opportunities for the poor to develop its business and increases its earnings. The trust bear from the target side is the integrity process built through program when making a development process to become a process of populist, as one and complementary between the facilitator and target groups.

Key Words :

Micro. Micro Subsistence enterpreuneur, micro credit
Productive Economi. micro-productive economic.
Modernization. Clasical modernization. *economic growth*
Dependensia. *central-pheriferal*. Metropolis-Satelite
Participation. *participation traps*, participation, half participation
Empowerment. To give ability, to empower

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GFAFIK	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
4. Teknik Pemilihan Informan	15
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
7. Keterbatasan Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan Tesis	21
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Indonesia dan Kemiskinan	24
1. Definisi dan Indikator Kemiskinan	24
2. Penyebab Kemiskinan	28
3. Beberapa Teori Sosial Terkait dengan Kemiskinan	30
3.1. Teori Modernisasi Klasik dan Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Rostow	30
3.2. Dependensia Theory	32
4. Beberapa Kritik Terhadap Modernisasi Klasik dan Dependensia	35
4.1. Teori Modernisasi Klasik	35
4.2. Teori Dependensia	38
5. Kemiskinan dari Aspek Hak Asasi Manusia	39
B. Persoalan Ekonomi Dunia Ketiga	41

1. Informalitas Ekonomi Produktif di Perkotaan	41
2. Usaha Mikro dan Pengembangan Kredit Mikro	42
3. Kredit Mikro dan Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>)	49
C. Community Development	49
1. Konsep Community Development	49
2. Prinsip-prinsip Community Development	56
3. Strategi dan Visi Pemberdayaan Masyarakat	59
4. Pemberdayaan sebagai Sebuah Proses (<i>on-Going Process</i>)	62
D. Agen sebagai Pendamping Sosial dan Community Worker	68

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH, LEMBAGA DAN PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan	70
1. Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat	70
1.1. Kondisi Geografis	71
1.2. Kondisi Sosial Ekonomi	71
1.3. Kondisi Sosial Budaya	74
2. Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur	76
2.1. Kondisi Geografis	76
2.2. Kondisi Sosial Ekonomi	77
2.3. Kondisi Sosial Budaya	79
B. Gambaran Umum Lembaga	80
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi DKI Jakarta	80
1.1. Sejarah Berdirinya BPM Pemda DKI Jakarta	80
1.2. Visi dan Misi BPM	84
1.3. Tugas dan Fungsi BPM	85
2. Gambaran Umum LSM Masyarakat Mandiri (MM)	88
C. Gambaran Umum Program	91
1. Program PPMK Bina Ekonomi Pemda DKI Jakarta	91
2. Program MM untuk Pemberdayaan Usaha Mikro	96

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Perbedaan Pelaksanaan Program Dana Bergulir PPMK Pemerintah DKI Jakarta dan MM melalui Kredit Mikro dalam Pengembangan Ekonomi Produktif bagi Orang Miskin	104
A.1. Implementasi Kebijakan Program Ekonomi Produktif PPMK DKI Jakarta Melalui Kredit Mikro (Study Kasus di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat)	104
A.1.1. Profil Program PPMK Bina Ekonomi di Kelurahan Duri Utara Jakarta Barat	104
A.1.2. Latar Belakang Kebijakan dan Program Ekonomi Produktif melalui Intervensi Kredit Mikro PPMK	105
A.1.3. Tujuan, Prinsip dan Sasaran Program	106
A.1.4. Konsep Ekonomi Produktif dan <i>Community Development</i>	109
A.1.5. Peraturan tentang Pola Alokasi Dana Bina Ekonomi untuk Kredit Mikro	110
A.1.6. Langkah-langkah Implementasi Program PPMK di Lapangan	110

A.1.7. Perumusan Kebutuhan Sasaran	113
A.1.8. Jenis Pendekatan dan Partisipasi Masyarakat	113
A.1.9. Jumlah Modal, Jenis Usaha dan Lama Pinjaman	114
A.1.10. Pendampingan	115
A.1.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Program	117
A.2. Implementasi Program Ekonomi Produktif LSM melalui Kredit Mikro (Study Kasus Lembaga Masyarakat Mandiri (MM) - Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)	124
A.2.1. Profil Program MM di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur	124
A.2.2. Latar Belakang Program Ekonomi Produktif LSM MM melalui Intervensi Kredit Mikro	125
A.1.3. Tujuan, Prinsip dan Sasaran Program	126
A.1.4. Konsep Ekonomi Produktif dan <i>Community Development</i>	128
A.1.5. Peraturan tentang Pola Alokasi Dana MM untuk Kredit Mikro	128
A.1.6. Langkah-langkah Implementasi Program di Lapangan	129
A.1.7. Perumusan Kebutuhan Sasaran	131
A.1.8. Jenis Pendekatan dan Partisipasi Masyarakat	132
A.1.9. Jumlah Modal, Jenis Usaha dan Lama Pinjaman	134
A.1.10. Pendampingan	135
A.1.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Program	136
B. Manfaat Program Ekonomi Produktif yang Dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dan LSM-MM	141
B.1. Manfaat Program Kredit Mikro Pemda DKI untuk Orang Miskin di Kelurahan Duri Utara, Jakarta Barat	141
B.2. Manfaat Program Kredit Mikro LSM-MM untuk Orang Miskin di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur	143
BAB V PEMBAHASAN	
A. Kesadaran Kritis dalam Program Pengentasan Kemiskinan	145
B. Deskripsi Program PPMK melalui Kredit Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Produktif Orang Miskin	148
1. Latar Belakang Kebijakan Ekonomi Produktif di DKI Jakarta melalui PPMK	149
2. Kriteria dan Perumusan Kebutuhan Sasaran	150
3. PPMK sebagai salah Satu Program Ekonomi Produktif yang <i>Pro-poor</i>	152
C. Deskripsi Program LSM-MM melalui Kredit Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Produktif bagi Orang Miskin	154
1. Latar Belakang Program Ekonomi Produktif MM melalui Kredit Mikro	154
2. Kriteria dan Perumusan Kebutuhan Sasaran	155
3. Kredit Mikro sebagai Program Pengembangan Ekonomi Produktif yang <i>Pro-poor</i>	157

D. Analisa perbedaan Program Kredit Mikro versi Pemerintah dan LSM dalam Mengembangkan Ekonomi Produktif Masyarakat	160
1. Kemiskinan dan Pemberdayaan Melalui Pengembangan Usaha Mikro	161
2. Ukuran kemiskinan, Pemberdayaan dan Pendekatan <i>Community Development</i>	165
E. Analisa Manfaat Program Kredit Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Produktif yang telah Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan LSM-MM	174
1. Manfaat PPMK Bina Ekonomi bagi Pemanfaat Program	175
2. Manfaat Program Kredit Mikro MM bagi Mitra	175
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	177
B. Saran – saran	183
 DAFTAR PUSTAKA	187

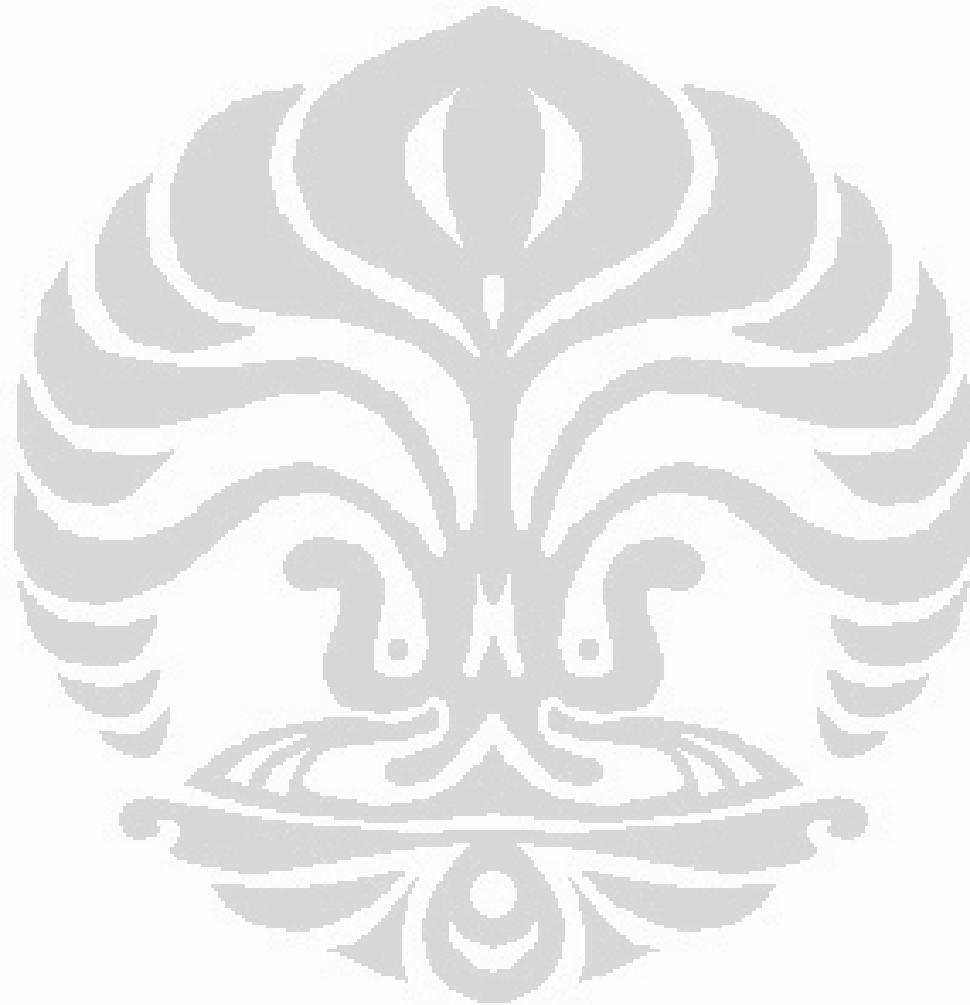


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996 – 2005	5
Tabel 2	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, Februari – Maret 2006	5
Tabel 3	Profesi Rakyat Miskin Kota dan Faktor Penyebabnya	7
Tabel 4	Theoretical Sampling	18
Tabel 5	Perbedaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	43
Tabel 6	Struktur Ekonomi Indonesia, 2003	46
Tabel 7	Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat	51
Tabel 8	Beberapa perbandingan antara cara-cara verbal dan visual	62
Tabel 9	Lapangan Pekerjaan Berdasarkan KK Kelurahan Duri Utara, Tahun 2006 ...	72
Tabel 10	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Duri Utara, Tahun 2007	72
Tabel 11	Fasilitas Kesehatan Kelurahan Duri Utara, 2007	73
Tabel 12	Lembaga Ekonomi di Duri Utara, 2007	74
Tabel 13	Jenjang Pendidikan Masyarakat Kelurahan Duri Utara, 2007	75
Tabel 14	Jumlah Penduduk Musiman & Daerah Asal di Kelurahan Duri Utara Tahun 2006	75
Tabel 15	Jenis Pekerjaan Masyarakat Bidara Cina Tahun 2008	77
Tabel 16	Fasilitas Kesehatan Kelurahan Bidara Cina, Februari 2008	78
Tabel 17	Jumlah dan Jenis Lembaga Ekonomi di Bidara Cina, 2008	78
Tabel 18	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Bidara Cina, 2008	79
Tabel 19	Tahapan Implementasi Program MM di Komunitas Urban	98
Tabel 20	Aktivitas Fasilitasi MM pada Masyarakat	99
Tabel 21	Tingkat Partisipasi dan Kondisi Angsuran Mitra MM Bidara Cina, 2008	102
Tabel 22	Jenis Usaha yang Dibiayai MM	135
Tabel 23	Perbedaan Program Kredit Mikro antara PPMK Pemda DKI dan LSM -MM, 2008	174

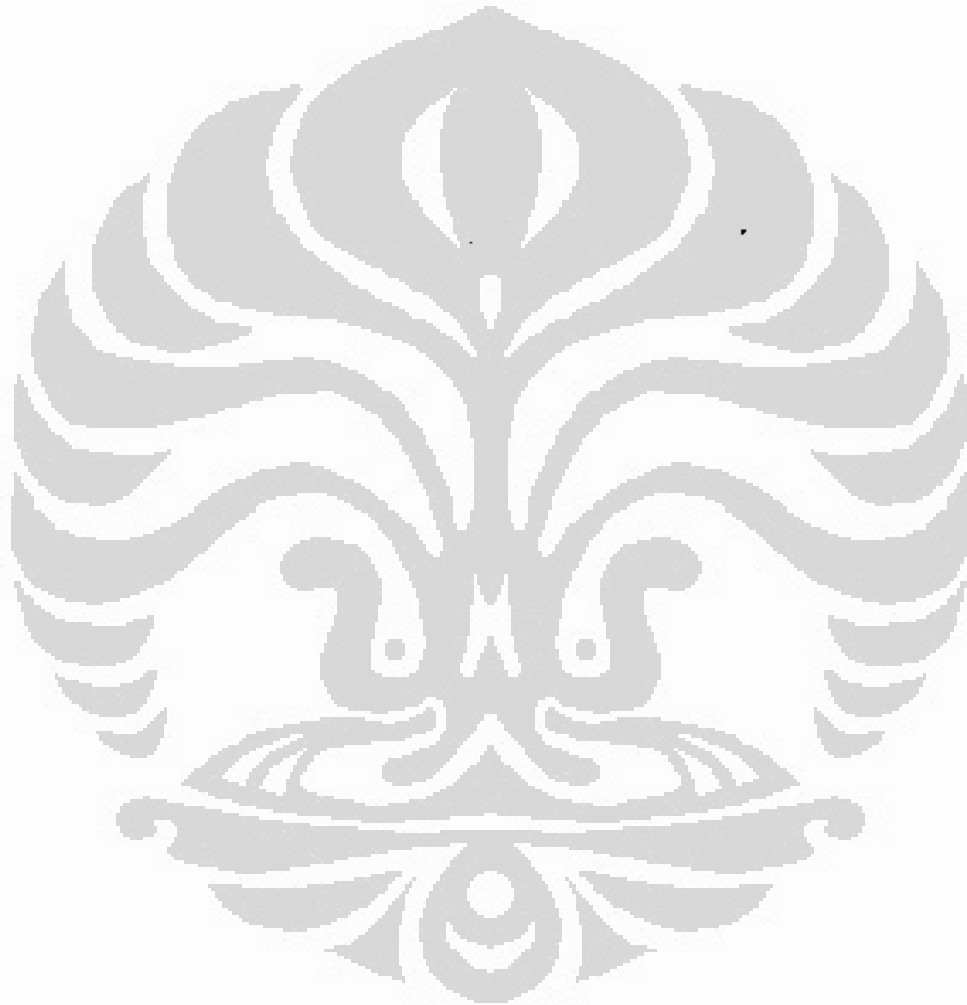
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Lembaga Masyarakat Mandiri, 2008	90
Gambar 3.2	Struktur Kepengurusan PPMK	96
Gambar 3.3	Ringkasan Pelaksanaan Program Urban MM.....	100
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Kelompok Mitra (KM) MM	101
Gambar 3.5	Struktur Organisasi Kelompok Mitra dan Koordinasi Program Urban	103



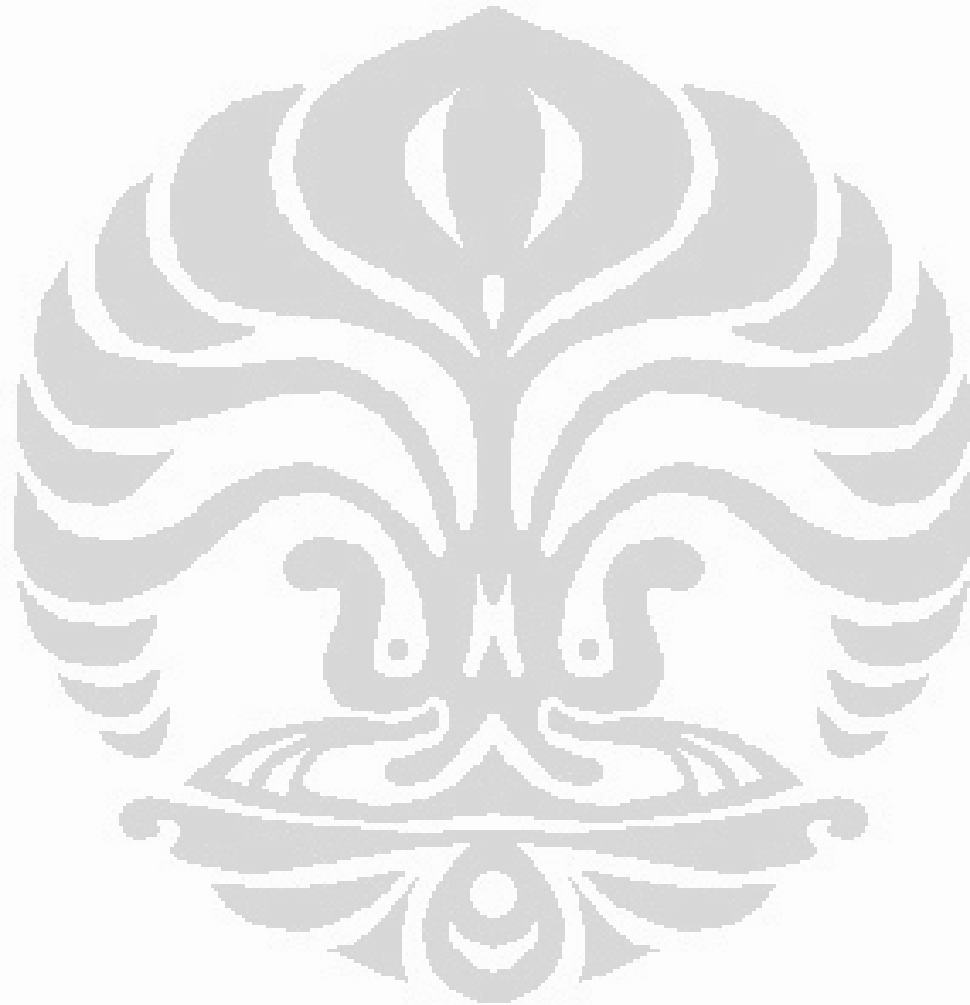
DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Peningkatan Pendapatan Mitra MM Bidara Cina, 2008	144
---	-----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Studi Kelayakan Mitra
- Lampiran 4 Surat Permohonan Pembiayaan Kelompok
- Lampiran 5 Formulir Analisa Proposal Pinjaman Bergulir PPMK
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Penjamin
- Lampiran 7 Dokumentasi Foto



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang kemiskinan selalu menarik untuk dikaji. Pengentasan kemiskinan melahirkan berbagai kebijakan dan program melalui upaya-upaya pemberdayaan maupun teknik-teknik pengorganisasian masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Sesuai dengan kesepakatan Internasional tentang penghapusan kemiskinan dari *United Nations* (UN) tentang kemiskinan melalui *Millenium Development Goals* (MDG's) dengan tujuan pertama yaitu "*Eradicated Extrim Poverty and Hunger*". Target pertama dari kebijakan ini adalah "*Halves, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day*" (Setengah dari jumlah populasi masyarakat dunia antara tahun 1990 – 2015 memiliki pendapatan sedikitnya 1 dollar per hari). Pendekatan pendapatan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemiskinan.

Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Millenium, Indonesia mengeluarkan suatu strategi untuk pengentasan kemiskinan nasional yang disebut sebagai Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan (SNPK) (WWF, 2005 : 8) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. SNPK ini diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan lokal seperti di Jakarta diturunkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian beberapa program sesuai pasal 9 Pergub ini ditujukan sebagai program-program pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Salah satu hal penting yang dapat menyumbang penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program untuk orang miskin (*pro-poor*) dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Di DKI Jakarta, dimana dalam

pengamatan¹ yang dilakukan terhadap program advokasi hak-hak masyarakat, selain mengembangkan kesadaran (*self awareness*) masyarakat miskin tentang hak-hak individu dalam berbangsa dan bernegara, pengembangan tersebut juga mencakup upaya-upaya pengembangan ekonomi yang produktif, guna membangun perbaikan pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pengembangan ini khususnya difokuskan pada level usaha mikro masyarakat dengan komposisi 98% lebih di Indonesia.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, untuk menjawab persoalan kemiskinan tersebut di atas, banyak lembaga baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ikut berperan serta dalam mendesain berbagai macam strategi dan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Berbagai strategi tersebut tentunya sangat membantu memperkaya model-model pendekatan dan pemberdayaan masyarakat guna membantu program-program pengentasan kemiskinan. Namun strategi penghapusan kemiskinan akan menghadapi kegagalan karena kesalahan menyimpulkan asumsi dasar mengapa kemiskinan terjadi (Faqih, 2004 : 20 - 21). Pendapat ini menyatakan bahwa jika kemiskinan didasarkan pada keyakinan bahwa penyebab utama kemiskinan letaknya adalah pada kaum miskin itu sendiri, maka strategi/program – program pengentasan kemiskinan akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Menurut Faqih (2004 : 21 - 22) cara pendekatan yang dilakukan ini cenderung merupakan *blame the victim*. Untuk bisa memecahkan masalah kemiskinan, mesti menggunakan perspektif yang berbeda dalam menganalisa masalah tersebut. Bisa jadi kemiskinan merupakan akibat dari suatu proses, kebijakan ataupun mekanisme dari suatu kebijakan atau program, dimana jika dilihat lebih jauh, program atau kebijakan tersebut ternyata tidak memihak orang miskin. Senada dengan pernyataan The World Bank dalam *Constructing Indonesia* (WWF, 2005 : 7) bahwa partisipasi dan pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena kemiskinan berkaitan dengan ide politik dan sosial yang merefleksikan harapan-harapan dan aspirasi masyarakat. Jika ada aspirasi masyarakat yang tidak terserap dalam proses pembangunan, maka dengan sendirinya proses pemiskinan telah terjadi. Karena persoalan

¹ Pengamatan ini dilakukan berdasarkan pengalaman penulis dalam kegiatan praktikum pada masyarakat miskin perkotaan di lembaga *Urban Poor Consortium* (UPC).

kemiskinan tidak terlepas dari kebijakan Negara, dimana Negara memiliki **state obligation** (Faqih, 2004:13 - 15) atau kewajiban untuk melindungi hak-hak rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi undang-undang dasar, perlu kiranya melihat bagaimana peta kebijakan dan program pemerintah, utamanya kebijakan dan program pemerintah daerah yang *pro-poor* atau memihak orang miskin, dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan usaha mikro-produktif yang eksis di masyarakat Indonesia.

Dewasa ini program-program kemiskinan banyak dan beragam model pendekatannya. Kebanyakan program menggunakan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam arti yang luas seperti contoh dapat kita lihat pada program LSM seperti dana bergulir dan replikasi grameen bank dalam bentuk kredit mikro untuk usaha mikro dengan berbagai modifikasinya. Pemerintah dengan bentuk P2KP dan PPMK yang juga memiliki salah satu program kredit mikro untuk masyarakat. Dalam observasi peneliti, program dari pihak LSM dan pemerintah memiliki pendekatan *community development* yang berbeda, meskipun mereka menyebutnya sama dan memiliki program/kegiatan yang juga hampir sama. Hampir semua LSM dalam program kredit mikro memiliki pendampingan yang cukup intensif berinteraksi dengan kelompok sasaran sehingga mampu meminimalisasi kemacetan pengembalian kredit dan terjadi perubahan pendapatan masyarakat yang cukup signifikan. Sementara program pemerintah belum mendapatkan pendampingan seintensif yang dilakukan oleh LSM, sehingga banyak kredit mikro yang macet dan dampak program masih sangat kecil, bahkan menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian Isnadiati (2005 : 134 – 136) pada program pengembangan masyarakat miskin perkotaan melalui program PPMK di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan menemukan bahwa beberapa kendala program disebabkan oleh adanya persepsi masyarakat bahwa dana mikro yang dipinjamkan merupakan dana hibah, dan masyarakat tidak terlalu merasa berkewajiban mengembalikan dana, meskipun petugas berkali-kali menjelaskan. Aturan main yang juga tidak jelas antara petugas dengan pihak sasaran dalam proses peminjaman dana juga menjadi masalah. Berdasarkan observasi peneliti, petugas program pemerintah tidak secara intensif berhubungan dengan masyarakat, berbeda dengan pola

LSM yang memiliki interaksi yang lebih intensif. Kembali lagi Isnadiati (2005) menyatakan belum adanya pola kerja yang tersistematis dalam melakukan proses pengembangan ekonomi masyarakat sasaran, perumusan kelompok sasaran pun seringkali menjadi masalah, juga perencanaan kegiatan tidak melibatkan masyarakat sasaran secara langsung karena dilakukan oleh Dewan Kelurahan, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta tokoh-tokoh dalam masyarakat (Musrembang Kelurahan).

Berbeda dengan LSM, berdasarkan hasil penelitian tentang dampak program kredit mikro untuk melawan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Karya Usaha Mandiri (KUM) dari Yayasan Mitra Usaha (YMU) di kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor bahwa tingkat pendapatan tahunan masyarakat meningkat sebesar 20,8% lebih besar dari sebelum menjadi anggota kelompok sasaran program kredit mikro tersebut (Colter & Suharto, 1993 : 70). Sementara program pihak pemerintah melalui PPMK yang diwakili oleh dewan kelurahan memiliki lebih banyak persoalan, disamping kemacetan kredit seperti yang telah disebutkan diatas, kontribusi program terhadap perubahan kesejahteraan hidup sasaran menjadi tidak jelas, bahkan banyak dana yang digelapkan oleh petugas (Isnadiati, 2005 : 134-135).

Kota menjadi sasaran penelitian karena wilayah perkotaan DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu pada Maret 2007 sebesar 405.700 jiwa atau sekitar 4,48 % dari total jumlah penduduk (BPS, 2007). Menurut berita Resmi Statistik (2006) pada daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi konsumsi masyarakat kota, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen). Kota menjadi fokus penelitian ini karena kemiskinan kota lebih terasa dibandingkan di desa jika dikaitkan dengan kekurangan pangan, sandang dan perumahan. Kondisi kemiskinan kota terkait erat dengan pendapatan masyarakat, karena makin sempitnya lahan untuk produksi/perumahan dan ketergantungan yang lebih kuat dengan uang sebagai alat tukar. Hal ini menjawab fenomena pengukuran kemiskinan masih banyak terfokus pada nilai konsumsi dan pendapatan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Pengukuran kemiskinan ini juga senada dengan The World Bank bahwa kemiskinan terjadi jika masyarakat mengkonsumsi kurang dari US \$ 1 per hari (The World Bank Evaluation

Department, 2006 : 2) atau garis kemiskinan dapat dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat minimal sebesar \$1 US per hari.

Adapun wilayah perkotaan pada tahun 2005 memiliki 12,40 juta jumlah penduduk miskin, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 1996 – 2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2006

Pada tabel 2 dapat kita lihat sebagai berikut :

Tabel 2.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, Februari – Maret 2006

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan	Total		
Perkotaan					
Februari 2005	103 992	46 807	150 799	12,40	11,37
Maret 2006	126 523	48 797	175 324	14,29	13,36
Pedesaan					
Februari 2005	84 014	33 245	117 259	22,70	19,51
Maret 2006	103 180	28 076	131 256	24,76	21,90
Kota+Desa					
Februari 2005	91 072	38 036	129 108	35,10	15,97
Maret 2006	114 614	38 228	152 847	39,05	17,75

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2006

Berdasarkan data statistik di atas, ternyata terjadi peningkatan angka kemiskinan di daerah perkotaan (meskipun dalam tabel, angka kemiskinan masih lebih besar di daerah pedesaan, namun penelitian lebih fokus pada kemiskinan di wilayah perkotaan karena tingkat kesulitan hidup yang lebih besar karena kebergantungan yang tinggi dengan alat tukar uang). Selain itu, wilayah perkotaan merupakan fokus pengembangan study Universitas Indonesia.

Untuk wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin meningkat dari 9,42 juta pada tahun 1996 menjadi 12,40 juta jiwa pada tahun 2005. Sementara untuk wilayah pedesaan, jumlah penduduk miskin 24,59 juta pada tahun 1996 dan mengalami penurunan menjadi 22,70 juta pada tahun 2005. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta jiwa, sementara untuk wilayah pedesaan mengalami penurunan sebesar 1,89 juta penduduk. Untuk presentase keseluruhan baik di perkotaan maupun pedesaan, sejak tahun 1996 (17,47 %) mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 15,97 %. Dalam hal ini berarti terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,5 % selama 8 tahun.

Penduduk pedesaan mengalami penurunan angka kemiskinan bisa jadi diakibatkan oleh tingginya angka urbanisasi penduduk ke wilayah perkotaan, sehingga dengan demikian kontribusi urbanisasi dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan kota. Kota merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, yang menarik perhatian masyarakat untuk pindah dan tinggal menetap di kota, dengan harapan akan mendapatkan pendapatan dan kehidupan yang lebih baik dibandingkan di pedesaan. Kebanyakan perpindahan penduduk kurang dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai, karena rata-rata pendidikan mereka yang cukup rendah untuk masuk pada pasar kerja. Keterbatasan tersebut menyebabkan banyak penduduk urban yang tidak terserap untuk bekerja disektor formal. Akhirnya mereka cenderung beralih/menciptakan lapangan kerja baru, dengan memanfaatkan celah-celah kebutuhan masyarakat kota dengan biaya yang lebih murah, mudah dan terjangkau oleh masyarakat lokal maupun urban di sekitarnya (sektor informal). Pekerjaan informal banyak ditekuni oleh kaum urban sebagai mata pencaharian yang bisa menunjang mereka untuk bertahan hidup. Sektor ini sesungguhnya mencerminkan swadaya masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yunus (2007 : 147) lebih condong menyebutnya "ekonomi kerakyatan"

(sebutan dari Karl Osner, warga Jerman yang telah memainkan peran penting pada masyarakat Eropa tentang kredit mikro).

Berikut ini data pada tabel 3 mengungkapkan tentang lapangan pekerjaan/profesi masyarakat miskin perkotaan :

Tabel 3.
Profesi Rakyat Miskin Kota dan Faktor Penyebabnya

No	Sektor atau Profesi Yang Digeluti Kaum Miskin Kota	Bentuk Ketergantungan Penyebab Kemiskinan
1	Tukang becak	Stigma, keresahan sosial, Perda, kepentingan tertentu
2	Pedagang kaki lima	Perda, konflik horizontal, pemilik modal
3	Petani kota (<i>city farming</i>)	Konversi lahan ke industri dan perumahan, pengakuan/legalitas
4	Nelayan kota dan pemukiman pesisir	Pemerintah berpihak pada nelayan pemilik modal besar, baik dari kebijakan dan reklamasi
5	Pekerja seks komersial (PSK)	Stigma sosial yang terus membuat mereka tersudut, sebagai komoditas politik, pemerasan
6	Penarik becak pengangkut barang	Ruang usaha terbatas oleh kebijakan kota, pemilik modal dan modernisasi
7	Buruh informal (pengangkat barang di petabuhan, bandara, Pembantu rumah tangga, buruh harian kantor-kantor swasta & instansi pemerintah, pembersih jalan dan lubang angkut sampah)	Gaji yang tidak sesuai standard dari tempat bekerja/penerima jasa, tidak mendapat pendidikan dan keterampilan yang cukup, tidak memiliki modal, tidak memiliki jaminan kesehatan
8	Anak jalanan	Eksplotasi, stigma sosial, kriminal
9	Tukang parker	Keamanan kerja, eksploitasi, kesempatan dan kebebasan politik
10	Tukang ojek	Hukum, keamanan, dan keselamatan
11	Tukang jamu bakul	Persaingan, permodalan
12	Pemulung	Stigma, kesehatan, keamanan
13	Pedagang asongan	Kriminal, kekerasan
14	Pengamen	Kriminal, kekerasan
15	Pengemis & gelandangan	Stigma, hukum, kekerasan
16	Buruh pabrik	Upah kecil, tidak jelas kepastian kerja, kesehatan, hak politik
17	Hansip/satpam/jaga malam	Kesehatan, kepastian kerja
18	Guru Honorar	Upah kecil, kesehatan, peningkatan ketrampilan
19	Buruh bangunan	Keselamatan kerja, kesehatan, upah kecil
20	Tukang obat pinggir jalan	Pendidikan, hokum
21	Pedagang pasar tradisional	Pendidikan, modal, kebijakan modernisasi
22	Supir angkutan umum	Kebijakan trayek, modal, kesehatan, keselamatan

Sumber: Diadaptasi dari Focal Point Rakyat Miskin Kota, Kikis-UPC

Berdasarkan profesi yang dimiliki masyarakat miskin kota, khususnya yang bergerak pada usaha ekonomi produktif dalam skala mikro, dengan pendapatan yang rendah tentunya berdampak pada kesejahteraan hidup mereka. Kondisi ini dapat menjadi makin parah ketika kaum miskin dibenturkan

dengan persoalan kebijakan politik maupun ekonomi, konflik, ketidakpastian kerja, kesehatan maupun keselamatan yang tidak memihak mereka. Kerentanan (*vulnerability*) ini menjadi sangat sensitif jika keberadaan mereka diabaikan dalam pembangunan melalui program-program yang sentralistik, elitis dan tidak memihak orang miskin. Seperti contoh masalah permodalan pada usaha mikro yang banyak tumbuh subur di perkotaan. Penelitian ini mencoba melihat kedua sisi program pemerintah maupun LSM dalam bentuk kredit mikro yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran utamanya kelompok miskin. Disamping itu, penelitian tentang perbandingan program ekonomi produktif melalui kredit mikro keduanya belum ada yang meneliti.

Sesuai dengan hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan melakukan pemihakan kebijakan yang mendorong dan melindungi produktivitas orang miskin, diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia, teknologi, kelembagaan maupun permodalan (Ismawan dalam Sumedi dan Supadi, 2004). Arah penanggulangan kemiskinan yang mulanya ditujukan pada *rescue* dan *recovery* seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sebagainya ; sebaiknya dikembangkan menjadi *preventif* dan *stimulatif* agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka penanggulangan kemiskinan dalam penelitian ini menyarankan keterkaitan dengan penciptaan situasi dimana kaum miskin diberikan peluang/akses-akses yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan hidup minimum mereka seperti modal dalam bentuk kredit mikro, informasi usaha yang memadai, dan teknologi tepat guna. Karena baik dinegara-negara kaya maupun miskin, lembaga-lembaga kredit lebih memihak kaum kaya dan dengan demikian mereka memaklumkan lonceng kematian bagi kaum miskin (Yunus, 2007 : 144). Tanggungjawab pemerintah dengan peran distribusi yang efektif adalah membuka peluang/akses kepada masyarakat utamanya kaum miskin dalam usaha mikro untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut.

B. Perumusan Masalah

Persoalan permodalan masih tetap dibutuhkan untuk pengembangan usaha mikro bagi kaum miskin perkotaan. Permodalan sangat dibutuhkan mereka guna mengembangkan usaha yang telah mereka rintis dan kembangkan, meskipun usaha masih sangat sederhana atau berjalan subsisten yang sekaligus menjadi *social enterpreneurship* (Yunus, 2007). Menurut Muhammad Yunus bahwa permodalan seperti halnya makanan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan bagi para pengusaha mikro yang miskin dan belum tersentuh lembaga perbankan/keuangan. Berdasarkan pengamatan peneliti ketika berkecimpung dalam kegiatan kaum miskin kota, perhatian pemerintah dan pihak LSM dalam mengembangkan ekonomi produktif melalui intervensi modal mikro masih sangat dibutuhkan masyarakat, utamanya bagi pekerja informal (usaha mikro) yang bisa dikatakan masih sangat bersifat subsisten. Namun persoalan agunan selalu menjadi kendala dalam proses perkreditan untuk pengembangan modal usaha. Beberapa syarat formal lainnya, juga masih sulit dipenuhi.

Meskipun banyak program ekonomi dalam bentuk kredit mikro yang sudah dilaksanakan, baik oleh kalangan pemerintah maupun dari kalangan NGO serta sektor swasta dengan model *Corporate Social Responsibility* (CSR); semuanya masih memiliki banyak "pekerjaan rumah" dan bahkan bisa dikatakan jika masalah kemiskinan utamanya di wilayah perkotaan semakin membesar dari hari ke hari, seiring makin tingginya angka urbanisasi dan kelahiran. Semua upaya tersebut melahirkan pertanyaan; Bagaimana program ekonomi produktif melalui kredit mikro yang dilaksanakan baik oleh LSM maupun pemerintah dapat memecahkan masalah kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan. Bagaimana perbandingan kedua program tersebut setelah melihat beberapa proses dan hasil masing-masing program. Bagaimana program tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran, adalah pertanyaan penting untuk diteliti. Bagaimana program tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, setidaknya program-program pengentasan kemiskinan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran dimana program dikembangkan, minimal dapat menekan pertambahan angka kemiskinan.

Beberapa program penting ekonomi produktif yang dapat diteliti dan dibandingkan adalah Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (PPMK) bina ekonomi dengan intervensi kredit mikro dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dengan pola kredit mikro untuk usaha ekonomi produktif ala Masyarakat Mandiri sebagai LSM dan dana penyalur dana dari lembaga filantrophy Dompot Dhuafa (DD) yang banyak bergerak dalam pemulihan keberdayaan masyarakat melalui intervensi kredit mikronya. Kedua program masing-masing diambil sebagai contoh untuk perbandingan karena masing-masing merupakan program pengembangan ekonomi produktif masyarakat dengan intervensi kredit mikro. Sebenarnya dalam program PPMK ada beberapa kegiatan lain yang juga dikelola bersamaan dengan kegiatan dana bergulir, juga untuk perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang mendorong kegiatan sosial ekonomi setempat, namun peneliti lebih terfokus pada kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memberikan dana bergulir. Dalam program ini, baik pemerintah maupun LSM berorientasi bagi kesejahteraan masyarakat sasaran. Namun sejauhmana manfaat program tergantung pula pada pola perencanaan yang bisa menajaki kebutuhan sasaran. Pendekatan dengan konsep *community development* (CD) menjadi penting untuk menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan program kredit mikro untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi orang miskin antara Pemerintah DKI Jakarta dan LSM – MM.
2. Sejauhmana manfaat program kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan LSM MM.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa perbedaan pelaksanaan program dana bergulir PPMK Pemerintah DKI Jakarta dan MM melalui kredit mikro dalam pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin.

2. Untuk menganalisa manfaat program kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan LSM.

E. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Penelitian secara akademis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk pengembangan konsep *community development* melalui intervensi kredit mikro yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam menganalisa secara lebih kritis tentang implementasi program ekonomi produktif berbasis komunitas.

B. Manfaat Penelitian secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang bentuk – bentuk pengembangan program melalui intervensi kredit mikro untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi orang miskin.
2. Memberikan masukan untuk pengembangan program ekonomi berbasis masyarakat pada program-program pemerintah daerah maupun LSM
3. Sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan ekonomi produktif untuk orang miskin dalam bentuk intervensi kredit mikro.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, segala informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang diperlukan digali dan dianalisis secara mendalam, sehingga dapat mengungkap persoalan kemiskinan di DKI Jakarta, juga bagaimana pemerintah dan LSM dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif karena pendekatan ini paling baik dipahami sebagai perluasan data, yang memungkinkan menemukan aspek-aspek kunci dari suatu kasus secara lebih

jelas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ragin dalam Newman (2000 : 17) yaitu :

" Qualitative research, by contrast, are best understood as data enhancers. When data are enhanced, it is possible to see key aspects of cases more clearly." (Penelitian kualitatif sebaliknya, adalah penelitian yang paling baik dipahami sebagai perluasan data. Ketika data diperluas, adalah mungkin untuk melihat aspek-aspek kunci terhadap suatu kasus secara lebih jelas).

Pendekatan yang dilakukan secara prosedural sesuai dengan aturan penelitian dan hasilnya merupakan data deskriptif (Maleong, 1993 : 3). Menurut pendapat Locke, Spiridouse dan Silverman dalam Creswell (1994 : 147) penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

"Qualitatif research is interpretative research. As such, the deviates values, and judgement of the research become state explicit" (Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif. Dengan demikian, bias/penyimpangan nilai-nilai, dan pendapat peneliti yang tertuang secara jelas dalam penelitian).

Sementara tujuan dari penelitian kualitatif menurut Alston dan Bowles (1998:18) adalah :

"Purpose of Qualitative research is to explore and explain different social realities." (Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan realitas sosial yang berbeda).

Pendekatan penelitian yang dipilih bersifat kualitatif dapat membantu menjelaskan suatu realitas kebijakan dan program ekonomi produktif yang diterapkan pemerintah DKI dan LSM melalui program kerja dilapangan, dan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat sasaran terhadap program yang telah dilaksanakan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian sosial, ada banyak variasi penelitian yang memungkinkan untuk dipilih sebagai suatu alat penelitian. Menurut Alston dan Bowles (1998:1) :

"Social research purpose to reassure you that research is not all about numbers, but about careful thinking, critical awareness and the ability to view situations from new perspectives." (Tujuan penelitian adalah untuk

meyakinkan kembali bahwa penelitian tidak semua tentang angka-angka, tapi juga pemikiran yang terarah, kesadaran kritis, dan kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif yang baru).

Berdasar pada pendapat di atas, maka penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji suatu persoalan secara sistematis dengan suatu kesadaran bahwa sebuah persoalan memiliki berbagai dimensi dan perspektif untuk dianalisis. Kembali lagi Alston dan Bowles (1998:6) menyatakan bahwa :

"Social research definition is the systematic observation and/or collection of information to find or impose a pattern, to make a decision or take some action" (Definisi penelitian sosial adalah observasi yang bersifat sistematis dan atau kumpulan informasi untuk menemukan atau mendorong sebuah model, untuk membuat sebuah keputusan atau mengambil beberapa tindakan penting)

Untuk mengkaji persoalan kemiskinan memerlukan pemahaman dan metode yang mendalam serta menyeluruh. Pengkajian tersebut membutuhkan suatu jenis penelitian yang benar-benar dapat menggambarkan secara riil bagaimana program-program untuk pengentasan kemiskinan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, baik oleh LSM maupun Pemerintah. Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, peneliti mengambil penelitian deskriptif yang banyak digunakan pada *field research* (Newman, 2000 : 36) guna mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program ekonomi produktif bagi orang miskin dari kedua lembaga pemerintah maupun LSM tersebut, serta bagaimana manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sasaran. Sebagaimana Newman kemukakan (2000: 21-22) analisis deskriptif digunakan jika kita ingin mengembangkan lebih banyak tentang fenomena sosial dan ingin menguraikannya melalui suatu penelitian :

"Descriptive research present a picture of the specific details of a situation, social setting or relationship. Much of social research found in scholarly journals or used for making policy decisions is descriptive." (Penelitian deskriptif menghadirkan sebuah gambaran detail yang spesifik tentang suatu situasi, seting sosial atau suatu hubungan. Paling banyak jenis penelitian deskriptif untuk penelitian sosial ditemukan dalam jurnal ilmiah atau biasanya digunakan untuk membuat keputusan tentang suatu kebijakan).

Adapun tujuan penelitian deskriptif menurut Newman (2000: 22) adalah menyediakan data secara detail, menempatkan data baru dengan data lama

yang bertentangan, menyusun kategori atau tipe klasifikasi, menerangkan urutan langkah-langkah atau tahapan, membuktikan suatu proses atau mekanisme penyebab dan melaporkan latar belakang atau konteks dari suatu situasi.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sejak awal bulan Maret hingga awal Juni 2008. Lokasi penelitian berada di DKI Jakarta dimana dengan asumsi kemiskinan perkotaan cukup besar. Kota Jakarta merupakan wilayah yang memiliki penduduk dari masyarakat yang beragam latar belakang dan unik untuk diteliti. Besarnya arus urbanisasi menyebabkan kepadatan penduduk dan mengakibatkan sulitnya lapangan pekerjaan dan penyediaan layanan publik untuk masyarakat. Karena itu, masyarakat Jakarta lebih cenderung bekerja pada sektor informal guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sektor informal yang digarap masih sangat kecil dan mengalami banyak kendala baik itu modal, keamanan berusaha karena keberadaan mereka cenderung dicap merusak pemandangan kota, disamping persoalan masa depan pasar yang belum jelas. Masyarakat perkotaan cenderung menggunakan uang sebagai alat tukar utama, karena terbatasnya lahan untuk memproduksi sumberdaya lain. Karena ketergantungan yang tinggi pada uang, maka sektor informal yang ditekuni merupakan kerja/usaha penjamin utama untuk *survival*, meskipun dengan modal dan kondisi yang serba terbatas. Wilayah perkotaan juga merupakan konsentrasi pengembangan keilmuan bagi Universitas Indonesia karena letaknya berada di wilayah perkotaan. Penelitian tentang perbedaan program ekonomi produktif yang dikelola pemerintah dan LSM belum ada yang meneliti. Disamping itu, pilihan tempat juga didasarkan pada kemudahan dalam menjangkau wilayah, biaya yang relatif murah dan waktu penelitian yang bisa relatif singkat, merupakan pertimbangan yang cukup penting dalam penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan lembaga pelaksana kebijakan dan program ekonomi produktif bagi masyarakat yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Program PPMK yang dipilih adalah program terbaik tahun 2007. Sementara LSM yang akan menjadi sasaran penelitian ini adalah Masyarakat Mandiri yang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta. LSM ini dikenal

sebagai lembaga yang menyalurkan dana filantropi dan aktif memberikan bantuan kepada kaum dhuafa khususnya untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi kaum miskin berbasis komunitas melalui intervensi kredit mikro. LSM ini juga menggalang berbagai kerjasama dengan pihak lain baik di Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan program pengembangan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Penelitian dilakukan di 2 wilayah di DKI Jakarta yaitu untuk program PPMK pemerintah dilakukan di daerah kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, merupakan program PPMK untuk kategori pemanfaat terbaik. Untuk wilayah program MM dipilih program urban yang dilaksanakan di DKI Jakarta di wilayah kelurahan Bidara Cina, Kota Jakarta Timur. Untuk kelurahan Duri Utara, dipilih 2 (dua) Rukun Warga (RW) yang mewakili masyarakat miskin disana yaitu RW 02 dan RW 04, sementara untuk kelurahan Bidara Cina, yang dipilih yaitu RW 07 dan RW 08, yang termasuk dalam kategori RW miskin.

4. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan *non – probability sampling* atau *non-random samples*. Berikut pernyataan Newman (2000 : 196) :

“Qualitative research tend to use non-probability or nonrandom samples. This means they rarely determine the sample size in advance and have limited knowledge about the larger group or population from which the samples is taken.” (Penelitian kualitatif cenderung menggunakan non-probabiliti atau nonrandom sampel. Ini berarti mereka jarang menentukan ukuran sampel lebih dulu dan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kelompok atau populasi yang lebih besar dimana sampel-sampel tersebut diambil).

Tipe sampel yang digunakan adalah *purposive sample* yang memiliki prinsip memperoleh semua kemungkinan kasus yang dapat menunjang kriteria khusus dengan menggunakan metode yang bervariasi dengan mengambil sampel sesuai dengan tujuan penelitian (Newman, 2000 : 196 - 198).

Sesuai dengan tujuan penelitian tentang bagaimana implementasi program ekonomi produktif di DKI Jakarta dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka penelitian ini memerlukan salah satu teknik pemilihan informan yang tepat,

sehingga mampu menggambarkan secara tepat pula, seperti apa kebijakan dan upaya pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif yang dicanangkan di DKI Jakarta. Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut :

A. Pihak program PPMK

1. Pelaksana Program PPMK :

a. Pihak BPM termasuk :

- Kabag Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program.
- Kasubid Pemasarakatan dan Usaha Ekonomi.
- Memahami tentang kebijakan dan program PPMK di DKI Jakarta

b. Pihak Dewan Kelurahan selaku pelaksana program di Kelurahan yaitu :

- Ketua Dekel selaku penanggungjawab program PPMK di Kelurahan.
- Mengetahui seluk beluk program PPMK di Kelurahan Duri Utara.
- Merupakan pelaksana program PPMK di Kelurahan Duri Utara sejak tahun 2006 – 2008.

c. Pihak TPK RW :

- Mengurus bina ekonomi di wilayah RW 02 dan 04 sejak periode 2006 – 2008.
- Berusia 30 – 60 tahun.
- Aktif melaksanakan program perguliran dana.

2. Pemanfaat program :

- a. Pihak pemanfaat / penerima program bina ekonomi PPMK periode 2006 – 2008.
- b. Sukses sebagai pemanfaat program (angsuran lancar dan pendapatan meningkat).
- c. Berdomisili di RW 02 dan 04

B. Pihak MM

a. Manager program :

- Merupakan pimpinan pengelola program MM yang terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi program.
- Terlibat dalam perencanaan program kredit mikro di Bidara Cina
- Memahami program kredit mikro MM di Bidara Cina.

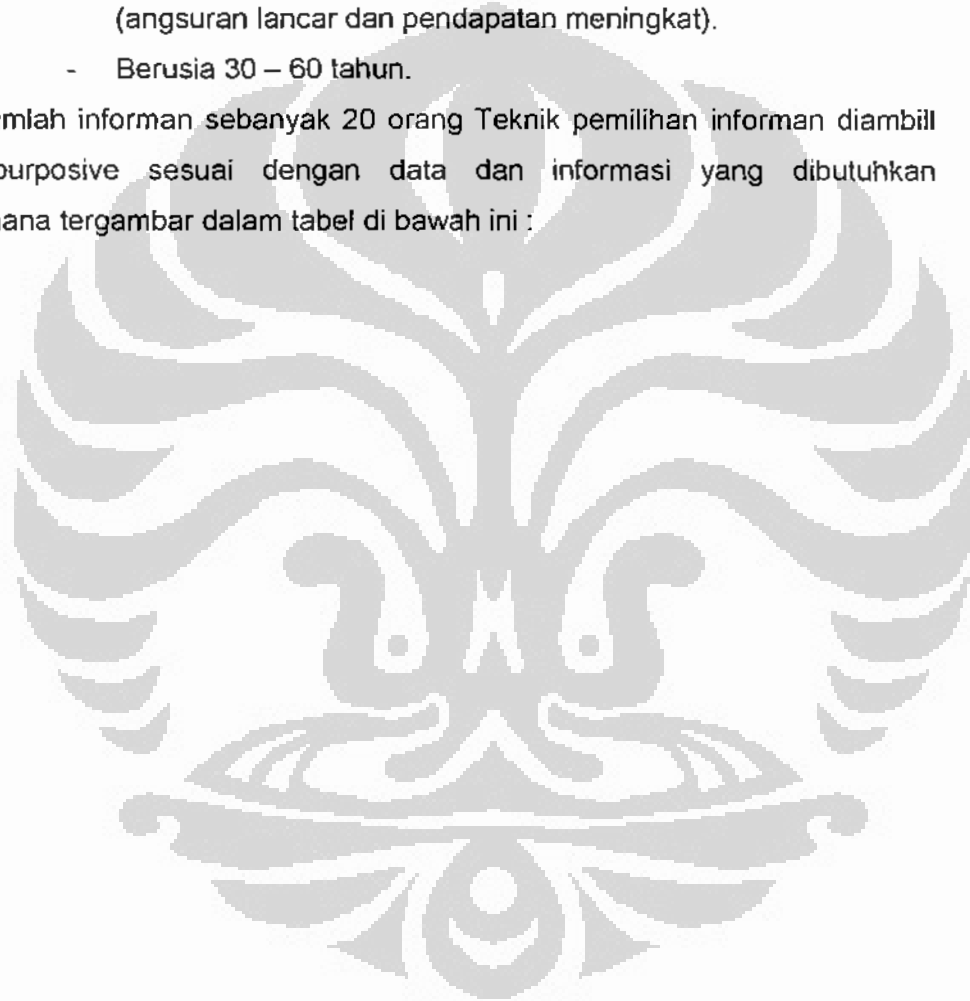
b. Pendamping Lapangan :

- Mendampingi program di wilayah Kelurahan Bidara Cina sejak tahun 2006 – 2008.

c. Penerima program (Mitra) :

- Penerima dana bergulir MM dan berdomisili/tinggal di wilayah penelitian RW 07 dan 08.
- Merupakan mitra yang dapat mencapai target program MM (angsuran lancar dan pendapatan meningkat).
- Berusia 30 – 60 tahun.

Jumlah informan sebanyak 20 orang Teknik pemilihan informan diambil secara purposive sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :



Tabel 4.
Theoretical Sampling

No	Infomasi yang Dibutuhkan	Informan	Jumlah Informan
1.	Bagaimana perbedaan program kredit mikro untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi orang miskin antara Pemerintah DKI Jakarta dan LSM – MM.	1. Dinas BPM Pemprov DKI Jakarta ; - Kepala dinas/yang mewakili, - pelaksana terkait (Dekel dan TPK RW) - pihak pemanfaat	2 orang 4 orang 8 orang
		2. Pihak LSM yang memiliki program ekonomi produktif: - Manager Program dan pendamping lapangan - Kelompok sasaran (Mitra)	2 orang 4 orang
2.	Sejauhmana manfaat program kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan LSM	1. Dinas BPM Pemprov DKI Jakarta ; (Kepala dinas/yang mewakili)	2 orang
		2. Pelaksana terkait (Dekel dan TPK RW)	4 orang
		3. Pihak pemanfaat PPMK	8 orang
		1. Pihak LSM yang memiliki program ekonomi produktif. (Manager Program dan pendamping lapangan)	2 orang
		2. Mitra MM	4 orang
	Jumlah		20 orang*

Keterangan : *Jumlah dihitung melalui informan yang ditemui berdasarkan data yang dibutuhkan, bukan berdasarkan jumlah hitungan dalam matematis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Kegiatan pengumpulan data sekunder dan informasi dengan sumber dari berbagai buku, jurnal, majalah, dokumen-dokumen, laporan pelaksanaan program, surat kabar, hasil penelitian dan internet tentang topik penelitian yang relevan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kerangka

pemikiran serta memahami konsep-konsep yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menganalisa permasalahan penelitian.

2. Wawancara Mendalam (*In – Depth Interview*)

Salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang mendetail guna menggali data-data secara akurat kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik yang dipilih dalam rangka mendukung penelitian kualitatif ini adalah dengan cara *In – Depth Interview* atau biasa yang dikenal dengan wawancara mendalam. Sesuai dengan pendapat Minichello (1995 :73) peneliti memilih metode ini karena : 1) metode ini bisa melihat realitas sosial dan bagaimana itu dapat dipelajari. Realitas sosial tersebut bisa lebih berarti dalam interaksi yang muncul antara manusia tergantung pada bahasa, kata dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan penelitian yang dikaji. Singkatnya *in-depth interview* merupakan metode yang sesuai dalam memperoleh akses ke interpretasi dan bahasa individual tentang penelitian yang hendak dikaji. 2) Didasarkan pada pandangan bahwa isu-isu praktis ditentukan oleh pilihan metode riset, maka untuk melakukan investigasi sosial dalam pengumpulan data tergantung pada tehnik yang dipilih.

3. Observasi Lapangan

Kegiatan ini dilakukan untuk memahami program/kegiatan ekonomi produktif melalui kredit mikro melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan di lapangan yang didasarkan pada topik penelitian.

4. Pengambilan Foto

Pengambilan gambar atau dokumentasi foto-foto sesuai dengan sasaran dan kebutuhan penelitian, untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada pilihan penelitian secara kualitatif, maka diperlukan sebuah teknik analisis data yang merupakan proses konseptualisasi. Data yang terkumpul melalui proses *in-depth interview* dengan para informan dikategorikan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian. Jelasnya, teknik ini digunakan untuk pengorganisasian data secara rinci sehingga dapat memberikan

gambaran yang jelas dan koheren. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Irawan (2006 : 76 – 80) adalah :

1. Tahap pengumpulan data mentah; dimana tahap ini melakukan pengumpulan data mentah, seperti melalui wawancara dan kajian pustaka
2. Tahap transkrip data; yaitu merubah catatan ke bentuk tertulis dengan mencatat seperti apa adanya (Verbatim).
3. Tahap pembuatan Koding; yaitu dengan cara menemukan kata-kata kunci dari hasil transkrip untuk kemudian diberi kode. Menurut Newman (2000 : 421):

“Coding is two simultaneous activities : mechanical data reduction and analytic categorization of data into themes. The researcher imposes order on the data. coding data is the hard work of reducing mountains of raw data into manageable piles.”

(Koding adalah dua aktivitas yang simultan: sebagai reduksi data secara mekanis dan kategorisasi analisa data kedalam tema. Peneliti dapat menggunakan susunan data koding data adalah suatu kerja keras untuk menurunkan/mengurangi gunung data mentah kedalam susunan data yang lebih teratur).

4. Tahap kategorisasi data; yaitu menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran, yang dinamakan "kategori".
5. Penyimpulan sementara; tahap ini sudah mulai menyimpulkan meskipun masih bersifat sementara
6. Triangulasi; merupakan proses *check* dan *re-check* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini, beberapa kemungkinan dapat terjadi. Pertama, satu sumber cocok atau senada, koheren dengan sumber lainnya. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lainnya, tetapi tidak harus bertentangan. Ketiga, satu sumber 180 derajat berbeda atau bertolak belakang dengan sumber lainnya.
7. Penyimpulan akhir; merupakan kegiatan akhir dari suatu proses penelitian.

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian menggunakan 2 (dua) wilayah yang berbeda yaitu di Kelurahan Duri Utara, Tambora Jakarta Barat sebagai lokasi program PPMK Pemerintah DKI Jakarta. Sementara Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur merupakan lokasi program LSM MM.

Penelitian ini dimulai dengan memilih dan membandingkan kedua program. Program PPMK yang dipilih merupakan program PPMK terbaik pemerintah di Duri Utara yaitu sebagai pengelola terbaik sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1554 tahun 2007. Sementara untuk program LSM, dipilih program MM sebagai pemberi kredit mikro yang aktif membantu usaha mikro masyarakat di wilayah Bidara Cina. Berdasarkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh *lesson-learned*, maka peneliti lebih memilih program yang terbaik dari kedua pihak tanpa terlalu fokus pada karakteristik penerima manfaat. Aspek karakteristik ini dapat menjadi bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membuat penulisan ilmiah, dibutuhkan sistematika penulisan yang sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis. Penulisan tesis ini secara garis besarnya terbagi dalam enam (6) bab. Adapun rincian dari penulisan tesis ini akan dijabarkan dalam paragraph berikutnya.

Bab Pertama berupa pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keterbatasan penelitian.

Bab Kedua merupakan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan studi literatur/kepuustakaan mengenai kemiskinan dengan berbagai definisi, ciri dan penyebabnya, beberapa teori sosial yang terkait dengan kemiskinan beserta kritik terhadap teori tersebut, kemiskinan dari aspek *human rights*, persoalan

ekonomi dunia ketiga menyangkut informalitas perkotaan, ekonomi produktif dan kredit mikro, *community development* dan prinsipnya, strategi dan visi pemberdayaan masyarakat, serta proses intervensi.

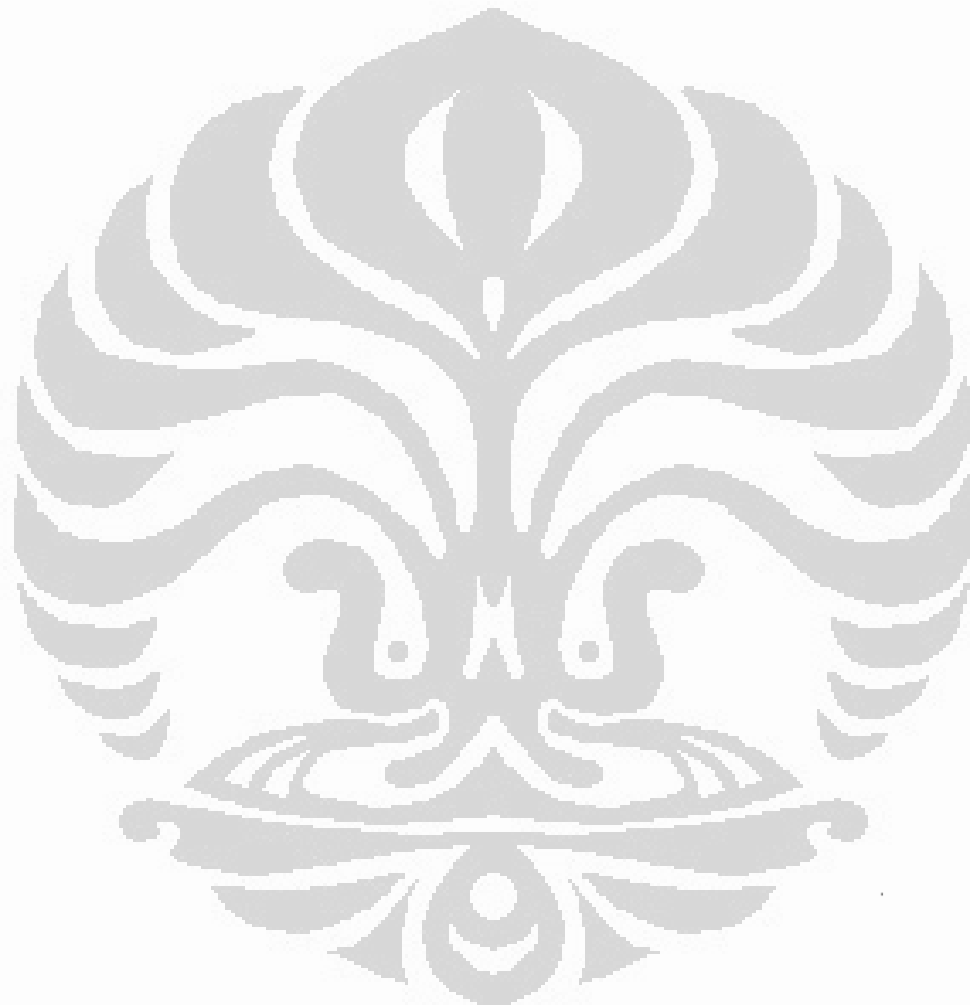
Bab Ketiga merupakan gambaran umum dari lembaga Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan program ekonomi produktif melalui kredit mikro oleh pihak pelaksana di tingkat kelurahan. Juga menjelaskan gambaran umum LSM MM, diikuti dengan penjabaran program kredit mikro dari masing-masing lembaga.

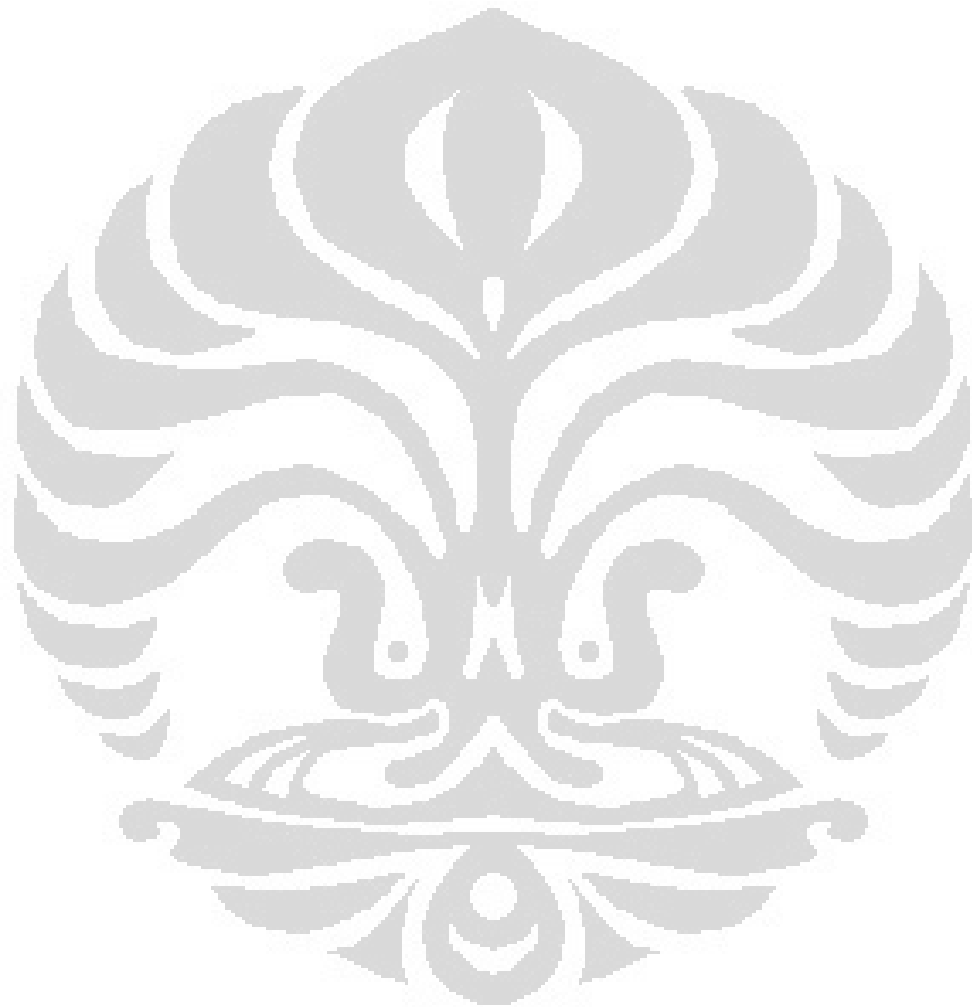
Bab Keempat merupakan temuan lapangan dari hasil wawancara dengan aparat, praktisi program dan masyarakat sasaran berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Bab ini menjelaskan tentang a) Bagaimana program Pemerintah DKI Jakarta dengan LSM MM melalui kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin; b) Bagaimana program LSM melalui kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin; c) Bagaimana perbedaan program mikro kredit untuk mengembangkan ekonomi produktif versi Pemerintah dan LSM; d) Sejauhmana manfaat program mikro kredit untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan LSM

Bab Kelima merupakan pembahasan dari temuan lapangan yang dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori/konsep yang sudah dipaparkan pada bab kedua kerangka pemikiran berupa bagaimana kebijakan dan program pemerintah DKI Jakarta dan LSM dalam mengembangkan program ekonomi produktif bagi orang miskin, model pelaksanaan program antara pemerintah dan LSM, juga manfaat program bagi kelompok sasaran. Bagaimana kebijakan dan program diarahkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dijelaskan berdasarkan konsep dan teori.

Bab Keenam atau terakhir merupakan bab penutup dari penelitian ini. Adapun isi dari bab tersebut adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian tentang program pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin, pelaksanaan program oleh pemerintah dan

LSM serta manfaat program bagi kelompok sasaran. Sementara saran adalah temuan dan himbauan peneliti yang didasarkan pada data lapangan untuk dapat dimanfaatkan secara akademis oleh penelitian selanjutnya maupun secara praktis bagi pemerintah atau LSM dalam pengembangan kebijakan dan program ekonomi produktif untuk usaha mikro yang banyak digeluti oleh masyarakat miskin.





BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. Indonesia dan Kemiskinan

1. Definisi dan Indikator Kemiskinan

Kemiskinan menurut wikipedia (2007) merupakan suatu keadaan yang dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai aspek kehidupan. Separuh orang memahami secara subyektif dan komparatif, namun juga ada yang memahami dari aspek ilmiah. Istilah "negara berkembang" ditujukan kepada negara-negara yang "miskin". Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, utamanya mencakup :

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Menurut Bappenas kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang/kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sementara menurut BPS, kemiskinan adalah bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Sedangkan menurut BKKBN indikator, sebuah keluarga dikatakan miskin jika : (a) Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, (b) Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, (c) Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian, (d) Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, dan

(e) Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Sementara menurut Bank Dunia menyatakan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari (Arifin, 2006)

Menurut Nurkse (1953) dalam www.pu.go.id/public/p2kp kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang dikatakan miskin absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Selanjutnya *Dillon dan Hermanto* (Prisma No. 3 Th. 1993 : 11-12) mengemukakan bahwa secara garis besar ada dua cara orang memandang kemiskinan. Sebagian orang berpendapat bahwa kemiskinan sebagai suatu proses, sedangkan sebagian lagi memandang kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Ketidakadilan alokasi sumberdaya dan dana kepada masyarakat mengakibatkan kelambatan pembangunan dan menciptakan berbagai kesenjangan. Kesenjangan dapat menciptakan banyak penyakit sosial sebagai akibat dari kemiskinan itu. Kembali menurut *Dillon dan Hermanto* (Prisma No. 3 Th. 1993, 11-12) bahwa kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai salah satu akibat jika pasar mengalami kegagalan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Pada dasarnya sumberdaya memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan penggunaannya oleh manusia tidak terbatas. Konsep ini sering di kenal dengan *kemiskinan struktural* karena terbatasnya sumberdaya yang tersedia, sementara distribusi alokasi sumberdaya mengalami ketidakadilan. Menurut Todaro (1992 : 218 - 221) kemiskinan absolut yaitu suatu jumlah penduduk yang hidup di bawah tingkat pendapatan minimum tertentu dimana penduduk miskin di dunia ketiga memiliki ciri-ciri secara general dikatakan Todaro yaitu mereka yang tinggal di wilayah desa yang tersebar luas dan hidup dari bercocok tanam atau kegiatan-kegiatan disektor pertanian.

2/3 sektor pertanian subsisten entah sebagai petani gurem, atau tenaga kerja di ladang-ladang pertanian. Lebih lanjut Todaro mengatakan bahwa sepertiga (1/3) orang miskin tinggal di wilayah pinggiran kota (menggantungkan hidupnya dari jasa kecil-kecilan) dan menjadi /memiliki usaha ekonomi mandiri seperti penjaja makanan, pedagang kelontong dipingir-pinggir jalan, pedagang kaki lima (PKL), penjual jasa sebagai sopir angkutan umum, dan sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Chambers (1987:132-133), orang luar, orang-orang yang tidak dikategorikan miskin, cenderung memandang orang miskin sebagai manusia yang boros, malas, fatalistik dan harus bertanggung jawab atas kemiskinannya itu sendiri. Namun studi Sethuraman (1981:198) menemukan bahwa orang miskin itu pekerja keras, cerdas dan ulet. Untuk bisa bertahan, orang-orang miskin tidak bisa hidup bermalas-malasan, dan harus bekerja keras, kapan saja dan dengan cara bagaimanapun. Sejalan dengan pendapat Yunus (2007 : 137) kaum miskin menjadi miskin bukan karna mereka tidak trampil atau buta huruf, tapi karna tidak bisa menyisihkan hasil yang didapat dari kerja mereka. Mereka tidak memiliki kontrol atas modal, dengan kemampuan mengontrol modal-lah yang memberi orang kekuatan untuk lepas dari kemiskinan. Mereka berusaha untuk dapat melepaskan diri dari apa yang disebut dengan *perangkap kemiskinan* yang terdiri dari kemiskinan itu sendiri, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa unsur-unsur kemelaratan itu berjaln erat dalam suatu mata rantai. Mata rantai ini kadang-kadang disebut juga dengan sindrom kemiskinan atau perangkap kemiskinan.

Kemiskinan melahirkan kerentanan, yang mencerminkan keadaan tanpa penyangga atau cadangan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga sering mendorong mereka kehilangan kekayaannya sehingga membuat mereka lebih miskin. Ketidakberdayaan golongan miskin dicerminkan dengan kemudahan golongan masyarakat lainnya yang lebih mampu dan lebih kuat untuk menjangir, mengatur dan membelokkan hasil-hasil pembangunan serta pelayanan pemerintah yang diperuntukkan bagi mereka yang kekurangan. Ketidak berdayaan mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk antara lain yang terpenting adalah pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya, seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, serta hampir tidak

mempunyai pengaruh apa-apa terhadap pemerintah dalam mengambil keputusan tentang pelayanan dan bantuan yang perlu diberikan kepada golongan yang lemah.

Kemiskinan dapat dijabarkan pada pengertian yang lebih luas lagi. David Cox dalam Suharto (2004:1-6) membagi dimensi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi .

- Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju sedang Negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- Kemiskinan sosial seperti kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
- Kemiskinan konsekuensial adalah kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut SMERU (2001) dalam Suharto,dkk (2004), kemiskinan memiliki berbagai dimensi :

- Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan).
- Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
- Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal
- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam
- Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat
- Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan

- Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil) (Suharto, dkk, 2004:7-8)

Dari berbagai definisi dan indikator tentang kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana orang/sekelompok orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, baik makan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan akses pada sumber-sumber ekonomi, sosial maupun informasi, sehingga tidak dapat / lamban memperbaiki taraf kehidupannya ke arah yang lebih baik. Akses terhadap sumberdaya yang dimaksud seperti ekonomi adalah lahan, pekerjaan, upah layak, modal, kesempatan berusaha, dan lain-lain. Untuk akses dalam aspek sosial yang dimaksud adalah rendahnya partisipasi orang/kelompok di dalam masyarakat untuk masuk pada kelompok-kelompok sosial penting dan memperluas jaringan diri/kelompoknya sehingga mendapatkan kesempatan beraktualisasi secara lebih baik. Sementara akses dalam aspek informasi adalah rendahnya tingkat penyerapan informasi publik sehingga memperlemah akses mereka untuk pengembangan ekonomi dan sosial.

2. Penyebab Kemiskinan

Dalam www.wikipedia.org (2007) Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

- Penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- Penyebab sub-budaya ("*subcultural*"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
- Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Dari berbagai penyebab kemiskinan tersebut beberapa pandangan melihat kemiskinan melalui beberapa ciri yang dapat dilihat secara kasat mata sesuai konteks dan tempat dimana kemiskinan itu berada. Menurut Kusnadi (2000), kondisi rumah masyarakat dapat digunakan untuk melihat status sosial masyarakat tersebut. Rumah permanen biasanya dimiliki oleh penduduk yang mampu secara sosial ekonomi, seperti petani yang berlahan luas, pemilik perahu dan pedagang ikan berskala besar. Rumah-rumah semi permanen dan non-permanen sebagian besar dimiliki oleh nelayan/pengasin sedang dan kecil. Rumah-rumah dapat bersifat multifungsi, artinya tidak hanya sebagai tempat hunian dan sosialisasi juga digunakan untuk tempat mengeringkan ikan atau usaha lainnya. Kepadatan kampung menyebabkan mudahnya penyebaran informasi dikalangan masyarakat baik tentang kondisi internal keluarga maupun informasi luar juga mudah diketahui oleh banyak pihak. Kesulitan mendapatkan lahan untuk pemukiman, akibat keterbatasan lahan yang tersedia dan harga yang mahal, serta keterbatasan sosial ekonomi masyarakat.

Kemiskinan pada umumnya dapat dilihat dengan kendala-kendala masyarakat dalam melaksanakan usaha untuk memperbaiki tingkat ekonominya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rachbini, dkk (1995: 109) yaitu :

- a. Kelangkaan Modal (antara lain disebabkan karena tidak ada akses yang cukup terhadap kelembagaan kredit)
- b. Tidak ada akses terhadap pasar yang kompetitif, termasuk akses terhadap para penguasa antara lain karena struktur pasar yang "*distortif*" menyebabkan kelompok miskin tidak memiliki *bergaining position* yang kuat dalam sistem niaga
- c. Tidak punya akses terhadap informasi (pasar dan harga) yang mutakhir sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien dan tidak dapat memiliki keunggulan komparatif.
- d. Mereka memiliki kualitas rendah sebagai "*enterepreneurs*" (wiraswasta) yang harus responsif menyebabkan banyak sekali kesempatan ekonomi yang tersedia di pedesaan dan hanya dimanfaatkan oleh orang yang tidak miskin.

Lebih lanjut berdasar definisi Nurkse (www.pu.go.id/public/p2kp), garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan

masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan. Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Pakar ekonomi lainnya melihat kemiskinan secara global, yaitu kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (*cyclical*), dan kemiskinan individu.

3. Beberapa Teori Sosial yang terkait dengan Kemiskinan

Dalam kesadaran kritis (*critical consciousness*), menurut pemikiran Freire (Faqih, 2002 : 31 – 33) bahwa perlu melihat masalah dari struktur dan sistem dalam menganalisis struktur dan sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya serta keterkaitan akibatnya dalam kehidupan masyarakat. Teori sosial tentang pembangunan banyak digunakan untuk menganalisis kemiskinan. Adapun beberapa teori yang terkait erat dengan persoalan kemiskinan adalah teori modernisasi klasik dan teori dependensia. Teori ini dimotori oleh beberapa pendapat yaitu :

3.1. Teori Modernisasi Klasik dan Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut WW. Rostow

Dalam Suwarsono (2000) Rostow merupakan seorang ekonom yang merumuskan pemikiran pokoknya lewat karya klasiknya yaitu *The Stages of Economic Growth*. Rostow merupakan salah satu ekonom yang ikut menyumbangkan pemikiran pada teori modernisasi klasik. Teori modernisasi menggunakan metafora pertumbuhan, seperti halnya pertumbuhan organisme (Faqih, 2002 : 55). Lima tahapan perkembangan ekonomi yang dimaksud dalam buku ini yaitu : Tahap masyarakat tradisional,

berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lalu diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan berakhir masyarakat modern yakni masyarakat industri dengan tahap konsumsi masyarakat yang tinggi (*high mass consumption*) (Faqih, 2002 : 56). Rostow menguraikan lebih jauh tahapan yang perlu dilalui dan lebih khusus lagi menjelaskan tahapan yang dianggap kritis, yakni tahap tinggal landas. Rostow melihat tahapan pembangunan dunia ketiga dengan kiasan tersebut. Pertama, Negara dunia ketiga ketika dalam tahapan tradisional mungkin hanya mengalami sedikit perubahan sosial atau mengalami kemandekan sama sekali. Kemudian negara tersebut perlahan-lahan mengalami perubahan, hal ini disebabkan tumbuhnya kaum usahawan, perluasan pasar, pembangunan industri. Perubahan ini masih dianggap prakondisi menuju tahap lepas landas (Suwarsono, 2000). Prasyarat utama adalah ketersediaan modal (Faqih, 2002 : 56 – 57) melalui penggalan investasi dan kebijakan pajak, juga melalui lembaga-lembaga keuangan atau obligasi pemerintah untuk tujuan produktif, devisa, atau investasi modal asing. Teori ini menekankan industrialisasi sebagai sektor yang paling menguntungkan untuk mencapai negara modern.

Jika dikaji lebih jauh, tahapan perkembangan bagi masyarakat dunia ketiga menurut Rostow masih sangat tradisional, meskipun memiliki peluang untuk menjadi masyarakat yang maju. Ke- "tradisional" dalam pandangan Rostow menggambarkan tingkat/pola hidup masyarakat dengan konsumsi rendah (Suwarsono, 2000). Jika konsumsi rendah, dalam hal ini berarti masyarakat masih mengalami kemiskinan. Konsumsi rendah dapat ditingkatkan melalui pembangunan, meskipun fokus pembangunan masih diletakkan pada percepatan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, ada aspek lainnya dilupakan untuk dibangun yaitu aspek sosial masyarakat, yang secara langsung maupun tidak, terkait dalam pembangunan yang dimaksud Rostow. Aspek sosial tersebut merupakan pengimbang dalam pembangunan ekonomi, yang tidak saja mengejar pertumbuhan tapi juga melaksanakan pemerataan yang berimbang antara kedua aspek tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Pemikiran Rostow di Indonesia banyak diadopsi pada masa Orde Baru, dimana mengutamakan percepatan pembangunan ekonomi. Pada masa ini, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*). Namun sayangnya,

pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami ketimpangan karena sistem pembangunan yang dilaksanakan masih bersifat sentralistik, sehingga hanya menciptakan kesenjangan ekonomi. Harapan hasil pembangunan akan mengalami *trickled down effect* ke masyarakat oleh sistem konglomerasi yang diciptakan orde baru, ternyata tidak terlaksana. Pembangunan hanya menciptakan *gap* yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin. Hasil-hasil pembangunan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja yang semakin hari bertambah kaya. Sementara itu, kaum miskin makin bertambah miskin.

Sementara untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Rostow juga menyarankan dunia ketiga termasuk di dalamnya Indonesia, untuk memperoleh pinjaman modal asing, teknologi bahkan keahlian (Suwarsono, 2000). Meskipun demikian, saran Rostow mengakibatkan tingginya jumlah utang luar negeri dan makin meluasnya persoalan moral di negeri ini berkaitan dengan tingginya angka korupsi serta pengabaian hak-hak rakyat kecil untuk memperoleh akses ekonomi. Pada akhirnya, terjadi kemiskinan yang menciptakan berbagai penyakit sosial. Lembaga-lembaga keuangan diarahkan hanya untuk membiayai sektor industri yang besar karena dianggap menguntungkan dan mampu mendongkrak pendapatan nasional menuju negara modern dengan konsumsi tinggi.

3.2. Dependensia Theory (Teori Dependensia)

Dalam teori modernisasi, baik yang klasik maupun yang baru melihat permasalahan pembangunan lebih banyak untuk kepentingan Amerika dan Negara maju lainnya. Meskipun teori modernisasi klasik banyak membahas tentang bagaimana proses pembangunan Negara dunia ketiga dengan pola *tradisional - modern*. Menurut teori ini, aspek-aspek tradisionalitas merupakan faktor penghambat bagi modernisasi (dalam teori modernisasi klasik).

Berbeda dengan teori dependensia, dimotori oleh ekonom Brazil Celso Furtado (Faqih, 2002 : 123 – 124) tergabung dalam ECLA yang secara tegas memberikan argumentasi tentang buruknya kolonialisme dan pembagian kerja dunia internasional. Teori dependensia berpendapat bahwa selama pertukaran yang tidak berimbang dalam pembangunan ekonomi dunia internasional, maka Negara dunia ketiga akan tetap mengalami keterbelakangan (Suwarsono, 2000 : 131). Teori dependensia merupakan

produk Amerika Latin yang menyoal keterbelakangan pembangunan Negara dunia ketiga dengan pola *sentral/metropolis* dan *pinggiran/satelit* (Gundre Frank). Satellite makin didominasi oleh metropolis dan semakin tergantung (Faqih, 2002 : 123).

Menurut Suwarsono (2000 : 89) bahwa teori dependensia mewakili "suara Negara-negara pinggiran" untuk menantang hegemoni ekonomi, politik budaya dan intelektual dari Negara maju. Teori ini merupakan kritik terhadap kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin (*United Nation Economic Commission for Latin America/ECLA/KEPBBAL*) pada awal tahun 1960-an. Program ini menekankan pada impor untuk negara-negara industri, dimana program industrialisasi memerlukan substitusi import dari negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga seperti Amerika Latin mengalami keterbelakangan (Hettne, 2001: 146) dan memungkinkan melakukan produksi untuk kepentingan industrialisasi tersebut. Industri membutuhkan bahan pangan dan bahan mentah, yang mana menjadi fokus pembangunan untuk dunia (skema *International Division Labour – IDL*). Jika program komisi ekonomi tersebut berhasil diharapkan akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta mendorong pembangunan politik yang demokratis (Suwarsono, 2000 : 91). Dalam Hettne (2001: 155) beberapa periode tertentu, substitusi impor berjalan cukup baik, namun pengalaman selanjutnya menunjukkan bahwa strategi tersebut kurang memadai. Hettne menjelaskan lagi bahwa *pertama* kekurangan dari doktrin CEPAL¹ mengutamakan industrialisasi dengan menciptakan ketergantungan untuk teknologi dan keuangan bagi dunia ketiga dan *kedua* pola distribusi pendapatan di Amerika Latin adanya pembatasan permintaan barang pabrik hanya untuk elit dengan jumlah yang relatif kecil.

Penyediaan bahan pangan dan bahan mentah untuk industri ternyata mengakibatkan kemerosotan nilai tukar perdagangan di Amerika Latin yang pada akhirnya berpengaruh pada proses pembentukan akumulasi modal di dalam negeri.

-
- ¹ 1. Doktrin CEPAL adalah perlawanan pada kebijakan konvensional yang menyangkut hubungan antara perdagangan internasional dan pembangunan, yang mendesain sebuah kerangka alternatif : model pusat-pinggiran. Dalam perspektif ini, bangsa "pusat" akan mendapatkan keuntungan, sementara bangsa "pinggiran" akan mengalami keterbelakangan karena kecenderungan perdagangan yang tidak "adil", politik yang tidak seimbang, teknologi yang tergantung pada negara pusat, dan lain-lain.
 2. Dalam doktrin CEPAL juga menjalankan strategi pembangunan dengan menitikberatkan pada substitusi import, perencanaan dan intervesionisme serta integrasi regional.
 3. Doktrin ini secara ideologis dilihat sebagai upaya untuk untuk melakukan nasionalisme ekonomi.

Devisa menjadi alasan untuk melakukan import barang-barang dari negara industri, yang menyebabkan kemerosotan nilai tukar. Sebagaimana hal tersebut, di Indonesia terjadi import besar-besaran dari negara industri yang menghasilkan produk-produk teknologi yang lebih tinggi. Ini merupakan salah satu bentuk ketergantungan Indonesia terhadap negara maju dalam produk teknologi. Meskipun import tersebut pada akhirnya menguras devisa dari hasil produksi ekspor dalam negeri.

Secara filosofis, teori dependensi menghendaki peninjauan kembali pengertian "pembangunan" (Suwarsono, 2000 : 104). Pembangunan di negara berkembang sebaiknya memperhatikan perbaikan hidup sesuai dengan standar hidup yang baik untuk masyarakat, tidak hanya ditafsirkan sebagai proses industrialisasi, peningkatan output, dan peningkatan produktivitas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dos Santos pada tahun 1970 (Hettne, 2001 : 157) tentang ketergantungan :

"Merupakan situasi "yang mengkondisikan" dimana didalamnya ekonomi sekelompok negara ditentukan oleh pembangunan dan perkembangan sekelompok yang lain. Hubungan saling ketergantungan antara dua atau lebih sistem perekonomian, atau antara perekonomian itu dengan dengan sistem perdagangan dunia, menjadi hubungan ketergantungan bila beberapa negara dapat berkembang hanya sebagai bayangan perkembangan negara dominan, yang mungkin memiliki pengaruh positif dan negatif pada pembangunan mereka berikutnya (Hettne, 2001: 157).

Melihat teori ketergantungan diatas dimana fenomena pasar lebih menguntungkan negara industri yang memiliki akses dan teknologi yang maju dan meminggirkan negara dunia ketiga yang lebih banyak berlaku dengan posisi sebagai pelaku ekspor bahan mentah. Ketergantungan dimaksud untuk negara-negara dunia ketiga merupakan bayangan atau bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk eksploitasi negara maju/dominan terhadap negara-negara berkembang. Jika kita lihat konteksnya pada negara Indonesia dimana proses ekspor selama ini merupakan komoditi ekonomi yang paling diandalkan, maka secara otomatis, kebijakan ekspor melahirkan pertumbuhan ekonomi yang timpang. Ketimpangan disebabkan oleh karena pasar hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu dan secara langsung hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Karena hasil ekspor dikelola langsung oleh pemerintah dan pihak swasta. Hal ini juga mengakibatkan adanya stagnasi dan kelambatan (retardasi) dalam pembangunan karena pengabaian terhadap ekonomi kecil dan mengejar pertumbuhan ekspor yang tinggi dari industri-industri besar. Pasar dalam negeri menjadi terabaikan.

Kondisi tersebut mengulang kegagalan ekonomi yang dialami oleh Amerika Latin dimana terjadi stagnasi ekonomi akibat ketergantungan ekspor untuk negara industri dan melupakan kesejahteraan negara berkembang. Praktik ekspor dan impor yang tidak seimbang, banyak melahirkan penyimpangan dan tidak memberi hasil yang optimal bagi pembangunan kesejahteraan rakyat.

Jika kita kembali pada posisi sentral – periferi dengan menganalogikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan, maka secara geografis pusat adalah daerah urban (aglomerat), dari aspek ekonomi merupakan daerah industri, dari aspek struktur sosial merupakan kelompok elite. Maka periferi adalah daerah pinggiran di pedalaman atau daerah kumuh sekeliling kota (Strahm : 17). Daerah kumuh ini mengelilingi kota Jakarta, dan kota-kota besar lain di Indonesia. Keterbelakangan terjadi akibat normal dari pemberlakuan sistem ekonomi yang tidak adil, yang sekedar mengejar pertumbuhan (Osvaldo Sunkel dalam Hettne, 2001:125). Dalam *etnodevelopmentnya* Rodolfo Stevenhagen (Hettne, 2001:125) bahwa penghilangan nilai tradisional bisa mengakibatkan terasingnya masyarakat dari pembangunan dan merupakan kelemahan paradigmatis. Secara umum, pasar senantiasa memihak kepentingan negara maju yang memiliki teknologi yang lebih baik daripada negara berkembang.

4. Beberapa Kritik terhadap Teori Modernisasi Klasik dan Dependensia

4.1. Teori Modernisasi Klasik

Teori modernisasi klasik mengalami kritik dari banyak ilmuwan dari kalangan mainstream, selain teori ini sangat berseberangan dengan teori marxisme. Menurut Suwarsono (2000 : 48), akademisi dari kelompok mainstream tersebut punya keberatan terhadap asumsi yang dipakai dalam teori modernisasi klasik seperti evolusioner dan fungsionalisme. Beberapa kritik tersebut antara lain :

- a. Gerak Pembangunan, dimana teori modernisasi menjadikan barat sebagai model bagi dunia ketiga untuk mengikuti proses pembangunan dan perkembangan masyarakatnya. Jadi segala sesuatu tentang barat dapat dicontoh dengan kepercayaan yang kuat bahwa nilai-nilai budaya barat adalah yang baik dan alami di dunia, sehingga dunia ketiga mengimpikan model pembangunan seperti di barat (Suwarsono, 2000 : 49). Dunia ketiga dilihat pada skala terendah proses

perkembangan peradaban, yang dicap sebagai tradisional atau primitif. Dalam kondisi tersebut, secara langsung menempatkan barat pada *lebellling superior* dan dapat mengkooptasi dunia ketiga melalui penguasaan teknologi dan segala kemajuannya. Akibat dari hegemoni tersebut, sehingga dunia ketiga melupakan alternatif pencarian model pembangunan yang lain berdasarkan ke-khasan dan ke-tradisionalannya. Sunkel dalam Hettne (2001:125) ingin mengganti pandangan ini dengan metode yang lebih historis, yang hasilnya merupakan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat struktur bangsa terbelakang. Menurut Hettne (2001:125), pendekatan Sunkel ini menegaskan bahwa karakteristik keterbelakangan merupakan akibat *normal* dari pemberlakuan sistem yang spesifik. Teori modernisasi klasik juga menganggap bahwa dunia ketiga tidak memiliki masa depan yang pasti. Padahal para ahli mengatakan jika dunia ketiga memiliki kemungkinan yang luas, bisa jadi seperti Ethiopia dengan masalah kelaparan, kemiskinan dan bahkan musnahnya bangsa (Suwarsono, 2000 : 50). Teori ini dianggap belum melakukan uji kemungkinan terhadap macetnya pembangunan jika teori tersebut dilaksanakan di dunia ketiga. Hal tersebut dirasakan di Indonesia, dimana pada era orde baru yang mencanangkan era tinggal landas di tahun 1997, namun yang terjadi sebaliknya. Kekacauan politik, ekonomi dan sosial mengakibatkan krisis yang berkepanjangan dan multi dimensi. Hingga saat ini, dampak krisis masih sangat kuat dirasakan di masyarakat.

- b. Nilai tradisional merupakan salah satu hal yang dikesampingkan oleh teori modernisasi. Tradisi yang berkembang dimasyarakat dianggap sebagai faktor penghalang dalam melakukan proses pembangunan. Padahal nilai tradisional merupakan faktor yang saling berdampingan dengan nilai modern dan diantara keduanya saling mempengaruhi. Seperti yang dikatakan Amartya Sen (1999 ; 35) bahwa esensi pembangunan merupakan sebuah proses yang bersahabat (*a friendly process*) sehingga dapat menghargai nilai modernitas dan tradisional yang ada di masyarakat. Sebagai contoh adalah kesuksesan Jepang dalam memadukan kedua hal tersebut. Kritik lain juga datang dari Rodolfo Stevenhagen dengan *ethnodevelopment*-nya yang memakai teori Habermas, dimana persoalan tradisi menjadi penting, dan manakala dihilangkan maka terjadi krisis

identitas yang akan menimbulkan ancaman terhadap kesatuan nasional dan berimplikasi serius pada proses pembangunan ekonomi (Hettne, 2001: 46). Penghilangan tradisi atau jika tradisi dianggap menghambat proses pembangunan, maka yang akan terjadi justru sebaliknya, pembangunan akan terhambat karena pengabaian terhadap tradisi yang sudah lama dianut oleh masyarakat. Pengabaian ini secara tidak langsung merupakan "upaya alienasi" terhadap peran masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

- c. Metode kajian yang dikembangkan dalam teori modernisasi klasik cenderung menggunakan analisa yang abstrak, tidak jelas periode sejarahnya, juga tidak jelasnya wilayah yang dimaksud (Suwarsono, 2000:52). Teori ini dianggap terlalu mengeneralisasi semua kondisi di negara dunia ketiga.
- d. Sehubungan dengan perang dingin antara blok barat dan timur, maka teori modernisasi klasik dianggap suatu upaya Amerika untuk mendapatkan legitimasi untuk intervensi bagi kepentingan dunia ketiga (Suwarsono, 2000 : 53). Sebagai ilmu sosial, kenyataan generalisasi ilmu tersebut tidak berlaku secara universal, sehingga dunia ketiga tidak perlu mengadopsi ilmu tersebut (Bodenheimer dalam Suwarsono, 2000 : 53). Adopsi teori modernisasi klasik di Indonesia sebagai salah satu contoh kegagalan teori tersebut. Menurut Bodenheimer (Suwarsono, 2000 : 53) teori modernisasi klasik dikatakan sebagai teori yang telah melahirkan rumusan yang salah tentang arah dan watak perubahan sosial yang berlangsung secara inkremental dan gradual; dimana kesalahan ini mendapatkan posisi yang stabil dan terarah. Pembangunan merupakan suatu proses penetrasi dari barat ke dunia ketiga yang mengakibatkan menurunnya ideologi revolusioner karena ketidakberdayaan di dunia ketiga dari sikap dan paradigma pragmatis dan ilmiah di pihak barat (Suwarsono, 2000 : 53).
- e. Dominasi Asing dilupakan dalam kerangka teori modernisasi klasik, karena fokus analisisnya lebih memperhatikan variabel internal seperti nilai-nilai tradisional dan kurangnya investasi produktif. Sementara persoalan diluar itu dilupakan seperti kolonialisme, perusahaan multinasional, ketidakseimbangan nilai tukar perdagangan, dan ciri-ciri sistem internasional (Suwarsono; 2000 ; 53). Meskipun teori ini mengakui kedaulatan politik dan secara formal terbebas dari

kolonialisme, namun para penganut marxis masih melihat adanya kekuasaan barat terhadap ekonomi, politik dan budaya negara dunia ketiga.

4.2. Teori Dependensia

Teori Dependensia mengalami kritik sejak tahun 1970-an dari berbagai kalangan utamanya para pendukung teori modernisasi klasik. Menurut Collin Leys dalam Hettne (2001:166) bahwa teori dependensia memiliki masalah pada terjadinya stagnasi teoritik dan terjadinya pengulangan. Selain itu, teori ini juga belum bisa memberikan dampak praktis serta ada persoalan yang tak dapat dipecahkan dari teori tersebut. Leys lebih lanjut mengatakan jika teori depensia memiliki pengertian pembangunan yang kabur, cenderung ekonomistik, dan penyebab utama keterbelakangan tidak dikenali.

Para penganut teori modernisasi klasik menganggap teori dependensi hanya sebagai alat propaganda politik dari ideologi revolusioner marxisme (Suwarsono, 2000 : 128 - 129) sebagai lawan dari kapitalisme. Teori dependensia juga dianggap kurang dapat memberikan gambaran terhadap karakteristik dunia ketiga yang dianggap "pasif"², melihat dinamika sistem hanya berasal dari pihak "sentral" (Timberger dalam Suwarsono : 2000 : 129) dan mengabaikan "pinggiran". Juga sepertinya, kekuatan eksternal sangat dominan, sehingga dunia ketiga tidak mampu memberikan perlawanan pada kekuatan tersebut. Padahal, dunia ketiga masih memiliki banyak kesempatan untuk dapat menumbuhkan ide-ide baru, aturan-aturan yang baru, dan juga teknologi baru untuk menciptakan perubahan, tanpa perlu memperhatikan kekuatan negara sentral. Dengan ide-ide baru, pranata maupun teknologi yang baru, dunia ketiga bisa melakukan banyak perubahan untuk pembangunan yang lebih maju. Teori dependensia dianggap masih abstrak, dimana teori ini membutuhkan penjelasan tentang bagaimana situasi negara dunia ketiga yang mengalami ketergantungan. Masih ada generalisasi ketergantungan negara-negara dunia ketiga yang sama, tanpa memperhatikan variasi di tingkat nasional. Teori dependensia juga lebih menitikberatkan pada faktor eksternal sebagai faktor dominan dalam ketergantungan tersebut. Disini mengatakan bahwa negara-negara maju sangat berperan penting sebagai penyebab ketergantungan, dan kondisi ini mengglobal. Namun teori ini mengabaikan kondisi internal negara dunia ketiga, yang

² Pasif karena ruang gerak yang terbatas untuk dapat menciptakan perubahan politik yang dinamis.

bisa jadi ada beberapa faktor internal penyebab ketergantungan tersebut, sehingga terjadi pemiskinan yang hampir berjalan massal. Faktor internal tersebut adalah peranan kelas sosial dan negara, dimana negara berfungsi sebagai payung dalam kebijakan ekspor dan import bagi negara dunia ketiga pada negara maju. Dalam hal ini, negara memiliki andil yang cukup kuat untuk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi.

5. Kemiskinan dari Aspek Hak Asasi Manusia (*Human Rights Based Approach*)

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa persoalan kemiskinan bukan sekedar tanggungjawab individu dari tiap masyarakat, namun juga lebih besar dikaitkan pada tanggung jawab Negara secara keseluruhan. Sebagaimana yang diamanatkan konstitusi UUD 1945 kita bahwa "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.*" Menurut Jim ife (2001:25) bahwa ada beberapa definisi berkaitan dengan hak asasi manusia; dimana pada ³ *generasi pertama* melihat hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak politik sipil. Gerakannya secara praktis mengedepankan advokasi untuk hak-hak politik sipil. Sementara pada *generasi kedua* melihat HAM sebagai hak atas ekonomi, sosial, dan budaya, dimana setiap manusia memiliki hak atas ekonomi, mendapatkan pelayanan sosial (*the provision of social services*) seperti standar minimum kesehatan, perumahan, pendidikan dan sebagainya. Untuk *generasi ketiga*, melihat HAM sebagai suatu level kolektivitas dimana komunitas, masyarakat dan bangsa memiliki hak-hak yang lebih luas. Sebagai sebuah level kolektivitas, maka hak asasi manusia memiliki "kekuasaan" untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial maupun politik.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan *state obligation*, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas untuk kesejahteraan masyarakatnya. Maka selayaknya, pemerintah melaksanakan kebijakan dan program yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Jika kita coba melirik bagaimana sebuah Negara sangat berempati terhadap penyediaan fasilitas pelayanan masyarakatnya. Contohnya seperti Negara kesejahteraan (*Welfare*

³ Pengertian dan pengembangan konsep HAM dalam beberapa generasi

State). Menurut Jim Ife (2001:89), Negara kesejahteraan (*welfare state*) banyak menganut definisi yang dipengaruhi oleh pemikiran *human rights* generasi kedua, dimana Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan sosial bagi masyarakat. Jika di hubungkan dengan kondisi Indonesia, dimana layanan sosial masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya, kualitas layanan masih sangat minim. Padahal persoalan kebutuhan primer⁴ masyarakat juga masih belum banyak terpenuhi. Belum lagi bicara layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan yang tentu saja masih sangat terbatas. Biaya layanan yang mahal, menyisakan persoalan tersendiri karena daya beli masyarakat yang rendah yang disebabkan kemiskinan. Sebagaimana ini juga dijelaskan berdasarkan *hirarki of needs* – nya Maslow bahwa ada beberapa tingkat kebutuhan manusia dalam hidup seperti *basic needs* (pertama dikemukakan oleh Mahbub Ul-Haq), hingga aktualisasi diri sebagai kebutuhan manusia yang paling tinggi. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka banyak persoalan kemanusiaan dapat terselesaikan dengan baik. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, sebagaimana yang termaktub pada pasal 25 ayat (1) pada *Deklaration of Human Rights*.Pasal tersebut berbunyi :

"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control." (Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perhatian medis dan pelayanan sosial yang perlu, dan hak akan keamanan dalam keadaan tidak bekerja, sakit, ketidakmampuan/kecacatan, janda, manula atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan yang tidak terjangkau olehnya).

Selain itu menurut Cornia, Jolly dan Stewart (1987 : 137) bahwa perlunya ada kebijakan sektoral negara untuk melindungi masyarakat rentan (*vulnerable*) yaitu kaum miskin dimana kebijakan tersebut berupa restrukturisasi untuk sektor-sektor produktif yang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Program tersebut diperuntukan untuk membantu memperluas hasil dan pendapatan masyarakat rentan seperti petani kecil, industry kecil, dan memberikan pelayanan untuk mendapatkan akses kredit yang murah dan mudah dan juga memperbaiki teknologi

⁴ Kebutuhan primer menyangkut pangan., sandang dan papan

yang mereka gunakan. Disini, peran perempuan sangat besar atau bisa dikatakan dominan dalam mengembangkan industri kecil seperti yang ada di Afrika dan pada wilayah urban di sektor informal lainnya seperti pengusaha perempuan atau sebagai pekerja dibanyak Negara di dunia.

Kenyataannya, banyak perempuan di dunia ketiga yang berperan besar pada sektor informal tersebut, sehingga kebanyakan program ekonomi produktif diperuntukkan bagi perempuan pengusaha mikro seperti contoh grameen bank di Bangladesh. Alasannya cukup sederhana, disamping peran mereka yang besar disektor informal, impact/dampak program pada keluarga lebih besar. Banyak perempuan miskin di Negara berkembang menjadi penopang keluarga, dan perannya dalam rumah tangga menjadi strategis untuk mensejahterakan keluarga. Sudah semestinya fungsi pembangunan adalah untuk melayani kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih pada masyarakat yang berada di strata bawah (Korten, 1991), karena menurut Korten, pembangunan adalah keberpihakan kepada rakyat kecil karena mereka bagian mayoritas bagian bawah piramida kehidupan dari struktur sosial dan ekonomi dunia. Seharusnya pembangunan diarahkan untuk menjadi *bridging* bagi kaum miskin untuk membangun kehidupan mereka dan keluarganya menjadi lebih baik.

B. Persoalan Ekonomi Dunia Ketiga

1. Informalitas Ekonomi produktif di Perkotaan

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Todaro (1992 : 218 - 221) bahwa sepertiga dari orang miskin tinggal di wilayah perkotaan dengan menggantungkan hidup pada sektor informal dimana mereka memiliki usaha kecil-kecilan dan mandiri serta tinggal di wilayah pinggiran kota seperti pedagang makanan, kelontong, pedagang kaki lima, sopir angkot dan sebagainya. Konsep sektor informal pertama kali dikenalkan oleh antropologh Inggris Keith Hart (Comelius, 2003 : 7) berdasarkan pengalaman di Acra dan Nima (Ghana). *International Labour Organization* (ILO) akhirnya mengambil alih istilah ini. Sektor informal diperkotaan muncul akibat adanya kaum urban yang bekerja dikota (berasal dari desa), yang tidak berhasil bekerja pada sektor industry dan jasa di kota sehingga terpaksa menjadi pengangguran (hal ini berdasar pada studi ILO dipimpin Dr. Seturahman di 8 kota di dunia ketiga) yaitu Free Town (Sierra Leone), Lagos, Kana

(Nigeria), Kumasi (Ghana), Kolombo, Manila, Kordoba, & Campinas. Munculnya sektor informal karena sektor ekonomi rakyat karena migrasi yang berlebihan (*excessive migration*) yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan atau rendahnya pendapatan di desa atau kesulitan hidup di pedesaan. Ketidakseimbangan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan akan berakibat migrasi yang berlebihan ke kota. Seperti Jakarta, pendatang musiman dalam masa apung di Jakarta disebut Dieter Ever (1984 : 121) sebagai *circular migrants*. Dia menyebutkan bahwa pesatnya pertumbuhan Jakarta disebabkan oleh migrasi. Sasaran para migrant tersebut adalah bekerja pada sektor informal dalam bentuk produksi barang & jasa. Umumnya sektor informal tersebut digeluti oleh kaum miskin kota lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar atau disebut subsistensi. (Hans -Dieter Ever, 1984 : 113 - 126).

Ekonomi rakyat adalah kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Riuntu, Cornelius, Miar, 2003 : 4 – 5). Dengan kata lain ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan cara swadaya untuk mengelola sumberdaya apa saja yang ada ditempatnya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya beserta keluarganya. Atau bisa disebut *economic survival* dari rakyat miskin baik di perkotaan atau di pedesaan. Bentuk kegiatan ekonomi ini dapat kita kategorikan sebagai ekonomi produktif karena sifatnya yang tumbuh dari rakyat, usaha bentuknya kecil, informal dan digunakan untuk bertahan hidup. Menurut Mubyarto, 1996 (Riuntu, Comelius, Miar, 2003 : 4 – 5) ekonomi rakyat /perekonomian rakyat memiliki ciri-ciri sbb :

- Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar
- Dikelola dengan cara swadaya
- Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya
- Tidak ada buruh dan majikan
- Tidak mengejar keuntungan.

2. Usaha Mikro dan Pengembangan Kredit Mikro

Usaha kecil didefinisikan (UU Nomor 9/1995) sebagai perusahaan yang mengerjakan tenaga kerja kurang dari 20 orang tanpa menggunakan mesin. Keputusan tersebut berasal dari ILO yang mengusulkan pada akhir 1960-an yang kemudian dianut

oleh Departemen Tenaga Kerja dan BPS. Menurut UU Nomor 9 /1995 industri kecil adalah perusahaan yang omzet bersih pertahun antara Rp. 10 – 200 juta (The Asia Foundation, Yayasan Indonesia Forum , 1998; 2). Bisa jadi usaha informal masyarakat masuk pada kategori usaha kecil dengan omzet 10 – 200 juta pertahun. Namun kondisi kekurangan modal dan ketidakentuan pasar menjadikan usaha ekonomi masyarakat menjadi gamang. Seperti yang dikemukakan oleh Hernando de Soto (Hadinoto, Retnadi, 2006 : 219) bahwa sektor informal adalah aktivitas ekonomi yang berada diluar sistem ekonomi yang legal, tak dilindungi hukum, rawan terhadap kemungkinan eksploitasi oleh orang yang terlibat kriminal atau preman dan siapa saja yang bisa memanipulasi hukum. Untuk bisa mengetahui tentang usaha mikro, berikut tabel yang bisa membedakan antara usaha kecil dan mikro yang selama ini hampir selalu disamakan posisinya.

Tabel 5
Perbedaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

No	Keterangan	Pengusaha Informal	Pengusaha Kecil
1	Status Lembaga	Informal	Formal
2	Legalitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdaftar/illegal ▪ Beroperasi diluar aturan pemerintah 	Terdaftar/legal Beroperasi sesuai aturan pemerintah
3	Segmentasi	Un-bankable/anbanked	Bank-able – banked
4	Akses pada Lembaga Keuangan	Tidak mempunyai akses pada lembaga keuangan formal	Mempunyai akses dengan nilai asset yang kecil
5	Pelayanan Jasa keuangan yang sesuai	usaha microbanking, microfinance	Jasa perbankan konvensional (komersial)
6	Pajak	Tidak membayar pajak	Membayar pajak

Sumber : *Microfinance and poverty; questioning the conventional wisdom*, Hege Gulli (1998) dalam Wartono (2003 : 38).

Untuk dapat bertahan hidup, mereka para pengusaha mikro mencari nafkah seadanya seperti yang disebut sektor informal (Riuntu, Cornelius, Miar, 2003 : 50-51) dimana kebanyakan studi empirik menunjukan sektor ini banyak digeluti oleh wanita daripada laki-laki (Shields, Woman in Labor market). Wanita lebih terikat dengan rumah tangganya guna memelihara anggota keluarga yang belum mandiri dengan berjualan dipinggir jalan, menjajakan dagangan, bekerja tanpa jaminan sedikitpun untuk mendapatkan penghasilan yang teratur. Menurut Yunus (2007 : 49) Tidak adanya

struktur finansial formal yang tersedia untuk melayani kebutuhan kaum kredit miskin. Pasar kredit ini lanjut Yunus, karena keterbatasan lembaga-lembaga formal, telah diambil alih oleh rentenir lokal dimana cara ini sungguh efisien dalam menciptakan sebuah jalan cepat menuju kemiskinan bagi masyarakat.

Kredit usaha mikro diadakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah melalui keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 11/Kep/Menko/Kesra/IV/2002 – no 4/2/kep-BI/2002 tgl 22 april 2002 dijelaskan bahwa kredit usaha kecil adalah jumlah peminjaman modal sampai dengan Rp. 500.000,-. Dengan pembagian jenis usaha menengah maksimal 5 miliar rupiah, dan usaha mikro maksimal sebesar 50 juta (Riuntu, Cornelius, Miar, 2003 : 172).

Kembali menurut Riuntu, Cornelius dan Miar (2003 : 173) pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro dengan kategori sebagai berikut :

- Pendapatan menengah kecil
- Masyarakat miskin, masih memiliki usaha secara ekonomis (*economically active poor*)
- Masyarakat sangat miskin (*extremely poor*) atau masyarakat yang sama sekali belum tersentuh perbankan.

Sementara kendala lembaga perbankan dalam menggulirkan bantuan ke usaha kecil masyarakat adalah (Riuntu, Cornelius, Miar, 2003 : 174) :

1. Kendala geografis; sangat sulit menjangkau pengusaha kecil karena tempat usaha dan tempat tinggal terpencil dan tersebar
2. Kendala ekonomi; usaha yang dikelola berskala kecil dan terisolir sehingga biaya transaksi bagi kedua belah pihak (perbankan dan pengusaha kecil) menjadi sangat tinggi.
3. Kendala hukum dan legalitas; dengan adanya regulasi yang mensyaratkan perbankan untuk memperhatikan legalitas usaha calon debitur, maka perbankan mengalami hambatan dalam melayani usaha kecil atau sektor informal.
4. Kendala desain; Banyak program pengembangan usaha kecil merupakan paket kebijakan pemerintah yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha kecil yang sangat bervariasi berdasarkan lokasi, jenis usaha, latar belakang, sosial budaya setempat.

5. Kendala inkonsistensi program; seringkali pelaksanaan kredit program berubah-ubah, bahkan diberhentikan, yang mengakibatkan bank harus menyusun kembali sistem dan prosedur baru. Padahal, bank telah melakukan investasi infrastruktur dan sumberdaya yang cukup besar sehingga menambah biaya operasional bank.
6. Kendala kordinasi, berupa lemahnya kordinasi antar departemen teknis atau pihak-pihak yang terkait.

Beberapa kendala di atas menyebabkan lemahnya akses pengusaha mikro pada akses permodalan dan membutuhkan perhatian khusus untuk dapat memperbaiki perkembangan usaha masyarakat kecil. Anehnya, selama ini usaha mikro sudah membuktikan ketahanannya, apalagi setelah Indonesia digoyang krisis pada tahun 1997, sementara usaha besar lainnya mengalami krisis. Usaha mikro teruji sampai saat ini, resistensi pada krisis ekonomi, dan para pengusaha mikro biasanya debitur yang patuh membayar kewajiban kreditnya. Disamping itu, sampai saat ini usaha mikro merupakan penyedia lapangan kerja cukup besar di Indonesia. Ketidakmampuan untuk melayani kredit 1 – 2 juta atau ratusan ribu, kama biaya operasional yang mahal menjadikan, Perbankan didesain bukan untuk melayani kaum miskin. (Ismawan dan Budiantoro, 2005 : 34 – 35)

Menurut BPS tahun 2000 dalam profil Usaha Kecil Menengah (UKM), usaha mikro tidak berbadan hukum (lihat tabel di atas), di Indonesia terdapat sekitar 39 juta badan usaha yang terdiri atas : 2005 buah usaha besar, 55.437 usaha menengah, dan 39.121.350 usaha kecil (90% adalah usaha mikro) (Riuntu, Cornelius, Miar, 2003 : 171 – 172). Komposisi usaha mikro dan usaha lainnya dalam struktur ekonomi Indonesia tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Struktur Ekonomi Indonesia, 2003

Jenis Usaha	Jumlah (buah)	Persentase (%)
Usaha Besar	2,000	0.005
Usaha Menengah	62,000	0.146
Usaha Kecil	588,000	1.385
Usaha Mikro	41,800,000	98.464
Jumlah	42,452,000	100.000

Sumber: Diolah dari Bambang Ismawan & Setyo Budiantoro dalam Kementerian Koperasi & UKM, 2004

Besarnya jumlah usaha mikro pada tabel di atas menyatakan secara realistis bahwa usaha mikro mengalami pertumbuhan yang sangat besar melebihi 50% dari usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Usaha mikro (BPS) menyebutkan sebagai industri Rumah Tangga, yang tenaga kerjanya (TK) berjumlah 1-4 orang termasuk pemilik, hasil penjualan 100.000.000,- pertahun, serta kekayaan maksimum 25 juta/tahun diluar tanah & bangunan. Sementara industri kecil (usaha kecil) punya TK 5 – 19 orang. Termasuk pemilik, hasil penjualan maksimum 1 milyar/tahun. Serta kekayaan maksimal Rp. 200.000.000,- diluar tanah & bangunan (kompilasi BPS, BPK, Koperasi & Deperindag dalam Ismawan dan Budiantoro, 2005 : 6).

Agar usaha mikro layak mendapatkan bantuan pemodal, maka selayaknya ada upaya-upaya perbaikan system ekonomi usaha tersebut. Menurut (Riuntu, Cornelius, Miara, 2003 :175) Kelompok masih sangat miskin ini sebenarnya dapat dinaikan kelasnya menjadi masyarakat *economically active poor* dengan cara pemberian subsidi pemerintah antara lain dalam bentuk sandang, pangan dan papan. Selanjutnya untuk menjadikan masyarakat ini *bank-able* atau dapat menyerap pemodal, perlu diberikan bantuan teknis (seperti teknik produksi atau usaha, pendidikan dan pelatihan, pembinaan organisasi dan manajemen untuk penguatan kelembagaan – *capacity building*) agar layak mendapat bantuan modal atau kredit perbankan. Pendapat Soto (Hadinoto, Retnadi, 2006 : 222 – 223) pemberdayaan sektor informal dimulai dengan program penyadaran, lalu diagnosa, perancangan reformasi hak kepemilikan (hukum), implementasi reformasi, penginteraksian sektor yang semula sektor informal menjadi satu dengan sektor modern dibawah satu aturan hukum. De Soto menyatakan kaum

papa harus menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang diakui. Hal ini sekaligus menjadi agenda politik, bahwa kebijakan ekonomi harus memihak kaum miskin.

Keberadaan banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik dari pihak LSM maupun pemerintah melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkan usaha mikro mereka. Prinsip-prinsip LKM dalam *Microcredit Summit* tahun 1997 di New York disepakati 4 prinsip yaitu (Ismawan dan Budiantoro, 2005 : 12 -14) :

1. Menjangkau kaum miskin
2. Menjangkau dan memberdayakan perempuan
3. Mengembangkan kelembagaan berkelanjutan secara finansial
4. Dampak terukur; diperluas pada aspek lain selain ekonomi, misal pemberantasan buta huruf, peningkatan pendidikan anak, dan lain-lain.

Adapun kontribusi keuangan mikro untuk daerah adalah (Ismawan dan Budiantoro, 2005 : 129 – 130):

1. Mendukung pemeratan pertumbuhan
2. Mengatasi kesenjangan kota desa
3. Mengatasi kesejangan usaha besar – mikro
4. Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota maupun daerah – pusat
5. Meningkatkan kemandirian daerah

Meskipun tahun keuangan mikro sudah dicanangkan pada tahun 2005, namun menurut Krisna Wijaya usaha tersebut perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut : (Hadinoto, Retnadi, 2006 : 285) :

1. Pengusaha mikro sebagai obyek utama, berarti orientasinya kepada si pelaku usaha mikro yang tak lain adalah orang yang kemampuannya untuk usaha mikro
2. Berkaitan dengan persepsi, usaha mikro bukan dikasihani (charity) tapi disertai tanggungjawab untuk mengembalikan dan penekanannya pada kelayakan usaha
3. Dapat menciptakan value chain dengan industri misal produksi baut untuk industri otomotif.

4. Mitos tentang kredit mikro yang paling penting, padahal faktor produksi lain seperti lahan tempat usaha, sumberdaya manusia, teknologi dan permodalan. Jadi jangan cuma modal saja yang diberikan
5. Merubah persepsi kredit, tidak harus dari bank, tapi bisa dari banyak sumber seperti LKM

Sebaiknya keuangan mikro dilaksanakan secara berkelompok, dimana manfaat kelompok sangat besar dalam membantu program berkembang dengan baik. Berkelompok penting karena motivasi yang tinggi dan belajar satu sama lain, disamping itu biaya transaksi LKM maupun LPUM menjadi ringan. Jika dilayani secara individu, *transaction cost* akan besar sekali (Kurniadi, 2005 : 196). Kelompok, tidak hanya memberi rasa aman dan saling dukung, tapi juga mengurangi perilaku negatif para peminjam, menciptakan kebersamaan, saling kontrol secara halus agar tetap searah dengan tujuan program (Yunus, 2007).

Banyak jenis lembaga keuangan mikro yang dibangun masyarakat dalam bentuk konvensional atau bagi hasil (syariah) untuk menjangkau pengusaha mikro – kecil seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), koperasi dan lembaga pengelola zakat. Sebagai lembaga penyedia jasa kredit mikro, maka LKM yang sudah ada ke depan disarankan sebagai berikut (Hadinoto, Retnadi, 2006 : 83 – 84) :

1. Mengatasi legal status agar jelas, diarahkan menjadi bank, koperasi atau LKM
2. Pengawasan lebih intensif untuk melindungi pihak ketiga (penabung)
3. Pengembangan jaringan melalui penumbuhan lembaga keuangan sekunder, jaringan on-line untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat lokal,

Microfinance memiliki pengertian penyediaan jasa keuangan bagi penduduk miskin dan pengusaha informal. Sementara *microcredit* memiliki makna yang lebih spesifik yaitu penyediaan kredit bagi penduduk miskin dan usaha sektor informal (Wartono, 2003). Pengembangan usaha mikro sebagai bagian terbesar yang menyangga ekonomi masyarakat di kota besar seperti Jakarta, guna mendapatkan akses keuangan yang mudah, mengurangi pengangguran dan mengatasi masalah kemiskinan kota. Keuangan mikro dianggap melakukan pemberdayaan bila LKM tersebut melakukan instrumen pemberdayaan yang ditujukan untuk kaum miskin. Alat utama untuk mengukur sukses tidaknya program tersebut adalah pengaruh atau dampak keuangan bagi kehidupan para penerimanya (Ismawan dan Budiantoro, 2005).

3. Kredit Mikro dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Sebagaimana pernyataan Sen dalam Ismawan (2005 : 75 – 76) bahwa pembangunan sebagai proses yang bersahabat, yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya. Jika manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan maksimal untuk mencapai kesejahteraan bersama, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berdasarkan kekuatan rakyat yang berdaya menghidupinya. Lanjut Sen penyebab langgengnya kemiskinan, ketakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas seperti kesempatan ekonomi, politik, sosial, transparansi dan jaring pengaman sosial. Kemiskinan selanjutnya hanya akan meningkatkan proses dehumanisasi. Kesempatan diciptakan untuk mendapatkan akses penting masyarakat guna mengembangkan kehidupannya.

Menurut Yunus (2007 : 142) pembangunan harus dipandang sebagai isu HAM, bukan semata masalah meningkatkan pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB). Ketika perkonomian nasional meningkat, situasi kaum miskin tidak secara otomatis membaik. Karenanya pembangunan harus didefinisikan ulang. Yunus melanjutkan, pembangunan seharusnya merujuk hanya pada perubahan positif yang terukur dalam pendapatan perkapita 50% populasi termiskin. Yunus menegaskan (2007 : 137) Kredit harus dianggap sebagai bagian dari hak azasi manusia (HAM) dan bagaimana kredit bisa memainkan peran strategis untuk menghapuskan kelaparan dunia. Dalam Wartono (2003 : 61) Yunus menegaskan pada pertemuan *Micro Credit Summit* di New York tahun 1997 bahwa "*Credit is more than business. Just like food, credit is a human right*" (Yunus, *Microcredit Summit* 1997). Pernyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa kredit diyakini sebagai alat efektif untuk memberantas kemiskinan.

C. Community Development (CD)

1. Konsep Community Development

Pembangunan sosial merupakan sebuah harapan yang dapat memberikan perubahan bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Pembangunan sosial di Indonesia lahir akibat terlalu besarnya fokus pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan tertinggalnya aspek sosial dan menciptakan kesenjangan yang besar. Menurut Midgley (2001: 23) definisi pembangunan sosial adalah proses perencanaan perubahan sosial untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk dengan memperhatikan proses dinamis dari pembangunan ekonomi, dengan melakukan pendekatan interdisipliner. Midgley juga menjelaskan bahwa pendekatan yang dimaksud bersifat interdisipliner dalam ilmu sosial dari berbagai macam disiplin ilmu, utamanya politik ekonomi. Politik ekonomi dibutuhkan dalam proses perencanaan untuk menciptakan strategi-strategi yang bersifat intervensionis dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cornia, dkk (1987) tentang kebijakan sektoral untuk *vulnerable groups* yang membutuhkan intervensi yang juga spesifik dalam mengembangkan program ekonomi produktif bagi orang miskin.

Community Development (CD) merupakan salah satu konsep yang merupakan strategi pembangunan komunitas dalam pembangunan sosial. Prinsip dasar dari CD adalah pengembangan kemitraan masyarakat dengan agen eksternal, yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga profesional dengan menekankan pentingnya masyarakat menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dan kemandirian (*self-help*) (Midgley, 2001 : 41). Hal ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan bagian penting dari CD. Namun kadang partisipasi mengakibatkan jebakan partisipasi (APMD dan Ford Foundation, 2005 : 194 - 196) yang dipahami sebagai bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, dimana dalam konteks kebijakan perlu dilakukan agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat. Saat ini, hampir seluruh program pemberdayaan masyarakat menggunakan prinsip CD, meskipun pada perjalanannya, masih banyak yang belum memenuhi kriteria dari konsep CD tersebut di atas.

Dalam diskursus akademis pekerjaan sosial pemberdayaan dikenal sebagai *community organization* atau *community development* (CO/CD) (Gilbert dan Specht dalam Suharto, 2005 : 38). Beberapa negara seperti Australia dan Eropa disebut sebagai pekerjaan masyarakat (*community work*), penyembuhan sosial (*social treatment*), perawatan sosial (*social care*). Dua (2) perpektif pengembangan masyarakat itu adalah :

Tabel 7.
Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat

Pendekatan	Perspektif	Tujuan/Asumsi
Profesional (tradisional, netral, teknikal)	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan masyarakat • Pengorganisasian masyarakat • Pembangunan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat • Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada
Radikal (transformational)	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi masyarakat berdasarkan kelas • Aksi masyarakat berdasarkan gender • Aksi masyarakat berdasarkan ras 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat • Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi • Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial yang menindas, diskriminatif dan eksploitatif

Sumber : Suharto, 2005.

Konsep pengembangan masyarakat lahir dari konsep pemberdayaan masyarakat dimana menurut Prianarka (1996; 45 – 47) menggambarkan pemberdayaan adalah suatu konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Konsep CD pertama mulai tampak pada tahun 1970-an yang dapat dianggap sebagai gerakan perlawanan terhadap kemapanan, anti system, anti struktur dan anti determinisme, yang merupakan bagian yang didominasi oleh Negara-negara yang memiliki kekuasaan lebih dari Negara lain. Gerakan ini dikenal dengan gerakan *aufklarung* atau *enlightenment*.

Gerakan ini bermuara pada determinisme keagamaan sebagai basis idiil dan organisasi gereja dan monarki sebagai basis kekuasaan struktural. Otoritas keagamaan dan monarki tidak lagi mendapat tempat di masyarakat. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan turut mempercepat proses pemberdayaan. Begitu juga, kebebasan rasio dan individu melahirkan alternatif sistem baru yang menggantikan sistem keagamaan

dan kerajaan yang mudah dan deterministik. Sistem alternatif tersebut meliputi liberalisme, individualisme dan rasionalisme (Priamarka, 1996 : 47).

Pengertian pemberdayaan menurut Priyono dan Priamarka (1996: 78) mengandung 2 (dua) pengertian yaitu *to give power or authority* dimana meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak-pihak yang kurang berdaya atau lemah. Dan pengertian yang kedua yaitu *to give ability or to enable* adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Berbeda pendapat dengan Sumodiningrat, pemberdayaan sebenarnya istilah khas Indonesia. Di Barat, pemberdayaan dimaksud *empowerment* yang lebih bernuansa "pemberian kekuasaan" . Yang lebih tepat menurut Sumodiningrat adalah "energize" , dengan makna agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winami Ambar Teguh S (2004 : 113) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Fungsi pemerintah menjadi fasilitator saja sementara subyek pembangunan adalah masyarakat sendiri. Kemandirian belum dapat dikatakan sebagai akhir dari proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Namun menurut Sumodiningrat bahwa masyarakat masih membutuhkan perlindungan dan ini membutuhkan peran negara sebagai pengayom dan pelindung rakyatnya.

Dalam literature pembangunan konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas. Menurut Pearse dan Stiefel (1979) dalam Priyono dan Priamarka (1996:63) mengatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekosentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Pembangunan sudah semestinya didasarkan pada kebutuhan atau *needs* dan berdasarkan pada potensi lokal masyarakat.

Secara konseptual (Teguh, 2004 : 120), ada 5 prinsip dasar dari pemberdayaan masyarakat; **Pertama**, untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan *break even* dalam setiap keinginan yang dikelola. Berbeda dengan bisnis, kendati pemungutan *fee* telah menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan lainnya.

Kedua, konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

Ketiga, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Keempat, dalam implementasi konsep harus memaksimalkan sumberdaya (*resources*) baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Kelima, kegiatan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai *katalis* yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Menurut Korten (1991) tiga model pembangunan di Negara berkembang yaitu *community development*, partisipasi masyarakat dan model desentralisasi. Berangkat dari prinsip *community development* bahwa dalam pengembangan masyarakat yang dikaitkan dengan program pembangunan, tidak lepas dari aspek partisipasi warga dimana warga sebagai pelaku pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator saja. Upaya mengembangkan kemampuan manusia menjadi hal yang utama sehingga menjadi pelaku (*agent*) dan *powerful* dalam artian berdaya dan mandiri. Juga pengintegrasian seluruh sektor merupakan hal penting dalam menciptakan pembangunan yang komprehensif dan berbasis pada kebutuhan komunitas. Penguatan komunitas menjadikan sifat kerjasama yang terbangun antar sesama, karena adanya kepentingan dan tujuan yang sama untuk sama-sama berkembang, sebagai kebutuhan dasar manusia dan terbuka pada setiap keragaman dan kemungkinan perbedaan diluar dirinya atau komunitasnya (*inclusive*), anti kekerasan, penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan memiliki *self reliant* yang tinggi serta optimalisasi dalam pemanfaatan sumberdaya lokal.

Sebelum kita menelaah lebih jauh tentang alasan pemilihan kebijakan pengembangan masyarakat sebagai salah satu pilihan pendekatan paradigma pembangunan saat ini, kegagalan pembangunan masa sebelumnya menitikberatkan pada paradigma pertumbuhan, yang merupakan ekspresi dari nuansa pembangunan elitis (Teguh, 2004 : 63, 69, 70). Terbukti pembangunan telah menempatkan golongan elit pada posisi dominan. Belajar dari pengalaman masa lalu, maka mulai tahun 1990-an ditiupkan paradigma baru yang lebih *humanize*.

Terjadinya kegagalan tersebut memerlukan reorientasi baru dalam pembangunan. Bermula dari pengalaman pahit ini, maka pendekatan pembangunan memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan dengan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Jika pembangunan pertumbuhan ekonomi bersifat elitis, maka pembangunan berkelanjutan dan pembangunan manusia lebih bersifat populis.

Resiko yang dihadapi ke depan adalah ketika menjadikan suatu proses pembangunan menjadi suatu proses populis. Pembangunan berbasis pada manusia mencakup pembangunan masyarakat (*community based development*) dan pembangunan manusia (*people centred development*). Menurut Korten (1991: 68 – 69) beberapa visi dari pembangunan manusia didasarkan pada nilai yang eksplisit seperti : 1) penggunaan sumberdaya alam yang memberikan kesempatan bagi semua manusia guna memproduksi *basic livelihood* untuk mereka dan keluarganya; 2) setiap individu punya hak untuk memberikan kontribusi produktif bagi anggota keluarganya, komunitas dan masyarakatnya; 3) kontrol atas asset produktif seharusnya didistribusikan secara luas dalam masyarakat; 4) ekonomi lokal sebaiknya dapat didiversifikasi secara rasional memandirikan dalam memproduksi kebutuhan dasar. Sesungguhnya aliran pembangunan ini lahir karena adanya keprihatinan terjadinya degradasi manusia, yang hanya disamakan statusnya sebagai alat produksi (bersifat *mekanistik* dan mengesampingkan aspek *humanistic*) yang akhirnya, mengakibatkan dehumanisasi terjadi hampir di semua sektor.

Beberapa masalah dalam pembangunan salah satunya adalah ketimpangan sosial yaitu : 1) Ketimpangan antargolongan pendapatan; 2) Ketimpangan antar daerah dan juga antar kelompok etnis atau agama; 3) Ketimpangan antar sektor, seperti sektor pertanian dan industri atau sektor perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*); 4) Ketimpangan Gender; 5) Ketimpangan dalam kesempatan yang menjadi penyebab dari berbagai bentuk ketimpangan di atas; 6) Ketimpangan antar masyarakat di dunia maju dan berkembang dengan gejala keterbelakangan dan melahirkan ketergantungan (*dependency*) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (Kartasasmita, 1996 :21, 22,27,28). Ketimpangan tersebut menciptakan berbagai resiko tumbuhnya berbagai penyakit sosial dan berimplikasi terhadap proses pembangunan ekonomi.

Pemikiran tentang pengembangan masyarakat muncul setelah beberapa kegagalan dari pendekatan pembangunan sebelumnya baik secara residual maupun incremental dimana menurut Hardiman dan Midgley (1982 : 15) yaitu :

- a. Banyak Negara berkembang termasuk Indonesia sebelumnya menerapkan kebijakan pertumbuhan ekonomi, yang mereplikasi apa yang terjadi di Negara maju hasilnya banyak yang gagal.
- b. Pendekatan yang dilakukan merupakan reaksi terhadap permintaan (*demand*) dan bukan pada kebutuhan (*needs*)
- c. Tidak redistributif dan karenanya tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mendasar dan berjangka jauh ke depan.

Sehingga sebagai penambahan, perlu adanya pendekatan lain seperti pendekatan sektoral dan pendekatan terpadu (*unified approach*) yang antara lain disarankan oleh Myrdal, yang tidak ingin memisahkan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (Hardiman dan Midgley, 1982) juga dapat dilakukan dengan pembedaan pendekatan sektoral dan regional, makro – mikro, structural fungsional dan sebagainya.

Dapat dilihat pula pada pandangan menurut Sumodiningrat (Teguh, 2004: 71, 72) pemerintah mengadopsi pemberdayaan karena 3 alasan yaitu :

1. Pemerintah sangat merosot pendapatannya sehingga tidak bisa melakoni sebagai lokomotif pembangunan itu sendiri, seperti yang dilakukan antara tahun 1970 – 1980-an. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya diharapkan "membiayai" pembangunan. Yang bisa dilakukan adalah menstimulasi masyarakat agar bisa "membiayai" pembangunan itu sendiri. Penyebabnya adalah : kemerosotan pendapatan pemerintah, baik dari minyak, pajak, laba BUMN, bahkan pinjaman luar negeri.
2. Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya berpola dari pemikiran pemerintah atas pembangunan itu sendiri. Alhasil, pembangunan bermakna pemaksaan kehendak pemerintah terhadap rakyat. Akibatnya pembangunan menjadi bias dari tujuan awalnya. Semestinya, pembangunan diadakan atas dasar kesepakatan antar rakyat dengan pemerintah (sebagai institusi) dan ini berarti memberdayakan masyarakat. Dalam bahasa teknis, disebut juga pembangunan yang berakar dari kehendak rakyat.

3. Kemandirian menjadi trend global. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu memenangkan persaingan. Bangsa yang mandiri terbentuk dari masyarakat mandiri. Jadi credo pembangunan adalah memandirikan masyarakat.

Konsep partisipasi dikembangkan dengan melihat kegagalan diatas karena pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan partisipasi rakyat seringkali salah sasaran karena hanya mengandalkan pengetahuan para perencana maupun birokrat (*top down*). Dengan konsep pembangunan komunitas (*community development*) yang berakar pada partisipasi rakyat karena (Kartasasmita, 1996 : 27,28) :

- a. Diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan lapangan sesungguhnya berkaitan dengan sumberdaya yang tersedia dan dapat dikembangkan, kelembagaan masyarakat serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
- b. Pelaksanaan pembangunan akan lebih kukuh karena didukung oleh masyarakat
- c. Terkait dengan hak yang paling mendasar dalam demokrasi, yaitu ikut menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka. .
- d. Efisiensi dan legalitas serta sinergi yang terarah dari masyarakat.
- e. Konteks pemberdayaan sebagai sintesa dari pembangunan yang berorientasi pada manusia dan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Community Development

Pengembangan masyarakat pada dasarnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi suatu program pembangunan. Adapun prinsip CD yang menjadi penguat dan konsisten dengan *ecological* dan *social justice perspective* (Jim Ife, 1995; 177-199) adalah :

1. Holism merupakan prinsip yang dapat diterapkan dalam semua aspek comdev. Pemahaman melalui pengembangan yang terintegrasi (lintas sektoral) dan dapat diterapkan pada level analisis juga pada level praktis. Dalam pengembangan masyarakat, diperlukan keterpaduan semua sektor baik sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan perseorangan (*personal spiritual*) karena dalam

pembangunan, perlu memperhatikan semua aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain (interdependensi antar sektor) juga sekaligus berbeda dalam perkembangannya untuk masing-masing komunitas.

2. Konfrontasi terhadap struktur yang kurang menguntungkan (*structural disadvantage*). Hakekat yang mendasar tentang kelas, gender, dan penekanan kelompok etnis merupakan tema CD. Dalam pengembangan masyarakat, kerja CD adalah memberikan counter dan pencerahan dari segala bentuk penekanan ini.
3. Hak asasi manusia (*Human Rights*). Komitmen dalam HAM adalah salah satu prinsip CD. Seperti yang diterapkan oleh badan-badan PBB yang sangat penting bagi *community work* untuk memperoleh persamaan dalam mencapai standar hidup, pengambilan keputusan, persamaan hak atas pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan budaya suatu komunitas, serta hak atas perlindungan dan bantuan bagi keluarga.
4. Berkelanjutan (*sustainability*); yang merupakan komponen inti dalam pendekatan ekologi. Menghindari penggunaan dan ketergantungan terhadap *non-renewable resources* dan menggalakan penggunaan *renewable resources*.
5. Pemberdayaan (*empowerment*); dalam prinsip ini berarti menyediakan warga masyarakat untuk memperoleh kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan memutuskan sendiri masa depan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berdampak dalam kehidupan komunitasnya.
6. *The personal and the political*; punya keterkaitan dengan individu dan struktur serta isu publik yang dapat dikembangkan dengan kebutuhan individu yang berhubungan dengan aspirasi dan pencapaian tujuan, yang diterjemahkan secara efektif dalam suatu aksi di level komunitas (*Community level action*).
7. Kepemilikan masyarakat (*community ownership*); yang dapat diartikan sebagai berikut : 1) dalam arti materil; seperti tempat pertemuan dan taman seperti *green space* atau *public space* di tingkat lokal. Jika ada perluasan kepemilikan, maka keberadaan ruang tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas. 2) kepemilikan struktur dan proses; desentralisasi sangat penting dalam mencapai kondisi pengembangan pada tingkat lokal, masyarakat

mengontrol pelayanan dalam berbagai bidang baik kesehatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya.

8. *Kemandirian (self reliant)*; mengandalkan sumberdaya (manusia, keuangan, teknik, alam) dari dalam masyarakat dan menjauhkan ketergantungan sumberdaya dari luar. Disini, masyarakat perlu mengidentifikasi ketersediaan atau potensi sumberdaya yang ada sebanyak mungkin. Dengan mengandalkan sumberdaya dari dalam, maka akan semakin meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam mengembangkan dirinya.
9. *Independence from the state*; tidak tergantung pada Negara juga berkaitan dengan rasa percaya diri yang kuat dan semakin menguatkan basis komunitas. Sponsor pemerintah dalam CD perlu dikurangi dan memperkuat sponsor lainnya yang dapat berasal dari yayasan, lembaga keagamaan dan lain-lain yang tidak ketat dan mengikat.
10. *Immediate goal and ultimate system*; bertumpu pada tujuan yang terbaik dan dekat dengan kebutuhan sasaran.
11. *Organic development*; pengembangan masyarakat mesti melembaga dalam masyarakat tersebut.
12. *The pace of development*; pengembangan yang lebih maju dan dilakukan secara *up to date* atau mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ketinggalan dalam isu lokal maupun global secara seimbang.
13. *External expertise*, dalam CD dapat dilakukan dan dikembangkan keahlian yang sifatnya berasal dari luar yang dapat menyokong pengembangan kemampuan internal komunitas.
14. *Community building*; Pembangunan komunitas sangat penting artinya dalam melaksanakan CD. Setiap pelaksanaan CD mesti berdampak pada pembangunan komunitas tersebut.
15. *Process and outcome*; penghargaan terhadap proses dan dampak dari proses sangat menentukan dalam keberhasilan CD
16. *The integrity of process*; perlu kesatuan proses dalam mengembangkan CD yang melibatkan semua aspek dan kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam komunitas.

17. *Non-violence*; Sebagai sikap yang penting dalam CD dimana segala bentuk program dilakukan dengan asas anti kekerasan baik yang secara fisik maupun emosional dan penghargaan yang kuat terhadap hak-hak individu.
18. *Inclusiveness*; keterbukaan terhadap perbedaan dan keragaman komunitas baik di lingkungan internal maupun eksternal dapat memperlancar proses CD.
19. *Consensus*; dalam setiap perbedaan dan konflik yang memungkinkan ada dalam setiap proses CD, perlu mengambil langkah konsensus yang melibatkan elemen masyarakat atau komunitas yang berkepentingan.
20. *Cooperation*; Kerjasama antar individu atau kelompok dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam menerapkan CD.
21. *Participation*; sebagai ruh dari proses pengembangan masyarakat yang menggerakkan komunitas untuk terlibat secara nyata dalam setiap program pembangunan.
22. *Defining Need*; dalam menterjemahkan kebutuhan, mesti berdasar pada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Bukan dari luar komunitas mereka.

Beberapa prinsip di atas menegaskan bahwa kebijakan nasional yang menggunakan pilihan pengembangan masyarakat sebagai pilihan pendekatan pembangunan mesti memuat prinsip yang sudah dijabarkan. Sedangkan alasannya jelas bahwa paradigma lama pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang memperjuangkan peningkatan pendapatan masyarakat dan Negara, telah gagal karena tidak diikuti dengan transformasi yang seimbang, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Pada prinsip *good governance* (Teguh, 2004 : 71), dimana 3 pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan utamanya dalam pembangunan nasional kita adalah masyarakat sipil, pemerintah dan swasta dengan sumberdaya manusia menjadi pilar utama yang harus diberdayakan, selaras dengan prinsip pengembangan masyarakat.

3. Strategi dan Visi Pemberdayaan Masyarakat

Pada sekitar tahun 1970-an, konsep pemberdayaan mengalami perkembangan seiring dengan makin menguatnya pandangan yang merupakan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya yang sebelumnya berkembang (Priamarka

dalam Hikmat, 2004: 1). Semua reaksi tersebut merupakan suatu upaya mencari pemecahan masalah terhadap persoalan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kebanyakan masyarakat di dunia ketiga. Konsep ini merupakan sebuah jalan baru untuk menemukan kembali sebuah jalan pembangunan yang lebih humanize, dan diharapkan mampu menjaga eksistensi manusia dalam proses pembangunan saat ini yang cenderung mengalami dehumanisasi.

Menurut Hikmat (2004:3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan, kerja dan keadilan yang diletakan pada kekuatan individu dan sosial. Kekuatan individu dan sosial merupakan penopang utama untuk dapat mewujudkan konsep pemberdayaan dan membangun masyarakat yang berkeadilan. Dewasa ini, konsep pemberdayaan diadopsi secara luas oleh kalangan pemerintah, swasta maupun LSM di Indonesia.

Kegiatan pemberdayaan tersebut juga didanai oleh berbagai sumber seperti *United Nation Development Program* (UNDP) dan masih banyak lagi lembaga donor lainnya, dimana dana tersebut didedikasikan untuk masyarakat rentan (*vulnerable Groups*). Banyak upaya fasilitasi dilakukan oleh pihak LSM dan Pemerintah.

Untuk dapat memberdayakan masyarakat secara partisipatif, beberapa teknik pemberdayaan mesti dilaksanakan. Untuk konsep partisipasi yang merupakan komitmen dan ruh bagi pemberdayaan masyarakat mesti mencakup beberapa hal. Menurut Hikmat (2004:218), cakupan tersebut yaitu : 1) perumusan konsep, 2) penyusunan model, 3) proses perencanaan, 4) pelaksanaan gerakan pemberdayaan, 5) pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan, 6) pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan dan dikembangkan secara bertahap, menyeluruh, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Dalam program/kegiatan pemberdayaan, seringkali kita mendengar teknik pemberdayaan seperti *participatory rural appraisal* (PRA). Beberapa prinsip penerapan PRA menurut Hikmat (2004:218) adalah : a) masyarakat dipandang sebagai subyek, bukan obyek, b) praktisi menempatkan diri sebagai insider; bukan outsider, c) penentuan parameter standard, lebih cenderung pada upaya pendekatan kebenaran dari apa yang dilakukan, d) masyarakat membuat peta, model, diagram, pengurutan, memberi angka atau nilai, mengkaji atau menganalisis, memberikan contoh,

mengidentifikasi masalah, menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang, dan merencanakan kegiatan aksi.

Sedangkan teknik-teknik PRA (Hikmat, 2004: 219) meliputi : 1) uraian data sekunder dan analisa data dasar; 2) pemetaan prasarana, bangunan, ruangan, sumberdaya alam dan lokasi; 3) observasi langsung terhadap dinamika sosial; 4) analisis pola penggunaan waktu (jadwal sehari-hari); 5) kalender musim dan profil perubahan; 6) diskusi kelompok terarah; 7) profil sejarah; 8) analisis pola keputusan; 9) studi kasus dan cerita tentang kehidupan; 10) bagan hubungan antar pihak (diagram venn); 11) peta mobilitas klien masyarakat; 12) pengurutan potensi atau kekayaan; 13) bagan alur input – output; 14) pengorganisasian masalah. Seluruh aktivitas tersebut dapat berjalan secara fleksibel dan sesuai dengan konteks tempat dimana program akan dilaksanakan. Sehingga para praktisi program akan dengan mudah melakukan kegiatan pemberdayaan melalui teknik pelibatan masyarakat dalam bentuk PRA. Selain PRA yang telah kita sebutkan tadi, ada beberapa teknik pemberdayaan yang memiliki misi yang sama seperti *participatory research and development (PRD)*, *participatory rapid appraisal (PRA)* dan lain-lain.

Dalam proses verbal, yang terjadi dari respon masyarakat bersifat reaktif (Chambers, 1996 : 66). Masih menurut Chambers, keterlibatan perempuan miskin juga dapat akan sangat marginal dan kepemilikan informasi disesuaikan oleh orang luar (*outsider*), bukan dimiliki dan dibagi oleh orang dalam (*insider*). Selain itu juga, peran *outsider* sebagai investigator sementara orang dalam tidak menjadi inisiator dan katalis. Untuk melihat proses PRA, maka dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8
Beberapa perbandingan antara cara-cara verbal dan visual

	Verbal (Wawancara, Percakapan)	Visual (Diagram)
Peran orang luar	Investigator	Inisiator dan Katalis
Mode orang Luar	Menggali	Memudahkan
Intervensi orang luar	Terus-menerus dan mempertahankan	Memulai dan kemudian menguranginya
Peran orang dalam	Responden	Penyaji dan analis
Mode orang-orang dalam	Reaktif	Kreatif
Kesadaran orang dalam terhadap orang luar	Tinggi	Rendah
Kontak mata	Tinggi	Rendah
Medium dan materi	Orang luar	Orang dalam
Wanita miskin dan lemah	Dapat dimarginalkan	Dapat dikuatkan
Detail dipengaruhi oleh	Kategori etik	Persepsi emik
Arus informasi	Berurutan	Kumulatif
Aksesibilitas informasi kepada orang lain	Rendah dan sementara	Tinggi dan semi permanen
Inisiatif untuk checking list dengan	Orang luar	Orang dalam
Utilitas spasial, informasi temporal dan kausal, perencanaan dan monitoring	Rendah	Tinggi
Kepemilikan informasi	Disesuaikan oleh orang luar	Dimiliki dan dibagi oleh orang dalam

Sumber: Robert Chambers, 1996

Semua teknik tersebut dapat membantu memperkaya wawasan tentang strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat, membangkitkan partisipasi masyarakat secara serius, sehingga keterlibatan secara aktif tersebut dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan, tanpa ada lagi yang teralienasi maupun perannya terdistorsi sehingga mengulang kegagalan seperti yang telah dialami pembangunan sebelumnya.

4. Pemberdayaan sebagai Sebuah proses (*on-Going Process*)

Dalam melakukan pemberdayaan, mesti dipahami bahwa pemberdayaan tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang/komunitas tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (2002 : 172) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan

(*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Kembali lagi, Adi (2002 : 182 – 195) bahwa intervensi merupakan tahapan yang bersifat *cyclical* (berbentuk siklus) dan spiral, dan bukan merupakan tahapan yang secara berurutan. Hal ini dimungkinkan untuk dapat kembali ke tahap sebelumnya jika terdapat masukan baru untuk menyempurnakan program pemberdayaan tersebut. Adapun tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan (*Engagement*); dibagi sekurang-kurangnya menjadi 2 bagian, yang merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif yaitu : 1) Penyiapan Petugas yang dilakukan oleh *community worker*, untuk menyamakan persepsi antar agen perubah mengenai pendekatan yang dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Biasanya dimulai dengan pelatihan awal untuk menyamakan pemahaman tentang program yang akan dikerjakan di wilayah tertentu. 2) Penyiapan Lapangan, yang juga dikenal dengan tahap *engagement* dimana *community worker* (CW) melakukan identifikasi awal /studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik formal maupun informal; Mendapatkan perizinan dari pihak terkait; kontak dengan tokoh-tokoh informal serta membangun komunikasi yang baik dengan sasaran. Komunikasi yang baik pada tahap awal, akan mempengaruhi keterlibatan warga pada tahap berikutnya. Kegiatan karitatif (amal) juga diperlukan untuk menyatukan dan menjalin kedekatan dengan warga, utamanya pada wilayah yang terbiasa menerima bantuan dari pemerintah (pendekatan direktif). Kegiatan ini dapat dikembangkan menjadi hubungan yang berkualitas antara CW dengan warga yang memiliki potensi sebagai kader.
- b. Tahap Pengkajian (*Assesment*) ; dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-person*) atau juga kelompok-kelompok masyarakat. Petugas mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dan sumberdaya klien. Sebaiknya asesment dilakukan setelah masyarakat dilibatkan aktif dan memahami permasalahan mereka sendiri. CW memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyusun prioritas dari permasalahan yang ditemui dan akan ditindaklanjuti pada tahap perencanaan. Dalam proses ini dikenal juga konsep

"kebutuhan normatif" (*normative needs*) yaitu kebutuhan berdasar pada standar norma yang berlaku. Kadang suatu masyarakat tidak merasakan suatu hal sebagai kebutuhan mereka, tapi CW melihat bahwa kondisi yang ada mesti diperbaiki karena bisa jadi kebutuhan yang lebih penting bukan yang dimaksud oleh masyarakat saat itu. Oleh sebab itu, perlu sebuah tindakan yang menjembatani perbedaan pandangan melalui peran edukasional, yang akan memberi informasi pada masyarakat untuk berdiskusi dan mempertimbangkan pilihan prioritas masalah mereka sendiri.

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan (*Designing*); sebagai agen perubah (*agent of change*), dapat melibatkan masyarakat untuk memikirkan alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan sumberdaya yang ada. Ini dimaksudkan agar program tidak saja bersifat charity tapi juga berdampak jangka panjang dalam perbaikan kehidupan warga dimasa datang. Contoh program kesehatan dan pendidikan.
- d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (*Designing*) ; Petugas membantu masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, utamanya dalam bentuk proposal pada pihak penyandang dana. Diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan mereka capai dan mengetahui bagaimana mencapai tujuan tersebut. Lalu masyarakat dapat mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang.
- e. Tahap Implementasi; tahap ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini membutuhkan kerjasama antara petugas dan masyarakat sasarnya, agar pelaksanaan apa yang sudah dirancang dapat berjalan dengan lancar. Pertentangan antar wargapun dapat menghambat pelaksanaan program, yang bisa jadi menekan keterlibatan warga untuk aktif dalam kegiatan. Bila kondisi ini terjadi, maka CW harus siap kembali ke tahap penyiapan lapangan dimana harus melakukan kontak dan hubungan dengan pihak oposan (orang yang menentang program) dengan mempertimbangkan mengapa pihak tersebut menjadi oposan. Dalam tahap ini, dapat merekrut kader/*community leader* guna membantu kerja-kerja petugas di lapangan, juga untuk sosialisasi dan transfer

pengetahuan/ketrampilan yang dapat sangat bermanfaat bagi komunitas tersebut. Beberapa teknologi yang tersedia dapat digunakan untuk membantu kelancaran tahap implementasi ini.

- f. Tahap Evaluasi ; merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan dan sebaiknya melibatkan warga. Dengan terlibatnya warga, maka diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Dalam jangka panjang, diharapkan masyarakat dapat membentuk suatu sistem yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Bila hasil evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sebuah evaluasi proses yang dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan suatu program atau kegiatan. Jika diperlukan, CW dapat melakukan lagi *assesment* terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat atau terhadap sumberdaya yang tersedia. CW sebagai *change agent* menyadari bahwa tolok ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Evaluasi dapat dilakukan pada input, proses (pemantauan/monitoring), dan juga pada hasil. Pada tahap ini, juga dilakukan stabilisasi pada perubahan yang terjadi melalui *reward* bagi perubahan yang lebih baik atau *punishment* dapat berupa kontrol pada sasaran. Bila sistem ini terpolakan dan terinternalisasi pada sebagian kelompok masyarakat, maka dapat diharapkan perubahan yang terjadi akan dapat relatif menetap.
- g. Tahap Terminasi (*Disengagement*) ; merupakan tahap "pemutusan" hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Meskipun terminasi dilakukan lebih banyak karena proyek sudah selesai, bukan karena masyarakat sudah mandiri. Meskipun demikian, petugas/CW tetap harus keluar dari komunitas secara perlahan-lahan, agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak. Sebaiknya masyarakat disiapkan sebelum ditinggalkan, dan tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Suharto (2005 : 67 - 69) menyatakan pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui :

- **Pemungkinan** : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- **Penguatan** : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- **Perlindungan** : melindungi masyarakat utamanya kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang/tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah, mencegah eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil
- **Penyokongan** : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- **Pemeliharaan** : memelihara kondisi yang kondusif agar teta terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dubois dan Miley dalam Suharto (2005 : 68) memberi cara dan teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 5.1. Membangun relasi pertolongan yang : a) merefleksikan respon empati; b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self determination*); c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; d) menekankan kerjasama klien (*client patnership*).
- 5.2. Membangun komunikasi yang : a) menghormati martabat dan harga diri klien; b) mempertimbangkan keragaman individu; c) berfokus pada klien; d) menjaga rahasia klien.
- 5.3. Terlibat pada pemecahan masalah yang : a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; b) menghargai hak-hak klien; c) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

- 5.4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui : a) ketaatan terhadap kode etik profesi; b) keterlibatan dalam proses pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan; c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu – isu publik; d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Prinsip peran pekerja sosial pemberdayaan masyarakat menurut beberapa penulis seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), dalam Suharto (2005 : 68) bahwa :

- Pemberdayaan sebagai proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner
- Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan – kesempatan
- Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat
- Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kopetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- Masyarakat harus berpartisipasi dalam keberdayaan mereka sendiri : tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri
- Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

- Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel

D. Agen sebagai Pendamping Sosial & *Community Worker*

Dalam program sosial, hampir semua menempatkan pendamping untuk menjadi pioner atau ujung tombak. Menurut Suharto (2005 : 94 – 95) pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi yang biasa disebut 4P yakni : pemampuan/pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*) dan pendukung (*supporting*). Suharto juga mengemukakan bahwa pendampingan sosial merupakan interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti :

- Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi
- Mobilisasi sumberdaya setempat
- Memecahkan masalah sosial
- Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Sebagai agen perubahan kaitanya dengan kerja – kerja di komunitas *community worker* memiliki peran seperti yang dikemukakan oleh Adi (2002 : 196) sebagai berikut :

1. Peran fasilitatif (*facilitatif role*) adalah peran untuk memfasilitasi komunitas sasaran; terbagi dalam : 1) animasi sosial (*social animation*) yaitu kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat termasuk didalamnya mengaktifkan, menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak; 2) mediasi dan negosiasi (*mediation and negotiation*); 3) pemberi dukungan (*support*); 4) membentuk konsensus (*building consensus*); 5) fasilitasi kelompok (*group facilitation*); 6) pemanfaatan sumberdaya dan ketrampilan (*utilization of skills and resources*); 7) mengorganisir (*organizing*).
2. Peran edukasional (*educational role*) adalah peranan mendidik masyarakat yang dijabarkan dalam beberapa aspek yaitu a) membangkitkan kesadaran masyarakat (*conscious raising*); b) menyampaikan informasi (*informing*); c) mengkonfrontasikan (*confronting*); dan d) pelatihan (*training*).

3. Peran perwakilan masyarakat (*representational role*) yaitu : a) mencari sumberdaya (*obtaining resources*); b) advokasi (*advocacy*); c) memanfaatkan media (*using media*); d) hubungan masyarakat (*public relation*); e) mengembangkan jaringan (*networking*); f) membagi pengetahuan dan ketrampilan (*sharing knowledge and experience*)
4. Peran teknis (*technical roles*) : a) mengumpulkan dan analisis data (*data collection and analisis*); b) menggunakan komputer (*using computer*); c) melakukan presentasi tertulis maupun verbal (*verbal and written presentation*); manajemen dan kemampuan mengontrol keuangan (*financial control*).



BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH, LEMBAGA DAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan

1. Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Kelurahan Duri Utara memiliki luas wilayah sebesar 40.150 Hektar (Ha) dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 8 RW, 93 Rukun Tetangga (RT), berjumlah 3.705 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah penduduk sebanyak 26.719 (Kecamatan Tambora dalam Angka, 2006). Sementara kepadatan penduduk 660 jiwa/Ha). Hal ini berbeda pada data yang diterbitkan tahun 2007 dimana luas wilayah menjadi 40.950 Ha, jumlah RW 8 (tetap), RT (tetap), jumlah penduduk menurun menjadi 26.242 jiwa dengan tingkat kepadatan 648 jiwa/Ha, sementara jumlah KK tetap yaitu 3.705. Adapun jumlah penduduk laki-laki (13.089 jiwa) dan perempuan (13.153 jiwa).

Kawasan lingkungan RW kumuh dan miskin berada di wilayah RW 01 dan RW 02 dengan kondisi lingkungan yang sempit, banyak rumah-rumah yang berhimpitan, yang disela dengan gang yang sempit. Banyak penduduk pendatang yang menyewa ruangan sempit untuk bertempat tinggal dan bekerja sebagai karyawan konveksi. Penduduk lainnya yang datang dan tinggal (urban) di wilayah ini sebagian banyak yang mendiami rumah kontrakan yang sempit, dengan kondisi penanganan sampah yang kurang baik. Menurut kategorisasi kekumuhan yang dibuat oleh BPM DKI Jakarta, yang diputuskan oleh Kepala BPM DKI Jakarta Nomor 601 Tahun 2007 pada Lampiran IV halaman 2 bahwa kelurahan Duri Utara khususnya di RW 02 termasuk pada kategori kumuh ringan (BPM, 2007).

Sesuai dengan observasi dan wawancara dengan Ketua RW 02 Bapak YN bahwa jumlah penduduk pribumi dan etnis Chinese sebanyak 30 : 70, atau 70% mayoritas terdiri masyarakat Chinese. Sementara untuk RW 04 sebanyak \pm 50% memiliki etnis Chinese (informasi dari pengurus RW 04). Kondisi ini memungkinkan

tumbuh kembangnya usaha dan banyaknya masyarakat urban yang berpindah dan bekerja pada usaha konveksi yang dikelola mayoritas etnis Chinese.

1.1. Kondisi Geografis

Wilayah kelurahan Duri Utara terletak di Barat Jakarta, dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kelurahan Krendang

Sebelah Timur : Duri Selatan

Sebelah Selatan : Tanah Sereal

Sebelah Barat : Kali Anyar dan Jembatan Besi

Topografi wilayah sedikit berbukit dan dilintasi oleh sungai Ciliwung yang airnya berwarna hitam.

1.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kelurahan Duri Utara kebanyakan mendiami rumah permanen dengan jumlah 1.392 buah, semi permanen sejumlah 1.146 buah dan bangunan sementara 510 buah (BPS, 2006). Data ini memperlihatkan masih besarnya warga yang tinggal di rumah semi permanen (1.146 buah) dan 510 buah untuk non-permanen. Ini menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang tinggal di rumah jenis semi permanen dan non-permanen masih sangat banyak melebihi 50% atau sekitar 54,33% masih mendiami rumah semi permanen dan non permanen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas kehidupan masyarakat, ditambah kumuhnya pemukiman yang banyak dibatasi oleh gang sempit.

Adapun penggunaan tanah menurut presentase penggunaannya adalah 82,40 % untuk perumahan, 8,00 untuk industry, 5,00 untuk perkantoran/gudang dan lainnya 4,60% (BPS, 2006). Kenyakan penggunaan tanah sebesar 82,40% untuk perumahan. Perumahan, selain untuk tinggal, banyak warga yang menggunakan sebagai tempat usaha seperti : konveksi, warung kelontongan, warung makan, tempat penjualan makanan gorengan, usaha kontrakan, dagang baju/sembako eceran dan beberapa usaha mikro rumah lainnya.

Adapun lapangan pekerjaan berdasarkan KK tahun 2006 yaitu sebagai berikut :

Tabel 9
Lapangan Pekerjaan Berdasarkan KK Kelurahan Duri Utara, Tahun 2006

No	Nama Pekerjaan	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Industri	887	22.27
2	Bangunan	46	1.15
3	Transportasi/Komunikasi	12	0.30
4	Pemerintahan	94	2.36
5	Keuangan	15	0.38
6	Jasa	1252	31.43
7	Perdagangan	984	24.70
8	Lainnya	693	17.40
	Jumlah	3,983.00	100.00

Sumber : diolah dari Kecamatan Tambora dalam Angka, 2007

Sementara data kelurahan Tambora tahun 2007 (Monografi Kelurahan Tambora, 2007) dikatakan sebagaimana dalam tabel :

Tabel 10.
Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Duri Utara, Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	7	0.12
2	Pegawai Swasta	1.347	23.78
3	Wiraswasta	480	8.47
4	Pengusaha	78	1.38
5	TNI	5	0.09
6	Polri	3	0.05
7	Dalam Pendidikan	1.422	25.10
8	Buruh	356	6.28
9	Ibu RT	1.175	20.74
10	Pensiunan	78	1.38
11	Numpang Orangtua (belum bekerja)	524	9.25
12	Sopir	12	0.21
13	Dokter	21	0.37
14	Guru	14	0.25
15	Lain-lain (calo, Ojek, dsb)	143	2.52
	Jumlah	5,665	100.00

Sumber : Diolah dari data Kelurahan, 2007

Masyarakat Duri Utara kebanyakan bekerja dibidang sebagai pegawai swasta (23,78%) dan berprofesi sebagai ibu Rumah Tangga (RT) sebanyak 20,74%. Banyaknya masyarakat yang berwiraswasta sebesar 480 orang atau 8,47%. Namun beberapa yang masih menganggur sebesar 524 orang atau 9,25% dari total populasi. Sementara fasilitas kesehatan yang tersedia di kelurahan ini adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 11.
Fasilitas Kesehatan Kelurahan Duri Utara, 2007

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1	Dokter Praktek	15	62,5
2	Rumah Sakit	0	0
3	Rumah bersalin	0	0
4	Puskesmas	1	4,17
5	Pos KB/Posyandu	8	33,33
	Jumlah	24	100,00

Sumber : Diolah dari data BPS Kecamatan Tambora, 2007

Fasilitas kesehatan sangat terbatas karena masyarakat mengandalkan puskesmas sebagai tempat pengobatan. Kehadiran dokter praktek cukup membantu pelayanan kesehatan di kelurahan ini. Sisanya berupa posyandu dan Pos KB yang melayani bayi, anak-anak untuk layanan kesehatan, serta Ibu-ibu pasangan usia subur untuk mendapatkan pelayanan KB.

Rata-rata masyarakat Duri Utara bergantung pada sumber air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) sebanyak 3.321 KK (BPS, 2007). Penduduk sisanya sebanyak 384 KK mendapatkan sumber air bersih melalui pembelian dari jasa hidran yang diusahakan masyarakat di rumah-rumah.

Sementara pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat terdiri dari 1 buah pasar lingkungan (tradisional) dan 1 buah pasar kaget yang beroperasi selama 2 – 3 jam sehari di wilayah, PKL 190 orang dan Restoran 1 buah. Bank untuk pelayanan jasa keuangan formal sebanyak 1 buah. Industry sedang 3 buah. Koperasi yang berdiri di kelurahan ini adalah Koperasi Anggrek yang telah berusia 18 tahun, beranggotakan 300 orang. Kelompok koperasi ini berada di wilayah RW 04. Sementara koperasi lainnya ada di wilayah RW 02 dengan keanggotaan sebesar 30 orang. Adapun tabel aktivitas ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 12.
Lembaga Ekonomi di Duri Utara, 2007

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1	Pasar Lingkungan	1	0.36
2	Pasar Kaget	1	0.36
3	Bank	2	0.71
4	Restoran	1	0.36
5	Industri Menengah	3	1.07
6	Toko	80	28.57
7	PKL	190	67.86
8	Koperasi	2	0.71
	Jumlah	280	100.00

Sumber : diolah dari Kecamatan Tambora dalam Angka dan temuan lapangan, 2007

Adapun jumlah orang miskin menurut data Raskin di RW 02 sebesar 350 orang dan RW 04 sebesar 80 orang tahun 2008 (data PKK RW 04 dan RW 02, Kelurahan Duri Utara)

1.3. Kondisi Sosial Budaya

Warga Duri Utara memiliki tingkat pendidikan yang kebanyakan mengenyam sekolah hingga tingkat SLTA. Berikut jenjang pendidikan yang dimiliki masyarakat Duri Utara, namun banyak anak yang berhenti sekolah setelah melalui jenjang SLTP sebesar 29,62%. Meskipun yang dapat menamatkan sekolah hingga SLTA cukup besar yaitu 47% dari jumlah yang ada. Namun pendidikan yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran sehingga sulitnya terserap dipekerjaan formal dan berakibat pada penambahan angka kemiskinan wilayah setempat (Data Kelurahan Duri Utara, 2007) :

Tabel 13.
Jenjang Pendidikan masyarakat Kelurahan Duri Utara, 2007

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	292	6.68
2	Tidak Tamat SD	102	2.33
3	SLTP	1,295	29.62
4	SLTA	2,055	47.00
5	Akademi/Universitas	266	6.08
6	Belum Sekolah	341	7.80
7	Lain-lain	21	0.48
	Jumlah	4,372	100.00

Sumber : Diolah dari data Kelurahan Duri Utara, 2007

Sebagai kota besar, dimana berbagai etnis datang dan menetap, DKI Jakarta memiliki banyak pendatang/penduduk musiman dari daerah Jawa maupun luar Jawa. Adapun jumlah penduduk musiman di kelurahan ini pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel. 14
Jumlah Penduduk Musiman & Daerah Asal di Kelurahan Duri Utara Tahun 2006

No	Daerah Asal	Jumlah (jiwa)
1	Jawa Timur	64
2	Jawa Tengah	91
3	Jawa Barat	81
4	Luar Jawa	38
	Jumlah	274

Sumber: diolah dari Kesamatan Tambora dalam Angka 2007

Sementara jumlah warga Negara asing yang tinggal di kelurahan Duri Utara adalah sebanyak 10 orang (Data Kelurahan, 2007). Rata-rata masyarakat etnis Chinese sudah berkewarganegaraan Indonesia karena berasal dari Medan dan Singkawang dan hidup bersama dan membaur bersama masyarakat Duri Utara.

2. Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Kelurahan Bidara Cina memiliki luas wilayah sebesar 126,1 Ha dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 16 RW, 188 buah Rukun Tetangga (RT), Kepala Keluarga (KK) berjumlah 9.171 KK dan jumlah penduduk sebanyak 43.198 jiwa (Kecamatan Jatinegara dalam Angka, 2007). Sementara kepadatan penduduk 7.279 rumah tangga/KM atau kepadatan populasi sebesar 34.384 jiwa/KM. Pada data yang diterbitkan Kelurahan Bidara Cina pada bulan Mei tahun 2008 dimana jumlah penduduk sudah berjumlah 43.117 jiwa dengan jumlah KK sebesar 10.793 KK.

Masyarakat Mandiri (MM) memiliki pendampingan masyarakat meliputi wilayah RW 07, RW 08 dan RW 09. Fokus penelitian ini ada pada wilayah RW 07 dan RW 08 sebagai wilayah yang rawan kemiskinan. Masyarakat yang didampingi mayoritas dari RW 07 karena wilayah ini merupakan daerah yang rawan banjir, paling miskin (data Raskin Tahun 2005 sebesar 300 orang) dan memiliki banyak penduduk yang berdagang makanan jajanan yang mengalami kebangkrutan pasca isu formalin, sehingga banyak masyarakat yang berusaha dibidang ini mengalami kemiskinan. Para pedagang kecil yang mengandalkan hidup dari berjualan makanan mengalami penurunan penjualan bahkan kebangkrutan akibat penjualan yang menurun/tidak laku.

2.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kelurahan Bidara Cina terletak 7 meter diatas permukaan laut. Kelurahan ini memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Bali Mester dan kampung Melayu

Sebelah Timur: berbatasan dengan Cipinang Cempedak

Sebelah Selatan: berbatasan dengan kecamatan Makasar Kramat jati

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tebet

Kondisi wilayah sedikit berbukit dan dekat dengan sungai Ciliwung, khususnya pada wilayah RW 07 merupakan daerah bantaran kali Ciliwung. Daerah ini merupakan wilayah rawan banjir utamanya pada siklus 5 tahunan di Jakarta. Seperti keterangan dari Pos RW 07, pada musim penghujan diluar siklus 5 tahunan, air tetap menggenangi sebagian wilayah utamanya di lingkungan RW 07 hingga 1 meter tingginya. Seringnya

banjir yang menimpa warga sehingga warga banyak kehilangan atau kerusakan asset ekonominya dan membuat warga menjadi makin miskin.

2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kelurahan Bidara Cina rata-rata mendiami rumah permanen dengan jumlah 1.392 buah, semi permanen sejumlah 1.146 buah dan bangunan sementara 510 buah. Adapun penggunaan tanah menurut persentase penggunaannya adalah 60,00 % untuk perumahan, 2,50 untuk industry, 37,50 untuk lainnya (BPS, 2007).

Lapangan pekerjaan masyarakat Bidara Cina pada tahun 2008 (terbit bulan Mei, 2008) seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 15.
Jenis Pekerjaan Masyarakat Bidara Cina, tahun 2008

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Karyawan swasta/Pemerintah	11,224	26.00
2	Pedagang	7,771	18.00
3	Pensiunan	4,317	10.00
4	Pertukangan	6,476	15.00
5	Fakir Miskin	1,295	3.00
6	Pengangguran	5,180	12.00
7	Lain-lain (calo, Ojek, dsb)	6,907	16.00
	Jumlah	43,170	100.00

Sumber : Diolah dari data Kelurahan Bidara Cina, 2008

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Bidara Cina bekerja sebagai pegawai swasta dan pemerintah sebesar 26 %, kemudian disusul dengan pedagang 18 %, lain-lain termasuk pada usaha ojek, calo dan sebagainya sebesar 16 %, sementara jumlah pengangguran sebesar 12%. Fakir miskin menurut kriteria kelurahan di wilayah ini sebesar 3% dari populasi.

Fasilitas kesehatan yang ada di wilayah ini lebih banyak tersedia Klinik 28,57%, Apotek 35,71%, puskesmas sebesar 21,43%, Rumah Bersalin 7,14% dan posyandu 7,14%. Adapun jumlah dan persentasi masing-masing disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 16.
 Fasilitas Kesehatan Kelurahan Bidara Cina, Februari 2008

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1	Apotek	5	35.71
2	Rumah Sakit	0	-
3	Rumah bersalin	1	7.14
4	Puskesmas	3	21.43
5	Pos KB/Posyandu	1	7.14
6	Klinik	4	28.57
	Jumlah	14	100.00

Sumber : Diolah dari data Kelurahan Bidara Cina, 2008

Untuk koperasi di wilayah ini memiliki 2 buah koperasi serba usaha yang beranggotakan 18 orang (Kelurahan Bidara Cina, 2008) dan satunya yang baru didirikan oleh Masyarakat Mandiri bersama warga masyarakat. Adapun beberapa fasilitas dan kelembagaan ekonomi di wilayah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 17.
 Jumlah dan Jenis Lembaga Ekonomi di Bidara Cina, 2008

No	Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1	Pasar Inpres	2	2.47
2	Restoran/rumah makan/Warung	27	33.33
3	Industri Menengah	1	1.23
4	Swalayan	3	3.70
5	Koperasi	2	2.47
6	Industri Kecil	1	1.23
7	Home industri	15	18.52
8	Hidran	6	7.41
9	Hotel /Penginapan	3	3.70
10	Waralaba/Mini Market	5	6.17
11	Bengkel	15	18.52
12	Pangkalan Minyak	1	1.23
	Jumlah	81	100.00

Sumber : Diolah dari data Kelurahan Bidara Cina sejak Tahun 2005 - 2008

Jumlah penduduk yang merupakan keluarga miskin dan menerima Raskin (Beras untuk Orang Miskin) sebesar 300 KK (untuk RW 07) (data PKK RW 07, 2007) dan RW 08 sebanyak 41 orang (data Kelurahan, 2005). Jumlah Keluarga Miskin pada Tahun 2005 sebesar 648 KK dengan jumlah anggota keluarga sebesar 2.186 jiwa.

2.3. Kondisi Sosial Budaya

Untuk menggambarkan kondisi sosial budaya masyarakat Bidara Cina, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan masing-masing warga. Jumlah penduduk yang tidak sekolah sebesar 1% atau 432 orang, jumlah yang tidak sekolah (*Drop-out*) sebesar 6%. Namun jumlah lainnya cukup menggembirakan karena rata-rata warga Bidara Cina lulus sekolah dari SD – Akademi sebesar 93% dari total populasi. Adapun tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Bidara Cina, 2008

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	432	1.00
2	Tidak Sekolah (DO)	2,590	6.00
3	Tamat SD	8,634	20.00
4	Tamat SLTP	12,951	30.00
5	Tamat SLTA	12,519	29.00
6	Tamat Akademi/PT	6,044	14.00
		43,170	100.00

Sumber : Diolah dari data Kelurahan Bidara Cina, Tahun 2008

Sebagai kota besar, dimana berbagai etnis datang dan menetap, DKI Jakarta memiliki banyak pendatang/penduduk musiman yang berasal dari Jawa dan Luar Jawa. Adapun jumlah penduduk musiman di kelurahan ini pada tahun 2006 adalah 259 laki-laki dan 199 perempuan. Jumlah seluruhnya dari penduduk musiman adalah 458 orang. Sementara jumlah warga Negara asing yang tinggal di kelurahan Bidara Cina adalah sebesar 53 orang terdiri dari 23 laki-laki dan 30 perempuan.

B. Gambaran Umum Lembaga

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi DKI Jakarta

1.1. Sejarah Berdirinya Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Secara literatur dalam pengertian yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta bahwa pemberdayaan masyarakat berarti : Suatu usaha yang sistematis dan komprehensif untuk mensinergiskan potensi yang dimiliki masyarakat menuju kearah masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemandirian, baik mandiri secara sosial, ekonomi, budaya dan memiliki daya tangkal dalam segala aspek kehidupan (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 1).

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemerintah Daerah DKI Jakarta merupakan lembaga pelaksana kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta. Dulunya, badan ini disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Secara historis, istilah PMD merupakan pengertian yang sangat terpengaruh pada kondisi politik, ekonomi, budaya dan mental spiritual dan awalnya diarahkan pada pembangunan masyarakat desa (*community development*). Sebelumnya ada beberapa Negara yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 1955 dengan sebutan yang hampir sama seperti di India (disebut *Community Development*), Pakistan (*Village Agriculture dan Industrial Rural*), di Birma (*community Development Pilot Project*) dan di Ceylon disebut sebagai *Rural Development* (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 1 - 2).

Di Indonesia, sejak periode tahun 1945 sampai tahun 1950, pelaksanaan pembangunan masyarakat masih belum jelas karena usaha tersebut baru dilaksanakan secara khusus untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat dibawah pengelolaan Jawatan Pendidikan Masyarakat (PENMAS) yang berada dibawah Kementerian Pendidikan, Pengkajian dan Kebudayaan (PP dan K) Perkembangan selanjutnya, pada kurun waktu 1950 – 1955, pemberdayaan masyarakat mulai mendapat perhatian pemerintah namun belum dibuatkan perundang-undangnya sebagi landasan hukum untuk organisasi pelaksana meskipun waktu itu sudah dibentuk Kementerian Pembangunan Masyarakat.

Selanjutnya tahun 1956, pembangunan masyarakat baru mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Pusat yang ditandai dengan program Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan diresmikan pada hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1956 diteruskan dengan pembentukan Panitia Kerja Sementara PMD (PKSPMD) di tingkat pusat. Langkah positif lainnya yang juga membantu eksistensi PMD yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957 tanggal 16 Januari 1957 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa, untuk tingkat propinsi dibentuk unit pelaksana teknis PMD yang diketuai oleh Gubernur KDH sebagai ketua merangkap anggota yang beranggotakan kementerian tingkat propinsi. (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 2 - 3).

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1960 yang diundangkan tanggal 28 Juli 1960. Peraturan tersebut mempertegas pengaturan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa dalam bidang kebijaksanaan, susunan organisasi, sumber pembiayaan. Melalui peraturan tersebut juga terbentuk Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPM) yang dibentuk dari tingkat pusat sampai ke daerah (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 3 - 4). Kemudian tahun 1964 - 1966 dibentuk Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) di pusat, diikuti dengan pembentukan kantor PMD Tingkat I (propinsi) dan Tingkat II (kabupaten) dan Tingkat III (kecamatan). Tugasnya adalah melaksanakan pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa. Perubahan selanjutnya adalah dibentuk Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tahun 1966 dibawah Departemen Dalam Negeri, sementara di daerah-daerah mengadakan penyesuaian untuk penyempurnaan organisasi (Profil BPM DKI Jakarta, 2003:4).

Dalam penjelasan profil DKI Jakarta (2003) Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, di tingkat daerah tugas pembangunan desa merupakan tanggungjawab Gubernur / Bupati / Walikota/KDH, Camat dan Kepala Desa sesuai kedudukan sebagai Kepala Wilayah dimana Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa dan Sub Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa berada langsung di bawah Kepala Daerah

melakukan fungsi staf dan pelaksana di bidang pembangunan desa. Dengan demikian, tanggungjawab pembangunan masyarakat menyangkut pemberdayaan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik disegala aspek kehidupan guna mencapai kemandirian masyarakat, adalah tugas dari pemerintah daerah dari tingkat propinsi hingga tingkat desa. Hal tersebut dikarenakan kemudahan penjangkauan ke tingkat masyarakat lebih leluasa dilakukan oleh pemerintah daerah.

Masih berdasarkan UU nomor 5 Tahun 1974 dan UU nomor 5 Tahun 1979 diadakan perubahan nomenklatur Direktorat PMD menjadi Drektrorat Pembangunan Desa termasuk ditingkat daerah, disamping itu juga diadakan perubahan nomenklatur LSD menjadi LKMD/K. Sementara itu, berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1992 dan Kepmendagri nomor 92 Tahun 1992, diadakan perubahan nomenklatur Direktorat Bangdes menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Sedangkan untuk daerah Tingkat I dirubah menjadi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi, juga begitu ditingkat kabupaten/kota menjadi Kantor PMD Kabupaten/Kotamadya. (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 5)

Seiring dengan perkembangan tersebut, DKI Jakarta memahami tentang pemikiran pembangunan masyarakat desa dan mengikuti alur kebijakan Pemerintah Pusat mulai dari pembentukan pelaksana teknis PMD tingkat Propinsi DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi DKI Jakarta pada tahun 1950-an hingga diletakannya strategi pembinaan kelurahan pada tahun 1968 melalui Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ib.3/II/68 tanggal 13 Februari 1968 tentang Strategi Pembinaan Kelurahan dan Pembangunan Masyarakat Desa Khusus Propinsi DKI Jakarta, yang menetapkan kualifikasi kelurahan yaitu Kelurahan Siaga, Kelurahan Swadaya dan Kelurahan Swasembada. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Departemen Dalam Negeri untuk mendasari strategi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) secara Nasional yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Sosial Desa. Pada tingkat pertama, program-program pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk mengatur dan menyempumakan struktur organisasi serta hubungan kerja antara

Dinas dan Jawatan yang memiliki aktifitas pembinaan masyarakat desa. Program tersebut ditujukan untuk menertibkan dan mengarahkan banyak lembaga yang beroperasi di kelurahan seperti lembaga Sosial Desa, Pendidikan Masyarakat, Pembangunan Masyarakat Desa, Bimbingan Masyarakat dan lain-lain, yang bergerak sendiri-sendiri dan mengakibatkan ketidakjelasan dan pecahnya potensi masyarakat (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 6 - 7). Untuk menyatukan kegiatan tersebut pemerintah DKI Jakarta menghimpun dalam satu wadah organisasi PMD Khusus DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 782/A/K/BKD/1972 tentang organisasi Masyarakat Desa Khusus Ibukota Jakarta. Pada tahun 1980, berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 dibentuk Direktorat Pembangunan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta (Bangdes) dan pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah DKI Jakarta tahun 1994 tentang Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi DKI Jakarta, maka diadakan perubahan nomenklatur dari Direktorat Pembangunan Masyarakat menjadi Kantor PMD DKI Jakarta.

Hingga tahun 1997, dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi diberbagai aspek sehingga pembangunan mengalami berbagai gangguan. Sebagai krisis tersebut berujung pada makin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Bersamaan dengan reformasi tahun 1998 terjadi perubahan kondisi sosial politik yang berkembang menjadi tuntutan desentralisasi, transparansi dan otonomi penyelenggaraan pemerintahan yang mendorong berkembangnya pemikiran tentang pentingnya paradigm baru pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan peran serta masyarakat (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 8). Setelah melakukan berbagai pengkajian, Pemda DKI berpandangan akan pentingnya reorientasi pemikiran bahwa pembangunan desa atau kelurahan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat

kelurahan/desa dan diletakkan sebagai titik sentral pemerintahan dan sekaligus sebagai kekuatan lokal yang merupakan dasar bagi pembangunan.

Seiring dengan kebijaksanaan Nasional tentang pemberdayaan masyarakat telah ditetapkan dalam ketetapan MPR – RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditindak lanjuti ke dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan hal-hal mendasar yaitu : 1) mendorong pemberdayaan masyarakat; 2) menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas; 3) meningkatkan peran serta masyarakat. Sejalan dengan itu, undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menegaskan kembali tentang : 1) peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program penguatan organisasi masyarakat; 2) program pemberdayan masyarakat miskin; 3) program pemberdayaan keswadayaan masyarakat. Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta pasal 10 (1), pasal 11 (1) dan pasal 12 menjelaskan bahwa “ Pemerintah propinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Didasarkan pada peraturan tersebut, ditetapkan suatu Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta serta Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta yang memiliki perhatian dan tugas pemberdayaan masyarakat (Profil BPM DKI Jakarta : 9 - 10). Proses pemikiran dan perubahan untuk kemudahan penjangkauan, realisasi dan upaya efisiensi telah menjadikan BPM eksis. Tujuan, strategi dan sasaran program adalah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat.

1.2. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

Visi dari BPM adalah “ Mewujudkan kemandirian masyarakat dalm membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan kondisi masyarakat DKI Jakarta” (Profil BPM DKI Jakarta, 2003 : 42 - 43) pemahaman terhadap visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan kemandirian masyarakat yang di dalamnya mencakup ketahanan ekonomi, social, dan budaya. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah maka usaha-usaha yang sistematis dan komprehensif harus dilakukan untuk mensinergiskan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat yang digunakan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri sehingga timbul rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil pembangunan yang telah diusahakan.
2. Meningkatkan kewenangan yang ada pada masyarakat dengan memperbaiki peraturan-peraturan yang berlaku dan meningkatkan kinerja dari lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat seperti Dewan Kelurahan (Dekel), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lainnya.
3. Melaksanakan usaha-usaha untuk mengarahkan pembangunan pemberdayaan masyarakat provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan baik secara nasional maupun daerah.

Sementara itu sesuai dengan profil BPM DKI Jakarta (2003 : 43 - 44), misi BPM DKI Jakarta adalah : "Mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri" melalui :

1. Peningkatan ketahanan masyarakat sehingga memiliki ketahanan dan daya tangkal dalam segala aspek kehidupan
2. Pemantapan nilai-nilai social budaya masyarakat sehingga mandiri secara social dan memiliki khasanah yang mampu memberikan kesejahteraan
3. Pemantapan pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan gender
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat agar masyarakat sejahtera secara ekonomi
5. Peningkatan pemantapan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan pemantapan teknologi tepat guna (TTG) sesuai kebutuhan.

1.3. Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

BPM memiliki tugas untuk menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 17 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya fungsi BPM adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan norma social budaya masyarakat
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pemberdayaan perempuan
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
- e. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.

BPM DKI Jakarta memiliki visi dan misi (Profil BPM DKI Jakarta : 42 - 44). Adapun visi BPM adalah "Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan kondisi masyarakat Propinsi DKI Jakarta". Sementara misi dari BPM adalah : " Mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. melalui :

- a. Peningkatan ketahanan masyarakat sehingga memiliki ketahanan dan daya tangkal dalam segala aspek kehidupan
- b. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sehingga mandiri secara social dan memiliki khasanah yang mampu memberikan kesejahteraan
- c. Pemantapan pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan jender
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat agar masyarakat sejahtera secara ekonomi
- e. Peningkatan pemantapan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan pemantapan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan

Sementara, tujuan dari BPM adalah : 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di tingkat kelurahan dan meningkatkan status lembaga masyarakat di tingkat kelurahan DKI Jakarta; 2) membentuk sikap dan prilaku masyarakat propinsi DKI Jakarta yang mempunyai interaksi sosial budaya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 3) meningkatkan peran dan

kedudukan perempuan dalam proses pembangunan serta mengangkat harkat dan martabat perempuan provinsi DKI Jakarta ; 4) mengembangkan sektor-sektor perekonomian masyarakat provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan; 5) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan. Pendekatan yang dibangun untuk mengimplementasi pemberdayaan masyarakat adalah 1) pendekatan institusional; 2) pendekatan intelektual, 3) pendekatan partisipatif (Profil BPM DKI Jakarta : 44 - 48). Salah satu indikator kerja dari program Peningkatan ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (Program BPM Provinsi DKI Jakarta, 2003 – 2007 : 34).

Pola kerja dan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1561 / 2002 yang diubah dengan Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 1747/ 2003. Sesuai dengan juklak diatas, asas keadilan, kejujuran, kemitraan dan kesederhanaan prosedur, dan kesetaraan dalam partisipasi, menunjukkan bahwa program PPMK memiliki kesungguhan dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang bina ekonomi. Komponen kegiatan ekonomi minimal 60% dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk misalnya pengembangan usaha kecil, industry rumah tangga, perdagangan barang dan jasa melalui dana bergulir (BPM DKI Jakarta, 2004). Sementara itu, tujuan khusus PPMK dibina Ekonomi adalah : 1) meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah; 2) tumbuh dan berkembangnya usaha mikro; 3) terbangun dan berkembangnya potensi ekonomi masyarakat. Sementara kelompok sasarannya untuk bina ekonomi adalah : 1). Anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah; 2). Usaha mikro. Sangat jelas diperaturan yang ditentukan bahwa bina ekonomi dari program PPMK diperuntukan pada masyarakat miskin dan pengusaha mikro di wilayah Jakarta.

Bentuk program ekonomi produktif PPMK menurut Pemprov Jakarta dalam bentuk dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja, dimana anggaran termasuk didalamnya dana untuk tribina (termasuk bina ekonomi dana bergulir) dan Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) (Pergub DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007).

2. Gambaran Umum LSM Masyarakat Mandiri (MM)

Masyarakat Mandiri (MM) adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan komunitas di pedesaan, perkotaan, wilayah asal pekerja migrant dan recovery pasca bencana. Kelahirannya diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2000. Sejak bulan Juli 2005, MM resmi menjadi lembaga otonom dengan memperkuat visi dan misi sebagai wahana pemberdayaan berbagai komunitas dhuafa atau tak berdaya (*powerless*), sehingga komunitas tersebut dapat mencapai kemandirian (Profil Lembaga MM, tanpa Tahun).

Peran Lembaga MM adalah *empowering and synergy* sebagai jembatn masa depan yang menghubungkan komunitas dampingan dengan multistakholder secara sinergi. Peran ini dilakukan untuk dapat mencapai keterlibatan berbagai pihak terkait untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat (*community development*). Proses pemberdayaan komunitas bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat guna meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan dengan sebaik mungkin sumberdaya alam dan manusia setempat (Profil Lembaga MM, tanpa Tahun). Visi dan misi MM adalah sebagai berikut :

Visi :

Tumbuhnya komunitas-komunitas yang berdaya dan berkemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, secara mandiri dan berkesinambungan

Misi :

1. Memfasilitasi kesadaran komunitas dalam membangun diri dan lingkungan kearah kehidupan yang lebih luas.
2. Membangun kapasitas kelembagaan lokal
3. Memfasilitasi terjadinya sinergi lintas pelaku (multistakeholder) untuk keberlanjutan system mata penghidupan komunitas (*livelihood system*)

Adapun tujuan dari MM adalah :

1. Tercapainya kemandirian material komunitas sasaran
2. Tercapainya kemandirian intelektual komunitas sasaran
3. Tercapainya kemandirian manajemen komunitas.

Sementara arah program dari MM adalah :

1. Penyadaran (*awareness*)

2. Pengorganisasian (*organization*)
3. Kaderisasi (*Cadre*)
4. Dukungan teknis (*Technical Support*)
5. Pengelolaan sistem (*system Management*)
6. Pembentukan kelompok secara partisipatif
7. Pandampingan langsung
8. Penumbuhan kader lokal
9. Pengembangan kelembagaan komunitas
10. Menjalinkan kerjasama lintas pelaku (multistakeholder)

Sesuai dengan arah program di atas, MM menentukan komponen program lembaga sebagaimana berikut :

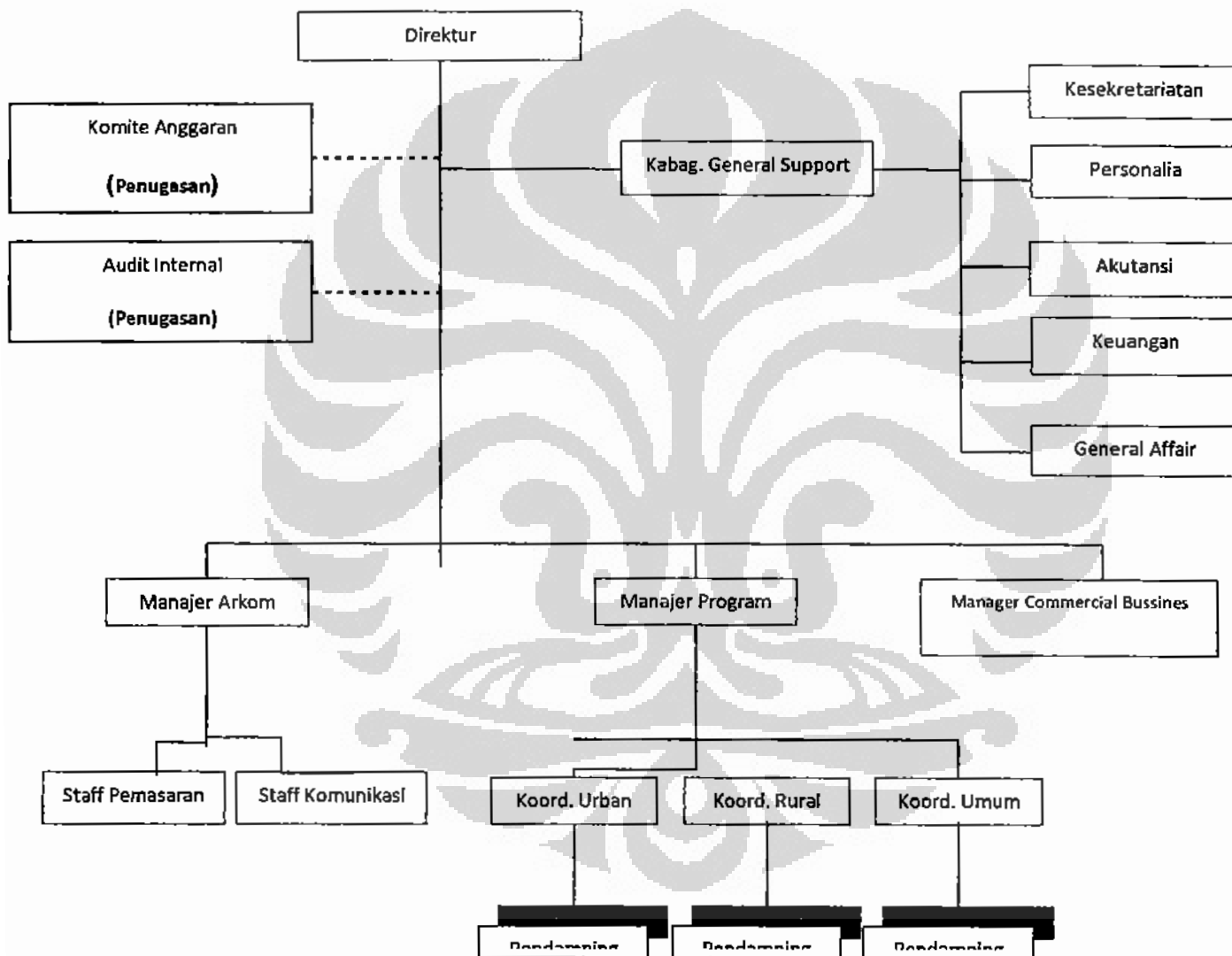
- a. Pembiayaan usaha mikro berbasis kelompok
- b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
- c. Pengembangan kelembagaan komunitas
- d. Pemupukan modal swadaya
- e. Pembangunan jaringan dan sinergi
- f. Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna

Saat ini, MM memiliki program pemberdayaan masyarakat meliputi pedesaan, perkotaan (*urban*), wilayah kantong pekerja migran (*migrant worker*) dengan wilayah diantaranya Sukabumi dan Cianjur, dan wilayah *recovery* akibat bencana alam seperti Aceh, Banggai Kepulauan, Bengkulu, Yogyakarta, Pangandaran dan Kebumen.

Adapun struktur kelembagaan MM dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.

Struktur Masyarakat Mandiri 1429 H/
2008 M



Sumber: MM, 2008

C. Gambaran Umum Program

1. Program PPMK Bina Ekonomi Pemda DKI Jakarta

Program PPMK merupakan salah satu program unggulan yang ditunjuk untuk mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta berdasarkan pasal 9 Pergub DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2007. Program ini dipertanggungjawabkan oleh BPM Propinsi dalam perumusan kebijakan program sesuai pasal 29 dalam Pergub DKI Jakarta nomor 34 tahun 2007. Sementara BPM Kota/kabupaten bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PPMK. Dewan Kelurahan, UPK MK, TPKK dan TPKRW bertanggungjawab terhadap administrasi, keuangan dan fisik pelaksanaan PPMK. Secara organisasi, pada pasal 11, Pergub (pasal 12 – 14) yang sama disebutkan bahwa organisasi PPMK terdiri atas :

- a. Pengarah : terdiri atas tingkat provinsi (gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Kesejahteraan Masyarakat, Bapeda). Sementara tingkat Kotamadya / Kabupaten Administrasi (Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati Kabupaten Administrasi, Sekretaris Kotamadya/ Sekretaris Kabupaten Administrasi, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kotamadya/Asisten Pelayanan Masyarakat kabupaten Administrasi, Bapeko/Bapekab Administrasi.
- b. Pembina : berada pada tingkat BPM Provinsi dan BPM Kotamadya/Kabupaten Administrasi
- c. Pelaksana : terdiri dari Lurah, Dekel, Tim Seleksi Proposal, UPKMK/LKM, TPKK dan TPK RW.
- d. UPM : merupakan mitra BPM dalam melaksanakan pengawasan PPMK ditingkat RW dan Kelurahan:

Penelitian ini akan menganalisa bagaimana program PPMK di Duri Utara sebagai Kategori Pengelola terbaik se – Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dengan SK Gubernur Nomor 1554 Tahun 2007.

Sesuai dengan profil program PPMK Duri Utara (2007) dan Pedoman Pelaksanaan PPMK (2003), secara kelembagaan dan fungsinya, PPMK Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah sebagai kepala administrasi tertinggi di kelurahan bertugas :

- Mensosialisasikan PPMK kepada seluruh lembaga dan lapisan masyarakat
 - Melaksanakan pengawasan terhadap UPK-MK
 - Bersama Dekel menyeleksi usulan masyarakat dan menandatangani Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)
 - Memantau dan mengawasi program serta melaporkan proses perencanaan pencairan dan pelaksanaan PPMK
 - Turut serta menandatangani cek pencairan dana dari Bank DKI
 - Menyelenggarakan musyawarah pertanggung-jawaban Dekel terhadap pelaksanaan PPMK kepada masyarakat dan pemerintah setiap 6 bulan sekali
 - Menggalang partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan SDM lingkungan yang potensial di kelurahan
 - Membuat laporan setiap akhir bulan
- b. Dewan Kelurahan selaku penanggungjawab PPMK yang bertugas :
- Mensosialisasikan PPMK kepada seluruh lembaga dan lapisan masyarakat
 - Menampung usulan masyarakat meliputi ekonomi, fisik dan sosial dari RT melalui RW untuk dikaji
 - Menyusun dan menetapkan prioritas bina ekonomi, bina fisik lingkungan, dan bina sosial untuk dijadikan program kerja PPMK
 - Meneliti dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan, sesuai tahapan pengerjaannya di lapangan
 - Membuka rekening I di Bank DKI untuk menampung dana BLM dan rekening II untuk dana bergulir, tanpa ATM dan tidak boleh dicairkan atas nama perorangan oleh Dekel.
 - Sesuai dengan hasil musyawarah, menyalurkan dana fisik, sosial yang bersifat hibah
 - Bersama TPK RW menggali, mengelola potensi dan meningkatkan partisipasi serta keswadayaan masyarakat (*matching fund*).
 - Memfungsikan UPKMK sebagai institusi pengelola perguliran dana PPMK
 - Membuat laporan PPMK setiap akhir bulan

- c. Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPK-MK) bertugas mengelola keuangan program sebagai berikut :
- Mengelola dana bergulir PPMK
 - Mengadministrasikan dana PPMK
 - Melakukan penagihan cicilan dan guliran PPMK dari masyarakat
 - Memberikan pertanggungjawaban PPMK kepada Dekel di bawah kordinasi Lurah
 - Membuat laporan dana bergulir PPMK setiap akhir bulan dengan sistem komputerisasi
- d. Tim Seleksi bertugas :
- Melakukan bimbingan teknis langsung terhadap penyusunan proposal pada tingkat RW
 - Bersama Dekel mensosialisasikan program pada masyarakat di tingkat kelurahan
 - Melaksanakan seleksi proposal yang disampaikan oleh RW
 - Melaksanakan pemantauan dan membuat laporan kemajuan kegiatan PPMK di tingkat RW setiap akhir bulan.
- e. TPK – RW yang diwakili oleh masing-masing RW di kelurahan setempat yang dipilih dari setiap RW dan diusulkan oleh RT setempat. TPK – RW bertugas :
- Menunjang kelancaran pelaksanaan PPMK
 - Membantu menyusun pengusulan kegiatan masyarakat
 - Menyetorkan segera dana cicilan PPMK dari masyarakat ke UPKMK dan tidak boleh menggulirkan langsung.

Tujuan dari PPMK (BPM DKI Jakarta, 2004) adalah mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat yang berbasis pada komunitas RW
2. Memperbaiki sarana dan prasarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program social lainnya.
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinergikan program bantuan dari pemerintah (*matching fund*)

4. Menyiapkan bantuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dan berbasis pada kelompok usaha kecil.
5. Memanfaatkan dan memberdayakan institusi yang ada di masyarakat, dengan membentuk TPK-RW.

Tujuan tersebut di dasarkan pada lima (5) prinsip-prinsip pengelolaan program. Lima Prinsip PPMK adalah : 1) Demokrasi; 2) Partisipasi; 3) Transparansi; 4) Akuntabilitas; 5) Desentralisasi; 6) Keberlanjutan (Evaluasi PPMK, 2006). Setiap program yang dijalankan dalam PPMK harus menganut prinsip ini.

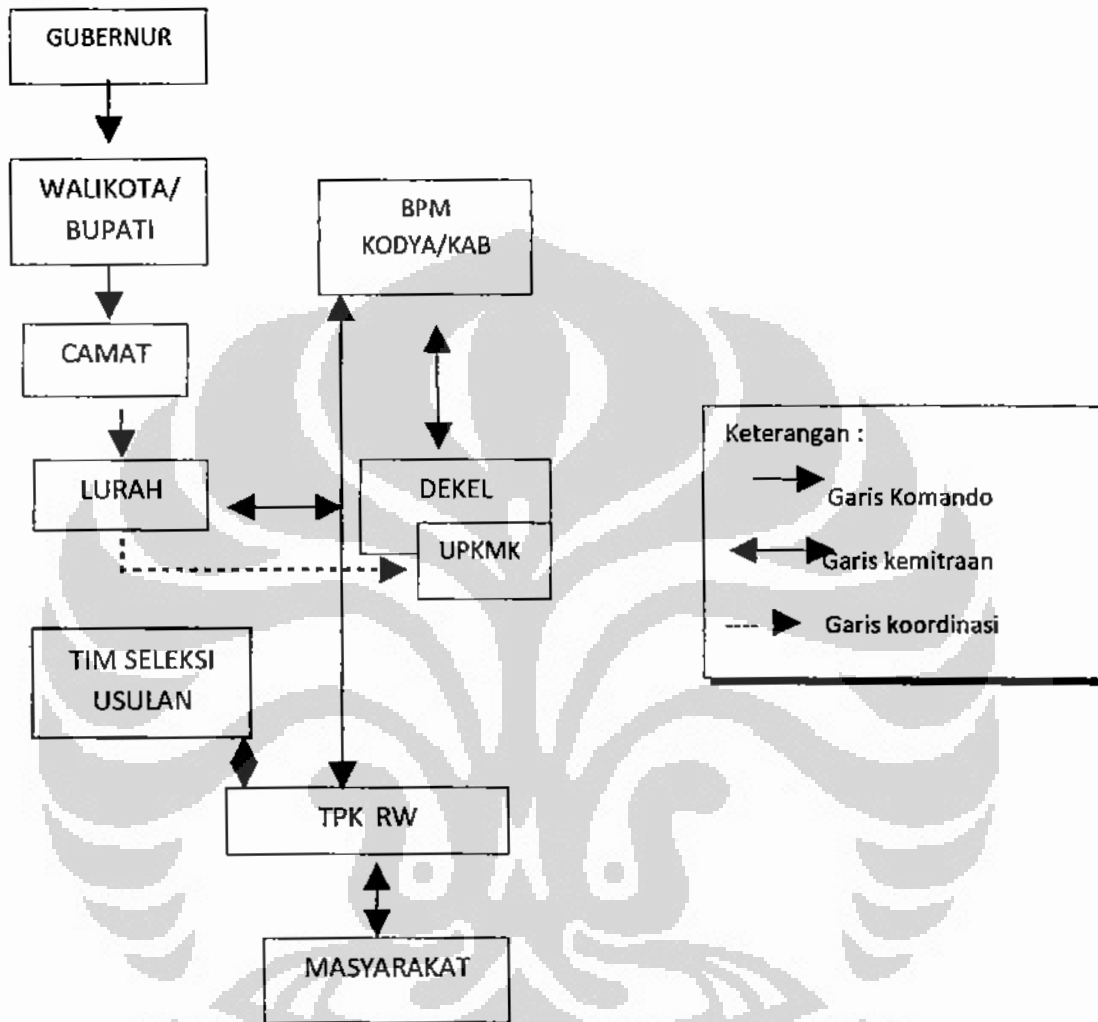
Proses implementasi PPMK adalah sebagai berikut (Panduan PPMK, 2004) :

1. Persiapan penyaluran dana BLM oleh Dewan Kelurahan
 - a. Sosialisasi PPMK kepada masyarakat
 - b. Melakukan identifikasi potensi dan masalah, didampingi oleh LSM/Fasilitator Kelurahan/Perguruan Tinggi (berlaku sejak 2002 sampai 2005)
 - c. Meningkatkan penguatan kelembagaan
 - d. Pembukaan rekening dan pencairan dana di Bank DKI, dilakukan oleh tiga (3) orang yakni Ketua Dekel, Wakil Dekel, dan Lurah
 - e. Membuat dan menyampaikan surat pernyataan pencairan dana kepada Bank DKI
2. Perencanaan pemanfaatan dana
 - a. Masyarakat melalui RT mengajukan usulan rencana kegiatan ekonomi, fisik lingkungan, dan sosial sesuai dengan kebutuhan.
 - b. TPK RW mengajukan usulan dari masyarakat melalui RT ke Tim Seleksi Kelurahan (TSK)
 - c. Tim Seleksi Kelurahan (TSK) melakukan penelitian dan penyusunan kegiatan yang dijadikan sebagai rencana PPMK
3. Pencairan dan penyaluran dana
 - a. Kepala BPM Kotamadya / Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencairkan dana PPMK setelah meneliti dan menyetujui DURK yang disampaikan oleh Dekel ke Rekening I Dekel

- b. Dekel mempersiapkan surat perjanjian pemberian bantuan dana PPMK dan tidak diperkenankan memindahkan dana PPMK ke Bank lain kecuali Bank DKI.
 - c. Dekel harus segera memproses penyaluran dana PPMK kepada masyarakat
 - d. Cek dari Dekel sebelum diserahkan kepada TPK RW, diadministrasikan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK)
 - e. UPKMK menyerahkan cek yang telah dibukukan, kepada TPK RW untuk dicairkan kepada Bank DKI.
4. Perguliran Dana PPMK
- a. UPKMK segera menagih cicilan dana PPMK dari masyarakat.
 - b. Setelah diadministrasikan, dana tersebut digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - c. Membuat tanda bukti cicilan dari masyarakat sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu lembar 1 (satu) untuk yang bersangkutan, lembar 2 (dua) untuk UPKMK, lembar 3 (tiga) untuk Dekel.
 - d. Pengadministrasian pengguliran dana PPMK di setiap tahap dibukukan sendiri-sendiri/terpisah dan jasa pinjaman ditetapkan 1% per bulan sesuai kesepakatan.
 - e. Kepada masyarakat yang mempunyai tunggakan lebih dari 30%, maka dana pinjaman PPMK berikutnya untuk sementara ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
 - f. Pengguliran dana PPMK untuk tahap lanjutan harus dimusyawarahkan dengan Tim Seleksi Usulan

Struktur organisasi PPMK digambarkan pada gambar 3.2.

Gambar 3.2
Struktur Kepengurusan PPMK



Sumber : BPM DKI Jakarta, 2004

2. Program MM untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Program ekonomi produktif di MM lahir sebagai sebuah upaya untuk memberikan penguatan kepada masyarakat miskin melalui program pengembangan ekonomi untuk usaha mikro masyarakat. Awalnya program tersebut hadir di komunitas urban sejak tahun 2006. Karena dana pemberdayaan masyarakat yang digunakan berasal dari zakat, maka masyarakat harus terberdayakan.

Program kredit mikro merupakan adopsi dan modifikasi dari pola *Grameen Bank* (GB) AIM Malaysia. Program di wilayah urban ditujukan di beberapa wilayah di Jabodetabek. Adapun tujuan dari MM dalam program mikro kredit di daerah urban adalah sebagai berikut (MM, 2006 : 4) :

- a. Tujuan Akhir (*Goal*) : Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro makanan jajanan
- b. Tujuan antara (*purpose*) : Peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro makanan jajanan dengan indikator keuntungan harian rata-rata meningkat minimal Rp. 50.000,-

Program ini mengalami modifikasi utamanya dalam pembentukan kader lokal dan pembentukan lembaga lokal seperti koperasi usaha bersama yang ada di Kelurahan Bidara Cina. Koperasi ini dikelola oleh Kader dan masyarakat yang menjadi anggota koperasi, dimana dana guliran dan tabungan masyarakat merupakan dana awal pengembangan koperasi. Kegiatan program di Bidara Cina dan hampir semua program di kawasan urban berlangsung selama 2 tahun. Saat ini, program tengah memasuki masa *exit* atau terminasi program.

Sesuai dengan panduan program pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro makanan jajanan yang dirumuskan oleh MM (MM, 2006 : 11 – 19), tahapan/langkah-langkah implementasi program sebagai berikut :

- a. Tahap pra - persiapan : meliputi 1) kajian kebutuhan (*need assessment*) yaitu kebutuhan menyangkut kebutuhan yang dirasakan pada saat tertentu (*field needs*), kebutuhan nyata (*actual needs*), dan kebutuhan yang dirasakan di waktu mendatang (*anticipated needs*). 2) Hasil *assessment* dirumuskan dalam bentuk perencanaan program yang dibuat dalam bentuk matrik perencanaan program (MPP) pemberdayaan dan pengembangan usaha yang selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran, termasuk perencanaan anggaran operasional, rencana pembiayaan, sumber-sumber pendanaan, langkah-langkah strategis, tahapan pekerjaan teknis, pembagian peran dan tugas, serta kemungkinan sumberdaya dan hambatannya. Juga dibuat perencanaan penyerapan dana sesuai skem pembiayaan dengan mekanisme, prosedur dan administrasi yang dibutuhkan.

- b. Tahap Persiapan : Program mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan di wilayah sasaran. Dalam tahap ini, persiapan yang dilakukan adalah : *blue print* program, pedoman teknis pelaksanaan, sumberdaya manusia, biaya operasional, dana pembiayaan dan lain-lainnya.
- c. Pelaksanaan : untuk tahap ini,terkait dengan dilapangan, perubahan atau pergeseran semua rencana program sangat mungkin terjadi, selama dalam perubahan yang wajar. Jadi kondisi tidak perlu dikuatirkan. Fungsi pendamping sebagai fasilitator dan motivator sangat diperlukan dalam proses ini. Untuk tahap ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 19.
Tahapan Implementasi Program MM di Komunitas Urban

No	FASE PROGRAM	TAHUN		
		2006	2007	2008
1	Perintisan dan Penumbuhan KM (Kelompok Mitra)	6 bulan		
2	Penguatan Kapasitas Individu dan Lembaga Lokal		12 bulan	
3	Pelepasan (Kemandirian Material dan Wadah Kelompok)			6 bulan

Catatan : perintisan program urban mulai bulan Maret 2006

Sumber : Tim MM, 2006

Guna mencapai tujuan, tahapan program perkotaan (urban) didasarkan pada unsur-unsur input, proses aktivitas tertentu, dan output, yang diharapkan mampu mendukung keberhasilan program. Secara garis besar, unsur-unsur input dan aktivitas serta output yang direncanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

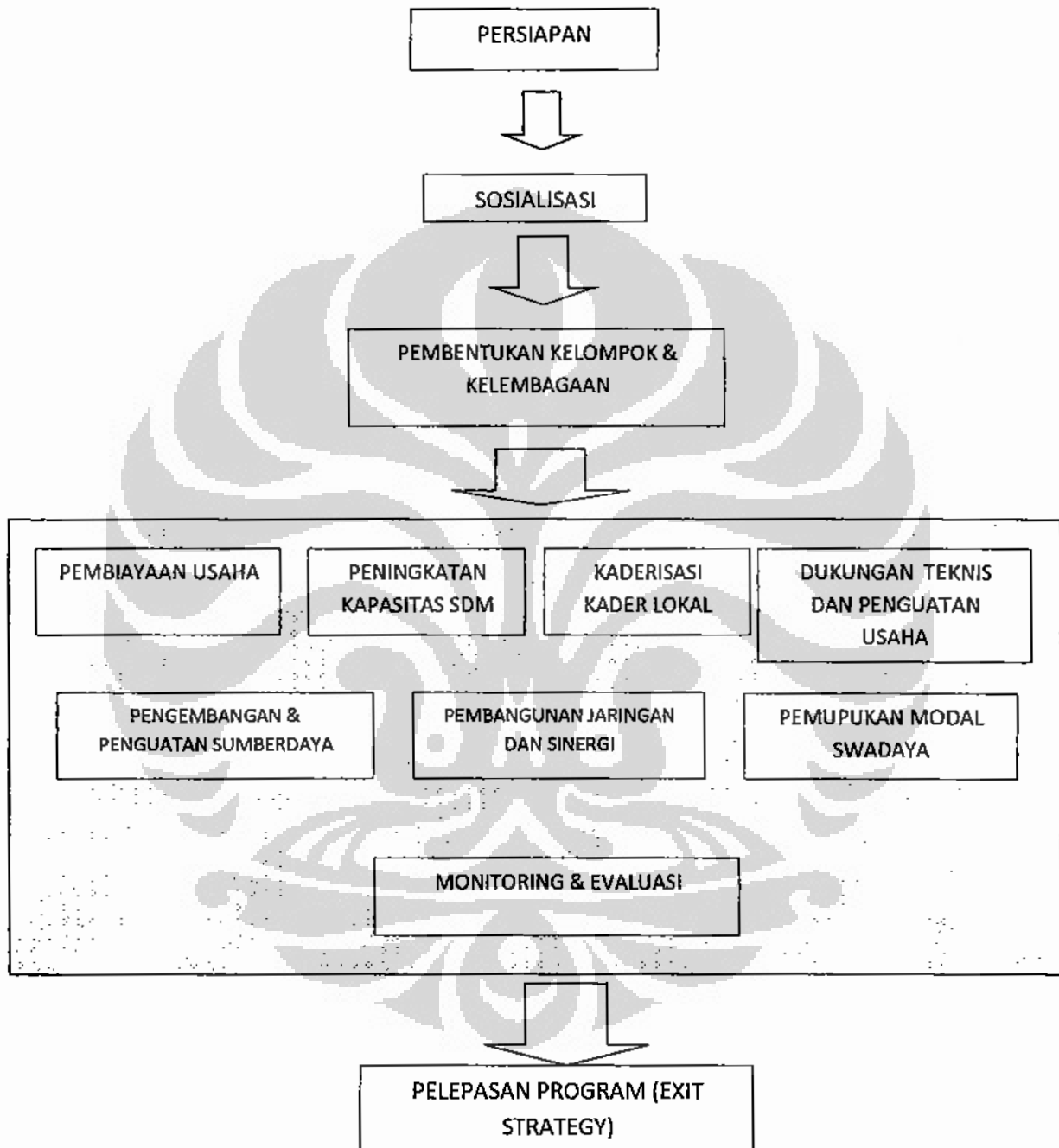
Tabel 20.
Aktivitas Fasilitasi MM pada Masyarakat

INPUT	PROSES	OUTPUT
Aktivitas Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan manajemen dan pengembangan usaha b. Pengembangan turunan / asset produktif 	Peningkatan pendapatan
Kemitraan dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dalam mengupayakan pasar b. Fasilitasi dengan sumber-sumber permodalan 	
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dengan sumber-sumber permodalan b. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna 	
SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Penumbuhan dan penguatan kelompok/kelembagaan b. Pelatihan manajemen keorganisasian dan leadership c. Fasilitasi dengan dinas terkait 	Kemandirian kelompok / kelembagaan

Sumber : Tim MM, 2006

Adapun ringkasan dalam pelaksanaan program MM di wilayah urban adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3
Ringkasan pelaksanaan Program Urban – MM

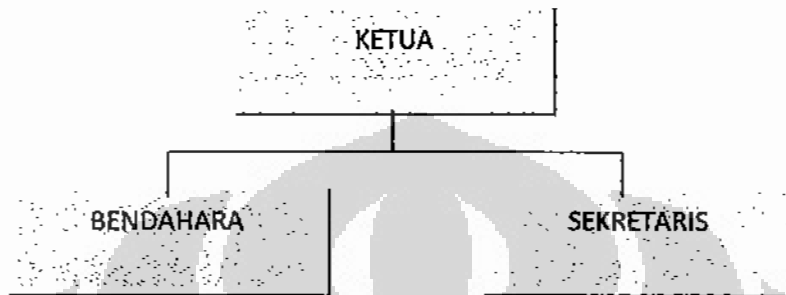


Sumber : MM, 2006

Adapun struktur kelompok pembiayaan Mitra MM (KM) adalah seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.4.

Struktur Organisasi Kelompok Mitra (KM) MM



Sumber : MM, 2006

Dalam kelompok ada pembagian tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut (MM, 2006 : 24–25) :

- a. Ketua KM : 1) mengkoordinasi kegiatan simpan pinjam; 2) melaksanakan pembinaan kelompok dan memelihara keutuhan kelompok dalam pelaksanaan program; 3) mengetahui permasalahan kelompok dan setiap anggota, baik hal-hal yang berhubungan dengan program maupun yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program (misal, masalah pribadi/keluarga yang dapat membantu kegiatan, maka ketua atau mitra lain harus membantu menyelesaikannya); 4) membantu PM dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian dan pelaksanaan kegiatan kelompok; 5) menandatangani Surat Pengajuan Pembiayaan (SPP) setelah disetujui oleh seluruh mitra (KM); 6) penagihan kewajiban anggota; 7) monitoring dan evaluasi berkala pada kegiatan pembuatan makanan jajanan yang halal dan *thoyib*.
- b. Sekretaris/Bendahara : 1) menyelenggarakan administrasi dan keuangan KM; 2) membuat notulen rapat pada setiap pertemuan yang melibatkan KM, sehingga semua informasi dapat diserap oleh anggota; 3) membuat surat permohonan pembiayaan untuk anggota yang mengajukan setelah disetujui oleh mitra KM; 4) mengumpulkan angsuran mitra wajib, infaq dan tabungan

mitra; 5) pembuatan berita acara pembentukan kelompok (kepala desa/lurah, ketua kelompok, saksi, pendamping).

MM memiliki struktur organisasi kelompok mitra dan koordinasi program urban.

- c. mitra; 5) pembuatan berita acara pembentukan kelompok (kepala desa/lurah, ketua kelompok, saksi, pendamping).

Sesuai dengan laporan tahunan MM Januari 2008, kelancaran angsuran anggota juga partisipasi mereka dibagi berdasar 3 kategori tinggi, sedang dan rendah yaitu :

Tabel 21
Tingkat Partisipasi dan Kondisi Angsuran Mitra MM Bidara Cina, 2008

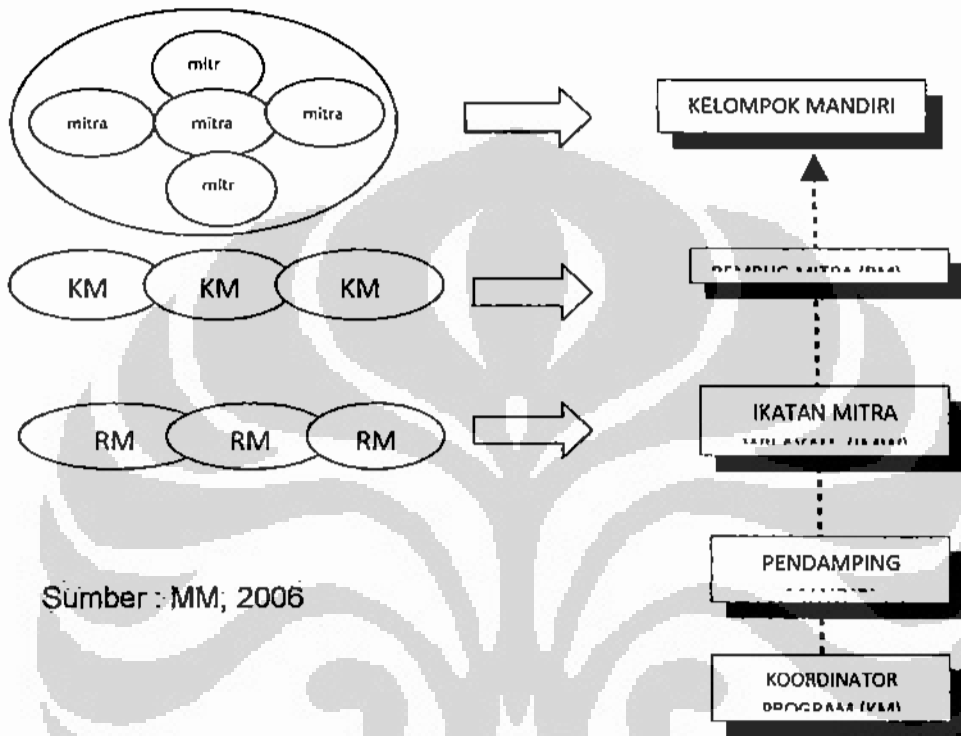
Tingkat Partisipasi	Rata – rata		
	Tinggi > 75 %	Sedang 50 – 75 %	Rendah < 50 %
Kehadiran	28,77	31,22	39,98
Pembayaran Angsuran	27,31	37,86	34,38
Keterlibatan dalam Kelompok	16,96	35,78	47,35
Aktivitas sosial	14,33	47,14	37,99

Sumber : Laporan MM, 2008

MM memiliki struktur organisasi kelompok mitra dan koordinasi program urban. Adapun strukturnya seperti gambar 05 sebagai berikut :

Gambar 3.5

Struktur Organisasi Kelompok Mitra dan Koordinasi Program Urban



Sumber : MM, 2006

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Perbedaan Pelaksanaan Program Dana Bergulir PPMK Pemerintah DKI Jakarta dan MM Melalui Kredit Mikro dalam Pengembangan Ekonomi Produktif bagi Orang Miskin

A.1. Implementasi Program Ekonomi Produktif PPMK Pemerintah DKI Jakarta melalui Kredit Mikro (Study Kasus Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat).

A.1.1. Profil Program PPMK Bina Ekonomi di Kelurahan Duri Utara Jakarta Barat

Program PPMK Bina ekonomi Kelurahan Duri Utara dilaksanakan di seluruh 8 Rukun Warga (RW) dan 93 Rukun Tetangga (RT). Pusat aktivitas PPMK berada di Kantor Dewan Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Tujuan program bina ekonomi ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan ekonomi produktif masyarakat yang berbasis pada usaha kecil.

Jenis usaha yang dibiayai atau dibantu berupa usaha masyarakat seperti warung kelontong, dagang gado-gado, dagang nasi uduk, dagang bakso, perajin bakso, perajin roti, warung kopi (Warkop), dagang makanan dan sejenisnya. Adapun seleksi pemanfaat dilakukan oleh Tim Seleksi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berdomisili di Kelurahan setempat di DKI Jakarta, dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki usaha yang masih berjalan
3. Ukuran usaha dibawah 20 juta ke bawah
4. 30 % dari asset adalah modal sendiri sesuai dengan kelayakan usaha.
5. Tidak tersangkut utang untuk dana usaha dengan pihak lain.

~~(Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Y.S. 2008)~~

Setiap perguliran dana akan ditagih oleh UPKMK melalui TPK RW bina ekonomi untuk diadministrasikan dan digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan dana jasa sebesar 1% perbulan yang dibayar masyarakat sekaligus dengan angsuran perminggu. Setiap TPK-RW akan mengunjungi pemanfaat ke rumah-rumah untuk menagih angsuran. Masyarakat pemanfaat dengan prestasi yang baik mendapatkan *reward* untuk menerima pinjaman lebih besar di tahun anggaran

berikutnya. Sementara yang memiliki masalah angsuran, akan ditunda perolehan kredit barunya sampai pembayaran lunas. Setiap cicilan dibuktikan dalam tanda bukti sebanyak 3 lembar (lembar 1 untuk bersangkutan, lembar 2 untuk UPKMK, dan lembar 3 untuk Dekel). Dana PPMK diperoleh dari APBD DKI Jakarta dan jumlah disesuaikan dengan kemampuan APBD (BPM, 2003). Jumlah dana yang digulirkan minimal Rp. 500.000,- sampai Rp. 20.000.000,-. Total dana yang digulirkan sejak tahun 2002 adalah Rp. 2.179.630.149,- dengan total jumlah pemanfaat 1.282 orang. Untuk tahun 2007 pemanfaat berjumlah 482.500.000,- dengan jumlah pemanfaat 174 orang, tingkat kemacetan sebesar 11%.

A.1.2. Latar Belakang Kebijakan dan Program Ekonomi Produktif di DKI Jakarta melalui Intervensi Kredit Mikro Program PPMK

Program PPMK merupakan salah satu program untuk pengembangan ekonomi produktif dan merupakan program unggulan Pemerintah DKI Jakarta yang tersebar diseluruh kelurahan yang ada di lima (5) Kota dan satu (1) Kabupaten. Menurut hasil wawancara dengan salah satu informan dari Staff program di BPM DKI Jakarta bahwa program ini muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997. Sifat program berjalan secara *bottom-up* dan berbeda dengan program - program sebelumnya seperti PDM-DKE (program dalam Mengatasi Krisis Ekonomi) dan P2KP. Sesuai dengan kutipan wawancara Bapak AR sebagai berikut :

" PPMK lahir karena perubahan perencanaan secara bottom up dari top down, karena dulu semua program dari pusat. Masyarakat tidak tahu tentang kebutuhan program, jadi tidak nyambung antara kebutuhan masyarakat dari atas. Keluhan masyarakat, banyak usaha-usaha dari bawah tidak diakomodir. Jika 2 tahun usul, belum tentu terlaksana secepatnya. Dengan adanya PPMK, mereka merencanakan sendiri melalui Musrembang yang dihadiri oleh LPMD, Dekel, unsur representasi dari kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (tomas), RT, dan RW. " (April, 2008)

Lahirnya PPMK sebagai upaya pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam ikut merencanakan program sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Sekian lama, perencanaan program dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena system perumusannya ada di tingkat pusat. Merespon persoalan tersebut, maka Pemda DKI Jakarta membuat sebuah kebijakan pemberdayaan melalui

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK dalam Rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Propinsi DKI Jakarta tahun 2003 – 2007 dan telah diadakan perubahan pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 1747/2003 untuk penyempurnaan. Program diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta yang membahas tata cara dan pedoman pelaksanaan program.

Kebijakan tersebut tidak dikatakan secara eksplisit sebagai suatu aturan yang mengatakan secara jelas bahwa program tersebut merupakan salah satu bentuk ekonomi produktif untuk orang miskin. Pada praktiknya, program tersebut merupakan turunan dari usaha ekonomi produktif yang diberikan pihak pemerintah DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh masyarakat secara luas, juga dimanfaatkan oleh kaum miskin perkotaan.

A.1.3. Tujuan, Prinsip dan Sasaran Program

Dalam program PPMK memiliki tujuan-tujuan untuk ketercapaian program secara lebih baik. Adapun tujuan program sesuai hasil wawancara dengan Bapak YS sebagai berikut :

"Saya melihat bahwa PPMK merupakan program unggulan dari Pemda DKI untuk mensejahterakan masyarakat kecil untuk menambah pendapatan mereka untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta . Adanya program bisa diterima oleh masyarakat umum utamanya masyarakat kecil....."(April, 2008)

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa program PPMK bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kecil melalui peningkatan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Prinsip program adalah musyawarah, partisipasi sesuai dengan wawancara dengan Bapak AR sebagai berikut :

"Prinsipnya musyawarah, semua bisa aja mengikuti dinamika masyarakat. Kredibilitas dituntut untuk menciptakan syarat-syarat yang penting dapat melibatkan potensi masyarakat. Dana stimulant untuk menggali potensi masyarakat dengan modal yang ada." (April, 2008)

Sebagai program yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan, maka Pemda mengacu pada definisi dan indikator yang dimiliki oleh BPS. Secara menyeluruh, indikator kemiskinan menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh BPS yaitu kemiskinan adalah bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Hal ini dikarenakan, secara struktural, Pemda DKI Jakarta mengindikasikan kepada BPS sebagai pusat informasi dan data dalam pembangunan di Indonesia termasuk di daerah. Indikator yang dikembangkan masih pada taraf konsumsi kalori sebesar 2.100 kalori per kapita. Ukuran lain belum dikembangkan menyangkut akses dan berbagai kebutuhan lain yang bukan sekedar diukur dari kebutuhan kalori/makanan saja. Pemerintah perlu mengembangkan indikator lain yang dapat makin memperjelas kriteria kemiskinan masyarakatnya, misalnya dengan mengadopsi berbagai indikator yang diterapkan banyak LSM, sehingga pengukuran kemiskinan dan peruntukan programnya dapat lebih berhasil guna sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Kriteria kelompok sasaran untuk menerima program PPMK adalah sebagai berikut : 1) Punya KTP wilayah setempat, 2) berdomisili di wilayah bersangkutan, 3) ukuran usaha dibawah 20 juta ke bawah, 4) 30 % modal sendiri sesuai dengan kelayakan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Kelurahan Bapak YS sebagai berikut :

"Penerima manfaat mesti punya KTP, domisili dan punya usaha. Usaha bisa diluar wilayah. Ukuran usaha maksimal Rp.20.000.000,- kebawah, untuk Rp.20.000.000,- ke atas belum bisa kami melayani karena program untuk usaha kecil. Kriteria lain dari peminat adalah punya modal /invest untuk pengembangan usaha /menambah modal. Ada masyarakat yang teriak karena tanpa modal mereka ga bisa berusaha. Sesuai dengan SK Gubernur 1747 – tujuan dari PPMK bina ekonomi adalah untuk mengembangkan usaha untuk tambah modal, ada kelayakan pinjaman ditentukan oleh tim seleksi. Jadi 30 % dari keuntungan pokok itulah kelayakan – baru diberi pinjaman (dana awal sebelum diberikan pinjaman). Kelayakan minimal 30 % dari laba bersih disurvey oleh tim survey. Saya maunya yang punya KTP, domisili disini, minimal, 2 tahun di wilayah tersebut. Ini kan program pemda untuk mengentaskan kemiskinan di DKI. Jadi harus jeli, karena KTP bisa aja nembak." (April, 2008)

Pernyataan ini diperkuat oleh Staff BPM Provinsi Selaku Pembina program PPMK Bapak AR :

"Kelayakan diajukan kepada tim seleksi, dengan minimal asset calon pemanfaat sebesar 30% dari pembiayaan pokok. Karakter juga penting untuk jadi pertimbangan. TPK RW dan dewan juri akan mempertimbangkan hal tersebut secara musyawarah." (April, 2008).

Kelayakan usaha, karakter, minimal asset 30% dari pembiayaan pokok merupakan pertimbangan yang penting untuk menjadi pemanfaat PPMK.

Aspek lain juga menjadi pertimbangan penilaian dari tim seleksi. Masalah kepribadian dan karakter calon pemanfaat juga sangat penting untuk menjamin kelancaran usaha dan pengembalian pinjaman ke petugas PPMK. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak YS sebagaimana pernyataan beliau di bawah ini :

"Nanti juga kita tanya dari sisi karakter orang biar lebih obyektif. Disini ada perwakilan masyarakat dari pihak dewan juri seperti dari tingkat RW, kita minta masukan dari TPK RW, gimana orangnya, bisa ga diberikan, bagaimana karakternya" (April, 2008).

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan program adalah kekeluargaan. Para petugas PPMK dapat melakukan tugas melalui sosialisasi di kelurahan dengan mengundang pihak- pihak yang menjadi perwakilan masyarakat seperti RT, RW, Toga dan Tomas, Pemuda dan lain-lain. Jadi semua anggota masyarakat yang terlibat merupakan pemanfaat dari program PPMK, aspek karakter juga penting untuk dilihat sebagaimana ditegaskan kembali oleh Bapak YS :

"Disini punya perwakilan TPK RW – tim pelaksana kegiatan wilayah di tingkat RW, dia tau sehari-harinya juga bagaimana sebenarnya. Jadi saya ga Cuma terima bahasa dari calon pemanfaat aja" (April, 2008).

Hal tersebut diperkuat oleh salah satu pelaksana TPK RW Bapak DE yaitu :

"Jika di PPMK tidak ada kelompok, semua lewat TPK RW, karena masing-masing RW punya TPK. Di warga masyarakat RW 02 tempat saya, dia usaha dan ingin membangun usaha, itu saya samperin, saya tanya jawab, saya jelaskan, bahwa kitanya ada program PPMK, kita bisa bantu modal ibu, yang penting bisa mengembalikannya." (April, 2008).

Dari penjelasan Bapak DE bahwa program juga disosialisasikan melalui hubungan langsung pihak perwakilan RW (TPK RW) kepada sasaran baik secara *door to door*, maupun diskusi keseharian karena tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain.

A.1.4. Konsep Ekonomi Produktif dan *Community Development*

Konsep ekonomi produktif menurut pemerintah, diwakili oleh pendapat Bapak YS adalah sebagai berikut :

"Usaha ekonomi produktif adalah usaha yang masih berjalan, lancar, pinjam dana PPMK bukan untuk beli kulkas, tivi. Besok ngembaliin gimana. Jadi harus benar-benar dibelanjakan untuk usaha. Survey dulu, jadi pinjam dikasi pengarahannya dulu tentang makna pinjaman PPMK dari Pak Lurah, supaya digunakan untuk usaha, jangan untuk bayar sekolah, dan lain-lain. Untuk bantu usaha yang produktif dan berjalan. Kita juga ga seperti itu, ketika usaha pemanfaat bangkrut, kita analisa kenapa usaha bangkrut, ada sisa pinjaman, tapi bangkrut. Kita telusuri lagi kenapa bangkrut. Misal salah manajemennya, kita bantu lagi supaya bangun lagi, jalan lagi. Begitu bangkrut, ga langsung kita tinggal begitu aja. Jangan bangkrut akal-akalan." (April, 2008).

Konsep *community development* menurut pemerintah dalam konteks program PPMK adalah sesuai dengan pernyataan Bapak MK, salah satu pejabat struktural di BPM :

"Memberikan otonomi kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan diri dan lingkungannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka." (April, 2008).

Teknik yang diterapkan dalam program ekonomi produktif bagi orang miskin adalah model rekrutmen formal seperti yang telah disebutkan di atas, sekaligus *crosscheck* dengan survey dan permintaan pendapat dari perwakilan masing-masing calon anggota. Juga diterapkan kelayakan penerima manfaat berdasarkan isian proposal dan survey usaha yang dilakukan oleh tim seleksi program. Contoh format kelayakan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran. Sesuai dengan pernyataan Bapak YS :

"Ada kelayakan pinjaman ditentukan oleh tim seleksi. Jadi 30 % dari keuntungan pokok itulah kelayakan-baru diberi pinjaman (dana awal sebelum diberikan pinjaman). Kelayakan adalah minimal 30 % dari laba bersih disurvey oleh tim survey. 30% dari laba bersih ini maksimum angsuran, perbulan/perminggu tergantung kesepakatan masyarakat, ini baru dari hasil tim seleksi dan juga akan

dirapatkan lagi pada rapat pleno, ada dewan juri. Itu dari sisi usaha; nanti juga kita tanya dari sisi karakter orang biar lebih obyektif.” (April, 2008).

Pernyataan beliau dilanjutkan sebagai berikut :

“Untuk kroscek, TPK RW yang melaksanakan, jadi kita bisa dapat masukan dari hasil usaha juga, banyak masalah ga, punya pinjaman tempat lain ga, semuanya akan mempengaruhi angsuran nantinya. Atau dia pernah dapat kesempatan mendapatkan pinjaman, banyak kan disini ada BKM, P2KP, jangan sampai dobel. Kalau memang sudah dapat, ya udah lanjutin P2KP, jangan dikita (PPMK). Jadi kita tujuannya bukan untuk membebani supaya tambah lancarnya.” (April, 2008)

A.1.5. Peraturan tentang Pola Alokasi Dana Bina Ekonomi untuk Kredit Mikro

Lembaga yang melaksanakan program ekonomi produktif adalah BPM Propinsi DKI Jakarta selaku Pembina dan pengarah program, dibantu dengan BPM Kota/Kabupaten di wilayah mereka masing-masing dan diteruskan di tingkat Kecamatan lalu di tingkat kelurahan oleh Dewan Kelurahan (Dekel) atau Tim Pelaksanan Kegiatan Kelurahan (TPKK), Unit Pelayanan Kegiatan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) dan TPK RW. Alokasi dana program menurut Bapak YS adalah :

“Dana 60 % untuk Bina Ekonomi. sampai sekarang total guliran kalau 2007 aja sih, cuma Rp. 591.000.000,-. Total seluruhnya yang bergulir di masyarakat sudah Rp. 2.176.000.000,- dari tahun 2002 – 2007. Dana dikembalikan dekel ke bank DKI. Pencairan pun pake bank DKI. Kita ga suka tunai, semua melalui bank DKI. Disini juga bisa meringankan administrasinya.” (April, 2008).

Sesuai hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak YS, alokasi dana untuk bina ekonomi sebesar 60% dari dana program PPMK yang dianggarkan setiap tahun. Jumlah dana yang digulirkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 591.000.000,-. Seluruh transaksi keuangan dari kelurahan dilakukan melalui cek melalui Bank DKI agar lebih aman dan secara administrasi lebih ringan biayanya.

A.1.6. Langkah-langkah Implementasi Program PPMK di Lapangan

Secara sistematis, diperlukan langkah-langkah pelaksanaan program hingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh program. Langkah-langkah implementasi program berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Pihak Dekel mengundang para pemuka masyarakat seperti Lurah, RW, RT dan tokoh masyarakat, agama, pemuda untuk hadir pada acara sosialisasi PPMK.
2. Sosialisasi di tingkat RW dan RT oleh RW dan RT setempat
3. Rekrutmen calon pemanfaat melalui rumah-rumah warga oleh TPK RW (TPK RW dipilih di tingkat RW)
4. Pengusulan proposal oleh calon pemanfaat dibantu oleh TPK RW dan atas persetujuan RT
5. Pemasukan proposal ke Dekel selaku penanggungjawab PPMK
6. Penyeleksian proposal oleh tim seleksi
7. Survey lapangan untuk kelayakan usaha oleh tim seleksi
8. Revisi proposal bagi yang perlu direvisi oleh pemanfaat (beberapa TPK RW rapat lagi untuk membantu proses penentuan pemanfaat di wilayah mereka masing-masing).
9. Penentuan pemanfaat sesuai kelayakan proposal
10. Rapat penentuan angsuran bersama pemanfaat dan pelaksana PPMK di kelurahan
11. Perguliran dana disaksikan oleh Dekel wilayah masing-masing dan RW dan diserahkan oleh TPK RW ke pemanfaat
12. Penagihan angsuran oleh TPK RW melalui kunjungan ke pemanfaat masing-masing dalam setiap minggu.
13. Penyetoran angsuran ke UPK MK oleh TPK RW
14. Penyerahan ke Bank DKI
15. Pelaporan Bulanan oleh TPKK ke Kodya, dari Kodya ke Pemda DKI

(Disarikan dari hasil wawancara dengan berbagai sumber dari pihak PPMK Duri Utara, 2008)

Sebagaimana pernyataan Bapak DE selaku TPK RW sebagai berikut :

"Pemanfaat buat proposal ada di TPK RW, diminta, fotokopi, diisi, kembalikan lagi ke TPK RW. Tanda tangan ketua TPK-nya. Setelah selesai – serahin ke Dekel. Nanti kita susun peminjam baru, kita undang tim seleksi supaya turun ke wilayah survey lokasi tempat tinggal mereka yang usulin. Jadi TPK RW menerima usulan aja. Pengembalian uang ke TPK RW – lalu TPK RW menyetor ke UPKMK. Jadi TPK RW setiap minggu ke rumah-rumah." (April, 2008).

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak MN :

".....Kalo jual uduk, pinjam Rp. 5.000.000,-, kan ga mungkin bisa ngembalikanya. Disesuaikan dengan kebutuhan dia, jadi dari RW ini, ada berapa yang usulkan, sebelum dana turun, proposal naik - dari dewan ada tim survey - turun tim, tugas saya mengantarkan. Mana masyarakatnya, ini usahanya. Dia dialog, jadi jika dia mau ajuin Rp.5.000.000,-, kelayakannya dari tim survey itu. Berapa sih layakanya, didiskusikan oleh kelurahan ini untuk warga masyarakat, itu sesuai dengan usaha yang mereka miliki. Itu setelah tim survey, ya. Tim saya mungkin disini rapat lagi . trus kalo masalah pencairannya, mungkin masing-masing TPK , tuh tiap daerah ditingkat RW masing-masing. Tapi TPK ga pake uang cash dari dewan. Sesuai dengan usulan yang distujui, misal dari 20 orang, yang distujui 50juta, itukan untuk 8 TPK, itu diserahkan oleh masyarakat, disaksikan oleh ketua RW, dan dewan wilayah masing-masing." (April, 2008).

Implementasi program PPMK untuk bina ekonomi di lapangan dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaksana TPKK yang ada di tingkat kelurahan. Proses implementasi disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program PPMK dan kebutuhan lokal. Menariknya, beberapa kreatifitas yang dilakukan oleh pihak pelaksana program seperti penjaminan dan asuransi cukup membantu dalam mengurangi kemacetan dan masalah dengan pihak pemanfaat. Berikut kutipan wawancaranya dari Bapak YS :

"Ada asuransi bumiputera juga untuk yang meninggal, agar ahli waris ga dibebani. Masing-masing ada polis asuransi, jika 1 atau 2 bulan meninggal, langsung klaim di asuransi. Ahli waris susah, jadi klaim di asuransi. Jika pinjaman 1 juta, meskipun sudah dilunasi Rp. 200.000,-, maka tetap dibayar Rp. 1.000.000,- oleh asuransi. Rp. 200.000,- dikembalikan untuk ahli waris. Saya ada beberapa cara untuk menyelamatkan ini, agar uang aman, itu aja. Jadi dalam pelaksanaan ini, perlu diselamatkan juga. Langkah-langkah dibuat sendiri gimana bisa diterima oleh masyarakat."

Tentang penjaminan, dilanjutkan lagi oleh Bapak YS :

"Ada juga penjaminan, untuk menyelamatkan dana, jadi kalo suaminya yang pinjam, istrinya yang jamin, begitu juga sebaliknya. Atau anggota keluarganya yang lain juga bisa."

Dilanjutkan lagi oleh Bapak YS :

"Ada juga surat pernyataan penjamin, jika macet maka akan diminta ke penjamin. Ga ada di SK 1747, tapi kami inisiatif, kita tanya kesanggupan mereka. Kebijakan sendiri agar uang selamat." (April, 2008).

Disiapkan *form* penjaminan untuk memastikan dana dapat dikontrol oleh keluarga dalam penggunaannya serta pengembaliannya. Lainnya seperti form analisa kelayakan juga merupakan kreatifitas pihak pelaksana PPMK kelurahan ini yang akan di bahas pada perumusan kebutuhan sasaran pada sub bab berikut.

A.1.7. Perumusan Kebutuhan Sasaran

Perumusan kebutuhan sasaran dilakukan berdasarkan masukan dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Untuk penggunaan dana tergantung pada form isian masyarakat yang disiapkan tim PPMK yang disebut sebagai "Kelayakan" seperti pada lampiran. Hal ini difakukan atas inisiatif dari pihak Dekel yang merupakan pelaksana program di kelurahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak YS :

"Ada, kami punya form untuk dianalisa. Modal kerja berapa, buka usaha berapa, yang sederhana, jadi jelas alokasi berapa aja." (April, 2008).

Dalam proses assessment kelompok sasaran (pemanfaat) harus memenuhi kriteria tersebut guna bisa mengakses dana guliran dari PPMK. Jaminan usaha seperti modal awal 30%, asuransi dan penjamin lainnya seperti karakter, sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan program. Format kelayakan terlampir.

A.1.8. Jenis Pendekatan dan partisipasi Masyarakat

Pendekatan yang dibangun dalam mensosialisasikan program dikatakan secara partisipatif yang pada hakekatnya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, baik dalam bentuk pemikiran maupun finansial sebagaimana konsep *community development* yang dijelaskan Bapak MK. Sementara dalam partisipasi, persepsi Bapak YS selaku Pelaksana program PPMK adalah :

"Partisipasi dalam konteks PPMK adalah kebijakan Pemda. Ya, mesti partisipasi untuk membantu program PPMK sebagai program unggulan – dengan partisipasi ini, kita menyalurkan sendiri ke masyarakat sesuai aturan, karena tujuannya untuk membantu masyarakat kecil, agar masyarakat sejahtera, dengan menambah penghasilan." (April, 2008).

Peran serta masyarakat dalam program cukup besar, sebagaimana pernyataan ibu YT, sebagai salah satu pemanfaat program :

"Tetangga sudah pada tau dan juga pada minjam. Semua pada minjam, laki atau perempuan. Jadi, kita sama-sama minjam. Senanglah, karena lurah sudah membantu. Uang jasa itu (PPMK) kecil. Daripada minjam tempat lain, banyak. Kita mikirlah bu. Kita ga mau." (April, 2008).

Hal ini dikuatkan oleh Ibu YN :

"Kita semua tahu jika ada program PPMK. Jadi disini hampir semua ikutan minjam dana dari PPMK." (April, 2008).

Partisipasi masyarakat tergolong cukup besar, dimana hampir semua warga tahu tentang adanya guliran dana dari PPMK. Kemungkinan juga karena program ini telah lama berjalan sejak tahun 2002 di kelurahan ini. Jadi pihak pelaksana PPMK tidak terlalu kesulitan dalam mensosialisasikan program.

A.1.9. Jumlah Modal, Jenis Usaha dan Lama Pinjaman

Sehubungan dengan program, sistem peminjaman yang diterapkan dilapangan dalam membiayai usaha kelompok sasaran dapat dilihat berdasarkan :

- a) Jumlah modal yang digulirkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 482.500.000,- dengan jumlah pemanfaat sebesar 174 orang (Laporan PPMK Duri Utara, 2007). Informasi dari Bapak YS :

"Orang yang menerima tergolong tetap, sejak 2003. Dari pinjaman kecil sampe besar. Pertama minjam Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Itupun kembali kepada usaha mereka. Kita punya satu asumsi kelayakan dia melalui tim survey bagaimana. Bisa dilihat oleh tim survey dia punya modal usaha, dan tempat usaha, lalu dia pinjamannya sekian, kelihatan disitu kan. Kalo memang dia dasarnya nasi uduk, kan bisa kita survey, jadi tim kita sendiri ada." (April, 2008).

- b) Jenis usaha yang dibiayai terutama usaha kecil dan mikro seperti warung kelontong, perajin roti, pedagang bakso, konveksi, pedagang warteg, pedagang nasi uduk, pedagang voucher dan sejenisnya. Beberapa yang telah diwawancarai berusaha mikro seperti warung kelontong (Ibu YT), Uduk (Ibu SM), Produksi Roti (SDR), jajanan gorengan (Ibu DM), Jualan Gado-gado (Ibu AS) dan beberapa yang lainnya seperti kreditan (AT) dan salon juga hidran air (WK).

c) Lama program dijalankan setiap tahun anggaran yaitu selama satu (1) tahun, dimana pencairan dana dapat dilakukan setiap 3 bulan. Jadi pengusulan anggaran pinjaman dari pemanfaat dapat dilakukan mengikuti proses pencairan tersebut setiap 3 bulan. Seperti yang dikatakan Bapak YS :

"Pencairan dilakukan 3 bulan sekali. Ada pencairan November, trus ada yang usulan masuk Desember, tentu dia kan nunggu lama; Desember – Januari kan lama. Sebetulnya ga lama juga; ada yang nunggu seminggu, sebulan. Kan kita tumpuk disini, kalo sudah mau pencairan, ini ada yang Desember, dan sebagainya. 3 bulan kemudian baru dianalisa lagi.kalo udah mau pencairan - kita undang langsung, memakai form penilaian." (April, 2008).

Untuk setiap angsuran, diperoleh dana jasa 1% dari setiap pinjaman. Total pendapatan dari dana jasa sebesar 12% per setiap pinjaman. Adapun formula angsuran dari pinjaman PPMK sebagai berikut :

$$\text{Angsuran Per bulan} = \frac{\text{Pinjaman} + \text{Jasa}}{\text{Angsuran}}$$
$$\text{Jasa Flat} = 1\% \times 12 \text{ bulan}$$
$$= 12\%$$

"Jasa 1% untuk operasional sehari-hari, untuk ATK, telpon, Dekel seharusnya difasilitasi oleh Kelurahan sesuai dengan Perda, tapi kita disini sebetulnya mandiri. Misal telpon bayar sendiri, staff bayar sendiri, karna terpisah sama gedung kelurahan." (April, 2008).

A.1.10. Pendampingan

Pendampingan program dilakukan oleh TPK RW yang berdomisili di lingkungan RW setempat. Tidak ada kriteria formal dalam pemilihan TPK RW karena mereka merupakan perwakilan dari RW masing-masing. Berikut kutipan wawancaranya dengan Bapak YS selaku pemberi SK untuk TPK RW :

"Ada. TPK RW dari Usulan RW, ga ada kriteria formal. Jadi TPK RW yang usulin dari RW, tokoh masyarakat. Jadi ada 4 orang yang diusulin yaitu ketua TPK RW, Sosial, fisik, dan ekonomi sesuai tribina. Dari usulan kita buat SK, yang buat

SK adalah Dekel. Karena disini ada 8 RW maka : $8 \times 4 \text{ RW} = 38$ orang TPK RW di kelurahan ini. Dewan unit ada dewan kelurahan perwakilan dari RW, Jadi ada 8 RW. Yang pilih masyarakat, jadi ga langsung terpilih dari RW. Jadi dari masyarakat lalu jadi dewan RW adakan pemilihan tingkat RT - baru tingkat RW - baru kelurahan. Dewan unit. Jadi mirip dekel. Untuk Dekel, ketika duduk di kelurahan, jika pulang ke RW jadi perwakilan RW-nya. Bermitra dengan RW, jika dikelurahan dengan Kelurahan" (April, 2008).

Proses pendampingan yang disebutkan oleh para TPK RW dan pelaksana lainnya dilakukan setiap hari oleh para TPK RW, karena tempat tinggal yang berdekatan sehingga mudah menjangkau para pemanfaat/sasaran program. Demikian kutipan wawancara dengan bapak DE selaku TPK RW :

"Pendampingan dilakukan setiap hari. Saya sebagai orang RW 02, jadi banyak tau tentang karakter orang RW 02. Ada yang minta bulanan, tapi cicilan kita mingguan. Yang bulanan paling 1 - 2 orang. Jadi tiap minggu setiap TPK muter, jemput bola." (April, 2008).

Dilanjutkan lagi oleh Bapak MN :

"Jika ada pencairan, kita mengundang mereka, bagaimana pengembalianya. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat kita, ya terus terang aja di wilayah kami, mengatakan puas. Pada masyarakat kita katakan ini bukan dana hibah. Oleh karena itu, jika mereka tidak mengembalikan, maka yang lain tidak dapat memanfaatkan. Dalam setiap kita ada rencana program, kita undang seluruh masyarakat, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat untuk menerima dana baru, kalau dana bisa kita serap, itupun manfaatnya untuk mereka. Kalaupun kita ga bisa serap, yah kita alihkan bagaimana caranya. Jadi ada cambuk-cambuk dari mereka sendiri sebagai kontrol. Jadi peranan mereka sendiri seperti apa, masyarakat mengurus wilayah, dewan wilayah, semuanya kita jadi satu, dalam arti kita menjembatani supaya roda kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan partisipasi mereka sendiri." (April, 2008).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak YS selaku Ketua Dekel sebagai berikut :

"Pendampingan setiap saat bahkan. Masing-masing dewan unitnya ada monitoring wilayahnya masing-masing. Kita ada rapat pleno sebulan sekali untuk minta pendapat. Iya, kita turun giliran, kita kan disini, mungkin ga saya, saya ada perwakilan dewan wilayah/RW, ini dana digunakan untuk usaha atau untuk konsumtif ya. Itu slalu kita cek, kesehariannya kita adakan juga pendekatan, biar ada kekeluarganya biar bisa kita bahas masalah, bagaimana perkembangan usaha, malah kita adakan pembinaan manajemen usaha, karena kebanyakan masyarakat belum tahu manajemen usaha untuk pemanfaat. Jika ada program

kita undang, bagaimana cara manajemen usaha, uang. Jika cuma bisa bantu, tanpa ada pembinaan & arahan juga, kan jadi dia ga ngerti. Namanya juga usaha kecil dagang, uang usaha, uang rumah campur aduk gitu.kita udah arahkan seperti itu.” (April, 2008).

A.1.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Program

A.1.11.1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program :

a) Dari pemerintah

Sesuai keterangan Bapak YS, pemerintah daerah sudah mendukung program PPMK melalui berbagai peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Gubernur. PPMK merupakan salah satu program unggulan Pemda. Demikian kutipan wawancaranya :

“.....Sesuai dengan SK Gubernur 1747 – tujuan dari PPMK bina ekonomi adalah untuk mengembangkan usaha untuk tambah modal.....”(April, 2008).

Program memiliki petunjuk pelaksanaan melalui peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2007 yang sebelum direvisi dalam bentuk SK Gubernur 1747. Beberapa peraturan dan keputusan gubernur sangat membantu kelancaran program, menjadikan aparat patuh pada peraturan yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan program, dengan mematuhi rambu-rambu pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan pihak pemerintah daerah.

b) Dari pihak pelaksana program

Pihak pelaksana program yang terdiri dari Lurah, Dewan Kelurahan selaku penanggungjawab program, Tim Seleksi Proposal, UPKMK / LKM, TPKK dan TPK RW merupakan kesatuan tim yang saling menunjang keberhasilan program. Beberapa kreatifitas pihak pelaksana seperti asuransi dan penjamin sebagai jaminan pemanfaat untuk mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan diterapkan oleh pihak pelaksana program dapat dilihat

pada sub bab sebelumnya. Dana yang diterima tidak dalam bentuk cash untuk menghindari penyimpangan anggaran. Komentar Bapak YS :

".....Pencairan pun pake bank DKI. Kita ga suka tunai, semua melalui bank DKI..... "(April, 2008).

Tentang pendampingan, pendapat yang dikemukakan dari Bapak YS :

".....Kerjasama TPK RW – DEKEL – UPKMK dan masyarakat yang penting itu pendukungnya. Itu hasil kerjasama semua masyarakat Duri Utara, baik itu tim seleksi, TPK maupun masyarakatnya. Terjalin komunikasi dengan baik, punya niat yang baik, yang penting mah niat. Sekarang biar dipagari dengan UU, jika ga dijalanin dengan baik, kan tergantung niat baik. Jika kita jalanin dengan baik, maka akan berjalan dengan baik juga. Sekarang pengelolaan PPMK akan dipindahkan ke koperasi, namun Pergubnya belum ada, badan hukumnya sudah kami siapkan. Selama koperasi belum jelas, saya tetap gulirkan ke PPMK. Saya ga mau masyarakat saya teriak dan jadi korban karena pengalihan. Kesannya terburu-buru. Prinsip pengelolaan juga hampir sama dengan PPMK. Meskipun demikian, masyarakat sudah paham dengan PPMK. "(April, 2008).

Pemahaman yang baik dari pihak pelaksana untuk menjalankan program dengan niat yang baik dan sistem kekeluargaan yang dibangun dalam menjalankan kerjasama dengan baik diantara pelaksana PPMK dan masyarakat, membantu program PPMK Duri Utara menjadi terbaik untuk kategori pemanfaat terbaik versi evaluasi Pemda DKI. Keaktifan pihak Dekel dan perangkat TPK-RW menjadikan program dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya keterangan Bapak YS tentang pengalamannya di PPMK sebagai berikut :

"Pada saat terima penghargaan disana kan banyak yang meliput dari Pelita, Pos Kota, ya udah, bukan saya yang minta, saya ga mau jadi orang populer. Jadi sudahlah, saya ga mau begitu. Yang penting tujuan saya duit selamat, masyarakat bisa sejahtera, itu aja. Alhamdulillah, teman-teman dewan kelurahan pada kumpul. Duri Utara aktif Dekelnya." (April, 2008)

Pengelolaan PPMK dilakukan secara professional karena Ketua Pelaksana memiliki pengalaman yang cukup signifikan untuk bisa mengelola PPMK secara baik. Berikut kutipan dari Bapak YS tentang pengalamannya kembali :

"Manajemen bisa diterapkan disini, saya pernah kerja perusahaan swasta, usaha sendiri juga pernah. Jadi karena ijazah saya ga laku lagi, jadi ngabdi aja ke wilayah." (April, 2008)

Untuk bisa menjaga program pemerintah berjalan secara lebih baik, diperlukan kesungguhan, beberapa pengetahuan dan pengalaman seperti yang telah diterapkan oleh Bapak YS selaku pelaksana program. Agar program pemerintah tidak selalu dicap kurang baik atau gagal. Keinginan untuk melakukan yang terbaik dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan meskipun semua masih dalam suatu proses pembelajaran, merupakan satu kunci menuju suksesnya program PPMK di Kelurahan ini.

c) Dari kelompok sasaran

Kelompok sasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam program. Keinginan untuk bekerjasama dengan pihak PPMK. Masyarakat dianggap sebagai pendukung utama keberhasilan program. Berikut pendapat dari Bapak YS tentang sasaran / pemanfaat sebagai berikut :

"Kerjasama TPK RW – DEKEL – UPKMK dan Masyarakat yang penting itu pendukungnya. Itu hasil kerjasama semua masyarakat Duri Utara, baik itu tim seleksi, TPK maupun masyarakatnya. Terjalin komunikasi dengan baik, punya niat yang baik, yang penting mah niat." (April, 2008).

Dari Bapak AK selaku pemanfaat program yang melakukan pembayaran cepat agar dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi, berikut pernyataannya :

"Jadi saya lunasin cepat biar enak. Ga bisa bayar sesuka hati, yah apa kata dunia. Jadi ga ada hambatan. Jadi minjam, ngangsur dibulatkan. Ngapain sih pinjam lama-lama." (April, 2008).

d) Pendukung lainnya :

Kemudahan peminjaman dengan uang jasa yang kecil sebesar 12% membuat masyarakat pemanfaat mau ikut terlibat sebagai sasaran program, dibandingkan dengan bank keliling yang jumlah bunganya lebih besar. Ketiadaan agunan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman. Berikut pernyataan Ibu AS :

"Kalo pinjam lain kan pake agunan, kalo sini kan ga. Saya trima kasih banget. Ada kemudahan karena merasa terbantu untuk bisa usaha." (April, 2008).

A.1.11.2. Faktor-faktor penghambat :

a) Dari pemerintah

Lamanya proses anggaran ditingkat provinsi untuk bisa dicairkan ke masyarakat merupakan faktor yang cukup menghambat pelaksanaan program PPMK. Beberapa faktor lainnya menyangkut anggaran juga menjadi masalah seperti biaya operasional kantor sebagai pusat aktifitas PPMK, juga anggaran untuk Satuan Tugas (Satgas). Berikut keterangan Bapak YS :

"Tahun anggaran baru sampe saat ini belum turun. Sudah menghambat untuk kebawah. Kegiatan - kegiatan juga terhambat, pembangunan juga. Mungkin lurah kalo mau nangis, nagis dia, anggaran sudah 3 bulan belum turun. Itu kan para legislative disana yang lambat, terlalu banyak teori aja. Tarik menarik kepentingan, bagi-baginya yang susah." (April, 2008).

Dana yang diterima untuk pelaksanaan program cukup minim. Kembali lagi dilanjutkan Bapak YS :

"Satuan Tugas (Satgas) turun perlu operasional, belum ada anggaran. 0,45% untuk TPK, 0,55% untuk operasional. Untuk beli ATK, andaikan 0,55 tanpa ada tunggakan, mungkin kita aman. Untuk tunggakan 11%, kita sudah mengurangi operasional. Kita mesti putar otak untuk biaya operasional, namun sejauh ini, kita pikirkan bagaimana dana PPMK ini selamat, gitu aja. Sekalipun cuma pas-pasan penghasilan saya." (April, 2008).

Dilanjutkan lagi oleh Bapak YS :

"Saya (PPMK) sebelum ada satgas, ada tim verifikasi namanya kita slalu turun, sesuai ketentuan provinsi, kita lakasanakan, sekarang diatur oleh Pergub 121, kita buru-buru atur. Kelurahan lain baru sekarang ini bentuk Satgas setelah ditegur, sampai sekarang laporan tim satgas sejauh mana belum tau karena baru dibentuk. Kalo saya dah buat laporan, sekarang ini turun yang ke-2 kali. Tapi sebelum tim verifikasi, jadi sekarang satgas dan itu sebenarnya membantu permasalahan keuangan PPMK. 2007 terbentuk tim asistensi, skalipun tim satgas belum punya biaya operasionalnya. Tapi saya bukan suatu kendala meskipun ga ada biaya operasional, buat

masyarakat, bagaimana caranya, kewajiban saya selaku ketua bagaimana ini bisa jalan. Dalam Pergub sebenarnya diatur operasional Satgas ada di kas BPM, tapi sampai sekarang belum ada. Mungkin di kotamadya atau dipropinsi, makanya saya mau tanya pada pihak BPM, kan jelas-jelas di Pergub ada, kalo sampe anggaran ga turun, ini Pergub, gubernur yang bikin, kan gitu. Ini perlu saya sampaien smua, jangan dibebankan ke Dewan Kelurahan aja. Jasa 1% untuk operasional sehari-hari, untuk ATK, telp, dekel seharusnya difasilitasi oleh kelurahan sesuai dengan Perda, tapi kita disini sebetulnya mandiri. Misal telpon bayar sendiri, staff bayar sendiri, karena terpisah sama gedung kelurahan. Makanya bersyukur lah, harusnya berbaik hatilah orang kelurahan. Untuk operasional satgas belum diganti, karena mengarahkan dewan masing-masing untuk membuat." (April, 2008).

Kendala-kendala lainnya di lapangan yang ditemui oleh para pelaksana program selain kendala politis di tataran kebijakan kelurahan dan daerah, juga kebijakan nasional terkait dengan kebijakan harga, serta masih sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dana-dana mikro yang digulirkan ke mereka, karena banyak masyarakat beranggapan bahwa dana tersebut sifatnya hibah. Masalah ini terjadi disebabkan karena masyarakat sudah beberapa kali menerima dana-dana bantuan seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sifatnya hibah. Sehingga mereka beranggapan dana PPMK juga sifatnya sama. Terjadi sebelum periode 2007, yaitu kurun waktu 2002 – 2005, banyak masyarakat yang enggan mengembalikan dana pinjaman tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak YS :

"Warga masih banyak yang terpengaruh jaman JPS dulu, jadi mereka pikir ini dana hibah, tapi itu dulu. Ada juga yang nunggak saat ini. Cuma yang lebih jelas setelah saya turun, penunggak ini bukannya ga mau bayar, karena memang usaha kondisinya macet. Semua bahan baku naik, minyak goreng naik, jadi berpengaruh, sulit untuk menjual. Kalaupun dijual, daya beli masyarakat kan kurang. Kalo saya liat seperti itu. Semua harga naik minyak tanah mahal, dampaknya ke pedagang-pedagang. Semua ini karena kebijakan pemerintah pusat, imbasnya ke pedagang - pedagang kecil ini. Yang tadinya dia punya untung Rp.50.000,-, sekarang menurun jadi Rp.10.000,-. Ah, ini kan cuma cukup untuk kebutuhan di dapur aja, belum bayar listrik dll. Ga cukup untuk bayar angsuran. saya keberatan juga jika dikatakan mereka ga membayar, karena kondisi sosial ekonomi dan usahanya yang macet. Saya mesti bela masyarakat saya kan, tapi juga ga menutupi juga ada beberapa orang yang ga membayar. Bukan karena

kemampuan ekonomi, tapi niat baiknya ga ada. Setelah itu saya ambil kesimpulan bahwa dia termasuk orang yang sulit membayar. Itu juga cuma beberapa orang, 1 - 2 orang - lah.” (April, 2008).

b) Dari pihak pelaksana program

Belum ada kriteria SDM secara khusus yang ditentukan untuk melaksanakan program. Sesuai Pergub 34 Tahun 2007 yang menegaskan kredibilitas pelaksana program dan tinggal atau berdomisili di wilayah setempat bersama dengan masyarakat pemanfaat. Masing-masing sudah mempunyai pembagian tugas. Meskipun sampai saat ini, menurut pihak pelaksana, belum ada kendala berarti.

c) Dari kelompok sasaran

Beberapa masyarakat sasaran yang masih terpengaruh JPS sehingga mereka menganggap dana PPMK juga hibah karena dari pemerintah. Cuma sedikit dari mereka yang mengetahui karena mereka bergaul dengan pihak pelaksana PPMK. Berikut keterangan dari Bapak MJ selaku pelaksana program :

“Masyarakat masih berpendapat kalau uang PPMK adalah uang kita, karena pengaruh JPS. Jadi masih ada yang sulit mengembalikan.” (April, 2008).

Keterangan Bapak YS tentang kendala di tingkat pemanfaat :

“Kedala pasti ada, saat ini saya menurunkan satgas, juga ada yang senang ada juga yang enggak. Jadi Satgas untuk menagih, dibilang kaku begini-begini. Padahal kita melaksanakan ini ada dasar aturan/hukum sesuai Pergub.” (April, 2008).

Pihak masyarakat yang ditagih oleh satgas merasa kurang senang dan menganggap hal tersebut kaku. Prinsip *reward and punishment* diterapkan pihak pelaksana untuk mengurangi kemacetan di tingkat pemanfaat. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak YS sebagai berikut :

“Yang macet, pertama saya undang, panggilan pertama ga datang, kita silaturahmi ke rumah. Gimana sih baiknya, gimana sih maunya, mau

saya panggil ke kelurahan takut kejauhan atau ke pos RW . kita jemput bola kan, gitu. Tapi ternyata ya ada smua kita jadi mengalah untuk menang – kalau prinsip saya. Biar kita buang waktu, misalnya gini, udah hamper 3 bulan satgas nangarinya gini aja, gitu lho. Banyak cara, kita sampaikan, ini uang, uang masyarakat juga, kalo banyak macet, kita ga bisa kasi pinjam lagi. Karena pola pikiran waktu dulu-dulu zaman JPS, ga ngembaliin juga ga pa-pa. Tapi beda dengan PPMK, kan gitu aturannya. Tapi masyarakat masih berpandangan kesana. Memang JPS ini ga ditindaklanjuti sama pemerintah pusat, apalagi Pemda, ga mau tau. Padahal itu uang masyarakat juga cuma beda anggarannya, APBD & APBN. Pemerintah kelasnya beda, karena APBN, menurut saya ga seperti itu. Gimana upaya menyelamatkan uang. Biar mereka ga manja. PPMK kena imbas karena JPS dulu. Termasuk BKM juga sama, P2KP juga kan sama..” (April, 2008).

d) Penghambat lainnya :

Pencitraan yang buruk tentang kinerja program pemerintah cukup mengganggu nama baik PPMK di khalayak umum. Padahal tidak semua program pemerintah utamanya PPMK jelek atau kurang baik dalam pelaksanaannya. Demikian pernyataan dari Bapak YS selaku pelaksana program :

“.....Cuma PPMK terlalu disorot banget, jangan digeneralisir ini jelek seolah-olah smua jelek. Memang kalo sini suka bilang seperti itu. Yang jelek aja, padahal dewan yang baik aja dengan inisiatif sendiri dicuatkan kan ga.” (April, 2008).

A.2. Implementasi Program Ekonomi Produktif LSM di DKI Jakarta melalui Kredit Mikro (Study Kasus Lembaga Masyarakat Mandiri (MM) – Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)

A.2.1. Profil Program Kredit Mikro MM di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur

Program Masyarakat Mandiri di Kelurahan Bidara Cina berjalan sejak bulan Maret 2006 dan berakhir pada bulan Maret 2008. Awalnya MM masuk ke kelurahan ini melalui organisasi lokal yaitu Kelompok Peduli Dhuafa Remaja (KPDR). Program kredit mikro

MM dilaksanakan di 3 Rukun Warga (RW) dengan jumlah anggota di tiap RT yang tidak merata. Pusat aktivitas MM berada di Kantor KPDR kelurahan Bidara Cina yang saat ini menjadi kantor koperasi serba usaha masyarakat pasca dua (2) tahun program kredit mikro MM. Tujuan akhir program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro makanan jajanan. Sesuai dengan hasil wawancara dan profil program MM Kelurahan Bidara Cina, secara kelembagaan dan fungsinya, pelaksana program MM terdiri dari :

- a. Pendamping : merupakan petugas lapangan dari Lembaga MM yang menjembatani sejak dari *assessment* hingga *finishing* program dan mengantarkan terbentuknya kelembagaan lokal serta usaha bersama masyarakat. Pendampingan dilakukan dengan sharing berbagai informasi pada setiap pertemuan kelompok dan melakukan sertifikasi makanan sehat dan halal dari LPOM MUI.
- b. Kelompok Mitra terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota kelompok seperti pada (lihat gambar 04). Kelompok dibentuk setelah rekrutmen anggota melalui Latihan Wajib Kumpulan (LWK). Sebelum pelatihan dimulai, terlebih dahulu diadakan uji kelayakan mitra menyangkut kebutuhan pembiayaan, indeks rumah (kategori miskin/tidak), kepemilikan asset pribadi, data usaha, dan pendapatan per kapita per hari.

Jenis usaha yang dibiayai adalah dagang mie ayam, dagang rujak, dagang ketoprak, dagang bubur ayam, dagang kelontong, dagang es buah dan jenis dagangan gerobak lainnya. Jumlah mitra adalah sebesar 41 orang (tahun 2008). Setiap perguliran dana akan dilakukan dan ditagih melalui kelompok oleh ketua kelompok yang dibentuk dan dipilih secara musyawarah. Dana angsuran diadministrasikan untuk gulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan dana bagi hasil penjualan sebesar 10 % – 15 %. Pembayaran angsuran dilakukan per 2 minggu sekali sesuai dengan kesepakatan antara mitra dan pendamping. Mitra dengan prestasi yang baik dapat menerima pinjaman lebih besar setelah angsuran lunas. Setiap cicilan dibuktikan dalam tanda bukti buku tabungan dan catatan pendamping serta kelompok.

Dana MM diperoleh dari dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS) Dompot Dhuafa. Jumlah dana yang digulirkan pada tahun 2006 atau Skim ke-1 adalah Rp. 29.250.000,-

dan pada Skim ke-2 sebesar 7.500.000,- dengan jumlah pemanfaat 41 orang. Adapun tingkat partisipasi pembayaran angsuran sebesar 35 % yang termasuk kategori rendah (Hasil wawancara pendamping dan laporan triwulan MM, 2008).

A.2.2. Latar Belakang Program Ekonomi Produktif LSM – MM Melalui Intervensi Kredit Mikro

Program ekonomi produktif di MM lahir sebagai sebuah upaya untuk memberikan penguatan kepada masyarakat melalui program pengembangan usaha mikro-produktif masyarakat miskin. Awalnya program tersebut sejak tahun 2000 ada dibawah koordinasi Direktur Pembangunan Masyarakat Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga filantropi. Karena kebutuhan akan program semakin besar, jadi secara kelembagaan, kegiatan tidak bisa hanya dinaungi oleh sebuah program saja, karena akan begitu banyak sub-sub program. Berikut kutipan wawancara dari Bapak PC :

"MM – awalnya program pemberdayaan masyarakat dibawah Kordinator Pengembangan Masyarakat Dompot Dhuafa yaitu sebagai program pengkajian masyarakat. Karena kebutuhan semakin besar, program pengembangan tidak bisa dinaungi oleh sebuah program karena akan menjadi banyak sub-sub program. MM harus menjadi lembaga otonom, karena sisi jaringan sudah sangat banyak. MM resmi menjadi lembaga otonom yang fokus pada ekonomi karena strategi program untuk pemberdayaan yang paling tepat adalah ekonomi, Sehingga praktis program masyarakat mandiri sekarang 3 tahun berjalan." (April, 2008).

Maka MM harus menjadi lembaga otonom karena kebutuhan dan jaringannya makin banyak. Tahun 2005, MM resmi menjadi lembaga otonom yang berfokus pada ekonomi sebagai strategi program untuk pemberdayaan masyarakat yang paling tepat. Karena dana pemberdayaan masyarakat yang digunakan berasal dari zakat, infaq dan shadaqoh maka masyarakat harus terberdayakan.

A.2.3. Tujuan, Prinsip dan Sasaran Program

Tujuan program MM adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan penguatan pada mereka agar memiliki keberdayaan. Tujuan dari program MM lengkapnya dapat dilihat pada halaman 88. Berikut pendapat Bapak PC :

"Tujuan program adalah memberikan penguatan kepada masyarakat agar kehidupan ekonomi mereka berubah dan terberdayakan." (April, 2008).

Sementara sasaran program dapat bervariasi, dimana MM ada diberbagai area seperti pedesaan, urban, dan kantong-kantong buruh migran. Program utamanya diperuntukan bagi kaum miskin dan usaha-usaha produktif dengan uji kelayakan sasaran terlebih dahulu melalui *door to door*. Untuk masyarakat urban, sasaran yang dapat menjadi anggota program sebagaimana pernyataan dari Bapak PN sebagai Manager program MM :

" Untuk masyarakat urban pendapatan mereka kurang dari \$ 2 per hari, sebagai seleksi awal kami kepada mereka. Juga para mustahik (kaum yang miskin) yang telah punya usaha atau mau memiliki usaha asal ada komitmen, dia akan usaha apa. Jadi kami latih mereka. Untuk wilayah pedesaan selama 3 minggu, sementara pihak urban cuma 3 hari aja." (April, 2008).

Adapun kriteria kelompok sasaran di wilayah urban adalah sebagai berikut :

- 1). Pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti boraks, formalin, dst. karena mereka belum memenuhi cara-cara pengolahan makanan jajanan yang aman pangan karena kurangnya modal dan kapasitas sumberdaya para pelaku usaha.
- 2). Penghasilan usaha maksimal Rp. 30.000,- / hari
- 3). Usaha dilakukan sendiri oleh klien (independen)
- 4). Skala modal / hari di bawah Rp. 500.000,-
- 5). Tidak mempunyai pembiayaan dari kelompok/pihak lain.
- 6). Rentan terhadap penggunaan bahan aditif berbahaya
- 7). Tinggal pada satu tempat domisili yang kumuh

(dikutip dan wawancara dengan Bapak PN dan Panduan MM, 2006 : 4)

Sebagai program yang berupaya mengurangi angka kemiskinan, MM juga fokus pada masyarakat urban perkotaan yang bekerja di sektor informal. Kriteria sasaran yang direkrut merupakan bagian dari komunitas miskin. Definisi kemiskinan menurut MM adalah orang yang memiliki kekurangan dalam beberapa hal, dimana MM melihat dari aspek ekonomi. Hal kekurangan tersebut berdampak pada standar hidupnya. Sebagaimana pernyataan dari Bapak PN :

"Kemiskinan adalah situasi dimana orang memiliki kekurangan dalam beberapa hal. MM melihatnya dari aspek ekonomi. Kalau miskin di desa – masyarakat punya rumah bagus tergolong orang yang punya." (April, 2008).

Bentuk dan intervensi program yang telah dilaksanakan oleh MM adalah melalui berbagai upaya-upaya penguatan seperti 1) pembiayaan usaha mikro berbasis kelompok, 2) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, 3) pengembangan kelembagaan komunitas, 4) pemupukan modal swadaya, 5) pembangunan jaringan dan sinergi, 6) pengembangan informasi, dan 7) teknologi tepat guna.

Untuk mengimplementasikan program, dibuat beberapa pedoman untuk program (fokus pada program pembiayaan usaha mikro) dan juga pedoman untuk pendampingan. Sosialisasi dilakukan secara partisipatif untuk memperkenalkan program pada masyarakat secara luas. Berikut pernyataan dari pendamping :

"Pendekatan partisipatif. Juga pendekatan tokoh lokal. Person-person yang bisa dioptimumkan. Ada FGD, silaturahmi, pertemuan di tempat-tempat informal dan seterusnya." (April, 2008).

Pendekatan yang dibangun dalam program ini kepada masyarakat ada beberapa yaitu :

- 1) Silaturahmi kepada calon sasaran secara personal (ke rumah) dengan mempertimbangkan norma agama /adat istiadat setempat. Biasanya dilakukan oleh pendamping.
- 2) Mendatangi tempat berkumpul masyarakat yang dapat bersifat formal, seperti pertemuan di balai desa, RT, RW, rembug desa. Juga bisa bersifat non-formal seperti pengajian, warung-warung, disungai, gardu ronda, dan lain-lain.
- 3) Sosialisasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), sarasehan, tebar kurban, pengobatan dan lain-lain untuk mengetahui persoalan – persoalan yang ada di masyarakat secara dekat juga mengenai kebutuhan akan program.
- 4) Pertemuan – pertemuan dengan pihak-pihak berpengaruh (*stakeholders*).

Berbagai pendekatan yang dilakukan diharapkan mampu menarik perhatian warga dan para stakeholder yang berdiam di wilayah sasaran untuk turut berpartisipasi dan mendukung program yang dilaksanakan oleh MM.

~~(Disarikan dari hasil wawancara dengan pendamping dan Manager Program MM serta panduan teknis MM 2008)~~

A.2.4. Konsep Ekonomi Produktif dan *Community Development*

Konsep ekonomi produktif menurut MM adalah usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut wawancara dengan Bapak PN :

"Ekonomi produktif adalah usaha ekonomi masyarakat yang berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi individu atau keluarga tersebut." (April, 2008).

Sementara konsep *Community development (comdev)* menurut MM adalah *empowering development* dengan memberikan penguatan kepada masyarakat yang bersifat sustainable. Demikian wawancara dengan Bapak PN :

"Comdev sebenarnya untuk empowering development atau penguatan pada masyarakat. Banyak cara untuk memberikan penguatan ditingkat masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat untuk hidup sejahtera. Comdev harus mengarah pada peningkatan taraf hidup, dengan menguatkan asset-aset yang dimiliki. MM membantu mengarahkan. Dalam comdev harus ada sustainability pasca program. Karena MM tidak mungkin ada terus di masyarakat." (April, 2008).

MM melakukan *empowering* atau pemberdayaan pada kelompok masyarakat yang melakukan usaha ekonomi mikro yang diharapkan bisa berjalan secara sustainable. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan meningkatnya asset yang dimiliki kelompok sasaran adalah fungsi comdev. Penguatan di masyarakat dilakukan dengan merekrut kader lokal untuk meneruskan program dalam kelembagaan lokal karena suatu waktu pasca program, MM akan meninggalkan wilayah sasaran.

A.2.5. Peraturan Pola Alokasi Dana MM untuk Kredit Mikro

Bentuk program ekonomi produktif melalui kredit mikro yang dikelola oleh MM merupakan modifikasi dari model Grameen Bank Bangladesh dan AIM Malaysia, namun agak berbeda penerapannya utamanya dalam proses pengembalian asset pembiayaan dari lembaga ke masyarakat yang akan dikelola melalui koperasi / kelompok Ikhtiar Swadaya Mitra – ISM. Setelah masa *exit* program, dana yang dimiliki lembaga melalui pembiayaan dan sharing margin dari hasil penjualan (akad jual beli) sebesar 10 – 15 % diserahkan kepada lembaga ISM untuk dikelola kembali ke masyarakat. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan untuk usaha ekonomi produktif merupakan dana zakat, infaq dan sadaqoh (ZIS) dari Dompot Dhuafa yang sepenuhnya merupakan milik masyarakat. Pengolahan dana pembiayaan pada lembaga lokal Koperasi yang dibentuk bersama kader dan masyarakat, menjadikan MM berbeda dengan lembaga keuangan

mikro (LKM) lainnya, dimana dana biasanya dikembalikan dan tetap dikelola kembali oleh lembaga. Jadi formula akad jual beli adalah :

$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok} + \text{Margin}$ $\text{Harga Pokok} = \text{Harga Beli Barang} + \text{Biaya-biaya}$

Sumber: diolah dari MM dan hasil wawancara, April 2008

Untuk setiap peminjam akan mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dengan pihak MM yaitu lama pinjaman selama 10 bulan dengan pertemuan 2 kali seminggu sekaligus pembayaran angsuran pembiayaan usaha.

Peraturan lembaga yang menegaskan pola dan alokasi dana untuk program ekonomi produktif yang *pro-poor* ditetapkan untuk operasional sejumlah tidak lebih dari 12%. Sisanya sebanyak 88% merupakan dana peruntukan untuk program. Berikut pernyataan dari Bapak PN :

"Untuk penggunaan dana operasional tidak lebih dari 12%. Sisanya adalah untuk program." (April, 2008).

A.2.6. Langkah-langkah Implementasi Program di Lapangan

Beberapa tahapan proses dalam implementasi program sesuai pada gambaran umum program MM dilaksanakan oleh pendamping. Tahap pra-persiapan meliputi *need assessment* yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dompok Dhuafa sebagai penyandang dana, pihak MM melanjutkan melalui analisa masalah dan tujuan. Setelah itu diadakan tahap persiapan melalui pembuatan *blueprint* program, sosialisasi dan studi kelayakan mitra. Kemudian dilakukan pelaksanaan program menyangkut seluruh aktivitas lapangan. Program dijalankan selama dua tahun, sejak maret 2007

".....Tim survey yang menentukan, tapi kami sudah ada data awal. Sebelumnya ada need assessment dari DD. Dari analisa masalah dan tujuan, kita siapkan konsep dan blueprint program. Problem social map, Cuma dialog aja. Awal Maret survey – sebulan lah yaa, sekitar April sudah dapat mitra. Kita lakukan LWK, bentuk kelompok, pertemuan warga untuk sosialisasi program .- studi kelayakan mitra sebelum pembentukan kelompok....."(April, 2008).

Teknik yang diterapkan dalam melaksanakan program :

- a. Pembentukan kelompok mandiri (KM) melalui berbagai model sosialisasi dan rekrutmen anggota. Pembentukan kelompok sebagaimana pada gambar 02 di bawah.
- b. Membangun disiplin kelompok melalui pertemuan dengan pendamping melalui pelatihan wajib kumpulan (LWK) pada saat rekrutmen, pertemuan setiap minggunya/sesuai kesepakatan, akad/perjanjian melalui ikrar mitra.
- c. Menerapkan uji kelayakan dan prosedur pembiayaan secara disiplin, mudah, tanpa agunan dan dilakukan sesederhana mungkin sesuai kebutuhan.
- d. Membentuk kaderisasi kelompok/individu.
- e. Membangun kelembagaan mandiri (Ikhtiar Swadaya Mitra – ISM) secara bersama dengan masyarakat dampingan.

(Sumber: disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak PN (2008) dan buku pedoman teknis pendamping MM 2007: 1 – 17).

Ringkasan pelaksanaan program di wilayah urban dapat dilihat pada gambar 3 halaman 100.

Implementasi program di lapangan acuannya seperti dijelaskan sebelumnya di bab 3, sub bab gambaran umum program. Setelah lulus LWK, pihak mitra mendapatkan fasilitas pembiayaan dari MM. Demikian pernyataan LN :

"Setelah mereka lulus LWK, salah satu fasilitas yang mereka bisa dapatkan adalah pembiayaan. Disitu juga ada formnya juga. Peraturan pembiayaan, dikomitmenkan ditingkat mitra diketahui oleh ketua kelompok dan anggotanya. Jadi bisa dicairkan. Syarat programnya berkelompok, kita ga seperti perbankan, yang bisa menjaminkan dana kita, melalui kelompok. Jadi ada tanggungjawab bersama, ada komitmen,. Awalnya kita tawarkan tanggungrenteng, tapi dalam perjalanannya tidak bisa dioptimalkan, karena tidak mendidik, mereka juga punya kebutuhan, tiap pertemuan talangin temen, ya akhirnya manja. Tapi tetap kekuatan kelompok kita bangun. Mereka disebut Mitra – kelompok mitra - (KM) (1 KM minimal 5 anggota) – kumpulan KM (Kelompok Mitra) – Rembug mitra (RM) – ISM (Ikhtiar Swadaya Mitra). 2 KM jadi Skim 1 untuk pemulihan karna saat banjir terjadi. 10 bulan tiap skim/tahapan. Pada prinsipnya pake akad – ekonomi syariah, sistem jual beli (murobahah). Kalaupun ambil keuntungan skim 2 sebesar Rp. 7.500.000,- – akad tergantung usaha mereka. Kalo mereka jualan udak, ga mungkin kita kasi lebih besar." (April, 2008).

Penerapan sistem kelompok untuk menjamin dana melalui tanggung jawab kelompok. Dana yang disalurkan akan dikembalikan ke pihak mitra melalui koperasi yang dibentuk

bersama. Pihak mitra yang terlambat membayar pembiayaan diberikan dispensasi untuk mengangsur selama beberapa minggu atau 2 bulan lamanya. Sistem tanggung renteng pada praktiknya sulit diterapkan karena membuat pihak mitra menjadi manja dan menyulitkan pihak mitra lain yang menalangi angsuran pembiayaan. Sehingga sistem ini tidak dapat diterapkan oleh MM.

"Skim 10 bulan pinjaman, pertemuan tiap 2 minggu. Margin rata-rata minimal 10%. Skim 1 – 2. Dana dikembalikan ke MM sementara aja, pembiayaan regular cuma sirkah ada 8, itulah yang membedakan dengan dana GB karna kita nirlaba, dan zakat, jadi kembali ke ummat. Kalo zakat kita ga berharap banyak, karna dana harus kembali ke masyarakat. MM bukan amil, kita cuma kontrak aja. Jual beli sebagai kesepakatan, karna tiap hari mereka menjual. Jadi ga bisa bagi hasil. Ada juga yang telat, tambah waktu sampe 2 minggu, atau malah sampai 12 bulan. Kelompok lebih banyak laki-laki daripada perempuan, pedagang keliling lebih banyak bapak-bapak. Mereka juga kerjasama sebagai suami istri." (April, 2008).

Program dijalankan dengan melakukan pendampingan pada masyarakat serta pengadaan sertifikasi. Sistem pertemuan yang dilakukan setiap 2 kali seminggu bisa merupakan salah satu yang menyebabkan lemahnya partisipasi mitra untuk hadir di pertemuan.

A.2.7. Perumusan Kebutuhan Sasaran

Guna mencapai tujuan, tahapan program perkotaan (urban) didasarkan pada unsur-unsur input, proses aktivitas tertentu, dan output, yang diharapkan mampu mendukung keberhasilan program. Untuk perumusan kebutuhan sasaran dilakukan melalui *need assessment* (penjajakan kebutuhan) sebagaimana keterangan dari pendamping program MM, saudara LN sebagai berikut :

"Kriteria untuk urban karena berangkat dari isu formalin, jadi pedagang makanan yang rentan isu Bahan Berbahaya, dibawah Rp.30.000,- pendapatannya perhari. Juga kepemilikan harta meskipun pendapatan diatas Rp.30.000,-, dalam studi kelayakan mitra, yah disesuaikan juga." (April, 2008).

Program kredit mikro diutamakan pada pedagang kecil yang rentan isu bahan berbahaya dan mengalami kebangkrutan pasca isu formalin, boraks dan lain-lain yang

ditambahkan sebagai pengawet makanan. Pada umumnya usaha yang dibiayai adalah usaha mikro di kelurahan RW 07 dan 08 Kelurahan Bidara Cina Jakarta Timur. Kemudian ditambahkan lagi informasinya oleh LN :

"Ada wawancara dengan masyarakat. Ada PRA, ideal ga juga, tapi ga langsung. Ada beberapa materi yang dipake seperti kelender musim, tapi ga langsung cuma lewat dialog aja. Tim survey yang menentukan, tapi kami sudah ada data awal. Sebelumnya ada need assessment dari DD. Dari analisa masalah dan tujuan, kita siapkan konsep dan blueprint program. Problem social map, Cuma dialog aja. Awal Maret survey – sebulan lah yaa, sekitar April sudah dapat mitra. Kita lakukan LWK, bentuk kelompok, pertemuan warga untuk sosialisasi program - studi kelayakan mitra sebelum pembentukan kelompok. Mata pencaharian sudah memenuhi syarat. – tempat lain door to door. Ini karena sudah ada lembaga lokal sebelumnya yang kelola dari BNI syariah (nama lembaga KPDR). Kita rekomendasikan apa programnya." (April, 2008).

PRA sebagai alat analisis tidak digunakan secara langsung melibatkan masyarakat sasaran, karena alat yang digunakan cuma menyangkut kelender musim dan *problem social map*. Semuanya melalui dialog dengan warga masyarakat Bidara Cina. *Assessment* sebelumnya telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa (DD), Kemudian Tim melakukan analisa masalah dan tujuan, lalu dibuat *blueprint* program. Adanya support dan kerjasama dengan lembaga lokal yaitu Kelompok Peduli Dhuafa Remaja (KPDR) memudahkan pihak MM masuk ke Bidara Cina.

A.2.8. Jenis Pendekatan dan Partisipasi Masyarakat

Pendekatan yang dibangun dalam mensosialisasikan program dapat sangat bervariasi meskipun disebutkan secara partisipatif. Pendekatan tokoh dan pihak-pihak yang berkompeten menjadi penting dalam mensosialisasikan program tersebut. Beberapa pendekatan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh pendamping lapangan MM, LN sebagai berikut :

" Sangat sulit di urban, dengan kondisi mereka yang sibuk dan tempat tinggal yang sangat sempit, kondisi rumah 2 X 2, itu kan kita susah. Apalgi kalo kita datang pagi, mereka lagi buat makanan, silaturahmi juga terbatas. Waktu itu dengan pendekatan lembaga lokal yang ada, mereka yang mempromosikan. mereka biasa ada pertemuan, dalam mengoptimalkan pertemuan-pertemuan, anisan, pengajian, kegiatan RT. Kita masuk dari situ. Ada moment-moment penting seperti itu kita masuk." (April, 2008).

Pendekatan untuk wilayah urban cukup sulit karena kesibukan dan rumah yang sempit. Keberadaan lembaga lokal yang sudah ada yaitu KPDR di wilayah tersebut memudahkan MM dapat menjalankan program bekerjasama dengan lembaga lokal yang sudah ada. MM memaksimalkan pendekatan melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh KPDR.

Peran serta masyarakat dalam program seperti pada umumnya. Banyak yang mau menjadi mitra, namun mereka rata-rata sudah banyak yang jadi pelanggan bank keliling (rentenir). Kondisi ini cukup menyulitkan rekrutmen Mitra, karena masyarakat terbiasa mendapatkan sumber dana yang mudah meskipun dengan bunga yang lebih besar. Sebagaimana pernyataan pendamping LN:

"Prokontra itu sudah pasti. Di mitra sendiri, jangankan masyarakat umum, ada juga yang kesal gitu, namanya kita sebuah lembaga, untuk akomodasi mereka juga ada aturan dan prosedur jadikan mereka agak keberatan, lho koq ribet banget. Harus ngisi data, ditanya-tanya dulu, LWK dulu, ribet mereka bilang...enakan bank keliling, begitu ketemu langsung cair. Kalo kita kan ga."

Mengingat persoalan modal menjadi penting khususnya untuk komunitas urban, tentunya para pengusaha mikro sangat membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan usaha. Hal yang hampir senada diucapkan oleh salah satu mitra MM Bapak SP :

"Sebenarnya yang mau gabung ke program MM ini banyak, cuma kurang sosialisasi aja." (April, 2008).

A.2.9. Jumlah Modal, Jenis Usaha dan Lama Program

Jumlah mitra di Bidara Cina sebesar 41 orang, selama hampir 2 tahun program berjalan. Sehubungan dengan keterlibatan dan partisipasi mitra dalam program, terlihat bahwa dalam proses membayar angsuran tergolong sedang, karena tingkat kehadiran yang rendah di pertemuan per 2 mingguan. Banyak yang menitipkan angsuran pada teman kelompoknya. Disamping suasana perkotaan yang cenderung individualistik (Laporan Perkembangan Tahunan MM dan Kaji Dampak Program Urban, 2006 – 2007). Meskipun demikian, ada beberapa kader yang dapat diandalkan untuk melanjutkan aktivitas program utamanya dalam pembentukan kelembagaan lokal. Saat ini, sudah

berdiri Koperasi Usaha Bersama dengan nama "Grosir Sembako Mandiri" di Kelurahan Bidara Cina yang dibangun oleh Ikatan Mitra Wilayah.

Sehubungan dengan program, sistem pembiayaan yang diterapkan adalah :

- a) Jumlah modal yang digulirkan relatif berdasarkan skim/tahapan penguliran dana dan pengajuan anggota untuk pembiayaan. Pada tahap pertama dana yang diberikan kepada mitra sebesar Rp. 29.250.000,-, pinjaman diberikan dari Rp. 400.000,- sampai Rp. 1.500.000,-. Tahap kedua jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 7.500.000,- dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 750.000,- sampai Rp. 2.000.000,-.
- b) Jenis usaha yang dibiayai sesuai dengan laporan dan survey lapangan serta wawancara langsung dengan pihak mitra yaitu :

Tabel 22.
Jenis Usaha yang Dibiayai MM, 2006 – 2008

No	Jenis Usaha	Jumlah (mitra)	Persentase (%)
1	Dagang bakso	4	9.76
2	Mie ayam	9	21.95
3	Jajanan sekolah	10	24.39
4	Kue kering	3	7.32
5	Jual sayur	1	2.44
6	Bubur ayam	2	4.88
7	Kupat sayur dan lontong	3	7.32
8	Gado-gado, ketoprak, pecel	5	12.20
9	Es buah dan rujak	2	4.88
10	Kue basah	2	4.88
	JUMLAH	41	100.00

Sumber : diolah dari hasil wawancara dan Laporan MM, 2008

Program dijalankan selama 2 tahun, dengan tahapan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lama penguliran setiap skim dana yaitu selama 10 bulan pada setiap skim pembiayaan dengan pertemuan angsuran 2 minggu sekali.

A.2.10. Pendampingan

Pendampingannya dilakukan khususnya dalam pertemuan setiap 2 minggu sekali, dan upaya pemberian sertifikasi produk halal dan keamanan produk dari LP POM MUI. Pendamping datang dan menawarkan jasa sertifikasi kepada pihak penjual secara cuma-cuma. Tentunya setelah dengan kesadaran untuk menghindari penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang dijual. Untuk pihak mitra yang bermasalah dilakukan pendampingan oleh ketua KM dan pendamping secara langsung. Berikut komentar LN selaku pendamping MM di Bidara Cina :

"Pendamping itu semua harus bisa. Jadi kita bisa buka jaringan keluar untuk mereka, promosikan mitra kita. Intinya, pendamping mesti serba bisa, tuntutannya seperti itu. Gimana pendamping bisa bersinergi dengan semua pihak, dengan kelompok, mitra, kader, dan pihak lain. Sejauh mana mereka keluar dari masalah mereka. Bisa setiap saat, bisa dikata 24 jam. Harus siap dari sisi waktu dengan berbagai potensi yang ada. Bagaimana merekayasa semua kondisi, kita ga bisa kerja sendiri, karena ini tugas orang banyak, tugas Negara." (April, 2008).

Kembali ditegaskan oleh LN tentang proses pendampingan :

"Pendamping ada bagi-bagi informasi, transfer informasi, ilmu yang dikasi lebih pada saran tentang bahan makanan berbahaya, wirausaha, keuangan, motivasi pasti lah ya". (April, 2008).

Tentang adopsi informasi pihak mitra terhadap penggunaan bahan makanan berbahaya, LN menuturkan :

"Itu kembali ke orangnya lagi yaa, tergantung komitmen mereka untuk menjaga kehalalan dan keamanan produk. Kata LPOM yah itu tergantung mereka, bisa berubah tiap produksi, tergantung mereka yang usaha." (April, 2008).

Tentang pengembalian angsuran, pendamping berperan setelah pihak pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) tidak bisa lagi menanganinya. Berikut penuturan dari LN :

"Tiap pertemuan, kita optimalkan 1 jam pertemuan. Jika ada kasus-kasus, kita spesialkan waktunya. Jika pengurus ga bisa, baru pendamping yang urus. Karena mereka sering pulang kampung, biaya mereka tersedot disitu, juga harga-harga, apalagi minyak tanah." (April, 2008).

Sementara pandangan dari pihak mitra Bapak ST tentang pendamping adalah sebagai berikut :

"Untung ada Bu Leni, kami dikasi pinjaman dana sejak pertama MM kesini. Meskipun ada yang macet, tapi kami masih bisa mendapatkan tambahan pembiayaan. Aku rajin ke pertemuan. Banyak dapat informasi tentang usaha. Lumayanlah." (April, 2008).

Pandangan ini dikuatkan mitra Bapak AH yaitu :

"Yah, Bu Leni sudah baik sama kita. Banyak kasi informasi tentang bahan tambahan makanan yang berbahaya. Cara melayani pembeli. Alhamdulillah, kami ikuti. Kalo layani pembeli ga boleh cemberut, masaknyanya dan tempatnya harus bersih". (April, 2008).

Peran pendamping sangat penting dalam proses perubahan perilaku masyarakat sasaran. Adopsi informasi yang diberikan pada setiap pertemuan, kunjungan dan pelatihan yang diberikan merupakan media yang penting guna memberikan pengetahuan dan merubah perilaku masyarakat, sehingga makanan jajanan yang tadinya ditakuti untuk dikonsumsi kembali terangkat menjadi makanan sehat dan layak dikonsumsi masyarakat.

A.2.11. Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Dalam perjalanannya, setiap program mengalami berbagai faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat program. Untuk itu perlu diketahui, faktor-faktor apa saja yang dialami oleh program dalam proses pelaksanaannya.

A.2.11.1. Faktor pendukung pelaksanaan program :

a) Dari pemerintah :

Setiap program yang akan dilaksanakan oleh LSM biasanya mesti sepengetahuan pemerintah setempat. Beberapa dukungan seperti dukungan moral dan himbuan untuk masyarakat agar terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh MM juga merupakan bagian yang penting untuk dapat diterimanya program di Kelurahan Bidara Cina oleh masyarakat setempat. Juga dukungan dalam program sertifikasi makanan sehat LPOM MUI untuk diujikan. Beberapa keterangan terkait disebutkan oleh LN sebagai berikut :

"Faktor pendukung dari pemerintah lokal, yah dukungan moril dari kelurahan. Belum ada yang sifatnya membantu secara langsung cuma bilang, program itu bagus untuk masyarakat." (April, 2008).

b) Dari pihak pelaksana program :

Kemampuan pendamping dan perencana program sangat dibutuhkan dalam proses sosialisasi, *assessment* hingga pelaksanaan program. Pendampingan dimaksud untuk melakukan berbagai pendekatan dan mencari alternatif – alternatif pengembangan usaha masyarakat, bukan cuma sekedar pengaliran dana dan angsuran pengembalian dari masyarakat. Membantu merubah perilaku usaha untuk tidak menggubakan BTP berbahaya dan motivasi berusaha, serta manajemen usaha kecil dari penyuluhan setiap pertemuan merupakan hal yang penting bagi masyarakat sehingga usaha kecil yang mereka punya dapat terus dikembangkan. Selain itu, upaya sertifikasi halal dan sehat untuk makanan yang diproduksi sangat membantu keberhasilan usaha masyarakat yang didampingi agar dapat bangkit kembali pasca isyu formalin.

c) Dari kelompok sasaran :

Kemauan untuk bekerjasama dengan baik dalam menerima program menjadi faktor penentu kelancaran dan keberhasilan program. Hal tersebut disebabkan kepercayaan pihak mitra terhadap MM. Pernyataan dari Bapak AH :

"Yang buat saya tertarik ikut program MM karena saya percaya dengan programnya. Saya bisa jualan lagi meskipun sudah kena musibah banjir, gerobak dan bahan-bahan saya sudah hancur. Alhamdulillah MM masih mau bantu lagi." (April, 2008).

Selanjutnya dari Ibu IR :

"Saya senang menjadi mitra MM, yah senang aja gitu. Sayanya butuh, jadi bisa kerjasama dengan MM. sudah 2 tahun ini saya kerjasama dengan MM." (April, 2008).

Pada umumnya bantuan MM ke kelompok sasaran cukup menggembirakan masyarakat, ini dapat dilihat pada pernyataan-pernyataan masyarakat di atas. Dalam kerentanan yang mereka miliki, MM masih bersedia membantu masyarakat miskin dari ketidakberdayaan dan musibah yang dialami.

d) Pendukung lainnya :

Keberadaan dana dari Dompot Dhuafa (DD) yang masih berjalan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung program MM. sebagai donatur program MM, DD telah mengalokasikan dana untuk usaha produktif yang dikelola oleh MM bersama mitra-mitranya. Seperti pengakuan Bapak PC dari Manager Program MM yaitu :

"Masih berjalannya donatur dari DD merupakan faktor yang sangat mendukung program kami." (April, 2008).

A.2.11.2. Faktor-faktor penghambat

Selain faktor pendukung, setiap program pasti juga mengalami hambatan. Adapun faktor – faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a) Dari pemerintah :

Sebagai usaha kecil yang biasanya berjualan dipinggir jalan atau tempat-tempat umum, seringkali mitra MM menjadi sasaran pembersihan dari Trantib DKI. Alasannya, melanggar ketertiban umum sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 1988. Padahal pihak mitra sudah membayar retribusi untuk bisa menggunakan tempat tersebut. Namun pihak pemerintah dalam hal ini trantib, tidak mau tahu jika mereka juga dipungut oleh pihak Pemda melalui retribusi tersebut. LN menyatakan :

"Banyak aturan dari pemerintah, katanya Perda tentang ketertiban umum. Jadi gerobak mitra dibawa oleh Trantib, padahal mereka sudah bayar retribusi. Tapi jika ada pengangkutan/pembersihan dari pihak trantib, mereka ga mau tahu. Yah, mau ga mau kita carikan jalan gimana gerobaknya bisa diadakan lagi supaya bisa jualan lagi." (April, 2008).

Senada dengan itu, Bapak PC mengatakan :

"Mestinya ada pengaturan tempat-tempat untuk berdagang. MM harap ada strategi-strategi dari pemerintah mencari titik-titik yang tepat. Maksudnya, bukan melarang, tapi menata tempat-tempat tersebut supaya layak untuk menjadi tempat berdagang." (April, 2008).

Sesuai laporan MM, 2008 bahwa persoalan kebijakan ekonomi makro seperti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), juga kebijakan tata ruang dari Pemda yang

mempersempit lahan berjualan menjadi penyebab kendala peningkatan pendapatan masyarakat yang berjualan utamanya dengan menggunakan tenda pinggir jalan. Banyaknya pembangunan mall dan lokalisasi yang ditawarkan Pemda kurang strategis untuk berjualan, sementara lahan layak untuk berjualan dilarang Pemda untuk digunakan.

b) Dari pihak pelaksana program :

Perlunya penguatan tim urban karena persoalan yang dihadapi dalam masyarakat urban lebih kompleks. Berbeda dengan desa yang struktur dan kondisi masyarakatnya masih lebih sederhana struktur sosialnya. Demikian Bapak PC :

"Mereka perlu dikuatkan di tim. Terutama yang bergerak dipendampingan urban. Karena sifat masyarakat urban yang jauh lebih sensitive daripada di desa." (April, 2008).

Kondisi masyarakat urban yang lebih kompleks dan sangat terbuka merupakan faktor yang cukup sulit dalam menerapkan program secara lebih baik. Proses untuk memahami dan kesabaran yang besar serta penguatan tim pendamping diperlukan dalam melakukan pendampingan.

c) Dari kelompok sasaran :

Kondisi masyarakat urban yang sangat unik dan sibuk, menjadikan program kurang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Setiap pertemuan mingguan, tingkat partisipasi mereka (mitra) masih kurang, bahkan angsuran seringkali ditiptikan pada teman sekelompoknya (disesuaikan dengan wawancara dan Laporan MM, 2008). Selain itu, kebiasaan pulang kampung, menyebabkan banyaknya biaya yang terpakai, sehingga mengurangi pendapatan mereka. Beberapa pernyataan pendamping LN sebagai berikut :

"Jika ada kasus-kasus, kita spesialkan waktunya. Jika pengurus ga bisa, baru pendamping yang urus. Karena mereka sering pulang kampung, biaya mereka tersedot disitu, juga harga-harga, apalagi minyak tanah." (April, 2008).

Komentar Bapak PC :

"Budaya untuk menjadi warga Negara yang baik yaitu belum punya id, menjadi penghalang masyarakat dapat mengakses program pemerintah daerah. Juga

ada ketakutan dari pihak masyarakat akan aturan yang banyak. Dalam proses rekrutmen melalui pelatihan (LWK) dan pertemuan rutin juga ada yang kurang aktif. Mungkin kendalanya karena kesibukan.” (April, 2008).

Faktor internal lainnya dari sasaran sendiri juga disebabkan oleh kualitas produk dan promosi belum optimal. Disamping itu juga *lay out* kurang menarik sehingga belum bisa menarik banyak perhatian dari pembeli.

Sementara dari Bapak AH masyarakat mitra sebagai berikut :

“Saya ikut pertemuan tapi ga rutin, karena ngantuk dan capek. Untuk setoran tentu ada, kadang-kadang terpake karena kebutuhan, pulang kampung, bayar kontrakan, sakit dan kalo hujan jadi ga datang.” (April, 2008).

Kurangnya partisipasi mitra dalam pertemuan 2 mingguan sebagai akibat dari kelelahan dan kesibukan usaha masyarakat urban yang berdagang pada pagi hingga siang hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak AH di atas.

Faktor penghambat dari pihak mitra juga karna ketiadaan KTP sebagai syarat untuk menjadi anggota. Beberapa mitra “kabur” dari program sementara angsuran belum dilunasi. Berikut petikan wawancara dengan LN :

“Hambatan pasti ada karena itu bumbunya. Karakter urban karena mereka tadinya pendatang. Jadi mereka sering pulang kampung, ga punya identitas KTP di kami, itu konsekwensi. ada beberapa kasus yang terjadi; mitra kabur 2 orang. Ada penyelesaiannya. Jadi penarikan asset oleh kelompok. Sebenarnya ga ada dalam aturan MM, jadi jika kelompok mau mutusin / sepakati untuk ambil asset, ya itu hak kelompok. Jadi jika dana digunakan ga bener, ya kelompok yang tangani, misal narik gerobak. Gerobak jadi milik kelompok, karena ga ada yang bisa cicil, dijual gerobaknya. Walaupun sebelumnya disewakan sempat beberapa bulan. Tapi, yah ga ada yang sewa lagi. Akhimya dijual untuk lunasi pembiayaan. Sebenarnya sih ga tertutupi utang dia dari jualan gerobak Jika meninggal, diputihkan utangnya. Bidara Cina ada 1 mitra yang meninggal, kita iklashkan.” (April, 2008).

Kendala-kendala di lapangan sangat bervariasi. banyaknya bank keliling mengakibatkan dualisme pembiayaan dan dapat merusak program. Selain biaya-biaya yang naik, sehingga mengurangi pendapatan para pengusaha mikro. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh LN :

"Pada saat kita survey, mereka bilang ga minjam bank keliling. kita memastikan jangan ada dualisme pembiayaan. Begitu kita datangi, kadang ada juga bank keliling. Mereka jadi ga enak gitu. Yah susah yah, merubah kebiasaan mereka. Yang sudah terbiasa instant juga akhirnya instant. Kita harus komitmen, kalo mo mundur silahkan, itu lebih bagus, daripada merusak yang lain".(April, 2008).

d) Faktor penghambat lainnya

Faktor penghambat lain lebih banyak diakibatkan oleh kebijakan harga dan preman yang mengadakan pungutan liar. Berikut wawancaranya dengan Ibu LN :

"Sebagai pedagang kecil, banyak masalah dengan preman, sering dipajakin. Juga harga-harga naik akibat BBM naik, akibatnya margin usaha yang diterima jadi menurun." (April, 2008)

Berdasarkan hasil wawancara, faktor penghambat lainnya yang cukup mempengaruhi berkembangnya program dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat yang menurun akibat tingginya harga-harga sehingga menurunkan pendapatan untuk jualan produk makanan jajanan, disamping adanya premanisme dan pungutan liar (pungli) yang sering terjadi dikalangan pedagang kecil, karena rata-rata mereka berjualan dipinggir jalan sehingga rawan pungli.

B. Manfaat Program Ekonomi Produktif Dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta Dan LSM – MM

B.1. Manfaat Program Kredit Mikro Pemda DKI untuk Orang Miskin di Kelurahan Duri Utara, Jakarta Barat

Keterlibatan masyarakat sasaran dalam program cukup besar karena program disosialisasikan oleh RW ke masyarakat setempat, disamping program ini sudah berjalan cukup lama. Ada banyak perubahan pada sasaran setelah menerima dan terlibat dalam program. Seperti usaha roti dan konveksi, serta dagang makanan seperti bakso dan warung. Sebagai contoh, pernyataan Bapak YS selaku pelaksana program PPMK sebagai berikut :

"Banyak perubahan, salah satunya roti, yang tadinya dia kerjain sendiri sekarang sudah punya karyawan, yang tadinya tempatnya ngontrak, udah punya rumah sediri. Konveksi yang tadinya kerja sendiri punya mesin jahit satu, sudah jadi konveksi dan punya karyawan. Tujuannya kan kita mengentaskan kemiskinan. Untuk pengembangan usaha yang bisa berkembang dan bisa merekrut tenaga.

Mengurangi pengangguran juga kan. Kita adakan pembinaan, pendampingan juga. Supaya seperti itu, paling tidak bisa merekrut tenaga-tenaga yang ada disitu. Alhamdulillah sih, banyak juga bukan Cuma 1 orang aja hasil bantuan PPMK ini. Yang signifikan ya, mungkin banyak lah sekitar sampe 20%. Jadi kalo yang pedagang-pedagang itu kan ga mungkin. Saya harapkan seperti konveksi, produksi roti,. Kalo kelontongan juga banyak, warung-warung. Tapi itu ga bisa terlalu merekrut tenaga kerja. Yang tadi warung kopi bisa besar, banyak. Pedagang bakso yang juga bisa besar banyak. Dari dorong sampe bisa menetap punya kios. Sekarang rame banyak langganan.” (April, 2008)

Beberapa perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sasaran berupa omset yang meningkat dan penambahan asset usaha. Sebagai berikut pernyataan Bapak AK selaku pemanfaat program :

“Jadi penerimaan omset perhari bervariasi, minggu dan kemis, keuntungan sehari lebih Rp.1.000.000,- hari sabtu Rp. 750.000,-. Untuk hari biasa ± Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- lah. Saya dianjurkan oleh customer saya untuk buka cabang.” (April, 2008)

Dilanjutkan oleh Ibu PR salah satu perajin roti bantuan PPMK :

“Kami sudah punya tempat sendiri, dulunya masih ngontrak. Sekarang yang di lantai 3 kami sewakan juga. Yah lumayan setelah ada program ini. Untuk saat ini agak sulit, dengan harga-harga sekarang yah sulit. Mau dinaikan juga serba salah. Karena ada program ini, jadi membantu banget.”(April, 2008).

Pernyataan Ibu AS sebagai pemanfaat :

“Untung ada program PPMK sehingga bisa membantu, apalagi bapaknya sudah lama ga kerja, jadi kami hidup dan bayar sekolah anak dari dagang ini aja.”(April, 2008).

Rata-rata masyarakat pemanfaat mengharapkan mendapatkan pinjaman PPMK lebih banyak lagi dari sebelumnya karena bunga kecil. Komentar Bu PR selaku pemanfaat :

“Pengennya kalau bisa pinjaman meningkat. Jadi ditingkatkan lagi gitu.” (April, 2008).

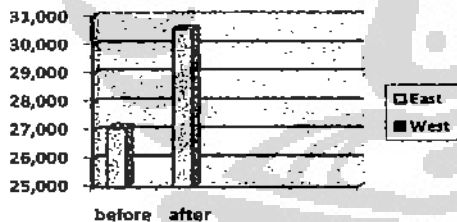
B.2. Manfaat Program Kredit Mikro LSM-MM untuk Orang Miskin di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur

Jumlah mitra MM di Kelurahan Bidara Cina sebesar 41 mitra selama 2 tahun program berjalan. Keterlibatan masyarakat sasaran dalam program memang masih kurang, sesuai dengan informasi yang diterima dari Bapak ST selaku mitra :

“Yah, lumayan mbak. Bisa kasi makan anak istri, buat bayar kontrakan, pulang kampung. Tapi sekarang semua harga naik, bingung juga mbak. Dulu sebelum naik BBM, kalo belanja 150 ribu, bisa dapat 250 ribu per hari. Sekarang yah bisa dapat 200 ribu juga sudah syukur mbak.” (April, 2008).

Kuatnya dampak kebijakan BBM terhadap pendapatan pihak mitra menjadikan hasil usaha menurun. Meskipun sebelumnya bisa mencapai Rp. 100.000,- / hari, yang saat ini cuma bisa mencapai paling besar Rp. 50.000,- per hari. Dalam evaluasi kaji dampak MM tahun 2008 disebutkan bahwa ada perubahan pada sasaran setelah menerima dan terlibat dalam program yaitu pendapatan yang meningkat dari Rp. 27,097,- menjadi Rp. 30,565,- setelah program berjalan. Adapun grafik peningkatan pendapatan sebagai berikut :

Grafik 01.
Peningkatan Pendapatan Mitra MM Bidara Cina, 2008



Sumber: diolah dari MM, 2008

Perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan setelah menerima program MM cukup banyak, selain meningkatnya pendapatan, juga penambahan asset usaha dan perubahan perilaku mitra karena bertambahnya pengetahuan tentang bagaimana memberikan pelayanan dan menghindari penggunaan bahan berbahaya di makanan yang diproduksi. Bagaimana melayani pembeli, kebersihan tempat jualan dan perabot yang digunakan, juga diajarkan dalam proses pendampingan seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya. Perubahan perilaku berusaha cukup menjadi bahan informasi yang bisa membantu meningkatkan kinerja usaha mikro para mitra. Berikut pendapat dari Bapak AH selaku mitra MM :

"Yah, dari segi mental, karena ikut latihan dengan MM tentang keberadaan makanan harus dijaga. Jangan menggunakan bahan pengawet seperti formalin. Penampilan harus bersih, perabot juga harus bersih. Jangan cemberut kalo melayani pembeli." (April, 2008).

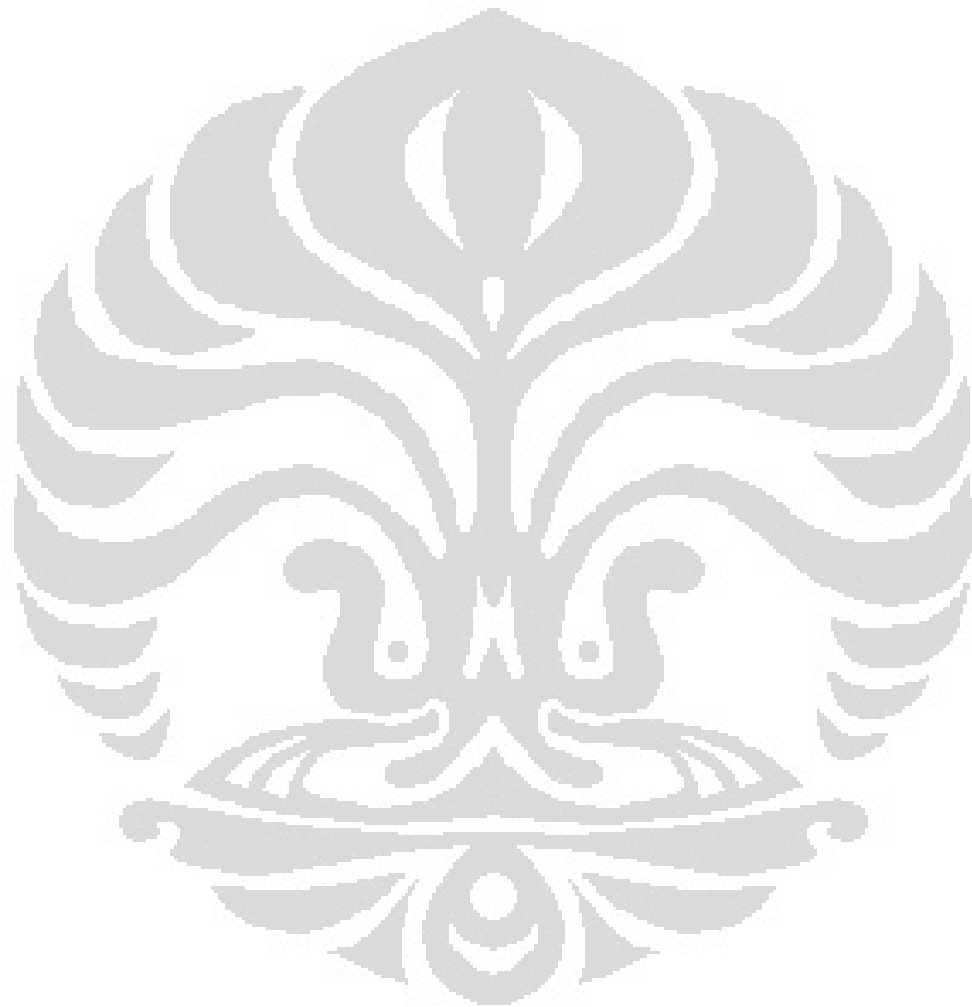
Seperti kebanyakan usaha mikro lainnya, bahwa dana yang dimiliki buat usaha dapat digunakan untuk keperluan mendesak lainnya seperti biaya untuk pulang kampung, berobat jika sakit, buat bayar rumah kontrakan atau sekolah anak. Jadi dana usaha bisa bersifat multifungsi. Berikut pendapat Bapak AH :

"Untuk setoran tentu ada, kadang-kadang terpake karena kebutuhan, pulang kampung, bayar kontrakan, sakit." (April, 2008).

Saran masyarakat untuk perbaikan program LSM - MM ke depan dari Bapak AH :

"Yah, kalo bisa usaha diperbesar lagi, tambah gerobak dan anak buah. Jual di tempat lain. Bapak harus punya pikiran maju, mesti punya pengetahuan. tapi bingung caranya. Cari lokasi baru, MM siap modal aja." (April, 2008).

Keinginan untuk memperluas usaha menjadi lebih besar sangat diharapkan, seperti salah satunya Bapak AH selaku mitra MM. Harapannya dapat menambah tenaga kerja untuk berjualan bubur ayam, sehingga hasil usaha yang diperoleh bisa lebih optimal.



BAB V PEMBAHASAN

A. Kesadaran Kritis dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Memahami upaya-upaya mengentaskan kemiskinan dengan berbagai strategi dan metode yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun LSM sangat ramai mewarnai program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Semua program sebaiknya diikuti dengan berbagai analisis penyebab, mengapa kemiskinan terjadi. Dalam kesadaran kritis (*critical consciousness*) dalam pemikiran Freire (lihat bab 2, hal. 30) tentang perlunya melihat masalah kemiskinan dari struktur dan sistem seperti sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya serta keterkaitan akibatnya dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi kemiskinan di perkotaan lahir karena makin besarnya arus urbanisasi yang datang dari desa dengan harapan untuk mendapatkan pembagian kue ekonomi karena saratnya pertumbuhan di daerah perkotaan. Lahirnya sektor informal banyak dikreasi oleh masyarakat urban yang kurang memiliki peluang bekerja di sektor formal. Usaha barang dan jasa yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Kemiskinan yang lahir diakibatkan oleh tidak cukupnya ketersediaan lapangan pekerjaan di kota menumbuhkan banyak usaha informal, namun usaha tersebut menurut Dieter Ever (1989) masih berbentuk usaha subsisten yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan saja. Bersamaan dengan pendapat Todaro (lihat Bab 2, hal. 25) yang menyatakan tentang kemiskinan absolut yaitu suatu jumlah penduduk yang hidup di bawah tingkat pendapatan minimum tertentu dimana banyak kelompok urban yang memiliki pendapatan di bawah standar minimum karena kebutuhan hidup di kota besar yang relatif mahal dengan pendapatan yang terbatas. Todaro menyebutkan jumlah penduduk miskin sebanyak sepertiga ($1/3$) yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Mereka hidup dari sektor informal dan memiliki usaha ekonomi mandiri (usaha mikro) seperti contoh penjaja makanan, pedagang kelontong di pinggir-pinggir jalan, pedagang kaki lima (PKL), penjual jasa sebagai sopir angkutan umum, ojek dan sebagainya. Kurang layak nya tempat tinggal karena tidak memiliki hak atas tanah, rumah dan jenis usaha yang rentan karena persoalan ketertiban, kebijakan harga, permodalan, tata

ruang dan penyebab lainnya yang lahir dari kebijakan pemerintah, menjadikan makin terdesaknya para kaum papa yang kebanyakan terdiri dari para pengusaha mikro.

Adapun akibat kemiskinan dapat dikategorikan sebagai akibat dari *setting* pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dengan memajukan industri-industri besar sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori modernisasi yang diadopsi pemerintah zaman orde baru (lihat Bab 2 hal.30 -32). Modernisasi pembangunan telah berhasil mengejar angka pertumbuhan ekonomi dalam menumbuhkan industri-industri besar di Indonesia, utamanya di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dan sekitarnya. Kehadiran wilayah pinggiran yang dalam teori dependensia disebut sebagai "*satelit/pinggiran*" dan kemajuan Jakarta sebagai "*sentral/metropolis*" ini juga merupakan kontribusi dari modernisasi. Dalam teori modernisasi klasik banyak membahas tentang bagaimana proses pembangunan Negara dunia ketiga dengan pola "*tradisional*" yang diwakili oleh desa - dan pola "*modern*" yang diwakili oleh perkotaan. Menurut teori ini, aspek-aspek tradisionalitas merupakan faktor penghambat bagi modernisasi. Sementara kondisi keterbelakangan desa sebagai akibat dari terpusatnya pembangunan di kota yang melahirkan urbanisasi yang disebut Dieter Ever (1989) sebagai *circular migrants* (lihat Bab 2, hal. 42).

Segala sesuatu yang terkait dengan industrialisasi merupakan ciri negara modern yang dimaksud oleh modernisasi. Padahal jumlah industri besar yang ada sangat sedikit, dibandingkan dengan pertumbuhan industri mikro yang mencapai 98%. Usaha mikro menjadi tidak "penting" karena sumbangan devisa yang diharapkan dari subsektor ini sangat sedikit dibandingkan dengan industri besar. Usaha mikro, dalam perkembangannya masih dicap tradisional karena belum menggunakan teknologi canggih untuk memproduksi barang-barang yang bagus, padahal menurut Sunkel dalam Hettne bahwa keterbelakangannya merupakan sebuah konsekwensi dari sistem ekonomi yang tidak adil dan hanya mengutamakan pertumbuhan (lihat Bab 2, hal 35). Juga kaitannya dapat dilihat dalam konsep *etnodevelopmentnya* Rodolfo Stevenhagen tentang alienasi masyarakat akibat penghilangan nilai tradisional dari pembangunan karena nilai yang dikembangkan menjadi baru dan bukan menjadi bagian dari apa yang telah dijalankan masyarakat. Sehingga pembangunan hanya "milik" kaum elit pembangunan, dan masyarakat tidak dapat terlibat banyak dalam proses tersebut.

Kalaupun nilai tradisional dihilangkan, maka akan terjadi krisis identitas dan berimplikasi pada integrasi bangsa dan pembangunan ekonomi, karena masyarakat tidak terlibat secara penuh. Ketimpangan akhirnya terjadi karena secara riil, itulah gambaran ekonomi yang dominan menyusun sistem ekonomi Indonesia, lemahnya upaya pengembangan usaha mikro yang banyak digeluti oleh kaum miskin mengakibatkan kesenjangan pembangunan.

Jenis kemiskinan yang ada di Indonesia secara nasional akibat dari modernisasi dapat diidentifikasi sebagai kemiskinan struktural karena sebabnya dari kebijakan pertumbuhan yang timpang antara kota-desa, industri besar - mikro. Kota-desa menjadi dikotomis, dan melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik dan budaya seperti kemiskinan. Kemiskinan perkotaan seperti kata Cox (Suharto, 2004) adalah kemiskinan yang disebabkan hakekat pertumbuhan perkotaan yang cepat, sehingga kaum miskin agak sulit melakukan adaptasi yang cepat terhadap percepatan pertumbuhan kota dan akhirnya tertinggal jauh dari pembangunan yang dilaksanakan (lihat Bab 2, hal 27). Kebijakan modernisasi yang rencananya akan mengalami tinggal landas pada tahun 1997, akhirnya berakhir dengan lahirnya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berdampak hingga saat ini.

Sementara teori depedensia klasik menghendaki peninjauan kembali pengertian "pembangunan" (Suwarsono, 2000) (lihat Bab 2, hal 35 - 37). Pembangunan sebaiknya memperhatikan perbaikan hidup sesuai dengan standar hidup yang baik untuk masyarakat, tidak hanya ditafsirkan sebagai proses industrialisasi, peningkatan output, dan peningkatan produktivitas sebagaimana yang selalu didengungkan oleh modernisasi. Perbaikan standar hidup dapat ditingkatkan dengan melihat kembali fungsi pembangunan yang berdimensi luas dan lebih bersahabat yaitu a *friendly process* (Sen, 1999). Adanya stagnasi dan kelambatan (retardasi) dalam proses pembangunan karena pengabaian terhadap ekonomi kecil dan mengejar pertumbuhan ekspor yang tinggi dari industri-industri besar. Sudah semestinya, paradigma pembangunan yang dikembangkan adalah proses penumbuhan kesempatan yang sama yang berjalan secara simultan pada usaha-usaha masyarakat yang tumbuh meskipun skalanya tergolong mikro namun bersifat mayoritas, yang sejalan dengan pengembangan pada aspek peningkatan sumberdaya manusia untuk menumbuhkan kemampuan dan skill,

perbaikan teknologi, pemerataan pembangunan antara kota-desa sehingga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah pedesaan, sehingga terjadi pemerataan, pengurangan kemiskinan dan secara otomatis dapat membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih bermartabat.

B. Deskripsi Program PPMK Pemda DKI Jakarta melalui Kredit Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Produktif Orang Miskin

Kemiskinan di DKI Jakarta terjadi merupakan dampak sentralitasnya pembangunan dan besarnya urbanisasi serta melahirkan "masa apung" seperti yang disebutkan Dieter Ever (1989) (lihat Bab 2 hal. 42) dimana kaum urban menjalankan peran-peran informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun usaha yang digeluti masih bersifat subsisten. Salah satu sektor informal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah usaha mikro masyarakat yang merupakan usaha produktif yang digeluti oleh kaum miskin perkotaan dan dibantu biayanya oleh program bina ekonomi PPMK yang merupakan program unggulan Pemda DKI Jakarta.

Kelahiran sektor informal merupakan sebuah realitas yang tidak bisa diabaikan dalam menyangga struktur ekonomi di Indonesia. Disamping itu, sampai saat ini usaha mikro merupakan penyedia lapangan kerja cukup besar. Menurut BPS tahun 2000 dalam profil Usaha Kecil Menengah (UKM), klasifikasi usaha mikro adalah tidak berbadan hukum. Di Indonesia pada tahun tersebut terdapat sekitar 39 juta badan usaha yang terdiri atas : 2005 buah usaha besar, 55.437 usaha menengah, dan 39.121.350 usaha kecil (90% adalah usaha mikro) (lihat Bab 2, hal.42 - 46). Pada tahun 2003 menjadi sebesar 98, 464 % jumlahnya. Sementara industri besar pada tahun 2003 hanya berjumlah 0,005%. Pesatnya pertumbuhan usaha mikro, adalah dimungkinkan makin besarnya kebutuhan mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan dan pengembangan sehingga usaha tersebut tetap eksis dan membantu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, disamping membantu menurunkan angka kemiskinan. Sudah saatnya pemerintah menitikberatkan pembangunan pada pengembangan sektor usaha mikro baik yang ada di wilayah pedesaan maupun perkotaan, guna memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Perlunya upaya restrukturisasi sektor-sektor produktif dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan

rumah tangga sejalan dengan pendapat Comia, Jolly dan Stewart (1987) sebagai upaya mengurangi kemiskinan, dimana fungsi Negara/pemerintah daerah memberikan ruang pada kebijakan sektoral yang melindungi kelompok rentan (lihat Bab 2, hal. 50). Kelompok rentan yang dimaksud adalah bisa berupa pengusaha mikro ini. Sebagaimana di DKI Jakarta, program PPMK milik pemerintah dan beberapa program LSM yang eksis di wilayah perkotaan adalah salah satu contoh upaya pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro untuk orang miskin.

1. Latar Belakang Kebijakan Ekonomi Produktif Di DKI Jakarta Melalui PPMK

PPMK lahir sebagai respon akibat krisis moneter tahun 1997, dimana banyak sekali industri besar yang kolaps dan makin berkembangnya usaha mikro masyarakat kecil. Program ini dirancang oleh Pemda DKI melalui BPM sebagai program yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat kelurahan. Program ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat dengan membangun perencanaan secara *bottom up* sebagai upaya membangun partisipasi melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan. Sesuai dengan kutipan wawancara Bapak AR (lihat Bab 4, hal. 105). Pemda DKI berusaha mempertemukan antara kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat melalui program PPMK. Daerah diberi otonomi untuk menentukan kebutuhannya dan mengaspirasikan kepentingan daerah melalui program yang direncanakan mereka melalui perwakilan yang ditunjuk dalam musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Masyarakat melalui forum Musrenbang diminta mengidentifikasi dan mengusulkan program-program yang akan dijalankan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Program PPMK diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta yang membahas tata cara dan pedoman pelaksanaan program. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan bina ekonomi yang memberikan dana bergulir untuk usaha mikro pada masyarakat melalui program PPMK Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagai program terbaik di DKI Jakarta Tahun 2007.

2. Kriteria dan Perumusan Kebutuhan Sasaran

Penentuan kriteria dan perumusan kebutuhan sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program. Salah satu kegiatan dalam program PPMK yaitu Bina Ekonomi merupakan program yang menangani kredit mikro yang digulirkan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan berdomisili di Kelurahan setempat di DKI Jakarta. Kelompok sasaran disebut sebagai "pemanfaat". Adapun kriteria pemanfaat adalah sebagai berikut :

1. Berdomisili di Kelurahan setempat di DKI Jakarta, dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki usaha yang masih berjalan
3. Ukuran usaha dibawah 20 juta ke bawah
4. 30 % dari asset adalah modal sendiri sesuai dengan kelayakan usaha.
5. Tidak tersangkut utang untuk dana usaha dengan pihak lain.

Penjelasan tentang kriteria sasaran dapat dilihat pada hasil wawancara pada Ketua Dewan Kelurahan Bapak YS terkait dengan kriteria sasaran (lihat Bab 4, hal.107 - 108). Beberapa aspek lain yang juga menjadi pertimbangan penilaian dari tim seleksi adalah tentang kepribadian dan karakter calon pemanfaat. Hal tersebut juga sangat penting untuk menjamin kelancaran usaha dan pengembalian pinjaman ke petugas PPMK.

Syarat formal dalam kriteria calon pemanfaat menjadikan program PPMK menjadi sulit diakses oleh komunitas urban tanpa identitas yang jelas. Dalam observasi yang dilakukan pada komunitas masyarakat miskin perkotaan (UPC), masalah kepemilikan KTP cukup sulit karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Sementara banyak kelemahan dalam kepengurusannya, baik dari sisi mendapatkan kartu keluarga yang cocok, maupun kepengurusan di tingkat RT hingga ke tingkat kelurahan.

Adapun masalah karakter, juga menjadi penting menurut pelaksana program dalam menentukan pengembalian dana yang dipinjamkan PPMK kepada para pemanfaat. Para TPK RW adalah bagian dari warga yang akan menjadi salah satu pemanfaat program, akan memberikan penjelasan detail mengenai karakter calon

pemanfaat kepada tim seleksi dan Dekel. Sifat pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan program adalah pendekatan kekeluargaan. Para petugas PPMK dapat melakukan tugas melalui sosialisasi di kelurahan dengan mengundang pihak-pihak yang menjadi perwakilan masyarakat seperti RT, RW, Toga dan Tomas, Pemuda dan lain-lain. Jadi semua anggota masyarakat yang terlibat merupakan mitra dari program PPMK.

Setiap TPK-RW dipilih 4 orang dari masing-masing RW untuk mewakili RW masing-masing dalam bidang PPMK. Didalamnya ada pembagian tugas untuk masing-masing bina ekonomi, fisik maupun sosial. Dari penjelasan Bapak DE bahwa program juga disosialisasikan melalui hubungan langsung pihak perwakilan RW (TPK-RW) kepada sasaran baik secara *door to door*, maupun diskusi keseharian karena tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain. Dalam kelompok TPK-RW juga dipilih ketua yang akan memimpin jalannya semua program secara koordinatif dan saling membantu jika terjadi masalah di masing-masing bidang. Pembagian tugas ini sebagai upaya untuk meningkatkan keberfungsian struktur pemerintahan hingga tingkat RT guna mendukung jalannya program pemerintah. Karena kerangka partisipatif masih dilihat sebagai peran serta dalam rangka mensosialisasikan kebijakan atau program pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak YS (lihat Bab 4, hal. 113).

Memahami pernyataan Bapak YS selaku pelaksana program, dapat dikatakan bahwa program PPMK masih belum berjalan secara partisipatif, karena fungsi-fungsi masyarakat dalam perencanaan program masih sangat terbatas. Perencanaan kegiatan melalui Musrembang Kelurahan, namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sasaran, sehingga banyak kebutuhan yang tidak bisa diakumulasi pada proses pembuatan keputusan. Sifat program masih terlihat sebagai upaya melibatkan masyarakat dengan kebijakan yang sudah ada di tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, upaya partisipasi dalam perumusan program melalui Musrembang dianggap bisa mewakili aspirasi masyarakat setempat. Hal ini akan mengakibatkan jebakan partisipasi (lihat Bab 2, hal. 50) (APMD dan Ford Foundation, 2005) yang dipahami sebagai bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya. Hal ini terjadi umumnya pada kebijakan dan program pemerintah yang bersifat struktural sehingga seringkali membuat pemerintah

tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaiknya pola sosialisasi lebih bersifat konsultatif sehingga dapat membangun proses pembelajaran dan meningkatkan *trust* masyarakat kepada program-program pemerintah.

3. PPMK sebagai Salah Satu Program Ekonomi Produktif yang *Pro-poor*

PPMK merupakan salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta. Sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan bahwa PPMK merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta (ada pada pasal 9). Arah kebijakan tersebut salah satunya menurunkan angka kemiskinan 2% per tahun, menurunkan pengangguran 3% pada tahun 2009 dan terwujudnya perbaikan pendapatan masyarakat miskin. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut adalah salah satunya melalui pengembangan ekonomi masyarakat melalui bina ekonomi usaha mikro yang bersifat produktif.

Konsep ekonomi produktif menurut pemerintah, diwakili oleh Bapak YS (lihat Bab 4, hal. 109) adalah sebagai usaha yang masih berjalan, sehingga peminjaman dana benar-benar dilakukan untuk usaha, bukan untuk konsumsi. Pihak PPMK mengantisipasi sifat konsumtif masyarakat peminjam/pemanfaat melalui pengarahan-pengarahan dan survey-survey petugas. Meskipun demikian, masih banyak yang menggunakan untuk membayarkan sekolah. Usaha produktif merupakan suatu keharusan guna mendapatkan pinjaman dari PPMK. Pemantauan penggunaan dana dilakukan oleh hampir semua pihak pelaksana PPMK sehingga dana dibelanjakan secara benar sesuai kebutuhan peminjaman yang disepakati. Fungsi kontrol cukup berjalan karena kehidupan pihak pemanfaat dan pelaksana program yang berdampingan. Fungsi ini sangat baik dikembangkan untuk memantau pelaksanaan dan membantu pengembangan usaha sasaran sehingga dapat berjalan secara optimal.

Usaha produktif yang dilaksanakan merupakan ekonomi rakyat yang dalam pengertian Riuntu, Comelius, Miara (2003) adalah kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (lihat Bab 2, hal. 42). Dengan kata lain ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat sendiri melalui swadaya guna

mengelola sumberdaya apa saja yang ada ditempatnya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya beserta keluarganya (subsisten) atau bisa disebut *economic survival* dari rakyat miskin. Bentuk kegiatan ekonomi ini dapat kita kategorikan sebagai ekonomi produktif karena sifatnya yang tumbuh dari rakyat, usaha bentuknya kecil, informal dan digunakan untuk bertahan hidup. Sejalan dengan pendapat Mubyarto (lihat Bab 2, hal. 42), rata-rata usaha mikro yang dijalankan masyarakat dan dibiayai oleh PPMK dilakukan dengan modal yang relatif kecil, dikelola secara swadaya, mandiri dan dikelola sendiri meskipun memiliki beberapa pekerja (maksimum sampai 4 orang) dan yang paling penting, menurut para pengusaha mikro adalah usaha yang mereka geluti bisa membantu ekonomi keluarga mereka. Yunus menyebutnya sebagai kewirausahaan sosial (*sosial enterpreneurship*), jadi usaha mikro nilainya lebih dari sekedar bisnis. Hubungan kekeluargaan antar pihak pengusaha dan pembeli/pengguna jasa bisa sangat kuat dan dapat membentuk modal sosial. Modal sosial ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat. Bila pemerintah menjadi mediator dalam program ini, maka hubungan pemerintah dan masyarakat akan lebih erat, hal ini akan memudahkan proses pembangunan di masyarakat sasaran karena terciptanya *trust* masyarakat kepada pihak pemerintah.

Jika melihat program PPMK, dimana kondisi masyarakat pemanfaat bervariasi dari yang usaha mikro hingga menengah (ada beberapa konveksi, pedagang bakso, produksi roti dan toko kelontong yang cukup besar dibiayai), maka sebenarnya program PPMK mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan beberapa usaha ini juga karena bantuan dari PPMK sebelumnya yang secara rutin membantu pihak-pihak yang dapat melakukan peminjaman secara benar dan lancar. Namun peminjaman sudah menjadi besar berkisar Rp. 10.000.000 – Rp.15.000.000,-. Sudah semestinya usaha yang sudah mulai membesar (diluar usaha mikro) mendapatkan asistensi oleh pihak-pihak yang kompeten di kelurahan khusus untuk pengembangan usaha pemanfaat ini untuk memperoleh akses ke perbankan. Semestinya pembiayaan lebih didahulukan untuk pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan kategori sebagai berikut sesuai dengan pendapat Riuntu, Comelius dan Miar (2003) bahwa pendapatan menengah kecil; rata-rata masyarakat yang didanai merupakan pelaku ekonomi mikro yang tidak memiliki badan hukum (lihat

tabel 5), mereka yang miskin, namun masih memiliki usaha secara ekonomis (*economically active poor*); banyak usaha yang tergolong sangat kecil namun masih bisa memberikan hasil untuk mendanai kebutuhan keluarga (subsisten) yang dibantu dalam program ini, masyarakat sangat miskin (*extremely poor*) atau masyarakat yang sama sekali belum tersentuh perbankan; dimana beberapa masyarakat yang mendapatkan program juga berasal dari masyarakat yang sangat miskin. Jika usaha sudah tergolong besar, saatnya pihak pelaksana dapat mengasistensi pemanfaat untuk memiliki status hukum (De Soto, dalam Hadinoto dan Retnadi, 2006) agar mendapatkan akses mudah ke bank (lihat Bab 2, hal. 46 - 47) agar usaha mereka mendapatkan pengakuan dan keamanan dalam berusaha.

Kredit PPMK lebih banyak diberikan pada RW termiskin di Kelurahan ini yaitu RW 02 dengan jumlah peminjam sebesar 140 orang tahun 2007. Prestasi peminjam terbukti sangat bagus dalam mengembalikan angsuran. Untuk di RW 04, jumlah peminjam 19 orang. Beberapa dari mereka juga awalnya belum memiliki usaha namun memiliki asset untuk memulai usaha dan setelah dibantu oleh PPMK, jumlah asset mereka bertambah.

Pengembalian pinjaman sangat penting dalam program PPMK untuk keberlanjutan program ke depan. Fungsi dana sangat baik jika dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati dengan dana jasa untuk pengelola sebesar 12% per tahun / selama 48 Minggu. Dana angsuran tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh peminjam lama untuk mengembangkan usaha lebih baik lagi atau bagi peminjam baru yang akan mengembangkan usaha. Namun demikian, program PPMK bina ekonomi patut diapresiasi karena program sudah cukup membantu pengembangan usaha mikro di masyarakat miskin Jakarta.

C. Deskripsi Program LSM MM melalui Kredit Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Produktif bagi Orang Miskin

1. Latar Belakang Program Ekonomi Produktif MM melalui Kredit Mikro

Masyarakat Mandiri (MM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program di wilayah urban. Lahirnya program ini selain sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di daerah perkotaan melalui pembiayaan usaha mikro, juga merupakan

upaya memberikan keberdayaan melalui inovasi produksi makanan jajanan yang merupakan usaha informal masyarakat urban yang mengalami kebangkrutan pasca isu formalin tahun 2005. Untuk mengembalikan posisi tawar masyarakat di sektor ini, maka MM hadir untuk memberikan alternatif pengembangan usaha dan program pengembangan kesadaran masyarakat untuk menghindari penggunaan BTP pada makanan. Selain itu, MM berusaha mendirikan kelembagaan lokal seperti koperasi melalui pengkaderan guna membangun partisipasi warga yang telah didampingi untuk meneruskan usaha permodalan yang telah dirintis MM. Disamping itu, Mitra MM telah memiliki usaha bersama dalam bentuk grosir sembako di Kelurahan Bidara Cina. Toko grosir sembako ini merupakan modal swadaya yang dikelola bersama oleh kader untuk pihak mitra.

Makin besarnya kebutuhan masyarakat akan kredit mikro, menjadikan MM berjalan secara otonom untuk mengembangkan program-program pendampingan dan perguliran kredit mikro guna menjawab persoalan-persoalan kemiskinan. Upaya untuk menjawab kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat (mitra) yang didampingi minimal Rp. 50.000,- per hari. Asumsinya, jika pendapatan naik, maka kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

2. Kriteria dan Perumusan Kebutuhan Sasaran

Sebagai program yang berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan, MM fokus pada masyarakat urban perkotaan utamanya pada mereka yang memiliki usaha mikro jajanan. Wilayah yang dipilih ada pada RW termiskin di Kelurahan Bidara Cina yaitu RW 07 dan RW 08. Meskipun demikian wilayah mitra yang didampingi MM mencakup 3 RW yaitu RW 07, RW 08 dan RW 09. Beberapa kriteria ditetapkan namun masih bersifat lentur seperti halnya kepemilikan KTP. Pendapat bapak PN tentang kemiskinan masih menggunakan standar The World Bank melalui pengukuran pendapatan. Adapun pernyataan tersebut adalah :

Proses rekrutmen dilakukan dengan asumsi awal pendapatan kurang dari \$ 2 per hari. Kepemilikan usaha juga atau mereka yang mau memiliki usaha yang penting memiliki komitmen, juga akan dibantu oleh MM. Kepemilikan KTP atau tidak, bukan menjadi syarat formal yang mesti dipenuhi, karena adanya kesulitan masyarakat urban

untuk memiliki KTP (lihat Bab 4, hal.126). Uji atau biasa disebut Studi Kelayakan Mitra (SKM) merupakan alat untuk menganalisis kelayakan mitra untuk menerima bantuan dana, khususnya menyangkut data tentang indeks rumah, pendapatan dan kepemilikan asset (lihat lampiran). Hampir semua mitra yang dibayai adalah datang dari kaum miskin kota. Latihan Wajib Kumpulan (LWK) merupakan pelatihan yang diadakan sebagai *entry point* calon anggota untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki MM utamanya pembiayaan usaha. Untuk wilayah urban, LWK hanya diadakan selama 3 hari saja, dikarenakan kesibukan masyarakat urban. Sementara wilayah pedesaan bisa mencapai 3 minggu lamanya.

Wawancara dengan masyarakat calon mitra dilakukan untuk mengetahui sejauhmana komitmen dan keinginan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Metode PRA seperti kelender musim digunakan secara tidak langsung melalui dialog dengan sasaran. Dompot Dhuafa yang merupakan pendana program, sebelumnya juga telah memiliki *assessment* tentang kondisi warga di Kelurahan Bidara Cina. MM melanjutkan misi tersebut melalui program dan pendampingan serta studi kelayakan mitra (studi kelayakan menggambarkan tentang kebutuhan dan kemandirian warga dalam menyerap bantuan-format terlampir). Rentang waktu survei dan rekrutmen melalui pelatihan berkisar sebulan lamanya. Dalam LWK, setiap sasaran harus mematuhi waktu dan mengikuti pelatihan secara penuh dan disiplin, sebagai syarat kemandirian untuk menerima bantuan. Jika ada yang tidak ikut, maka LWK harus diulang dari awal lagi. Jadi setiap sasaran harus komitmen untuk mengikuti latihan secara disiplin, guna menghindari pengulangan latihan. Adapun kriteria kelompok sasaran di wilayah urban adalah sebagai berikut :

- 1). Pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti boraks, formalin, dst. karena mereka belum memenuhi cara-cara pengolahan makanan jajanan yang aman pangan karena kurangnya modal dan kapasitas sumberdaya para pelaku usaha.
- 2). Penghasilan usaha maksimal Rp. 30.000,- / hari
- 3). Usaha dilakukan sendiri oleh klien (independen)
- 4). Skala modal / hari di bawah Rp. 500.000,-
- 5). Tidak mempunyai pembiayaan dari kelompok/pihak lain.

- 6). Rentan terhadap penggunaan bahan aditif berbahaya
- 7). Tinggal pada satu tempat domisili yang kumuh
- 8). Mau menjalankan usaha

Sejalan dengan pendapat Riuntu, Cornelius dan Miar (2003) (lihat Bab 2, hal.44) mitra MM termasuk masyarakat yang miskin dengan kategori indeks rumah yang miskin, kepemilikan asset yang masih kecil, *economically active poor* dan banyak yang belum tersentuh perbankan, bahkan rentan akan jebakan rentenir, mengingat banyaknya warga yang cenderung menggunakan jasa bank keliling karena kemudahan menjangkaunya, meskipun dengan bunga yang relatif besar.

Jenis pendekatan yang digunakan MM menurut LN adalah partisipatif. Mitra dididik untuk menjadi kader, yang akan membentuk lembaga lokal guna meneruskan perguliran dana yang telah dikelola oleh MM sebelumnya (lihat Bab 4, hal. 130). Alat PRA yang digunakan belum sepenuhnya diterapkan, proses *assessment* dan perencanaan program masih bersifat verbal. Dalam proses verbal (lihat Bab 2, hal. 61-62), yang terjadi dari respon masyarakat bersifat reaktif (Chambers, 1996). Masih menurut Chambers, keterlibatan perempuan miskin juga dapat akan sangat marginal dan kepemilikan informasi disesuaikan oleh orang luar (*outsider*), bukan dimiliki dan dibagi oleh orang dalam (*insider*). Selain itu juga, peran *outsider* sebagai *investigator* sementara orang dalam tidak menjadi inisiator dan katalis. Proses verbal dalam proses sosialisasi sebagai salah satu sebab yang menjadikan lemahnya partisipasi warga atau mitra terhadap program. Sebaiknya, MM menggunakan PRA penuh dalam proses *assessment* dan sosialisasi program guna meningkatkan partisipasi mitra dalam proses pertemuan rutin ataupun melanjutkan kelembagaan lokal menjadi lebih besar lagi.

3. Kredit Mikro sebagai Program Pengembangan Ekonomi Produktif yang *Pro-poor*

Pembiayaan ekonomi mikro di Kelurahan Bidara Cina sudah hampir 2 tahun dilaksanakan dan telah memasuki masa exit program. Program semi Grameen Bank yang dimodifikasi dari AIM Malaysia menjadi program Mitra MM dalam menyalurkan dana ZIS yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa, berupaya melahirkan kader dan kelembagaan lokal. Mitra merupakan panggilan untuk kelompok sasaran. Dengan

sistem jual beli (*murabahah*), pihak mitra memberikan margin penjualan kepada pihak MM sebesar 15% pada setiap pertemuan 2 mingguan. Dalam pendampingan program diharapkan banyak asistensi yang bisa diberikan pendamping kepada pihak mitra berupa penyuluhan tentang bahan pengawet dan tambahan makanan yang berbahaya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dagangan, tentang sertifikasi kehalalan dan kesehatan makanan juga diberikan pada usaha makanan mitra. Sebagaimana pernyataan LN selaku pendamping (lihat Bab 4, hal. 135).

Program LSM seringkali bersifat terbatas pada salah satu tempat. Ini disebabkan karena minimnya tenaga karena hanya mengandalkan pendamping yang berasal dari luar area (*outsider*) dan kelompok lokal saja seperti yang dialami pada program di Bidara Cina. Peran pendamping lebih banyak pada fasilitasi sekaligus sebagai tenaga rekrutment (jumlah dampingan sebesar 41 orang mitra) yang memungkinkan memberikan kualitas layanan yang lebih optimal pada mitra yang lebih sedikit. Dana yang cukup terbatas untuk pembiayaan mitra juga menjadi alasan. Namun demikian, upaya maksimal untuk menggalang partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Sebagaimana pada saat rekrutmen anggota, melalui berbagai kesempatan sosialisasi program dan berbagai pendekatan pada masyarakat, tokoh, maupun pemerintah setempat. Pernyataan LN selaku pendamping (lihat Bab 4, hal.127 dan 132).

Dalam proses pendampingan, diskusi tidak sekedar memberikan informasi (fungsi *informing*) seputar manajemen usaha, penggunaan bahan makanan yang aman, namun juga dapat membantu mitra melakukan identifikasi masalah mereka sendiri dan dapat diterjemahkan dan dikembangkan menjadi isu publik (lihat Bab 2, hal. 66 - 67) (Dubois dan Miley dalam Suharto, 2005). Kemampuan mengolah isu pribadi mitra menjadi isu publik merupakan bagian yang penting untuk melibatkan mitra secara aktif, juga membantu mitra memahami struktur dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang terjadi secara lebih kritis.

Kebutuhan untuk bisa bersinergi dengan semua pihak dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat komunitas. Kepandaian untuk merekayasa semua kondisi merupakan peran dari *community worker* yang menjalankan peran fasilitatif (lihat Bab 2, hal.68 - 69) dalam melakukan animasi sosial sehingga

membangkitkan semangat masyarakat untuk memiliki energi, semangat, inspirasi, dan antusiasme bagi termasuk didalamnya guna mengaktifkan, menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga (Adi, 2002) untuk membangun usaha menjadi lebih baik dan lebih maju.

Peran pendamping dari pernyataan Bapak AH (lihat Bab 4, hal. 136) dapat dilihat bahwa pendampingan bisa memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sasaran. Jika masyarakat punya pengetahuan, maka akan dapat merubah perilaku mereka, khususnya pada proses usaha dimana untuk manajemen usaha juga diajarkan seperti bagaimana melayani pembeli, menghindari penggunaan bahan berbahaya yang dapat merugikan orang yang mengkonsumsi, juga dari segi kesehatan dan kehalalan produk. Usaha mikro jajanan masyarakat akhirnya mendapatkan pencerahan dan terangkat kembali namanya, sehingga tidak terpuruk karena isu bahan berbahaya dalam makanan yang mereka usahakan.

Sesuai dengan tahapan program yang dimiliki MM, maka saat *exit* program sudah semestinya lembaga lokal terbentuk untuk meneruskan program. Kader-kader yang telah disiapkan akan meneruskan kerja pendampingan di komunitas. Koperasi serba usaha juga telah terbentuk yang menjual sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dan mengikat masyarakat melalui keanggotaan.

Sementara kondisi penerima manfaat setelah program yaitu : 1) telah memiliki lembaga lokal; 2) memiliki usaha bersama; 3) telah memiliki sertifikasi halal dari LP POM MUI; 4) peningkatan kesadaran akan pentingnya penataan Tempat Usaha, kebersihan tempat usaha, dan pelayanan kosumen; 5) memiliki pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat dan halal, tahu bahan tambahan dan pengawet (BTP) makanan berbahaya, dan mengetahui akibat BTP berbahaya; 6) lebih trampil dalam menyampaikan pendapat, membuat laporan keuangan kelompok, motivasi diri sendiri maupun orang lain.

Pembangunan sosial menurut Midgley (2001) (lihat Bab 2, hal. 50).adalah proses perencanaan perubahan sosial untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk dengan memperhatikan proses dinamis dari pembangunan ekonomi, dengan melakukan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner seperti pemahaman persoalan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat setempat

yang senantiasa berubah, mesti dikuasai oleh lembaga dan khususnya pendamping dalam merumuskan program dan pendekatan ke masyarakat sasaran. Penguatan kelembagaan lokal sebagai salah satu upaya untuk sustainability program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi wadah untuk menguatkan kelompok komunitas dan menampung segala bentuk aspirasi mereka, diikuti dengan upaya-upaya pemecahan masalah yang riil. Peran program sejak dari pendampingan hingga pembentukan lembaga lokal, juga merupakan upaya untuk memberikan pemampuan (*to give ability*) pada masyarakat menuju kemandirian. Program telah memberikan fungsi *empowering, enabling, supporting* (lihat Bab 2, hal. 68) dan perlu memberikan *protecting* (Suharto, 2005) guna melindungi aset dan usaha yang dimiliki masyarakat dalam bentuk usaha mikro mereka, melalui kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah dalam mengawal kebijakan yang memihak usaha kecil sebagai upaya perlindungan usaha mikro masyarakat dari pembersihan pihak Trantib.

D. Analisa Perbedaan Program Kredit Mikro versi Pemerintah dan LSM dalam Mengembangkan Ekonomi Produktif Masyarakat

1. Kemiskinan dan Pemberdayaan melalui Pengembangan Usaha Mikro

Kemiskinan pada umumnya dapat dilihat dengan kendala-kendala masyarakat dalam melaksanakan usaha untuk memperbaiki tingkat ekonominya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rachbini dkk (1995) (lihat Bab 2, hal.28) yaitu :

- a. Kelangkaan Modal karena kurangnya akses yang cukup terhadap kelembagaan kredit. Akses yang dimaksud bisa berupa KTP sebagai alat untuk mendapatkan program secara legal. PPMK sebagai program pemerintah daerah menghususkan pada penduduk yang memiliki KTP DKI Jakarta, sehingga kaum urban lain yang tidak memiliki KTP DKI tidak bisa mengakses program. Sementara program MM masih membolehkan pihak sasaran mendapatkan fasilitas pembiayaan meskipun tidak memiliki KTP DKI. Namun kondisi tersebut cukup beresiko karena kredit yang diberikan tidak memiliki jaminan apa-apa (misal KTP). Beberapa kasus terjadi dan MM harus merelakan beberapa mitra "kabur" dari program setelah menerima pembiayaan. Kutipan wawancaranya

dengan pihak MM, yaitu pendamping LN (lihat Bab 4, hal. 140). Pemecahan masalah dilakukan bersama kelompok mitra yang bermasalah. Meskipun hasil gerobak yang disewakan atau dijual belum mencukupi dana yang dipinjam oleh mitra tersebut. Namun dari proses pemecahan masalah, kelompok sudah menggunakan kapasitasnya untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun beberapa kebiasaan instan yang dimiliki masyarakat mengenai pinjaman ke bank keliling / pihak rentenir masih sulit dihapuskan. Dualisme pembiayaan mengakibatkan banyak usaha terhambat maju, kemungkinan juga karena biaya yang diberikan melalui kredit mikro belum mencukupi kebutuhan sasaran. Atau bisa jadi, kredit bank keliling lebih fleksibel untuk dibelanjakan diluar kebutuhan usaha (konsumtif) meskipun bunga yang ditawarkan cukup tinggi sampai 30%. Masalah ini berlaku pada program pemerintah maupun LSM. (lihat Bab 4, hal. 133, 140, 141).

b. Kurangnya akses terhadap pasar yang kompetitif, terhadap para penguasa antara lain karena struktur pasar yang "distortif" menyebabkan kelompok miskin tidak memiliki *bargaining position* yang kuat dalam sistem niaga.

Pemberlakuan perda 11 Tahun 1988 cukup menghambat program MM di komunitas urban Jakarta. Kelompok usaha informal makanan jajanan tidak memiliki bargaining untuk mempertahankan tempat usaha yang sebenarnya cukup menjanjikan berkembangnya usaha mereka karena posisi pasar yang mereka dapatkan ramai pengunjung. Padahal mereka (pihak mitra) sudah membayar retribusi untuk bisa menggunakan tempat tersebut. Namun pihak pemerintah dalam hal ini Trantib tetap mengangkut gerobak jualan mereka, dan Trantib tidak mau tahu jika mereka juga dipungut oleh pihak Pemda melalui retribusi. Distorsi pasar karena lemahnya posisi tawar akibat kebijakan yang tidak memahami kelompok miskin menjadikan usaha yang menyangga hidup mereka harus hilang. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan pendamping LN dari MM (lihat Bab 4, hal.139).

Semestinya pemerintah memberikan solusi dengan memberikan ruang yang cukup sehat bagi warga yang berusaha mikro seperti itu. Mengingat LSM sudah berusaha membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di

perkotaan, yang semestinya hal tersebut merupakan tanggungjawab Negara (*state obligation*) untuk menyediakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi pengembangan ekonomi mikro dengan menyediakan konsultasi dan pembinaan, dimana ini dapat bekerjasama dengan pihak LSM.

Sesungguhnya, orang miskin umumnya adalah pekerja keras. Studi Sethuraman (1981) telah menemukan bahwa orang miskin itu pekerja keras, cerdas dan ulet, mereka tidak bisa hidup (*survival*) bermalas-malasan, dan harus bekerja keras, kapan saja dan dengan cara bagaimanapun untuk dapat melepaskan diri dari apa yang disebut dengan *perangkap kemiskinan*. Rata-rata waktu kerja yang panjang, Namur margin yang diperoleh masih cukup sedikit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kenaikan BBM dan harga-harga bahan pokok, sehingga margin yang diperoleh menurun. Kaum miskin terisolasi dari kehidupan komunitas yang lebih maju, kerentanan akan peraturan dan kondisi yang senantiasa berubah dan bisa mengganggu usaha mereka. Hal-hal yang tidak terduga sering mendorong mereka kehilangan kekayaannya sehingga membuat mereka lebih miskin. Mereka memiliki ketidakberdayaan untuk memiliki posisi tawar yang lebih baik. Kondisi ketidakberdayaan menyebabkan makin rentannya posisi mereka dalam berusaha dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Sementara itu, program PPMK memiliki cukup perlindungan karena berbasis di kelurahan masing-masing. Kalaupun ada yang berusaha diluar, kondisi usaha relatif lebih aman karena jenis usaha sudah tergolong lebih besar daripada usaha milik anggota MM, disamping rata-rata pemanfaat berusaha di dekat rumah mereka masing-masing. Persoalan pasar yang kompetitif menjadi masalah karena masih lemahnya bergaining usaha sasaran menyangkut kualitas dan kemasan, juga *lay out* usaha. Juga jaringan pasar yang lemah karena produksi lebih diarahkan untuk konsumsi masyarakat wilayah setempat. Belum ada perluasan pasar, meskipun beberapa telah mencoba memulai membuka akses pasar sendiri. Pendapat dari Bapak AK (lihat Bab 4, hal. 142). Kesadaran untuk memperluas pasar didasarkan pada peningkatan omset dan asset usaha masing-masing. Pihak pelaksana PPMK berlaku sebagai motivator meskipun masih dalam metode yang terbatas. Namun semuanya dikembalikan pada

kemampuan mereka yang berusaha. Beberapa juga mengalami kerentanan akibat fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok dan BBM, sehingga margin yang diperoleh sedikit. Mereka tidak memiliki bergaining pasar yang cukup, lihat komentar Bu PR selaku pemanfaat PPMK (lihat Bab 4, hal. 142).

- c. Tidak punya akses terhadap informasi (pasar dan harga) yang mutakhir sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien dan tidak dapat memiliki keunggulan komparatif.

Jenis usaha yang dimiliki masih dikelola secara terbatas pada keluarga. Usaha tersebut tidak memiliki keunggulan karena dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Terbatasnya kemampuan karena latar belakang pendidikan dan jaringan pasar yang lemah, menyebabkan lemahnya informasi dan terjadinya kelemahan pada usaha mikro mereka. Kondisi ini terjadi pada hampir semua usaha informal yang dikelola oleh pemerintah dan LSM. Perlu upaya-upaya terpadu untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan peningkatan akses pasar agar usaha lebih bersifat komersial.

- d. Mereka memiliki kualitas rendah sebagai "*entrepreneurs*" (wiraswasta) yang harus responsif menyebabkan banyak sekali kesempatan ekonomi yang tersedia di pedesaan dan hanya dimanfaatkan oleh orang yang tidak miskin.

Kaum miskin rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, sehingga dinamika *entrepreneur* atau wiraswasta tidak banyak dimiliki mereka. Hal ini juga dikarenakan akses informasi yang lemah untuk mengembangkan jaringan pasar dan membuat usaha lebih responsif terhadap setiap perkembangan. Namun yang terjadi sebaliknya, rendahnya pendidikan dan kurangnya bantuan pihak lain memungkinkan usaha mereka berjalan stagnan. Kondisi ini terjadi di kedua pihak, baik di program PPMK maupun di program MM. Posisi pemberdayaan sudah seharusnya mendorong kemampuan masyarakat untuk responsif terhadap pengembangan usaha. Kalaupun terjadi sedikit perubahan, namun itu sekali lagi dimanfaatkan oleh pihak yang cenderung memiliki lebih banyak akses dan pengetahuan tentang usaha (lihat point b di atas).

Prinsip-prinsip LKM dalam *Microcredit Summit* tahun 1997 di New York disepakati 4 prinsip sesuai dengan pendapat Ismawan dan Budiantoro (2005) :

1. Menjangkau kaum miskin; program PPMK bina ekonomi dalam bentuk kredit mikro belum sepenuhnya menjangkau kaum miskin. Beberapa usaha yang dibiayai sudah tergolong besar dengan omset sebesar Rp. 200.000,- - Rp. 1.500.000,- perhari. Meskipun usaha ini awalnya mendapatkan pinjaman skala mikro yaitu Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- . perolehan pinjaman yang besar dikarenakan ketepatan angsuran dalam kurun waktu/periode pinjaman yang sudah lama dimana beberapa sudah mendapatkan pinjaman sejak tahun 2002, dan meningkat sesuai kelipatannya. Sementara MM sangat menjangkau kaum miskin dengan indikator kelayakan mitra sesuai dengan indeks rumah, pendapatan dan kepemilikan asset yang rata-rata kecil dan dikategorikan miskin. Rata-rata usaha yang dibiayai adalah pedagang gerobak-an.
2. Menjangkau dan memberdayakan perempuan; kedua program baik dari PPMK maupun MM melibatkan perempuan dalam kredit mikro-nya. Namun alasan keterlibatan mereka lebih pada kesempatan perempuan lebih banyak daripada laki-laki karena suami harus bekerja, atau kebetulan perempuan menjadi pengusaha mikro. Persoalan gender belum dijadikan sebagai salah satu aspek kajian pemberdayaan meskipun perempuan banyak terbelakang secara ekonomi karena masalah ketidakadilan gender.
3. Mengembangkan kelembagaan berkelanjutan secara finansial; pihak MM sudah memulai upaya ini, pasca program kredit mikro yang didampingi oleh pendamping lapangan, akan terbentuk kelembagaan lokal yang akan menjaga sustainability program. Sementara program PPMK belum mengarah pada penguatan kelembagaan lokal karena sifatnya yang struktural dan tergantung sangat besar pada kebijakan pemerintah daerah. Jadi program PPMK bina ekonomi bisa dikatakan belum bersifat *sustainable*.
4. Dampak terukur; diperluas pada aspek lain selain ekonomi, misal pemberantasan buta huruf, peningkatan pendidikan anak, dan lain-lain ; meskipun PPMK dibarengi dengan program lain seperti fisik dan sosial, namun dampak program terhadap perluasan aspek non-ekonomi belum terlalu mendapatkan perhatian. Sifat program masih menyangkut pencapaian target guliran, namun belum pada perluasan program seperti untuk mempertahankan

pendidikan anak. Meskipun dampak program secara ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran, dampak sosial yang terjadi sehubungan dengan peningkatan standar hidup masyarakat secara tidak langsung. Namun kegiatan masih terbatas pada perguliran dana dan pelatihan usaha bagi pemanfaat yang dapat memperoleh akses tersebut.

Untuk program MM, setiap membaca ikrar Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM) pada setiap perkumpulan dua mingguan, pihak MM memberikan afirmasi positif bagi para mitra untuk tetap mendorong anak-anak bersekolah. Kredit yang diberikan oleh kedua program dalam meningkatkan pendapatan mitra juga berdampak tidak langsung bagi pendidikan anak. Umumnya, program juga masih bersifat ekonomi. Meskipun demikian, program kredit yang dijalankan dapat membantu menghapus kelaparan dunia melalui pengurangan kemiskinan (Yunus, 2007).

2. Ukuran Kemiskinan, Pemberdayaan dan Pendekatan Community Development

Menurut Bappenas kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang/kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemda DKI menggunakan kriteria kemiskinan menurut BPS, dimana kemiskinan adalah bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Sementara menurut Bank Dunia menyatakan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari (Arifin, 2006), digunakan sebagai analisa awal untuk rekrutmen mitra bagi MM. Dari kedua pendekatan ini dapat dilihat perbedaan pendekatan diantara keduanya. Pemda memakai pendekatan pengeluaran dalam bentuk kalori, sementara MM melihat faktor pendapatan sebagai indikator awal dalam menjaring usaha mikro masuk dalam pembiayaan bantuan MM. Persyaratan formal juga merupakan suatu keharusan bagi program Pemda, sementara MM lebih longgar tanpa syarat formal. Perbedaan ini berakibat pada pola rekrutmen dan model program baik dari struktur maupun aturan main yang dipakai. Meskipun tujuan program hampir sama.

Prinsip dasar dari CD adalah pengembangan kemitraan masyarakat dengan agen eksternal, yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga profesional dengan

menekankan pentingnya masyarakat menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dan kemandirian (*self-help*) (Midgley, 2001). Pandangan Midgley ini sudah semestinya menjadi acuan program pemberdayaan pemerintah maupun LSM dimana sama-sama membutuhkan agen eksternal-profesional untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat menuju penguatan otonomi diri dan kemandirian. Hal ini telah dilakukan oleh MM, sementara pemerintah belum melaksanakan hal ini. Rata-rata mendorong kemampuan dari dalam untuk melakukan asistensi-administrative ke masyarakat sasaran meskipun dengan pengetahuan yang terbatas tentang fasilitasi. Fungsi masyarakat belum sepenuhnya menjadi subyek pembangunan karena sifat program yang masih terbatas memberi otonomi pada mereka. Sebaiknya program pembangunan didasarkan pada kebutuhan (*needs*) masyarakat bukan pada permintaan (*demand*) sehingga program yang dicanangkan tidak bersifat reaktif. Tantangan Yunus dan Korten untuk memperhatikan dan memberdayakan masyarakat paling bawah dalam proses pembangunan merupakan jalan untuk pembangunan itu sendiri yang seharusnya merujuk hanya pada perubahan positif dan terukur dalam pendapatan perkapita 50% populasi termiskin (lihat Bab 2, hal. 49).

Pendekatan program dapat dikatakan lebih bersifat profesional jika dilihat dari sifat program yang teknikal, tradisional, dan netral; pendekatan ini memiliki perspektif merawat masyarakat, membangun dan mengorganisasikan mereka (Gilbert dan Specht dalam Suharto, 2005). Pendekatan ini berupaya meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat, juga memperbaiki pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada. Gerakan sosial yang dibangun kedua program ini belum bersifat transformatif karena tujuan program tidak mencari akar permasalahan yang ada sebagai penyebab diskriminasi dan ketertindasan yang menyebabkan kemiskinan. Kenyataannya, gerakan kedua program ini belum bicara tentang kelas, gender dan ras, sehingga sifatnya belum transformatif.

Community Development (CD) adalah salah satu konsep yang memiliki strategi pembangunan komunitas dalam pembangunan sosial. Prinsip dasar dari CD (lihat Bab 2, hal. 50) adalah pengembangan kemitraan masyarakat dengan agen eksternal, yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga profesional dengan menekankan pentingnya masyarakat menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dan kemandirian (*self-*

help) (Midgley, 2001). Proses pendampingan yang dilakukan oleh MM sebagai lembaga eksternal merupakan suatu langkah pengembangan masyarakat. System kelembagaan dan kader yang lahir dari proses pendampingan merupakan bagian dari proses menuju kemandirian masyarakat untuk membangun dan mendapatkan akses pemodal dan dilingkungan mereka sendiri. Sementara program pemerintah melalui PPMK lebih memampukan insider sebagai pelaksana dan juga pendamping (meskipun makna pendamping lebih pada proses sosialisasi, penagihan dan pengusulan program) namun sudah semestinya pemerintah memberikan pelatihan yang lebih menguatkan pendampingan yang dilakukan oleh pihak TPK-RW yang telah ada. Seperti dijelaskan oleh Bapak DE, Bapak MN dan Bapak YS (lihat Bab 4, hal. 111-112). Model pendampingan menjadi rutin karena berjalan seputar sosialisasi, pengusulan anggaran dan penagihan angsuran. Meskipun demikian, jumlah dana jasa yang diberikan cuma 12%, berbeda dengan program MM yang berjumlah 15 % dari margin pendapatan masyarakat sasaran. Meskipun demikian, dana tersebut akan dikembalikan menjadi modal swadaya untuk usaha bersama mitra.

Pendampingan MM, setelah perguliran dana, selain sosialisasi dan penagihan angsuran setiap 2 mingguan, juga pertemuan diisi dengan materi-materi penyuluhan tentang makanan yang aman dari bahan tambahan dan pengawet yang berbahaya, motivasi berusaha, sertifikasi dan isu-isu lain yang relevan dengan pengembangan usaha masyarakat dampingan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ife (1995) beberapa prinsip CD yang perlu diperhatikan dalam program pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) *Holism*; yang memerlukan kajian komprehensif tentang sebuah program pemberdayaan yang sifatnya lintas sektoral. Untuk program PPMK bina ekonomi, masih sangat sektoral sifatnya, sementara program MM sudah membuka upaya *network* pada sertifikasi makanan sehat dan halal, meskipun masih terbatas sifatnya. Upaya-upaya perluasan kegiatan *network* lintas sektoral masih sangat dibutuhkan.
- 2) Konfrontasi terhadap struktur yang kurang menguntungkan (*structural disadvantage*), dengan memperhatikan hakekat yang mendasar tentang kelas, gender, dan penekanan kelompok etnis. Kurang responnya kedua lembaga

tentang persoalan ini pada akhirnya menjadikan kegiatan yang sudah berjalan seperti pengamanan Trantib terhadap gerobak kelompok mitra MM menjadi persoalan. Masalah gender yang banyak menyebabkan diskriminasi dan kemiskinan belum banyak diperhatikan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Secara menyeluruh, konsep HAM belum banyak diterapkan. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan bagi keluarga juga belum dipahami secara baik oleh Mitra MM. Sebagaimana penertiban dari Trantib DKI yang membawa kerugian besar bagi mitra, juga informasi program yang kurang diketahui dan sebenarnya dapat dijangkau masyarakat sasaran.

- 3) Pendekatan ekologi seperti penggunaan *renewable resources* dan mengurangi ketergantungan penggunaan *non-renewable resources* belum banyak dilakukan kedua program, baik PPMK maupun pemerintah. Fokus program masih seputar perguliran dana saja untuk membangun kemandirian masyarakat sasaran.
- 4) Pemberdayaan sudah dilakukan keduanya meskipun dengan kadar yang berbeda-beda tergantung pada pemahaman tentang makna pemberdayaan bagi masyarakat. Meskipun begitu, orientasi kedua program adalah bagian dari proses pemberdayaan itu sendiri.
- 5) Kedua program belum mengembangkan keterkaitan individu dan isu publik dalam suatu aksi di level komunitas, dimana keterkaitan individu dapat dikembangkan dengan aspirasi dan pencapaian tujuan untuk membangun aksi di level komunitas.
- 6) Kedua program belum mengembangkan upaya kepemilikan masyarakat (*community ownership*) seperti *green space* juga kepemilikan struktur dan proses menyangkut kontrol terhadap pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sudah semestinya, program kredit mikro sebagai *entry point* pemberdayaan komunitas dikombinasikan dengan berbagai isu yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut.
- 7) Kemandirian (*self reliant*) sudah mulai dilakukan kedua program dalam memanfaatkan potensi lokal yang ada, dimana rata-rata usaha mikro adalah mandiri, hanya memerlukan banyak pengembangan sehingga lebih *human face*.

- 8) *Independence from the state*; untuk program MM sudah pasti bersifat independen, karena dana yang digunakan merupakan sumbangan sosial dari dana ZIS Dompot Dhuafa. MM bebas berkreasi menggunakan dana yang ada melalui program-program pemberdayaan. Namun program PPMK masih sangat tergantung pada kebijakan pemerintah, meskipun dikelola oleh Dekel dan pelaksana dimasing-masing RW. Sebagai dana pemerintah, sifatnya tentu agak kaku, tergantung pada petunjuk teknis yang telah diatur. Belum ada upaya penggalangan dana yang tidak mengikat guna meneruskan program secara mandiri.
- 9) *Immediate goal and ultimate system*; semua program ditujukan untuk tujuan terbaik dan dekat dengan kebutuhan sasaran. Namun rata-rata masih lemah pada proses pembiayaan program yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.
- 10) *Organic development*; PPMK mulai melembaga hingga ke tingkat struktur RT meskipun masih bersifat struktural, sebaliknya LSM sudah mulai kemandirian melalui pembentukan lembaga lokal.
- 11) *The pace of development*; sebaiknya Pemerintah dan MM memperhatikan isu-isu lokal dan internasional guna memajukan programnya. Banyak *lessons-learned* dari program-program di tataran lokal, nasional, maupun internasional yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam program-program pengembangan masyarakat. MM sudah banyak melakukan kemajuan ini, namun PPMK masih sangat minim mengadopsi banyaknya proses pembelajaran ini.
- 12) *External expertise*; MM menggunakan pola ini sebagai pendamping masyarakat guna mengembangkan kemampuan komunitas, sementara PPMK bina ekonomi pernah menggunakan jasa fasilitator kelurahan (faskel) sebagai eksternal expertise. Namun akhirnya dihapuskan dalam struktur PPMK.
- 13) *Community building*; setiap program sudah semestinya melakukan pembangunan komunitas. Pembangunan komunitas sebaiknya diartikan sebagai pembangunan sumberdaya manusia dan pemampuan komunitas secara mandiri dan massif.
- 14) *Process and outcome*; program sebaiknya berorientasi pada proses dan dampaknya pun juga berorientasi proses. Proses belajar komunitas untuk

memperoleh kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat ditempa oleh banyak hal. Fungsi pendamping semestinya berjalan sebagai katalis program. MM dan PPMK sudah mulai melakukan hal ini meskipun masih sangat terbatas metodenya.

- 15) *The integrity of process*; merupakan upaya mendorong proses yang terintegrasi. Kedua program belum banyak mendorong hal ini.
- 16) *Non-violence*; kedua program telah menerapkan anti kekerasan dengan menghargai hak-hak individu dan aktivitas program dilakukan dengan berdasar pada musyawarah.
- 17) *Inclusiveness*; program PPMK membuka ruang terhadap perbedaan etnisitas dan religi. Sementara program MM belum mengalami perluasan terhadap isu religi, meskipun kegiatan sosialnya secara terbuka membantu siapapun yang membutuhkan.
- 18) *Consensus*; belum ada konflik yang berarti dalam masyarakat sasaran yang perlu dimediasi oleh kedua program
- 19) *Cooperation*; kerjasama antar elemen program baik pelaksana maupun sasaran menjadikan program berjalan dengan baik dan lancar.
- 20) *Participation*; partisipasi sudah semestinya dilakukan, namun kendalanya di program birokrasi masih mengalami jebakan partisipasi karena lebih banyak diartikan sebagai penterjemahan kebijakan pemerintah (Ford Foundation dan APMD, 2005)
- 21) *Defining Need*; program yang disampaikan sudah semestinya melalui *assessment* yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. PPMK masih menggunakan Musrembang kelurahan sebagai bagian *assessment* meskipun hasilnya masih sangat parsial. Sementara MM sudah melaksanakan *assessment* yang cukup optimal dalam proses mendefinisikan kebutuhan masyarakat sasaran.

Tahapan pemberdayaan dalam konsep Adi (2002) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Keinginan untuk merubah nasib semestinya berasal dari komunitas, meskipun tahapan program sudah

melalui masa terminasi. Pemberdayaan merupakan tahap yang *cyclical* (berbentuk siklus) dan spiral, dan bukan merupakan tahapan yang secara berurutan. Sifat *cyclical* menjadikan program berorientasi proses, dimana kebutuhan akan intervensi dalam membangun kesadaran komunitas merupakan jalan panjang menuju keberdayaan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kondisi program PPMK dan MM di komunitas urban dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan (Engagement) : merupakan tahap yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu persiapan petugas dimulai dengan pelatihan awal kepada petugas dan persiapan lapangan menyangkut kesiapan lapangan melalui studi kelayakan. Tahap ini juga disebut *engagement*. Program MM memiliki 3 fase yaitu perintisan, penguatan kapasitas dan pelepasan untuk kemandirian material dan wadah kelompok. Sementara program pemerintah melakukan proses perumusan program melalui Musrembang. Musyawarah ini diikuti oleh warga masyarakat melalui tokoh dan struktur pemerintahan di kelurahan hingga tingkat RT.
- b. Tahap Pengkajian (Assesment) : assesment bersamaan dengan Musrembang. Sementara program MM dilakukan melalui assessment kebutuhan warga. Tahap ini sangat menentukan perancangan program yang akan dilaksanakan di wilayah sasaran.
- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan (Designing) : perumusan kebijakan PPMK oleh BPM tingkat provinsi dengan melakukan desain program agar lebih implementatif. Begitupun perumusan program di tingkat MM yang didasarkan pada hasil *assessment* langsung kepada komunitas.
- d. Tahap pemformulasian Rencana Aksi (*Designing*) : perumusan kebijakan PPMK oleh BPM tingkat provinsi. Sementara program MM digodok bersama tim program sesuai dengan need assessment yang telah ditemukan sebelumnya. Langkah-langkah perumusan dilakukan oleh Tim perumus dan pelaksanaan program ditentukan selama 2 tahun pendampingan.
- e. Tahap Implementasi di tingkat kelurahan melalui proses sosialisasi ke warga masyarakat melalui tokoh dan struktur pemerintahan di kelurahan hingga tingkat RT. Kemudian dilakukan pengusulan. Setelah pengusulan dilakukan seleksi.

Setelah seleksi, dilakukan pencairan sampai pada penagihan angsuran oleh tim TPK RW. Untuk MM, implementasi program dimulai setelah diadakan LWK, yang menggodok calon anggota untuk berdisiplin dan memahami tujuan pembiayaan usaha.

- f. Tahap Evaluasi : evaluasi dilakukan setiap bulan oleh PPMK, dan oleh MM setiap pekan, bulanan dan triwulan.
- g. Tahap Terminasi (Disengagement) : merupakan tahap exit program oleh MM pada 6 bulan terakhir, sementara program PPMK masih terus berjalan tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Melihat proses partisipasi mitra dalam kelompok MM, sebaiknya program masih tetap mendapatkan pendampingan hingga mitra benar-benar mau berpartisipasi secara mandiri melalui penterjemahan kebutuhan pribadi mereka menjadi isu penting dalam kebijakan publik.

Ukuran keberhasilan program bisa dilihat sejauh mana masyarakat melakukan pengangsuran biaya yang dipinjamkan pihak LSM maupun Pemerintah. Pada program PPMK tahun 2006, kemacetan yang terjadi sekitar 11%. Sementara program MM, untuk kemacetan dihitung selama 3 bulan berturut-turut tidak mengangsur baru dikatakan macet. Kategorinya diberikan partisipasi pembayaran angsuran sebesar 34,38 kategori kemacetan diukur jika pembayaran tidak dilakukan mitra selama 3 bulan berturut-turut. Secara umum, kemacetan tidak terjadi di program MM. Hal ini dikarenakan pendampingan dan kontrol kelompok menjadikan tingkat angsuran cukup baik dan orientasi proses yang dibangun oleh MM dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat termasuk dalam pengangsuran pembiayaan. Jika ada kasus-kasus maka pendamping mengunjungi pihak mitra secara langsung, bila kelompok belum bisa menyelesaikan masalah angsuran atau kasus khusus terkait dengan anggota kelompok mitra. Pernyataan pendamping LN (lihat Bab 4 hal. 140).

Untuk melihat secara rinci perbedaan program PPMK yang dilaksanakan Pemda DKI Jakarta dan LSM MM di Bidara Cina pada tabel sebagai berikut :

Tabel 23
Perbedaan Program Usaha Mikro melalui Kredit Mikro
antara PPMK Pemda DKI dan LSM MM, 2008

No	Proses Program	Bina Ekonomi PPMK Pemda DKI Jakarta	Kredit Mikro MM
1	Perumusan Kebutuhan Sasaran	Musrembang Kelurahan	Semi PRA – Verbal
2	Jenis Pendekatan	comdev – direktif struktural	Comdev – non struktural
3	Tingkat Partisipasi	Semi Partisipatif	Konsultatif
4	Jumlah Modal	Relatif Besar	Relatif Kecil
5	Jenis Usaha yang dibiayai	Mikro dan relatif aman dari gusuran	Mikro dan rentan gusuran
6	Lama program	Relatif lebih lama sejak 2002	2 tahun sesuai dengan tahapan program
7	Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> • Struktural menggunakan aparat TPK RW yang dipilih • Sifat pendampingan untuk penagihan dan undangan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Non struktural • Sharing informasi setiap pertemuan • Sertifikasi kehalalan dan kesehatan produk
8	Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan pemerintah setempat • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah setempat
9	Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem yang direktif dan struktural menjadikan kelambatan dalam merespon kondisi disekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggusuran Trantib karena adanya stigma sosial dan perda 11 menyangkut ketertiban umum
10	Orientasi program	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil (angsuran yang lancar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses (identifikasi kemacetan berdasarkan waktu triwulan)
11	Coverage Area	<ul style="list-style-type: none"> • Luas menyangkut semua kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatif terbatas
12	Sifat Program	<ul style="list-style-type: none"> • Tergantung Program Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian dengan adanya kelembagaan lokal
13	Model Pendampingan	Individual	Kelompok
14	Manfaat Program	Peningkatan pendapatan dan beberapa pemanfaat memperoleh akses pelatihan pembukuan usaha	Selain peningkatan pendapatan, juga penambahan pengetahuan, ketrampilan komunikasi dan pembuatan laporan keuangan pihak sasaran

Sumber : diolah dan temuan penelitian, 2008

E. Analisa Manfaat Program Kredit Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Produktif bagi Orang Miskin yang telah Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan LSM

Studi Sethuraman (1981) tentang orang miskin merupakan pekerja keras, cerdas dan ulet untuk *survival* sebenarnya merupakan upaya untuk keluar dari *perangkap kemiskinan*. Ketiadaan akses membentuk isolasi bagi mereka dan menurunkan keberdayaannya. Untuk itu, kaum miskin juga membutuhkan stimulan dana untuk membantu mereka keluar dari perangkap kemiskinan. Juga bentuk-bentuk pemberdayaan lain seperti pelatihan, perbaikan pendidikan dan perbaikan teknologi.

Kemiskinan melahirkan kerentanan, yang mencerminkan keadaan tanpa penyangga atau cadangan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga sering mendorong mereka kehilangan kekayaannya sehingga membuat mereka lebih miskin dari sebelumnya seperti razia yang terjadi pada kelompok penjual makanan jajanan, merupakan hal-hal yang dapat membuat mereka makin miskin. Menurut David Cox dalam Suharto (2004) (lihat Bab 2, hal. 27) membagi dimensi kemiskinan perkotaan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan. Sementara masyarakat miskin memiliki berbagai kekurangan untuk bisa maju, mengimbangi lajunya pertumbuhan kota. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM dan Pemerintah merupakan suatu solusi di tengah ketidakberdayaan masyarakat miskin. Beberapa kendala di atas menyebabkan lemahnya akses pengusaha mikro pada akses permodalan dan membutuhkan perhatian khusus untuk dapat memperbaiki perkembangan usaha mereka. Meskipun usaha mikro sudah membuktikan ketahanannya, apalagi setelah Indonesia digoyang krisis pada tahun 1997, menunjukkan bahwa usaha tersebutlah yang eksis di masyarakat kita. Usaha mikro memerlukan perbaikan sistem usaha seperti penguatan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, perbaikan teknologi pemberian subsidi atau bantuan modal. Upaya tersebut akan mengantarkan usaha mikro yang sulit mendapatkan akses dana lembaga perbankan/keuangan dapat menjadi *bank-able* (Riuntu, Comelius, Miar, 2003) (lihat Bab 2, hal. 44). Beberapa manfaat ekonomi mikro dapat dilihat sebagaimana pernyataan para pemanfaat PPMK dan mitra program MM sebagai berikut :

1. Manfaat PPMK Bina Ekonomi bagi Sasaran Program

Secara umum program PPMK bermanfaat bagi banyak orang utamanya para pengusaha mikro - kecil. Dari data wawancara, beberapa pemanfaat memberikan rasa terima kasih telah dibantu PPMK. Dari Bapak AK selaku pemanfaat program PPMK yang melakukan pembayaran cepat agar dapat memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi (lihat Bab 4 hal. 119). Beberapa pemanfaat mendapatkan akses pelatihan seperti Pak SDR sebagai salah satu pemanfaat yang mendapatkan pelatihan tata boga dan manajemen keuangan usaha kecil dari Kelurahan.

Kemudahan peminjaman dengan uang jasa yang kecil membuat masyarakat pemanfaat mau ikut terlibat sebagai sasaran program. Uang jasa yang kecil sebesar 12% sangat menarik bagi pemanfaat sehingga banyak yang melakukan peminjaman di atas 2 kali. Mereka lebih senang karena telah terbantu oleh PPMK. Apalagi ditengah krisis kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok. Kalaupun ada yang mengalami masalah, pihak PPMK tetap akan menyelidiki setiap masalah yang dialami pemanfaat, dan mencoba memberikan langkah-langkah penyelesaian masalah.

Beberapa peran pendamping, juga bermanfaat bagi masyarakat pemanfaat program. Dalam kasus sakit dan tidak bisa menjalankan usaha dengan baik, tentunya akan berpengaruh pada angsuran pinjaman, maka pihak TPK-RW akan membantu mengatasi masalah sakit tersebut dengan mengantar pihak pemanfaat untuk berobat. Sampai akhirnya, pihak peminjam akan mulai usaha lagi dan mengangsur secara normal. Sehubungan dengan itu, pihak TPK-RW juga sudah membantu pihak pemanfaat dalam penagihan dana pinjaman. Formulir pinjaman dana yang biasa disebut kelayakan, kadang dibantu oleh pihak TPK-RW sebagai pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Manfaat Program Kredit Mikro MM bagi Mitra

Kehadiran MM di Kelurahan Bidara Cina merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat miskin, utamanya yang bergerak di usaha mikro. Bencana banjir yang dialami masyarakat dapat merusak dan menghilangkan asset yang dimiliki untuk berusaha. Banyak manfaat yang diberikan MM kepada kelompok sasaran. Strategi-

strategi yang bersifat intervensionis dilakukan MM dan juga PPMK dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial yang ada secara riil (Midgley, 2001) (lihat Bab 2 hal. 50). Sebagai bukti, beberapa pernyataan mitra MM di Kelurahan Bidara Cina seperti Bapak AH (lihat bab 4 hal. 144). Peran pendamping MM sangat dibutuhkan mitra. Belum ada masalah yang berarti dalam interaksi antara mitra dengan pendamping, malah kegiatan pendampingan sangat membantu mereka utamanya dalam pembiayaan usaha dan pertukaran informasi menyangkut usaha mereka.

Proses pendampingan merupakan alat efektif untuk bertukar informasi dan membangun sinergi antara pendamping dan mitra MM. Lahinya kepercayaan dari pihak sasaran adalah proses integritas yang dibangun melalui program ketika menjadikan suatu proses pembangunan menjadi suatu proses populis, menyatu dan saling melengkapi diantara pihak fasilitator dan sasaran. Menurut Ife (2001) (lihat Bab 2, hal. 39 - 40) HAM sebagai suatu level kolektivitas dimana komunitas, masyarakat dan bangsa memiliki hak-hak yang lebih luas untuk memiliki "kekuasaan" guna mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial maupun politik. Sebagaimana kredit sebagai HAM (Yunus, 2007) (lihat Bab 2, hal. 49) yang dapat membantu membuka peluang-peluang baru bagi si miskin untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya serta mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Selain itu menurut Cornia, Jolly dan Stewart (1987) (lihat Bab 2, hal. 39) yang menegaskan peran Negara untuk melindungi masyarakat rentan (*vulnerable*) melalui kebijakan sektoral, agar kaum miskin dapat memperoleh akses pada sektor-sektor produktif yang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Program tersebut diperuntukkan untuk membantu memperluas hasil dan pendapatan masyarakat rentan seperti petani kecil, industry kecil, dan memberikan pelayanan untuk mendapatkan akses kredit yang murah dan mudah dan juga memperbaiki teknologi yang mereka gunakan. Fungsi fasilitatif, teknis dan edukatif dalam pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkan usaha mikro masyarakat urban yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program-program pengurangan kemiskinan menjadi agenda masing-masing stakeholder baik dari kalangan pemerintah maupun LSM dengan berbagai model dan modifikasi. Usaha mikro merupakan sasaran paling empuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, disamping usaha ini berjumlah paling besar yaitu sekitar 98, 464 % pada tahun 2003 yang menyusun struktur ekonomi Indonesia. Realitas ini sangat sulit untuk disangkal, karena besarnya proporsi usaha mikro, mengalahkan usaha besar yang hanya berjumlah 0,005%. Orientasi pembangunan dalam pengaruh modernisasi masih sangat kuat, terciptanya kantong-kantong kumuh yang sering disebut "pinggiran" di DKI Jakarta merupakan dampak dari distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Dampak orientasi pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ini melupakan bagian terbesar dari penyangga struktur ekonomi Indonesia, yaitu usaha mikro masyarakat yang terbukti sangat kuat digoyang krisis.

Terbukti secara nyata bahwa orang miskin mampu membayar kredit dengan baik, tidak mengemplang seperti kebanyakan yang dilakukan oleh para pengusaha besar dalam berbagai kasus perbankan dan keuangan. Penyediaan kredit mikro oleh LKM baik dari LSM maupun pemerintah merupakan sebuah oase ditengah ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Sudah saatnya orientasi pembangunan dibalikkan, bukan lagi fokus pada penumbuhan industry besar, namun dengan memperhatikan sektor-sektor mikro masyarakat. Bagaimanapun, secara riil, usaha mikro inilah yang menyangga hampir seluruh struktur ekonomi Indonesia.

Kesimpulan ini dirangkum berdasarkan tujuan penelitian yaitu 1) Untuk menganalisa perbedaan pelaksanaan program dana bergulir PPMK Pemerintah DKI Jakarta dan MM melalui kredit mikro dalam pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin; 2) Untuk menganalisa manfaat program kredit mikro dalam pengembangan

ekonomi produktif bagi orang miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan LSM. Berdasarkan tujuan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Pemerintah DKI Jakarta dengan PPMK melalui kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan perkotaan utamanya melalui program bina ekonomi dengan intervensi kredit mikro. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan bahwa PPMK merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta (ada pada pasal 9). Pendekatan kekeluargaan yang diterapkan oleh pelaksana program melalui struktural pemerintahan sampai ke tingkat RT. Program ini merupakan pemberian pinjaman kredit mikro bagi usaha mikro yang dilaksanakan oleh TPKK (Dewan Kelurahan beserta perangkat UPKMK, Tim Seleksi, TPK-RW). TPK RW yang merupakan perwakilan dari setiap RW masing-masing untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan ditingkat RW. Sistem penjaminan keluarga dan asuransi diterapkan untuk menghindari kemacetan pengembalian angsuran. Pendampingan yang dilaksanakan lebih bersifat administratif seperti penagihan, pemberian undangan jika ada kegiatan dan rekrutmen anggota. Belum ada upaya pendampingan yang lebih intensif seperti transfer informasi, motivasi dan fungsi-fungsi fasilitatif lainnya yang bisa mendorong percepatan kemajuan usaha masyarakat miskin. Jumlah pinjaman hingga saat ini berkisar Rp. 500.000,- – Rp. 15.000.000,-.
2. Program LSM - MM melalui kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin merupakan jawaban atas makin besarnya kebutuhan masyarakat akan kredit mikro, menjadikan MM berjalan secara otonom, lepas dari Dompot Dhuafa yang dahulunya cuma merupakan bagian program, untuk mengembangkan program-program pendampingan dan perguliran kredit mikro guna menjawab persoalan-persoalan kemiskinan. Program MM merupakan modifikasi dari program Grameen Bank yang diadopsi oleh AIM Malaysia. Kriteria anggota ditetapkan namun masih bersifat lentur seperti halnya ada sebagian anggota sasaran yang tidak memiliki KTP. Latihan Wajib Kumpulan

(LWK) merupakan pelatihan yang diadakan sebagai *entry point* calon anggota untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki MM utamanya pembiayaan usaha. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penguatan masyarakat dari aspek pembiayaan usaha mikro. Mitra dididik untuk menjadi kader, yang akan membentuk lembaga lokal guna meneruskan perguliran dana yang telah dikelola oleh MM sebelumnya. Sistem yang diterapkan adalah kelompok dan pendampingan yang dilaksanakan sudah bersifat fasilitatif dan lebih intensif seperti transfer informasi, motivasi dan sertifikasi, dan fungsi-fungsi fasilitatif lainnya yang bisa mendorong percepatan kemajuan usaha mikro masyarakat miskin. Jumlah pinjaman berkisar Rp. 500.000,- – Rp. 6.000.000,-

3. Analisa perbedaan program kredit mikro versi Pemerintah dan LSM – MM dalam mengembangkan ekonomi produktif masyarakat sebagai berikut :

3.1. Program PPMK Bina Ekonomi :

- Perumusan kebutuhan sasaran berasal dari Musrembang Kelurahan, namun dapat terjebak pada pola partisipasi sebagai bentuk sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat.
- Sifat program masih sangat struktural dengan menggunakan aparat kelurahan hingga tingkat RT.
- Usaha yang dibiayai bersifat mikro dan relatif aman dari gusuran.
- Program berlangsung selama \pm 6 Tahun (lebih lama).
- Sifat dampingan masih struktural, lebih bersifat administratif daripada pemberdayaan dan sifatnya individual.
- Sistem direktif dan struktural menjadikan kelambatan dalam merespon kebutuhan masyarakat.
- Orientasi cenderung pada hasil angsuran yang lancar
- Syarat formal untuk menjadi pemanfaat merupakan suatu keharusan

- Tingkat partisipasi masih merupakan semi partisipatif karena sifatnya yang masih struktural.
- *Coverage area* lebih relative lebih besar
- Jumlah modal yang digulirkan relative lebih besar
- Jumlah anggota/mitra relatif lebih besar
- Sifat kelembagaan masih tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang menjadi perencana program PPMK. Kebijakan dapat berubah tergantung pada *political will* setempat. Belum adanya upaya untuk menguatkan kelembagaan lokal dari pihak masyarakat sendiri, padahal sumber-sumber ekonomi lokal dapat dikembangkan (misal koperasi yang telah ada di masyarakat lokal).
- Peningkatan pendapatan dan beberapa pemanfaat memperoleh akses pelatihan pembukuan usaha

3.2. Program Kredit Mikro MM :

- Perumusan kebutuhan sasaran berasal dari *assessment* langsung ke komunitas.
- Program tidak bersifat struktural karena adanya ruang konsultatif dan pertemuan rutin untuk sharing informasi dan pengetahuan.
- Syarat formal untuk menjadi pemanfaat bukan merupakan suatu keharusan
- Tingkat partisipasi sudah cukup partisipatif karena sifatnya yang tidak struktural.
- *Coverage area* relative lebih kecil
- Model pendampingan secara kelompok

- Jumlah modal yang digulirkan relatif lebih kecil
- Jumlah anggota/mitra relatif lebih kecil
- Masa program terbatas cuma selama 2 (dua) tahun.
- Orientasi program berdasarkan proses karena kemacetan dilihat sebanyak triwulan angsuran & keterlibatan dalam kegiatan.
- Pendampingan dari pihak eksternal memberikan banyak masukan bagi pengembangan kualitas kredit yang diberikan pada usaha mikro. Kehadiran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan banyak informasi bagi pengembangan diri dan usaha mikro masyarakat yang di dampingi. Peran program sejak dari pendampingan hingga pembentukan lembaga lokal, juga merupakan upaya untuk memberikan pemampuan (*to give ability*) pada masyarakat. Proses pendampingan yang dilakukan oleh MM sebagai lembaga eksternal merupakan suatu langkah pengembangan masyarakat. System kelembagaan dan kader yang lahir dari proses pendampingan merupakan bagian dari proses menuju kemandirian masyarakat untuk membangun dan mendapatkan akses pemodalan dilingkungan mereka sendiri.
- Penguatan kelembagaan lokal sebagai salah satu upaya untuk sustainability program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi wadah untuk menguatkan kelompok komunitas dan menampung segala bentuk aspirasi mereka, diikuti dengan upaya-upaya pemecahan masalah yang riil.
- Sifat program tidak struktural, pendamping dan masyarakat memiliki kebebasan menentukan berbagai keputusan sesuai dengan kesepakatan mereka.
- Manfaat program, selain peningkatan pendapatan, juga penambahan pengetahuan dan ketrampilan komunikasi dan pembuatan laporan keuangan pihak mitra.

4. Analisa manfaat program kredit mikro untuk pengembangan ekonomi produktif bagi orang miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan LSM
 - 4.1. Analisa Manfaat Program PPMK Bina Ekonomi : 1) bertambahnya pendapatan para pemanfaat, 2) bertambahnya peran perempuan secara nyata di rumah tangga dan wilayah publik karena terlibat dalam program, 3) meningkatnya taraf hidup masyarakat utamanya pemanfaat, bertambahnya pengetahuan tentang manajemen keuangan dan ketrampilan usaha bagi pemanfaat yang memperoleh akses pelatihan.
 - 4.2. Analisa manfaat program MM melalui kredit mikro adalah: 1) telah memiliki lembaga lokal; 2) memiliki usaha bersama; 3) telah memiliki sertifikasi halal dari LP POM MUI; 4) peningkatan kesadaran akan pentingnya penataan, kebersihan tempat usaha, dan pelayanan kosumen yang baik; 5) memiliki pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat dan halal, mengetahui tentang bahan tambahan dan pengawet (BTP) pada makanan dan akibatnya; 6) lebih trampil dalam menyampaikan pendapat, membuat laporan keuangan, motivasi kepada diri sendiri maupun pada orang lain.

Masih lemahnya bergaining usaha mikro kelompok sasaran menyangkut kualitas dan kemasan, juga *lay out* usaha. Juga jaringan pasar yang lemah karena produksi lebih diarahkan untuk konsumsi masyarakat wilayah setempat (subsisten). Belum ada perluasan pasar, meskipun beberapa anggota PPMK maupun MM telah mencoba mulai membuka akses pasar sendiri.

Pendekatan program juga dapat dikatakan lebih bersifat profesional dimana program bersifat teknikal, tradisional, dan netral; pendekatan ini memiliki perspektif merawat masyarakat, membangun dan mengorganisasikan mereka dengan berupaya meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat, juga memperbaiki pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada. Gerakan sosial yang dibangun belum bersifat transformatif karena tujuan program tidak mencari akar permasalahan yang ada sebagai penyebab diskriminasi dan ketertindasan. Kenyataannya, gerakan kedua program ini belum bicara tentang kelas, gender dan ras, sehingga sifatnya belum transformatif.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh MM sebagai lembaga eksternal merupakan suatu langkah pengembangan masyarakat. System kelembagaan dan kader yang lahir dari proses pendampingan merupakan bagian dari proses menuju kemandirian masyarakat untuk membangun dan mendapatkan akses permodalan dilingkungan mereka sendiri.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM dan Pemerintah merupakan suatu solusi di tengah ketidakberdayaan masyarakat miskin. Beberapa kendala di atas menyebabkan lemahnya akses pengusaha mikro pada akses permodalan dan membutuhkan perhatian khusus untuk dapat memperbaiki perkembangan usaha masyarakat kecil. Meskipun usaha mikro sudah membuktikan ketahanannya, apalagi setelah Indonesia digoyang krisis pada tahun 1997, menunjukkan bahwa usaha tersebutlah yang eksis di masyarakat kita. Sebagaimana kredit adalah HAM yang dapat membantu membuka peluang-peluang baru bagi si miskin untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Lahinya kepercayaan dari pihak sasaran adalah proses integritas yang dibangun antara pihak pelaksana dan sasaran melalui program, ketika menjadikan suatu proses pembangunan menjadi suatu proses populis, menyatu dan saling melengkapi (*complementer*) diantara pihak fasilitator dan sasaran.

B. Saran – Saran

Setelah memahami berbagai persoalan yang ada diantara kedua lembaga yang melakukan program kredit mikro untuk masyarakat miskin, beberapa hal yang perlu dibenahi adalah sebagai berikut :

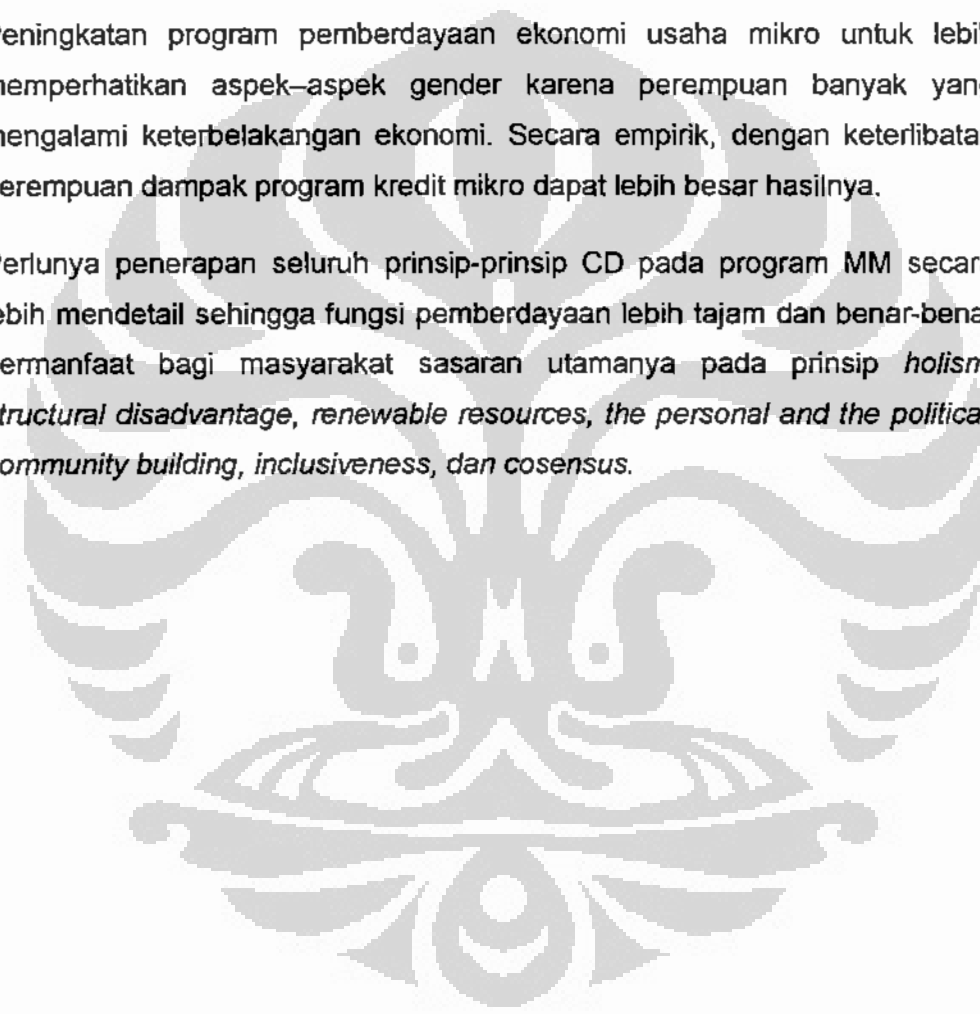
1. Untuk pemerintah (PPMK) :
 - a. Meskipun pendekatan kekeluargaan yang diterapkan oleh pelaksana program, fungsi insider (khususnya TPK RW) sebagai pelaksana dan pendamping program patut dikuatkan melalui berbagai ketrampilan fasilitasi yang dapat digunakan dalam pengembangan masyarakat.
 - b. Sebaiknya sistem yang digunakan dalam program bersifat kelompok, disamping lebih efisien, kelompok dapat menggunakan kapasitasnya untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka sendiri. Secara perlahan akan

makin memberdayakan mereka khususnya dalam proses penyelesaian masalah.

- c. Kebiasaan instan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari bank keliling dapat dikurangi jika program kaum miskin makin ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan jumlah pinjaman, kenggotaan, pendampingan yang intensif, dan sosialisasi program yang lebih berkualitas.
- d. Sebaiknya program pemberdayaan ekonomi usaha mikro lebih memperhatikan aspek-aspek gender karena perempuan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi akibat budaya yang patriarkat dan secara empirik dampak program kredit mikro dapat lebih besar hasilnya jika diberikan pada perempuan.
- e. Perlunya menggalang kerjasama dengan pihak LSM yang benar-benar *concern* pada masyarakat miskin. Ini memungkinkan karena LSM memiliki banyak *tools* yang bisa digunakan untuk menganalisa dan menguatkan program-program pembangunan, utamanya pada penguatan TPK-RW selaku pendamping pemanfaat program, kemudian bersama-sama secara simultan mengurangi angka kemiskinan seperti yang diharapkan Pemda DKI Jakarta 2% pertahun.
- f. Perlunya kaji ulang kebijakan daerah melalui Perda 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum kaitanya dengan pengembangan usaha mikro-produktif masyarakat dan pencarian alternatif kebijakan tata ruang yang lebih memihak kepentingan rakyat banyak kaitannya dengan kebijakan peningkatan standar hidup masyarakat untuk pengentasan kemiskinan guna mencapai kehidupan yang lebih bermartabat.
- g. Perlunya penerapan seluruh prinsip-prinsip CD pada program-program pemerintah sehingga fungsi pemberdayaan lebih tajam dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sasaran.

2. Untuk LSM – MM :

- a. Waktu yang cukup singkat dalam proses rekrutmen menjadikan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam program. PRA secara gamblang sesungguhnya dapat diterapkan jika pihak pelaksana bisa lebih "sabar" melaksanakan tahap *assessment* program hingga implementasi. Bila masyarakat dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut, maka rasa memiliki dan ketertarikan akan program akan lebih besar sehingga secara otomatis tingkat partisipasi akan relatif tinggi.
- b. Upaya peningkatan akses pasar dapat dilakukan melalui negosiasi dengan pemerintah tentang tempat-tempat strategis yang berlaku sebagai pasar usaha mikro yang telah dibina, atau secara kreatif membantu pihak-pihak pengusaha mikro mencari tempat-tempat alternatif yang mudah, ramai pembeli dan aman.
- c. Sebagai agen *civil society*, selain melakukan peran edukasi, *informing*, dan training, MM dapat melakukan fungsi mediasi dan negosiasi dengan pihak pemerintah daerah khususnya mengenai Perda 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum yang cukup merugikan pihak mitra MM. MM juga perlu menggalang aliansi dengan sesama LSM yang *concern* pada rakyat miskin di perkotaan yang ada di DKI Jakarta khususnya pada isu tata ruang dan masalah ketertiban umum.
- d. Informasi yang diberikan pada saat pendampingan dalam membangun kesadaran masyarakat sebaiknya tidak saja pada bahan makanan yang berbahaya, tata cara pelayanan, pelaporan keuangan, ketrampilan komunikasi atau kebersihan pengolahan usaha saja, tapi juga bagaimana memfungsikan peran pendamping dalam menterjemahkan permasalahan yang dialami oleh mitra, sehingga dapat dikembangkan menjadi isu publik. Ini akan memperkaya wawasan masyarakat sasaran tentang persoalan yang dihadapi dan bagaimana solusinya, sisi lain dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/mitra.

- 
- e. Terus berperan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan kredit mikro untuk kaum miskin, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengobati "kebiasaan instan masyarakat" mendapatkan pinjaman dari bank keliling (rentenir), melalui peningkatan jumlah pinjaman, kenggotaan, pendampingan yang lebih intensif, dan sosialisasi program yang lebih berkualitas.
- f. Peningkatan program pemberdayaan ekonomi usaha mikro untuk lebih memperhatikan aspek-aspek gender karena perempuan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi. Secara empirik, dengan keterlibatan perempuan dampak program kredit mikro dapat lebih besar hasilnya.
- g. Perlunya penerapan seluruh prinsip-prinsip CD pada program MM secara lebih mendetail sehingga fungsi pemberdayaan lebih tajam dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sasaran utamanya pada prinsip *holism, structural disadvantage, renewable resources, the personal and the political, community building, inclusiveness, dan cosensus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto S. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. 2002
- Alston, M, Bowles, W. *Research for Social Workers; An Introduction to Methodes*. Australia : Allen & Unwin, NSW1998
- Ambar Teguh S. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.
- APMD, Ford Foundation. *Trasformasi Ekonomi-Politik Desa*. Editor Gregorius Sahdan. Yogyakarta : APMD Press. 2005
- Arifin, B. *Kemiskinan, Bank Dunia dan Revitalisasi Pertanian*. Jakarta : INDEF. 2006
- Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006.
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES. 1987.
- _____. *Participatory Rural Appraisal (PRA). Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius-Oxfam. 1996.
- Colter, Suharto. *Laporan Penelitian Grameen Bank di Kecamatan Nanggung, Bogor*. Bogor : YMU. 1993
- Cornia, Jolly, Stewart. *Adjustment with Human Face Volume I; Protecting The Vulnerable and Promoting Growth. A Study by UNICEF*. Oxford : Clarendon Press. 1987.
- Cresewell, J. W. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California : Sage Publication. 1994
- Dillon Dan Hermanto. *Prisma No. 3 Tahun 1993*
- Faqih, Mansour. *Bebas Dari Neoliberalisme*. Yogyakarta : Insist Press. 2003
- _____. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Insist Press. 2001
- Hikmat, H. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora. 2004
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2006

- Kartasasmita G. Kebijakan dan Pembangunan Sosial. Malang : Universitas Brawijaya. 1996.
- Korten, D. Getting to The 21st Century; Voluntary Action and The Global Agenda. West Hartford : Kumarian Press. 1991.
- Hadinoto, S, Retnadi, J. Micro Credit Challenge, Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. Jakarta : PT Elex Media Computindo-Kelompok Kompas, Gramedia. 2006.
- Hetne, Bjorn. Teori Pembangunan dan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Ismawan, Budiantoro. Keuangan Mikro, Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah. Jakarta : Gema PKM. 2005
- Jim Ife. Human Rights and Social Work; Towards Rights – Best Practice. Cambridge University Press. 2001
- _____. Community Development Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice. Melbourne : Addison Wesley Longman Australia. 1995
- Kusnadi. *Nelayan*, Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung : Humaniora Utama Press. 2000
- Kumiadi, T.K. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi. Kerjasama Perhepi & Yae. Bogor : Penerbit Sains Sayogyo Inside. 2005.
- Maleong, Lexy. Metodologi Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2000
- Midgley, James. Social Development. London : Sage Publication. 1995.
- Minichello, V, dkk. In-Depth Interview. London : The Mac Millan Press. 1995
- Newman, W.L. Social Research Methodes; Qualitative and Quantitative Approach. IV Edition. United States of America : Allyn and Bacon. 2000
- Prianarka. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : CSIS. 1996.
- Rachbini, Didiek J. Negara dan Kemiskinan di Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1995
- Riuntu, Cornelius, dan Miar. Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat. Direktorat Pembinaan dan Pengabdian Masyarakat. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2003.
- Sen, Amartya. Development as Freedom. New York : Anchor Books. 1999
- Sethuraman, S. V. The Urban Informal Sector in Developing Countries : Employment, Poverty and Environment. Geneva : ILO. 1985

- Soeharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran*. Bandung : LSP-STKS . 1998
- Strahm, H. Rudolf. *Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation. 1999
- Suharto, dkk. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKSPress. 2004.
- _____, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2005.
- Sumedi, Supadi. *Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta : Departemen Pertanian. 2004
- Swarsono, Alvin So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta : LP3ES. 2000.
- Todaro, P. Michael. *Ekonomi untuk Negara berkembang, Suatu Ppengantar tentang Prinsip-prinsip dan Masalah Pembangunan*. Edisi III. Penerjemah Agustinus Subekti. Jakarta : Bumi aksara kerjasama Longman. 1994.
- The Asia Foundation, Yayasan Indonesia Forum. *Usaha Kecil Menengah : Tantangan & Alternative Jalan Keluar*. 1998 . Yayasan Indonesia Forum. Jakarta. 1998
- Wartono, Tri. *Usaha Microbanking Sebagai Instrument Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta. 2003.
- WWF, Indonesia. *Pendekatan Praktis Penerapan Kebijakan Pro-poor Budget; Seri Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Hak Rakyat*. Jakarta : WWF - Indonesia MFP DFID, Ford Foundation. 2005.
- Yunus, M. *Bank Untuk Kaum Miskin; Terjemahan Irfan Nasution*. Serpong Tangerang. Banten : Margin Kiri. PT Cipta Lintas Wacana. 2007

Terbitan Khusus

- BPM DKI Jakarta. *Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta*. Jakarta : Pemda DKI Jakarta. 2003
- BPM DKI Jakarta. *Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun 2003 – 2007*. Jakarta : Pemda DKI Jakarta. 2004

BPM, Kodya Jakarta Barat. Profil Pengelolaan PPMK Tahun 2007 Kelurahan Duri Utara. Jakarta Barat : BPM. 2007

BPM, Prov. DKI Jakarta. Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Efektifitas Program/Kegiatan BPM Provinsi DKI Jakarta Pada Kawasan Kumuh di 5 (Lima) Kota Administrasi Tahun 2007 - 2012. Jakarta : BPM DKI Jakarta. 2007

Kasubsi Kependudukan dan Capil. Laporan Kependudukan Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur. Jakarta : Pemda DKI Jakarta. 2008

Kelurahan Bidara Cina. Laporan Hasil Pembinaan Pemerintah Kelurahan di DKI Jakarta. Jakarta : Kantor Kelurahan Bidara Cina. 2008

Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi DKI Jakarta.

Masyarakat Mandiri. Laporan Perkembangan Tahunan dan Kaji Dampak Program Urban Tahun 2006 – 2007. Bogor : Masyarakat Mandiri. 2008

Pemda DKI Jakarta. Program Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 – 2007. Jakarta : BPM DKI Jakarta. 2003

Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Tim MM. Program Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Makanan Jajanan yang Rentan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya di Lingkar Wilayah Jabodetabek. Bogor : Masyarakat Mandiri. 2006

_____. Profil Masyarakat Mandiri. Bogor : Masyarakat Mandiri. Tanpa Tahun

_____. Panduan Teknis Bagi Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat. Bogor : Masyarakat Mandiri. 2007

Internet Documents

www.pu.go.id/public/p2kp

www.wikipedia.org/kemiskinan

TABEL INFORMASI WAWANCARA MELALUI IN-DEPTH INTERVIEW

No	Nama/Status	Informasi yang Diperoleh
1	Bapak AR /Kasubid Pemasarakatan Usaha Ekonomi Keluarga	<p>PPMK lahir karena perubahan perencanaan secara bottom up dari top down, karena dulu semua program dari pusat. Masyarakat tidak tahu tentang kebutuhan program, jadi tidak nyambung antara kebutuhan masyarakat dari atas. Keluhan masyarakat, banyak usaha-usaha dari bawah tidak diakomodir. Jika 2 tahun usul, belum tentu terlaksana secepatnya. Dengan adanya PPMK, mereka merencanakan sendiri melalui Musrebang yang dihadiri oleh LPMD, Dekel, unsur representasi dari kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (tomas), RT, dan RW.</p> <p>Kelayakan diajukan kepada tim seleksi, dengan minimal asset calon pemanfaat sebesar 30% dari pembiayaan pokok. Karakter juga penting untuk jadi pertimbangan. TPK RW dan dewan juri akan mempertimbangkan hal tersebut secara musyawarah.</p> <p>punya KTP DKI, punya usaha dan syarat lainnya masih banyak. Tapi dua itu yang paling penting</p> <p>Untuk PPMK adalah 20 % untuk Fisik, 20% untuk sosial dan 60% untuk ekonomi. Itu alokasi, untuk penyerapan berbeda.</p> <p>Pinjaman 1 - 2 tahun tergantung musyawarah. Tapi umumnya itu begitu.jumlah pemanfaat tergantung dana yang ada</p> <p>prinsipnya musyawarah, semua bisa aja mengikuti dinamika masyarakat.kretifitas dituntut untuk menciptakan syarat-syarat yang penting dapat melibatkan potensi masyarakat. Dana stimulant untuk menggali potensi masyarakat dengan modal yang ada.</p> <p>hambatan ada yaitu masih ada yang nganggap jika dana itu dana hibah dan membuat macet.</p> <p>Batasan pinjaman dan lama meminjam maksimum sampai dengan 3 kali minjam. Jika pemanfaat punya prestasi pinjam yang bagus.</p> <p>Partisipasi dalam program inimestinya keterlibatan menyeluruh. Meskipun yang terjadi tidak menyeluruh</p>
2	Bapak MK/Kasubag Umum Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program	<p>Konsep comdev dalam program PPMK ini adalah memberikan otonomi kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan diri dan lingkungannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka.</p> <p>Definisi kemiskinan pemda DKI kami mengikuti pola BPS yang mengatakan konsumsi 2.100 kalori sehari karena kami menginduk dengan mereka (BPS) dalam hal ini</p> <p>PPMK merupakan program untuk orang miskin khususnya bina ekonomi karena PPMK merupakan program untuk memberi stimulant pada usaha kecil agar bisa berkembang. Dan hasilnya bisa anda lihat pada program terbaik PPMK di kelurahan duri utara sebagai pengelola terbaik tahun 2007.</p>
3	Bapak YS/Ketua Dekel/Penanggungjawab PPMK Kelurahan Duri Utara	<p>Saya melihat bahwa PPMK merupakan program unggulan dari pemda DKI untuk mensejahterakan masyarakat kecil untuk menambah pendapatan mereka untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta . Adanya program bisa diterima oleh masyarakat umum utamanya masyarakat kecil. Dana 60 % untuk Bina Ekonomi. Penerima manfaat mesti punya KTP, domisili dan punya usaha. Usaha bisa diluar wilayah. Ukuran usaha maksimal 20juta kebawah, untuk 20 juta ke atas belum bisa melayani. Karena program untuk usaha kecil.</p> <p>Kriteria Penerima manfaat mesti punya KTP, domisili dan punya usaha. Usaha bisa diluar wilayah. Ukuran usaha maksimal Rp.20juta kebawah, untuk Rp.20 juta ke atas belum bisa kami melayani karena program untuk usaha kecil. Kriteria lain dari pemanfat adalah punya modal /invest untuk pengembangan usaha /menambah modal. Ada masyarakat yang teriak karena tanpa modal mereka ga bisa berusaha. Sesuai dengan SK Gubernur 1747 - tujuan dari PPMK bina ekonomi adalah untuk mengembangkan usaha untuk tambah modal, ada kelayakan pinjaman ditentukan oleh tim seleksi. Jadi 30 % dari keuntungan pokok itulah kelayakan - baru diberi pinjaman (dana awal sebelum diberikan pinjaman). Kelayakan minimal 30 % dari laba bersih disurvey oleh tim survey. Saya maunya yang punya KTP, domisili disini, minimal, 2 tahun di wilayah tersebut. Ini kan program pemda untuk mngentaskan kemiskinan di DKI. Jadi harus jeli, karena KTP bisa aja nembak.</p> <p>Kriteria lain dari pemanfat adalah punya modal /investasi.. untuk pengembangan usaha /menambah modal. Ada masyarakat yang teriak karena tanpa modal mereka ga bisa berusaha. SK 1747 -</p>

	<p>mengembangkan usaha untuk tambah modal, ada kelayakan pinjaman ditentukan oleh tim seleksi. Jadi 30 % dari keuntungan pokok itulah kelayakan-baru diberi pinjaman (dana awal sebelum diberikan pinjaman). Kelayakan – 30 % dari laba bersih disurvey oleh tim survey. 30% dari laba bersih ini maksimum angsuran, perbulan/perminggu tergantung kesepakatan masyarakat, ini baru dari hasil tim seleksi dan juga akan dirapatkan lagi pada rapat pleno, ada dewan juri. Itu dari sisi usaha; nanti juga kita tanya dari sisi karakter orang biar lebih obyektif. Disini ada perwakilan masyarakat dewan juri, TPK RW, kita minta masukan dari TPK RW, gimana orangnya, bisa ga diberikan, bagaimana karakternya. Ada surat penjamin juga. Perimbangan penting : pertama usaha dulu, penghasilan – karakter (melalui TPK) yg berhubungan langsung dgn warga schigga lebih tau. ada pertimbangan langsung dari dewan RW masing-masing, dewan juri.</p>
	<p>Pendekatan yang dibangun untuk rekrutmen pemanfaat :</p> <p>Pada saat kita kan proposal masuk ke TPK RW – baru ke Dekel – dikembalikan ke tim seleksi ut disurvey. Semua hasil itu diberikan dekel ke ut analisa tim seleksi, pertimbangan TPK juga dewannya, baru diambil keputusan kelayakan usaha, gitu. Karena kalo liat hasil wawancara, smua bisa aja; penghasilan ga nyampe 100 ribu, bilang 200ribu. Bisa aja kan direkayasa. Disini punya perwakilan TPK RW – tim pelaksana kegiatan wilayah, dia tau sehari-harinya juga bagaimana sebenarnya. Jadi saya ga Cuma terima bahasa dari calon pemanfaat aja.</p>
	<p>Untuk kroscek, TPK RW yang melaksanakan, jadi kita bisa masukan dari hasil usaha juga, banyak masalah ga, punya pinjaman tempat lain ga, semuanya akan mempengaruhi angsuran nantinya. Atau dia pernah dapat kesempatan mendapatkan pinjaman, banyak kan disini ada BKM, P2KP, jangan sampai dobel. Kalau memang sudah dapat, ya udah lanjutin P2KP, jangan dikita (PPMK). Jadi kita tujuannya bukan untuk membebani supaya tambah lancarnya.</p>
	<p>Iya, kita turun giliran, kita kan disini, mungkin ga saya, saya ada perwakilan dewan wilayah/RW, ini dana digunakan untuk usaha atau ut konsumtif ya. Itu lalu kita cek, itu slalu kita cek, sehariannya kita adakan juga pendekatan, biar ada kekeluargaannya biar bisa kita bahas masalah, bagaimana perkembangan usaha, malah kita adakan pembinaan manajemen usaha, karena kebanyakan masyarakat belum tahu manajemen usaha ut pemanfaat. Jika ada program kita undang, bagaimana cara manajemen usaha, uang. Jika Cuma kita bantu, 2 tanpa ada pembinaan & arahan jg, kan jadi dia ga ngerti. Namanya juga usaha kecil dagang, uang usaha, uang rumah campur aduk gitu, kita udah arahkan seperti itu.</p>
	<p>Ada perumusan kebutuhan sasaran, jumlah biaya, usaha apa aja yang dibiayai. Ada, kami punya form untuk dianalisa. Modal kerja berapa, buka usaha berapa, yang sederhana, jadi jelas alokasi berapa aja. Ada juga surat pernyataan penjamin, jika macet maka akan diminta ke penjamin. Ga ada di SK 1747, tapi kami inisiatif, kalo istrinya yg pjn, suaminya yg menjamin, jg sebaliknya begitu. Kita Tanya kesanggupan mereka. Kebijakan sendiri agar uang selamat.</p> <p>Ada asuransi bumiputera juga ut yang meninggal, agar ahli waris ga dibebani. Masing-masing ada polis asuransi, jika 1 atau 2 bln meninggal, langsung klaim di asuransi. Ahli waris susah, jd klaim di asuransi. Jika pinjaman 1 juta, meskipun sdh dilunasi 200 ribu, maka tetap dibayar 1 juta oleh asuransi. 200 untuk ahli waris dikembalikan. Saya ada beberapa cara untuk menyelamatkan ini, agar uang aman, itu aja. Jadi dalam pelaksanaan ini, perlu diselamatkan juga. Langkah2 dibuat sendiri gimana bisa diterima oleh masyarakat.</p> <p>Ada juga penjaminan, untuk menyelamatkan dana, jadi kalo suaminya yang pinjam, istrinya yang jamin, begitu juga sebaliknya. Atau anggota keluarganya yang lain juga bisa.</p>
	<p>Untuk jumlah pinjaman tergantung kelayakan, jika usaha gado-gado, ga mungkin 5jt pinjamannya. Sudah ada yang 3 - 4 kali pinjam, maksimum sekitar 20jt-an, itu udah batas maksimum. 500ribu minimal – 20 jt. Dulu sih, lagi 2002 dikasi 200ribu. Kalo sekarang itu cukup kecil.</p>

		sampai sekarang total guliran kalau 2007 aja sih, Cuma 591juta. Total seluruhnya yang bergulir dimasyarakat sudah 2,176juta. Dari tahun 2002 – 2007. dana dikembalikan ke dekel ke bank DKI. Pencairn pun pake bank DKI. Kita ga suka tunai, semua melalui bank DKI. Disini juga bisa meringankan administrasinya.
		Jumlah pemanfaat yang berjalan 1000 an lebih dari 2002 banyak juga. Setip RW relative, karena kebutuhannya tidak sama. Saya sih obyektif aja, baik fisik, ekonomi, maupun sosial tidak dibagi rata, tergantung usulan. Satu RW ada yang sampai 100 orang, ada juga yang bisa 10 orang. Kalo kelurahan lain ada yg bagi rata. Jadi tergantung usulannya, kita proses, analisa, diproses juga ada analisa, hitungan. Bisa jadi usulan 10juta, ternyata kebutuhan Cuma 8juta. Kan kita kroscek lapangan. Kan gitu. Bina fisik hubah
		Pendampingan setiap saat bahkan. Masing-masing dewan unitnya ada monitoring wilayahnya masing-masing. Kita ada rapat pleno sebulan sekali untuk minta pendapat. Iya, kita turun giliran, kita kan disini, mungkin ga saya, saya ada perwakilan dewan wilayah/RW, ini dana digunakan untuk usaha atau untuk konsumtif ya. Itu slalu kita cek, kesehariannya kita adakan juga pendekatan, biar ada kekeluargaannya biar bisa kita bahas masalah, bagaimana perkembangan usaha, malah kita adakan pembinaan manajemen usaha, karena kebanyakan masyarakat belum tahu manajemen usaha untuk pemanfaat. Jika ada program kita undang, bagaimana cara manajemen usaha, uang. Jika Cuma bisa bantu, tanpa ada pembinaan & arahan juga, kan jadi dia ga ngerti. Namanya juga usaha kecil dagang, uang usaha, uang rumah campur aduk gitu, kita udah arahkan seperti itu.” Dewan unit ada dewan kelurahan perwakilan dari RW, jadi ada 8 RW. Yang pilih asyarakat, jadi ga langsung terpilih dari RW. Jadi dari masyarakat lalu jadi dewan RW adakan pemilihan tingkat RT baru tingkat RW baru kelurahan. Dewan unit. Jadi mirip dekel. Ut dekel, ketika duduk dikelurahan, jika pulang ke RW jadi perwakilan RW-nya. Bermitra dengan RW, jika dikelurahan dengan Kelurahan
		Kendala pasti ada, saat ini saya menurunkan satgas, juga da yang senang ada juga yang enggak. Jadi satgas untuk menagih, dibilang kaku begini-begini. Padahal kita melaksanakan ini ada dasar aturan/hukum sesuai pergub.
		Tentang penjamin kendalanya Yah, pertama keberatan dari sisi meteral. Belum tentu disetujui, eh udah hilang 6ribu. Saya kasi pengertian, anda aja kalo minjam ke bank, baru mau pinjam aja pasti ada biaya, yah wajar kesini juga kalo mau usulin keluar 6ribu. Yang penting satu syarat kita mesti punya usaha, jika ga punya usaha, jangan coba-coba tandatangan permohonan. Kan gitu. Tapi alhamdulillah bisa diterima, jadi tidak ada kendala baik sama RW, RT atau masyarakat kita
		Pencairan dilakukan 3 bulan sekali. Ada pencairan November, trus ada yang usulan masuk Desember, tentu dia kan nunggu lama; Desember – Januari kan lama. Sebetulnya ga lama juga; ada yg nunggu seminggu, sebulan. Kan kita tumpuk disini, kalo sudah mau pencairan, ini ada yang Desember, dsb. 3 bulan kemudian baru dianalisa lagi. kalo udah mau pencairan - kita undang langsung, memakai form penilaian. Jasa 1% untuk operasional sehari-hari, untuk ATK, telpon, Dekel seharusnya difasilitasi oleh Kelurahan sesuai dengan Perda, tapi kita disini sebetulnya mandiri. Misal telpon bayar sendiri, staff bayar sendiri, karna terpisah sama gedung kelurahan. Makanya bersyukurlah Lurah,
		Pemilihan TPKRW Ada. TPK RW dari Usulan RW, ga ada kriteria formal. Jadi TPK RW yang usulin dari RW, tokoh masyarakat. Jadi ada 4 orang yang diusulin yaitu ketua TPK RW, Sosial, fisik, dan ekonomi sesuai tribina. Dari usulan kita buat SK, yang buat SK adalah Dekel. Karena disini ada 8 RW maka : 8 x 4 RW = 38 orang TPK RW di kelurahan ini. Dewan unit ada dewan kelurahan perwakilan dari RW, Jadi ada 8 RW. Yang pilih masyarakat, jadi ga langsung terpilih dari RW. Jadi dari masyarakat lalu jadi dewan RW adakan pemilihan tingkat RT - baru tingkat RW

		- baru kelurahan. Dewan unit. Jadi mirip dekel. Untuk Dekel, ketika duduk di kelurahan, jika pulang ke RW jadi perwakilan RW-nya. Bermitra dengan RW, jika dikelurahan dengan Kelurahan
		Yang sekarang ini, macet sebelum ditangani satgas sekitar 11%. Cuma skarang setelah satgas turun, sudah hamper 2 bulan dari 18 feb, ini ada pernyataan pemanfaat ada 8 RW, asal tau. Setelah satgas, ada penurunan, yg macet sdh mulai masuk lagi mengangsur/bayar. Sudah mnngkat pemasukannya selama ada tim ini. Lagi masyarakat, ya biasa jika kita turunkan satgas, karena tim satgas terdiri dari kpolisian, pemerintah kelurahan, malah kbanyakan dari pemerintah kelurahan, dewan Cuma 2, tokoh masy jg ada, dewan dipilih sesuai pergub 121 perwakilan satgas ini adalah ketua dewan dr anggotanya menunjuk saya satu, org dr anggota dewan yg ada disini
		Tim satgas ada 11 orang, 5 sama babinsa, pemerintah kelurahan kasubsi pemerintahan, kasubsi pemberdayaan, kasubsi kamtib, staf kamtib, sekkel, ada 4 org kelurahan. Tokoh masy 1 orang, bimas babinsa 2, dewan 2, perwakilan dari UPKMK 1 orang.
		Saya sebelum ada satgas, ada tim verifikasi namanya kita slalu turun, sesuai ketentuan propinsi, kita laksanakan, sekarang diatur oleh pergub 121, kita buru-buru atur. Klurahan lain baru skarang ini bentuk satgas setelah ditegur, sampe sekarang laporan tim satgas sejauh mana belum tau karan baru dibentuk. Kalo saya dah buat laporan, sekarang ini turun yang ke-2 kali. Tapo sebelum tim verifikasi, jadi skrg satgas dan itu sebenarnya membantu permasalahan keuangan PPMK. Tahun 2007 terbentuk tim asistensi, skalipun tim satgas blm punya biaya operasionalnya. Tp saya bukan suatu kendala meskipun ga ada biaya operasional, buat masyarakat, gimana curanya, kewajiban saya selaku ketua bagaimana ini bisa jalan. Dlm pergub sbenarnya diatur operasional satgas ada di kas BPM, tapi sampe sekarang belum ada. Mungkin di kotamadya atau dipropinsi, makanya saya mau nanya pada pihak BPM, kan jelas di pergub ada, kalo sampe anggaran ga turun, ini pergub gubernur yang bikin, kan gitu. Ini perlu saya sampaien smua, jangan dibebankan ke dewan kelurahan aja.
		penggunaanya pak, Jasa 1% ut operasional sehari-hari, ut ATK, telp, dekel seharusnya difasilitasi oleh kelurahan sesuai dengan perda, tapi kita disini sebetulnya mandiri. Missal telpon bayar sendiri, staff bayar sendiri, kerna terpisah sama gedung kelurahan. untuk operasional satgas blm diganai, km mengarahkan dewan masing-masing ut membuat
		Ga ada diskriminasi pada WNI keturunan. Ga mentingin keluarga, siapapun bolch2 aja, termasuk dewan juga boleh, tidak ada mengatur di SK 1747 bhw dewan ga boleh, ga ada. Yang penting orang tsb pnya usaha, layak dibantu. Dewan kan manusiir juga, rakyat juga. Jadi fair aja, jadi ngamuk disuma, silakan aja. Kalo sekarang dewan juga ga boleh pinjam, dewan juga punya usaha. Mau mengandalkan disini, ga cukup. Saya punya usaha, layak donk, saya juga masyarakat. Kan gitu. Yang penting ga ada diskriminasi. Ga ada mengistimewakan satu sama lain, umpama dewan diistimewakan- sesuai kelayakan hasil dari tim survaynya. Tjuannya kan untuk masyarakat Duri Utara, untuk menambah penghasilan kan, yah, kebetulan aja dia memang keluarga dewan, tapi dia juga usaha. Tapi kita ga mengistimewakan bahwa oh ini harus gede, ga. Kalo saya ga gitu. Tapi memang prediksi masyarakat, mentang-mentang dewan. Padahal kita disini aturan saya ga gitu. Obyektif dan mudah. Yang penting kita bisa bertahan baik, itu aja. Saya begitu,
		Penanganan yang macet gimana pak yang macet, pertama saya undang, panggilan pertama ga datang, kita silaturahmi ke rumah. Gimana sih baiknya, gimana sih maunya, mau saya panggil ke klurahan takut kejauhan atau ke pos RW. kita jemput bola kan, gitu. Tapi ternyata ya ada smua kita jd mengalah ut menang – kalau prinsip saya. Biar kita buang waktu, misalnya gini, udah hamper 3 bulan satgas nanganinya gini aja, gitu lho. Banyak cara, kita sampaikan, ini uang, uang masyarakat juga, kalo banyak macet, kita ga bisa kasi pinjam lagi. Karena pola pikiran waktu dulu-dulu zaman JPS, ga ngembaliin jg ga pa2.

	<p>Tapi beda degan PPMK, kan gitu aturannya. Tp masyarakat msh berpandangan kesana. Memang JPS ini ga ditindak lanjuti sama pemerintah pusat, apalagi pemda, ga mau tau. Padahal itu uang masyarakat juga Cuma beda anggarannya, APBD & APBN. Pemerintah klasnya beda, karena APBN, menurut saya ga seperti itu. Gmn upaya menyelamatkan uang. Biar mereka ga marja. PPMK kena imbas karena JPS dulu. Termasuk BKM juga sama, P2KP juga kan sama. Cuma PPMK terlalu disorot bgt, jgn digeneralisir ini jelek seolah2 smua jelek. Memang kal sini suk bilang seferti itu. Yg jelek aja, padahal dewan yang baik aja dengan inisiatif sendiri dicuatkan kan ga.</p>
	<p>Warga masih banyak yang terpengaruh jaman JPS dulu, jadi mereka pikir ini dana hibah, tapi itu dulu. Ada juga yang nunggak saat ini. Cuma yang lebih jelas setelah saya turun, penunggak ini bukannya ga mau bayar, karena memang usaha kondisinya macet. Semua bahan baku naik, minyak goreng naik, jadi berpengaruh, sulit untuk menjual. Kalaupun dijual, daya beli masyarakat kan kurang. Kalo saya liat seperti itu. Semua harga naik minyak tanah mahal, dampaknya ke pedagang-pedagang. Semua ini karena kebijakan pemerintah pusat, imbasnya ke pedagang - pedagang kecil ini. Yang tadinya dia punya untung Rp.50.000,-, sekarang menurun jadi Rp.10.000,-. Ah, ini kan cuma cukup untuk kebutuhan di dapur aja, belum bayar listrik dll. Ga cukup untuk bayar angsuran.saya keberatan juga jika dikatakan mereka ga membayar, karena kondisi sosial ekonomi dan usahanya yang macet. Saya mesti bela masyarakat saya kan, tapi juga ga menutupi juga ada beberapa orang yang ga membayar. Bukan karena kemampuan ekonomi, tapi niat baiknya ga ada. Setelah itu saya ambil kesimpulan bahwa dia termasuk orang yang sulit membayar. Itu juga cuma beberapa orang, 1 - 2 orang - lah.</p>
	<p>Pada saat terima penghargaan disana kan banyak yang meliput dari Pelita, Pos Kota, saya bilang pada mereka, tentang PPMK, jangan diekspos yang jeleknya aja, bagusnya dicuatkan kan ga. ya udah, bukan saya yg minta, saya ga mau jd org populer. Jd sudahlah, saya ga mau begitu. Yg penting tujuan saya duit selamat, masyarakat bisa sejahtera, itu aja. Alhamdulillah, teman2 dewan kelurahan pada kumpul. Duri utara aktif dekelnya.</p>
	<p>Manajemen bisa diterapkan disini, saya pernah kerja perusahaan swasta, usaha sendiri pernah. Jd km ijazah saya ga laku, jd ngabdij aja ke wilayah.</p>
	<p>Pengembalian pinjaman ada aturannya. Kita punya kesepakatan ut jasa 1% selama 12 bulan, jadi 12%. Ada yg mingguan, ada yg bulanan. Tp sebenarnya mingguan. Ada yang minta bulanan, ga masalah, tapi pada saat angsuran pertama, dia harus membayar dulu ut 1 bulan. Jgn nunggak dulu baru bayar 1 bulan. Bayar dimuka dulu ut 1 bulan. Kalo mau bulan, gitu. Kalo bayar setelah 1 bulan akan banyak tunggakan. Jadi kita kasi dana setelah sebulan baru mengangsur. Kecuali yg bulanan, ga ada lagi prci, sekarang turun selesai itu minggu depannya bayar. Kcuali yg baru.</p> <p>Pengembalian semua ke TPK RW. Ketika pencairan TPK RW, yg nagih TPK RW juga setiap minggu.</p>
	<p>Iya, yg meninggal aja, yang sakit belum, saat ini masih seperti itu. Asuransinya yang ga mau. Jika Ada yg tawaran itu, aku mau mintakan juga.</p>
	<p>Perubahan-perubahan bagi pemanfaat</p> <p>Banyak, salah satunya roti, yang tadinya dia kerjain sendiri sekarang sudah punya karyawan, yang tadinya tempatnya ngontrak, udah punya rumah sendiri. Konveksi yang tadinya kerja sendiri punya mesin jahit satu, sudah jadi konveksi dan punya karyawan. Tujuannya kan kita mengentaskan kemiskinan. Untuk pengembangan usaha yang bisa berkembang dan bisa merekrut tenaga. Mengurangi pengangguran juga kan. Kita adakan pembinaan, pendampingan juga. Supaya seperti itu, paling tidak bisa merekrut tenaga-tenaga yang ada disitu. Alhamdulillah sih, banyak juga bukan Cuma 1 orang aja hasil bantuan PPMK ini. Yang signifikan ya, mungkin banyak lah sekitar sampe 20%. Judi kalo yg pedagang-pedagang itu kan ga mungkin. Saya harapkan seperti konveksi,</p>

	<p>produksi roti, Kalo kelontongan juga banyak, warung-warung. Tapi itu ga bisa terlalu merekrut tenaga kerja. Yang tadi warung kopi bisa besar, banyak. Pedagang bakso yang juga bisa besar banyak. Dari dorong sampe bisa menetap punya kios. Sekarang rame banyak langganan.</p>
	<p>selama ini, faktor pendukung yg buat program berhasil</p> <p>Kerjasama TPK RW, DEKEL, UPKMK. Masyarakat yang penting itu pendukungnya. Itu hasil kerjasama semua masyarakat dari utara, baik itu tim sleksi, TPK maupun masyarakatnya. Terjalin komunikasi dengan baik, punya niat yg baik, yg penting mah niat.</p>
	<p>Sekarang biar dipagari dengan UU, jika ga dijalankan dgn baik, kan tergantung niat baik. Jika kita jalanin dg baik, maka akan berjalan dg baik juga. Sekarang pengelolaan PPMK akan dipindahkan ke koperasi, namun pergubnya belum ada, badan hukumnya sudah kami siapkan. Selama koperasi belum jelas, saya tetap glirkan ke PPMK. Saya ga mau masyarakat saya teriak dan jadi korban karena pengalihan. Kesanya terburu-buru. Prinsip pengelolaan juga hamper sama dgn PPMK. Meskipun denikian, masyarakat sudah paham dengan PPMK.</p>
	<p>Orang yang menerima tergolong tetap, sejak 2003. Dari pinjaman kecil sampe besar. Pertama minjam Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-. Itupun kembali kepada usaha mereka. Kita punya satu asumsi kelayakan dia melalui tim survey bagaimana. Bisa dilihat oleh tim survey dia punya modal usaha, dan tempat usaha, lalu dia pinjamannya sekian, kelihatan disitu kan. Kalo memang dia dasarnya nasi uduk, kan bisa kita survey, jadi tim kita sendiri ada.</p>
	<p>Contoh angsuran Dana, missal pinjaman 500ribu :</p> <p>500ribu + jasa 12%/tahun = 560ribu. Setahun 48 minggu = Rp. 568ribu.</p>
	<p>Pemanfaat buat proposal ada di TPK RW, diminta, fotokopi, diisi, kembalikan lagi ke TPK RW. Tanda tangan ketua TPK-nya. Selesai – serahin ke Dekel. Nanti kita susun peminjam baru, kita undang tim sleksi spy turun ke wilayah survey lokasi 4 tinggal mrk yg usulin. Jadi TPK RW menerima usulan aja. Pengembalian unng ke TPK RW – setor ke UPKMK. Setiap minggu ke rumah2.</p>
	<p>Merasa terbantu bgt. Mereka bilang untung dibantu PPMK, kalo nggak, saya udah hancur pak. Semua banyak usaha kecil, tadinya Cuma dagang makanan anak2, sekarang sudah pada lumayan, nambah untung, penghasilan. Ada juga yg ga ngembaliin ga apa2, masih jg ada. Cuma yg lebih jelas slh saya turun, penunggak ini bukannya ga mau bayar, krn mmg usaha kondisinya macet. Semua bahan baku naik, minyak goreng naik, jd berpengaruh, sulit ut menjual. Kalaupun dijual, daya beli masyarakat kan kurang. Klo saya liat sperti itu. Semua harga naik minyak tanah mahal, dampaknya ke pedagang2. Semua ini krn kebijakan pemerintah pusat, imbasnya ke pedagang 2 kecil ini. Yg tadinya dia punya untung 50rb, sekarang menurun jd 10ribu. Ah ini kan Cuma cukup ut kebutuhan di dapur aja, blm bayar listrik dll. Ga cukup ut bayr angsuran.saya kebertan jg jika dikatakan mrk ga membayar, karena kondisi social ekonomi dan usahanya yng macet. Saya mesti bela masyarakat saya kan, tp juga ga menutupi juga ada bbrp org yg ga membayar. Bkn krn Kemampuan ekkonomi, tp niat baiknya ga ada. Setelah itu saya ambil kesimpulan bhw dia termasuk org yang sulit membayar. Itu juga Cuma bbrp orang, 1 -2 org lah.</p>
	<p>Hambatan dari Pemerintah : tahun anggaran baru smp sat ini blm turun. Sdh menghambat ut kebawah. Kegiatan 2 jg terhambat, pembangunan jg. Mgkin lurah kalo mau nangis, nagis dia, anggaran sdh 3 bulan belum turun. Itu kan para legislative disana yg lambat, terllu banyak teori aja. Tarik menarik kepentingan, bagi2nya yg susah.</p> <p>Satgas turun perlu operasional, blm ada anggaran.0,45% TPK, 0,55% ut operasional. Ut beli atk, andaikan 0,55 tanpa ada tunggakan, mungkin kita aman. Tunggakan 11% kita sdh engurangi operasional. Kita mesti putar otak ut biaya operasional,namun sejauh ini, kita pikirkan bgmn dana</p>

	PPMK ini selamat, gitu aja. Sekalipun saya Cuma pas-pasn penghasilan saya.
	Ga ada lagi, yang bandel-bandel. Setelah turun tim ini, baru pada ngangsur. Ada tentara, polisi. Hubungan TPK RW, baik2 aja. Kita ga ada maslaah, baik TPK RW, UPKMK.
	TPK RW dari Usulan RW, ga ada criteria formal. Jd RW yg usulin dr RW, tokoh masyarakat. Jd 4 org yg diusulin yi ketua TPK RW, Sosial, fisik, ekonomi. Dari usulan kita buat SK, yg buat SK adalha Dekel. 8 x 4 RW = 38 orang.
	Ut tim selesksi rekrutmenya pada 1747 ada aturannya. Ada tugasnya jg. Saya melaksanakan itu, sesuai juklak n juknis. Ga perlu takut km sdh sesuai dgn aturan.
	Dr kotamadya ada tim evaluasi kinerja Dekel. Itu sdh mencakup TPK RW, peminjam, setahun sekali. Kita jg ada ukuran ut peminjam, itu interen kita aja. Sejauh mana keberhasilan meeka dari saat menerima – sekarang. Udah brp kali pinjam. Dsb. memang ga ada aturan, tp itu kebijakan kita ut mengevaluasi pemanfaat. Fromat evaluasi juga ada, setiap 6 bulan sekali, agaustus yaa, kita suka adakan evaluasi kinerja TPK RW yang baik, pemanfaat, ya, kita berikanlah trophy2 mrk ut motivasi spy lebih semangat. Sdh jalan lama, udah 3 tahun yi. Dr sisi administainya - pengurusan, tunggaklannya, yg berkelanjutan.
	Laporan dibuat dan diajukan ke kotamadya ut dikirim ke pemda. Laporan sesuai SK 1747.
	Istri bs pinjam, laki perempuan bisa. Tp harus t aja diantara mrk. Yg penting punya usaha. Byk nama perempuan di daftar nama saya, km prp byk yg jualan, suami pd kerja.
	Partisipasi dlm kontes ppmk – kebijakan pemda. Mesti partisipasi ut membantu program ppmk sbg program unggulan – dgn partisipasi ini, kita menyatukan sendiri ke msyarakat sesuai aturan, km tujuannya ut membantu masy kecil, masyarakat sejahtera, menambah penghasilan.
	Jika RT ga ut pinjaman produktif ga akan dikasi pinjaman. Usaha ekonomi produktif adalah usaha yg masih berjalan, lancar, pinjam dana PPMK bukan untuk beli kulkas, tivi. Besok ngembaliin gimana. Jadi harus benar-benar dibelanjakan untuk usaha. Survey dulu, jadi pinjam dikasi pengarahannya dulu tentang makna pinjaman PPMK dari Pak Lurah, supaya digunakan untuk usaha, jangan untuk bayar sekolah, dan lain-lain. Untuk bantu usaha yang produktif dan berjalan. Kita juga ga seperti itu, ketika usaha pemanfaat bangkrut, kita analisa kenapa usaha bangkrut, ada sisa pinjaman, tapi bangkrut. Kita telusuri lagi kenapa bangkrut. Misal salah manajemennya, kita bantu lagi supaya bangun lagi, jalan lagi. Begitu bangkrut, ga langsung kita tinggal begitu aja. Jangan bangkrut akal-akalan.
	Pergub mengatakan bhw kategori macet/nunggak, mis meninggal dunia, pindah alamat, usaha macet, enggan membayar. Ada klasifikasinya juga. Disitu ada bbrp tingkat ut evaluasi, knp. Yg meninggal – kita ketemu ahli warisnya, kita Tanya- snggup ga bayar, jk ada asuransi, maka asuransi yg bayar. Jk tidak, ternyata mrk tidak sanggup bayar maka kita rekomendasi satgas ut buat ket. RT ket tdk mampu, ttd baru kita usul. Yg pindah alamat kita hrs cari tau, kita kejar. Tergantung tim satgas gmn analisisnya. Alhamdulillah smp skrg blm. Kalo asuransi sjk thn 2005. Sblumnya blm msuk. Kelemahan2 sediki2 kita pebaiki. Ada yg asuransi, yah gmn lah kita atur agar aman. Kan ga ada aturannya, Cuma himbauan aja ut keamanan aja spy msk asuransi. Kan beda antara himbauan dg peraturan.
	Sebenarnya mudah, gampang buat KTP. Yg penting minta surat pindah. Jadi punya hak juga disini sebagai warga dki. Jd program ini ut warga jkt, karcna sdh otonomi daerah. Kalo program nasional mungkin msh bisa. Yg buat kumuh ga semua org dki, mungkin pendatang yg buat kumuh. Jakarta jadi jelek. Bkn kita ga mau peduli, warga jkt mesti pnya ktp jkt. Ga ada larangan org daerah suka

		jakarta, kan ga ada. Di daerah kan liat, disini apa2 jadi uang, ga tau kalo disini juga sulit. Aneh itu.
4	Bapak DE / TPK RW 02	<p>Penentuan pemanfaat yaitu masyarakat minta ke TPK RW. Jadi sbelum masyarakat minta, tapi kami lakukan penilaian karakter. Kadang-kadang pinjaman Cuma diberikan padu yang punya usaha. Sementara masyarakat yang belum atau baru mau mulai usaha tidak diberikan pinjaman.</p> <p>Jika di PPMK tidak ada kelompok, semua lewat TPK RW, karena masing-masing RW punya TPK. Di warga masyarakat RW 02 tempat saya, dia usaha dan ingin membangun usaha, itu saya samperin, saya tanya jawab, saya jelaskan, bahwa kitanya ada program PPMK, kita bisa bantu modal itu, yang penting bisa mengembalikannya</p> <p>cara masyarakat mengusulkan dana ke PPMK Pemanfaat buat proposal ada di TPK RW, diminta, fotokopi, diisi, kembalikan lagi ke TPK RW. Tanda tangan ketua TPK-nya. Setelah selesai – serahin ke Dekel. Nanti kita susun peminjam baru, kita undang tim seleksi supaya turun ke wilayah survey lokasi tempat tinggal mereka yang usulin. Jadi TPK RW menerima usulan aja. Pengembalian uang ke TPK RW – lalu TPK RW menyetor ke UPKMK. Jadi TPK RW setiap minggu ke rumah-rumah</p> <p>sosialisasi dilakukan per anggaran baru. Kami undang RT, masyarakat (pemanfaat), PKK, perwakilan tokoh-tokoh diundang juga. Jadi yang datang sekitar 30 orang ke acara. Disini ada 15 RT</p> <p>Pendampingan dilakukan setiap hari. Saya sebagai orang RW 02, jadi banyak tau tentang karakter orang RW 02. Ada yang minta bulanan, tapi cicilan kita mingguan. Yang bulanan paling 1 - 2 orang. Jadi tiap minggu setiap TPK muter, jemput bola.</p> <p>Di PPMK ini tidak ada kelompok, jadi yang ada individu. Yang berusaha jadi kami adakan kursus apa gitu untuk menambah pengetahuan mereka.</p> <p>Kadang-kadang mah dekel atau pihak kelurahan kurang paham tentang masyarakat sini.</p> <p>Masih tunggakan dulu sebelum saya jadi ketua sebesar 80% penunggak, RW ini terpuruk skali. ahamdulillah sekarang paling sekitar 10% aja.</p> <p>masyarakat ada yang belum paham PPMK, tapi setelah dijelaskan mereka tahu. Kami terjun langsung ke masyarakat</p> <p>kondisi masyarakat sini sebelum ada PPMK banyak yang minjam di bank keliling, memang nolongin sih tapi nyekek. Untung sekarang ada PPMK. Kami isini meskipun RW termiskin tapi yang terbaik PPMK-nya tahun 2007 kemarin untuk tingkat RW yaa.</p> <p>peran Bpk sebagai TPK RW jika ada yg bermasalah contoh Warung2 kopi, suami satpam, dia sakit kena paru2. Jd ga kerja. Saya bantu istrinya, jg pengobatan gratis kita antar. Alhamdulillah dia ikut, sdh segar lg, n mulai usaha lagi. Saya sbg org rw 02, jd byk tau ttg karakter org rw 02</p>
5	Bapak RW MN/TPK RW	<p>Fungsi TPK RW</p> <p>Fungsinya itu, seperti kalimatnya sebenarnya tim pelaksana kegiatan /program ppmk itu sendiri. Tapi menurut kami, fungsinya itu luas. Bberhubungan dg masyarakat, kita sendiri masyarakatnya. Aspirasi masyarakat kita tampung, bicarakan ke RT, RW, Tokoh masyarakat apa sih keinginannya masyarakat kita, setelah itu baru kita bawa ke sini. Jd misalnya, ada masyarakat yg pnya kegiatan usaha dan butuh modal, nah itu kan kita tampung. Tp kalo mng dia inginkan modal usaha, melalui ppmk bisa, ada prosedurnya. Nanti mereka yang mengisi proposal, diketahui oleh pak RT. RT harus mengetahui, kalo nggak nnt ga bs. Biar bgmn RT hrs tau. Jd stlh itu proposal naik, diserahkan ke dewan wilayah sini.</p> <p>Dlm ppmk ada tribina, social, fisik, ckonomi. Ini semua kita kembalikan kepada masyarakat . jika masyarakat mau seperti ini, kita rapatkan. Apa sih hasilnya ? kita perbaiki. Pasti akan kita kembangkan. Mng masuk prioritas, tp mesti kita ada kesepakatan, kita usulkan, lalu k klurahan</p> <p>Kita muter tiap hari untuk nagih angsuran ke pemanfaat. Jika ada pencairan, kita</p>

	<p>mengundang mereka, bagaimana pengembalianya. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat kita, ya terus terang aja di wilayah kami, mengatakan puas. Pada masyarakat kita katakan ini bukan dana hibah. Oleh karena itu, jika mereka tidak mengembalikan, maka yang lain tidak dapat memanfaatkan. Dalam setiap kita ada rencana program, kita undang seluruh masyarakat, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat untuk menerima dana baru, kalau dana bisa kita serap, itupun manfaatnya untuk mereka. Kalaupun kita ga bisa serap, yah kita alihkan bagaimana caranya. Jadi ada cambuk-cambuk dari mereka sendiri sebagai kontrol. Jadi peranan mereka sendiri seperti apa, masyarakat mengurus wilayah, dewan wilayah, semuanya kita jadi satu, dalam arti kita menjembatani supaya roda kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan partisipasi mereka sendiri.</p>
	<p>Brp org yg ambil bulanan.</p> <p>Missal dr 20 org ada 2 org yg ambil bulanan, tp ga smua org gitu sih, krn mingguan. Ut periode 2006 – 2007 kan setahun yaa, 31 orang dan 27 orang, sdh lunas 16 orang. Jadi kami coba yg benar2 mmg membutuhkan, kita liat perkembangan masy sendiri, jk pinjam pertama dia bagus, maka dia termauk punya target. Jd dicoba kpd pemanfaat yg benar2 mau membangkitkan usahanya. Jadi peminjam mula, kita liat keinginan dia usaha apa, dan mmg punya usaha, nah itu ada tim survey sendiri, dan jg klayakan usaha dia sendiri. Jd slama ini kita coba dlm rv pelaksanaan dir w 6 itu, bermanfaat, yg mmg benar2 ingin menggunakan usaha. Jd mrk itu selalu bergulir dan berkelanjutan. Itu ajalah. Jd kbanyakan mrk ini, adl mrk yg sdh bergulir dari peminjam I, kedua, masuk ketiga. Ut smntara dir w 6 ini kita coba, krn yg kita kuatirkn mrk kurang bertanggungjawab ya, shgg kita coba cari para calon nasabah yg benar2.</p>
	<p>Nov 2007- nov 2008. Mmg data ada disini smua, krn berkelanjutan. In semua, jd secara akumulasi. Jd dlm hal ini terserah masyarakatnya sendiri, kita open ya, terbuka kpd masyarakat dlm arti penggunaan dana ppmk ini. Dan ternyata mmg banyak diwilayah kami yg mrk mau usaha, sehingga mrk bs liat. Kita bs buktikan, smp 4 – 3 kali dia berkelanjutan. Gitu.</p> <p>Ada yg tetap, tetap, yg blank, kita coret. Kita kan yg jadi patokan apakah dia itu baik lancer nagsurannya, atau mmg dia jatuh dlm usaha, kan ada. Kalo jatuh dlm usaha, kita tggu sidang dri dewan bgmn antisipasinya krn bkn dewan akan memberi satu persepsi kpd TPK bhwa aka nada tim turun ut membuktikan itu secara fisik, thdp angsuran baik/tdk baiknya itu, kembali dewan memberikan tim sendiri kpd tpk, benar ga mmg dia tdk baik dlm kenyataanya. Dan Alhamdulillah dirw kami g ada masalah smp saat ini.</p>
	<p>Jd org2 ini tetap ?</p> <p>Tetap, sjk 2003. Dr pinjaman kecil – besar. Pertama minjam 500rb, 1 juta. Itupun kembali kpd usaha mrk. Kiat punya satu asumsi kelayakan dia melalui tim survey bgmn. Bs dilihat oleh tim survay Dia punya modal suaha, dan tempat usaha, lalu dia pinjamannya sekian, kelihatan disitu kan. Kalo mmg dia dasarnya nasi uduk, kan bisa kita survey, jd tim kita sendiri ada.</p>
	<p>Ut sementara saya selaku ppk, memberikan masukan kpd para masy itu sendiri, kita coba, dirw kami, sementara kita mengcover mrk yg mau dlm arti kata mrk yg punya usaha itu baru sekitar 10 org nasabah dr keturunan. Klo kita secara detil msalah kk kembali kdalamnya tuh, data yg lama dirw sekitar 450 kk. Tp ut smntara kita cek</p>

	<p>kembali, intruksi pa lurah, data lama hrs dihilangkan, jk ada pendduk yg ga domisili disini kan, kami cek kembali.</p>
	<p>Jd kembali ada yg kita pinjamkan 1 jt bagi peminjam pemula ttp dia bs jd besar , itupun saya kemblaikan pd tim survey, dewan, keuangannya mungkin jg. Tim seleski dr dewan, masyarakat jg dibentuk jg. Ada dr kelurahan, tokoh masyarakat.</p>
	<p>Jd semua ini lancer/brp persen yg macet ?</p> <p>Alhamdulillah, secra keseluruhan bagus. Ada program yg ditangani tim satgas, yg mmg jatuh, meninggal dunia, bgm cara tindakanya, Wewenangnya ada pd tim satgas itu sendiri.saya tdk bs memberikan satu pandangan. Tp kalau kembali pd nasabah diwil saya, hamper semuanya deficit, msh bagus.</p> <p>Ada yg sdh mncyclcsaikan angsuran dg bukti ngajukan usulan baru. Kalau mmg tdk ada halangan dlm bulan2 ini, ada pencairan. Itu ut masyarakat yg sdh beres dalam satu tahun keblakang.</p> <p>Dgn bukti waktunya bln mei 2008, jatuh tempo, tp saat ini mrk sdh bisa ngajukan kembali dgn bukti lampiran setoran merah, kita pegang setoran hijau, dan dewan putih. Ut membuktikan semua setoran itu sdh beres smua, sbg bahan proposal,missal proposal naik sebelum diseleksi ol tim sleksi, seleksi administrasi, dan kelayakan usaha, kita hrs lampirkan buku merah. Terakhir sbnyak 27 nasabah, sdh bisa dijawab dlm arti kata bhw bukti merah bs dilampirkan, scr jls lengkap datanya, jd jelas. Kecuali jk datanya buku merah tdk dilampirkan, krn macet. Kan blm jatuh tempo, krn bln mei.</p>
	<p>Yg miskin ? yah, tergantung dewan. Dia jual nasi uduk, masy itu kan mau sekali dpt pinjaman besar, akan tetapi di tim seleksi administrasi itu sebagai masy oke, datanya jelsa, tp kelayakan usaha nasi uduk mengasumsikan usulan 2jt. Tp kembali kepada kita perhitngan modal ut budget, minimal 500 n maksimum 1 jt. Itu sbg data org miskin. Tp kita liat lg, dia baru buka usaha atu sdh punya usha ? jk baru, kita beri pancingan,dulu. Ga mungkin kita kasi besar2,kalo macet grn. Jk tahun kemarin kita kasi 500rb, trus dia skrg sdh berkembang, kita bisa lebihkan. Itupun kembali kpd angsuran. Kalo angsurannya bgus, ok kita bs lebihkan, jk tidak, jd PR kita, krn kan beresiko buat kita. Org miskin, Bukan kita membedakan ya, scr professional saja. Jgn sampai kita mau menolong, tp kita terjebak.itu saja.</p>
	<p>Apakah ada konflik ga di masy ttg pemilihan kelayakan.</p> <p>Belum ada smp saat ini. Siapa saja boleh pjm besar, silahkan buat proposal sebesar2nya. Tp ada tim slesksi yg lihat. Jgn smp jd dilemma . Jk mrk bs mengcover yg skrg, insya Allah selanjutnya akan diperhatikan. Ga ada pandang bulu, etnis, dsb.</p>
	<p>Ada ga proses pengusulan ulang ?</p> <p>Kita kan triwulan, itupun tdk menunggu program y a d. kita pancing masy jk mmg mrk bs melaksanakan triwulan itu, komitmenlah dlm pengembalian supaya org lain bs memanfaatkan anggaran tadi. Makanya kita coba, 30% kemacetan ditkt wilayah, kita coba beri tanda merah. Kenapa koq ? saya lancer, ada diwilayah anda itu tdk lancer. Krn setiap usulan itu, kami selaku ppk, hanya memegang formulir, nnt nasabah dtg, stlh itu dia dittd RT ut meminjam, jd RT tau. Dia (RT) akan member masukan kpd kita org tsb</p>

	<p>bgmn. Stlh itu baru kita kita rapatkan, lapor ke dewan. Kita kan sebagai jembatan. Didewan sendiri pny tim2 sendiri, baik tim sleksi adminiastrasi, dah lgkap atau blrn, setelah itu turun lagi tim sleksi usaha, ut memantau, atau bs aja ada take n give dg pengurus, begitu. Jd kita coba berusaha spt itu. Kalau kita pake system yg enak2 aja, alhamdulillah, diwilayah kami cnak, kita ga ada masalah. Nnt pjn gede2 ga bs dikembaliin, kan kita malu sendiri.</p>
	<p>Ini gede2 pak</p> <p>Iya, kalo bs ngecek warungnya cmang keren. Kita usahakan bs cover semua. Yg miskin atau yg ga miskin. Jd pinjaman bertahap dr lima ratus – 1 jt- bertahap. Sdh lebih dr 3 X pinjam.</p> <p>Ada upaya melepaskan mrk ut dialihkan kpd yg lain.</p> <p>Mng hrs begitu. Misalnya kalau mng dia sdh masuk 30jt, mgkin kita sdh lempar dia ke bank. Bgmn kita ga diserang masy jk kita putuskan. Msai mrk sdh pinjam bagus. Bgmn jwaban kami jka dialihkan, kpd mrk dimana cara belanja aja bs lebih dr 15jt. ? yg kecil, utp kita akomodir. Yg jd pertanyaan, bgmn menjawabnya ? saya sdh bagus koq ga diinjamin lagi.</p>
	<p>Jk ada pencairan, kita mengundang mrk, bgmn pengembaliaanya. Selanjutnya ut pemberdayaan masy kita ya trs terang aja di wilayah kami, mengatakan puas. Pada masy kita katakan ini bkn dana hibah. Oleh krn itu, jk mrk tdk mengembalikan, maka yg lain tdk dpt memanfaatkan. Dlm setiap kita ada rencana program, Kita undang seluruh masy, perwakilan tokoh2 masy ut menerima dana baru, kalau dana bisa kita serap, itupun manfaatnya ut mereka. Kalaupun kita ga bs serap, yah kita alihkan bgmn caranya. Jd ada cambk2 dari mrk sendiri sbg control. Jd peranan mrk sendiri spt apa, masyarakat mengurus wilayah, dewan wilayah, semuanya kita jd satu, dalam arti kita menjebatani suapaya roda kegiatn ini dpt terlaksana dg baik dg partisipasi mrk sendiri.</p> <p>Ttg dana sosialisasi & operasional, Ada aturan main, dan itu menjadi modal kami dalam sosialisasi kepd masyarakat.</p>
	<p>Bagaimana Pengembalian angsuran pak</p> <p>Misal dari 20 orang ada 2 orang yang ambil bulanan, tapi ga semua orang gitu sih, karna mingguan. Untuk periode 2006 – 2007 kan setahun yaa, 31 orang dan 27 orang, sudah lunas 16 orang. Data tahun 2006, 31 orang. 26 orang data 2007. 27 orang total. Alhamdulillah, secara keseluruhan bagus. Ada program yang ditangani tim Satgas, yang memang jatuh, meninggal dunia, bagaimana cara tindakannya, wewenangnya ada pada tim Satgas itu sendiri. saya tidak bisa memberikan satu pandangan. Tapi kalau kembali pada nasabah diwilayah saya, hampir semuanya defisit, msh bagus. Ada yang sudah menyelesaikan angsuran dengan bukti ngajukan usulan baru. Kalau memang tidak ada halangan dalam bulan-bulan ini, ada pencairan. Itu untuk masyarakat yang sudah beres dalam satu tahun kebelakang. Dengan bukti waktunya bulan Mei 2008, jatuh tempo, tapi saat ini mereka sudah bisa ngajukan kembali dengan bukti lampiran setoran merah, kita pegang setoran hijau, dan dewan putih. Untuk membuktikan semua setoran itu sudah beres semua, sebagai bahan proposal, misal proposal naik sebelum diseleksi oleh tim seleksi, seleksi administrasi, dan kelayakan usaha, kita harus lampirkan buku merah.</p>

		<p>Terakhir sebanyak 27 nasabah, sudah bisa dijawab dalam arti kata bhw bukti merah bisa dilampirkan, secara jelas lengkap datanya, jadi jelas. Kecuali jika datanya buku merah tidak dilampirkan, karena macet. Kan belum jatuh tempo, karna bulan Mei.</p>
		<p>Ada kendala ga slma program ini berjalan ?</p> <p>Alhamdulillah tidak ada kendala. Karena tidak ada pergantian TPK RW, sejak 2003, maka kami paham/tau cerita. Walaupun ada pembaharuan. Yang jadi masalah, smakin banyak ganti orang makin banyak kerusakan. Jangankan kita tunggu dipos, kita door to door aja bisa meleng; ini pak kepagian atau ini pak kesiangan. Kan bcgitu-bcgitu untuk buat belanja. Bisa rusak deh program.</p>
		<p>Selama program ini jln, mana yg sukses ?</p> <p>Yag bakso. Omset pertama 1,5 smp bs tempat bagus, buka cabang. Kalo dia kita cut, pdhal udah bagus, paling dewan dikroyok padhal dia rencana buka di mangga 2. Trus warung klontngan si jAMIL it bagus. Jd dr 24 org, Cuma 1 ygnunggak, krn sakit. Bs pjm lg yg penting sembuh duu. Yah harga2 naik, minyak, kita semua teriak.. yah kondisinya spt itu. Semua susah.</p>
6	Pak MJ (55 Thn) TPK RW 04.	<p>Jml pemanfaat sekitar 135 org. selama ini peminjam ada yg pas 5x, ada 2 x. ada yg sekali (baru). Pinjaman Minimal 1jt – 15jt.</p>
		<p>Mrk ada yg macet ga ? brp %</p> <p>Ada, sekitar 2003 - 35%. 2004-2005 20%.</p>
		<p>Ada ga yg berubah dr usaha mrk stlah dibantu program</p> <p>Konveksi ada, ada jg yag ga. Yg paling berhasil konveksi. Warteg ada. Krn daerah termasuk daerah konveksi. Yg menagih Tim TPK RW. Meskipun ada pembagian tugas, ut jln kemasyarakat semua terlibat.</p>
		<p>Pd saat seleksi org, ada masalah ga ? Yg seleksi dr tim seleksi, kita Cuma kumpulkan data. Selama ini, ada ga masalah dr masyarakat ? Masyarakat masih berpendapat kalau uang PPMK adalah uang kita, karena pengaruh JPS. Jadi masih ada yang sulit mengembalikan Semua masy tau ga ttg ppmk Ada yang tau ada yang ga. Karna mercka masih pikir tentang JPS. Kecuali yang bergaut aja karena minjam.</p>
		<p>Ada ga pertemuan ut sosialisasi ?</p> <p>Setiap turun dana kita sosialisasi dulu di tingkat RW yang datang dari masyarakat sekitar .kita undang RT (untuk sosial). Kalau untuk ekonomi, kebanyakan kita undang beberapa orang termasuk RT bahwa ada pencairan kembali. Masyarakat semua kita datengin, termasuk RT - nya , yang penting ada KK dan KTP.</p>
7	Bapak AK/ Pemanfaat PPMK	<p>Menurut bapak slama jd pemanfaat ini, apa yg buat bpk tertarik</p> <p>Sy sgt tertarik. Saya mulai dr nol. Krn lama nganggur, saya dibantu tmn2. Ada pahlawan bertopeng ini ppmk, saya manfaatkan ini akhirnya jln trs smp sekarang. Kalo bicara ttg</p>

		training, semua org kan punya, ini kan ngotrak , gmn caranya melipatkan trs smp jatuh .
		<p>Pjm 1 brp pak,</p> <p>1,5 lalu kelipatan2, dan terpadu bpk. Kalo pinjam ain kan pake agunan, kalo ini ga. Saya trima kasih bgt. Ada kemudahan krn merasa trbantu. Jd saya lunasin cepat biar enak. Ga bs byr sesuka hati, yah apa kata dunia.</p>
		<p>Ada ga factor yg menghambat bapak atau ada kendala gada lm pinjam ?</p> <p>Ga da. Jd ga ada hambatan. Jd minjam, ngangsur dibulatkan. Ngpain sili pjm lama2.</p>
		<p>Keuntungan bersih sehari ?</p> <p>Jadi penerimaan omset perhari bervariasi, minggu dan kemis, keuntungan sehari lebih Rp.1.000.000,- hari sabtu Rp. 750.000,-. Untuk hari biasa ± Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- lah. Saya dianjurkan oleh customer saya untuk buka cabang. Yah kalo mo naik kelas, harus pindah ke tempat yang berkelas.</p>
		<p>aDa saran ut pengembangan kedepan</p> <p>Saran ga ada, tp ikut prihatin sama pengurus. Kdg2 sdh membantu sekian lama, tp bayarnya tersendat. Kdg ada yg cemburu dg saya, aki koq dikasi sekian.... Org kan cemburu aja, ga liat sepak terjangnya. Saya membuktikan kalau saya baik. Jd saya ga amu ngutang ke t4 lain, kan bs rusak krn bs ga focus. Saran saya tetap pada kejelian ada dibeliau-beliau (pihak TPKK). harapan saya sebagai pengusaha papan bawah seperti saya ini, yaa dapat pinjaman non - agunan, dapat pinjaman dari PPMK sesuai kebutuhan, namun berpulang pada kejelian memandang, menilai, kan gitu. Orang ini layak ga dikasi, harapan orang papan bawah yah dapat pinjaman sesuai kebutuhan. jadi seperti yang saya kataan tadi, misal saya pinjam ke PPMK, karena ga cukup akhirnya saya utang di tempat lain buat tambahan, akhirnya saya nyicil 2, berat. Bersamaan dengan itu. Jadi kalau satu arah, bisa fokus dia. Yah gak kedodoran, lebih ringan. Karna sini Cuma 12 % per tahun. Umpama dengan koperasi dan ketengan yg 25 – 30% per 3 bulan, apa ga lebih memberatkan. Mendua, karena tidak terpenuhi hajatnya, gitu.</p>
8	Bu TR/Pemanfaat	<p>Udah berapa lama berusaha bu</p> <p>Udah 5 tahun usaha warteg, tinggal disini (Duri Utara) semenjak 8 tahun yang lalu, sebelum PPMK ada. Modal pertama kecil. Berapa mah modalnya, kalo dulu ama sekarang mah ga ada apa-apanya, sulit cari duitnya. Dapatnya kurang, karna penghasilan sepi. Banyak kita mengeluh terus. Kalo dulu, rame, kita bisa simpan, malah sekarang kurang terus.</p>
		<p>Knp bu</p> <p>Apa-apa mahal. Sekarang naik semua, jadinya susah. Harga dinaikin susah juga. Sekarang mana ada, cuma untuk makan doang. Sehari pas-pasan, buat balanja cukup. Jadi Bolak balik usaha untuk makan doang.</p>
		<p>Bgmn selama menjadi pemanfaat ppmk.</p> <p>Dapat 2 juta, angsur mingguan. Sedapatnya duit, kalo ada 30 kasi 30, ada gocap, kasi</p>

		<p>gocap. Kalo ga ada duit, ya kita kosong, ga bayar. Jd kita kalo minggu ya, kadang2 ada gitu. Kita butuh modal.</p>
		<p>Kira2 ada manfaatnya ga bu</p> <p>Kemarin itu saya ngelunasin anak saya kuliah, di kampus. Bayar sebulan sekali. Jd anak saya sdh tamat kuliahnya, skrg sisain buat anak saya n modal.</p>
		<p>Skrg dpt brp bu ?</p> <p>Jika untung dpt 300rb. Kotor. Yah buat blanja doing bu. Skarang susah sih bu. Soale minyak tanah , saya ada gas tp takut pake. Pagi buka jualan uduk diluar, uduk Abis, anak saya jualan es. Lumayan dari depan ke blakang. Kadg2 lumayan.</p>
		<p>Sdh lama minjam, 2 tahun yaa, slama minjam ada masalah ga ?</p> <p>Ga ada masalah, anak saya yg kuliah yg ajarin. Anak yg bantu tulis, bayar ya lancer. Kalo bayar , kadangKalo dpt lebih, kasi lebih, kalo kurang yaa, seadanya.</p>
		<p>Penjamin ada bu ? ut bantu jk berhalangan.</p> <p>Penjamin ada, anak saya, yg kuliah itu. Kalo saya butuh pinjam, besok saya kasi. (pinjaman Ama ibu2 yg lain). Kalo minjam ama tetangga gitu doing.</p>
09	SDR & PR / Pemanfaat PPMK	<p>Angsuran gimana bu ? Selama ini ada kendala-kendala ga selama penagihan</p> <p>Lumayan bagus, karna kami minjam hamper 3 tahun. Oh lancer, ditagih sama TPK. Angsuran di tingkat UPK juga lancer. Ga da masalah.</p>
		<p>Ada dapat pelatihan ga Bu</p> <p>Kan ini kita belajar keuangan, kami dibantu dg pak cecep. Aku belajar, akhirnya bisa. Paling masukian dr setoran ke computer, kelancarannya gmn ? kan per RW masing2, jd dibantu pak yusuf. Kami jg ada kursus2, spt tata boga.</p>
		<p>Ada manfaat ga bu ikut PPMK</p> <p>Kami sudah punya tempat sendiri, dulunya masih ngontrak. Sekarang yang di lantai 3 kami sewakan juga Untuk saat ini agak sulit, dengan harga-harga sekarang yah sulit. Mau dinaikan juga serba salah. Karena ada program ini jadi membantu banget.</p>
		<p>Harapannya apa bu ?</p> <p>“Pengennya kalau bisa pinjaman meningkat. Jadi Ditingkatkan lagi gitu.”</p>
10	DM/44 thn / Pemanfaat PPMK	<p>Berapa lama minjam PPMK Sudah kurang lebih 3 tahun ini</p>
		<p>Bagaimanan perasaan ibu setelah dibantu PPMK</p> <p>Sedikit bahagia, 300-400ribu lumayan buat bayar kontrakan untuk anak. Perabotan nambah sedikit-sedikit buat beli kebutuhan sehari-hari. Anak ga sekolah jadi ga ada</p>

		langgungan.
		Kenapa bu ga sekolah Dia ga mau sekolah lagi ga tau kenapa jadi baru SMP sudah berhenti
		Bayarnya gimana bu Mingguan dari kumpul dapat hrian. Lumayanlah
		Bagaimana pelayanan petugas PPMK Alhamdulillah pelayanan baik. Kalo ke sini, kami dialayni dengan baik. Orangya ga neko-neko.kadang fromulir dibantu isiin.
		Jam berapa buka usaha bu Jam 5 pagi sampai jam 10 malam
11	WK/ Pemanfaat	Bagaimanan perasaan Bapak setelah dibantu PPMK Yah lumayan bu, usaha salon bisa naik tambah alat-alat, rumah dirapiin, bisa bantu orang tua, sehari usaha bisa dapat 50ribu untuk salon dan ledeng 100 ribu/hari. Itu usha pinjaman ppmk untuk ponakan saya, biar dia ga nganggur.
		Sudah brp lama gabung PPMK 3 tahun ini
		Bayarnya gimana Pak Kami angsuran bayar lancer. Kadang-kadang bayak udangan dari keluarga, tapi biasanya aku susulin bayar secepatnya atau 2 kalinya
		Alhamdulillah pelayanan PPMK baik. Ya, aku pernah ikut pelatihan manajemen usaha kecil
12	AT/TPK RW	Sudah berapa lama menjadi petugas TPK RW bu ? Sekitar 2 tahun lebih, saya aktif di bidang ekonomi membantu ibu-ibu dan bapak-bapak dalam memanfaatkan dana PPMK. Setiap hari dan setiap minggu ngider je rumah ibu-ibu untuk menagih angsuran pinjaman PPMK.
		Apa aja jenis usaha yang dibiayai Bu ? Yah, mayoritas yang kami biyai untuk pinjaman PPMK adalah usaha-usaha kecil seperti kreditan, warungan kecil-kecil, jualan indomie, gorengan, warteg. Masih banyak lagi. Rata-rata yang kecil.
		Bagaimana proses sosialisasi ke masyarakat bu ? Masyarakat minta fromulir ke TPK RW. Jadi sebelum masyarakat minta, ada penilaian karakter mereka terlebih dahulu. Kadang-kadang pinjaman Cuma diberikan sama yang usaha aja, sementara yang belum usaha atau baru mulai usaha masih susah diberikan.
		Ada masalah ga dengan masyarakat selama pinjaman diberikan ? Yah, kadang-kadang ada kecemburuan, karna pinjaman ama yang diusulin ga sesuai. Padahal ngusulnya mungkin3 juta, yang disetujui Cuma 1,5 juta. Jadi cemburu ama yang bisa pinjam lebih besar.
13	Ibu YT/ Pemanfaat PPMK	Darimana tau PPMK, kenapa bisa tertarik minjam

		Tetangga sudah pada tau dan juga pada minjam. Semua pada minjam, laki atau perempuan. Jadi, kita sama-sama minjam. Senanglah, karena lurah sudah membantu. Uang jasa itu (PPMK) kecil. Darpada minjam tempat lain, banyak. Kita mikirlah bu. Kita ga mau
		Gimana perasaan Ibu gabung PPMK Senang, kni lurah sdh membantu. Uang jasa itu kecil. Drpd minjam t4 lain, banyak. Kita mikirlah bu. Kita ga mau.
14	Ibu YN/Pemantau PPMK	Darimana tau ada program PPMK Kita semua tahu jika ada program PPMK. Jadi disini hampir semua ikutan minjam dana dari PPMK.
15	Ibu AS	Kenapa pinjam dana PPMK bu Kalo pinjam lain kan pake agunan, kalo sini kan ga. Saya trima kasih banget. Ada kemudahan karena merasa terbantu untuk bisa usaha.
		Untung ada program PPMK sehingga bisa membantu, apalagi bapaknya sudah lama ga kerja, jadi kami hidup dan bayar sekolah anak dari dagang ini aja.
16	Bapak PC/ Manager Program MM	Bagaimana sejarah sehingga MM lahir ? MM – awanya program pemberdayaan masyarakat dibawah Kordinator Pengembangan Masyarakat Dompot Dhuafa yaitu sebagai program pengkajian masyarakat. Karena kebutuhan semakin besar, program pengembangan tidak bisa dinaungi oleh sebuah program karena akan menjadi banyak sub-sub program. MM harus menjadi lembaga otonom, karena sisi jaringan sudah sangat banyak. MM resmi menjadi lembaga otonom yang focus pada ekonomi karena strategi program untuk pemberdayaan yang paling tepat adalah ekonomi, Sehingga praktis jadi program masyarakat mandiri sekarang 3 tahun berjalan,
		Apa tujuan program pak Tujuan program adalah memberikan penguatan kepada masyarakat agar kehidupan ekonomi mereka berubah dan terberdayakan.
		Bagaimana kriteria kelompok sasaran pak Untuk masyarakat urban pendapatan mereka kurang dari \$ 2 per hari, sebagai seleksi awal kami kepada mereka. Juga para mustahik (kaum yang miskin) yang telah punya usaha atau mau memiliki usaha asal ada komitmen, dia akan usaha apa. Jadi kami latih mereka. Untuk wilayah pedesaan selama 3 minggu, sementara pihak urban cuma 3 hari aja.”
		Bagaimana ketentuan alokasi dana untuk program ini pak Untuk penggunaan dana operasional tidak lebih dari 12%. Sisanya adalah untuk program.
		Apa definisi Kemiskinan menurut MM Kemiskinan adalah situasi dimana orang memiliki kekurangan dalam beberapa hal. MM melihatnya dari aspek ekonomi. Kalau miskin di desa – masyarakat punya rumah bagus tergolong orang yang punya. Bentuk dan intervensi program yang telah dilaksanakan oleh MM adalah melalui kredit mikro Salama ini program banyak, masyarakat punya pendamping, bagaimana perubahan setelah program dijalankan
		Bagaimana respon masyarakat Respon jelas ada, seperti kita tumbuhkan lembaga lokal, sekarang, diri sendiri sekarang

		berkelompok
		<p>Untuk Kelompok sasaran, gimana keterlibatannya ?</p> <p>Ada yg aktif, ada yg pasif, ada yg tdk aktif, tp mayoritas mrk aktif, utamanya yg memiliki usaha bersama. Jd mrk trus meluangkan waktu Termasuk pencatatan laporan itu tandanya serius thdp program ini. Untuk jelasnya lihat laporan triwulan.</p>
		<p>Konsep Comdev gimana menurut Bapak</p> <p>Comdev sebenarnya untuk empowering development atau penguatan pada masyarakat. Banyak cara untuk memberikan penguatan ditingkat masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat untuk hidup sejahtera. Comdev harus mengarah pada peningkatan taraf hidup, dengan menguatkan asset-aset yang dimiliki. MM membantu mengarahkan. Dalam comdev harus ada sustainability pasca program. Karena MM tidak mungkin ada terus di masyarakat.</p>
		<p>Untuk konsep ekonomi produktif gimana pak</p> <p>Ekonomi produktif adalah usaha ekonomi masyarakat yang berjalan secara berkesinambungan, dan memberikan manfaat bagi inividu atau keluarga tersebut.</p>
		<p>Ada hambatan selama pendampingan mitra, utamanya tentang penertiban kota</p> <p>Mestinya ada pengaturan tempat-tempat untuk berdagang. MM harap ada strategi-strategi dari pemerintah mencari titik-titik yang tepat. Maksudnya, bukan melarang, tapi menata tempat-tempat tersebut supaya layak untuk menjadi tempat berdagang.</p>
		<p>Kalo dari pendamping gmn, apa hambatanya</p> <p>Mereka perlu dikuatkan di tim. Terutama yang bergerak dipendampingan urban. Karena sifat masyarakat urban yang jauh lebih sensitive daripada di desa."</p>
		<p>Kalo faktor penghambat dari Mitra apa pak</p> <p>Budaya untuk menjadi warga Negara yang baik yaitu belum punya id, menjadi penghalang masyarakat dapat mengakses program pemerintah daerah. Juga ada ketakutan dari pihak masyarakat akan aturan yang banyak. Dalam proses rekrutmen melalui pelatihan (LWK) dan pertemuan rutin juga ada yang kurang aktif. Mungkin kendalanya karena kesibukan."</p>
		<p>factor pendukung MM dalam program apa pak</p> <p>Masih berjalannya donatur dari DD merupakan faktor yang sangat mendukung program kami.</p>
17	LN/ MM	<p>Pendamping</p> <p>Apa kriteria calon sasaran atau mitra MM ?</p> <p>Kriteria untuk urban karena berangkat dari isyu formalin, jadi pedagang makanan yang rentan isyu Bahan Berbahaya, dibawah Rp.30.000,- pendapatannya perhari. Juga kepemilikan harta meskipun pendapatan diatas Rp.30.000,-, dalam studi kelayakan mitra, yah disesuaikan juga.</p>
		<p>Bagaimana asesmnet dimulai</p> <p>"Ada wawancara dengan masyarakat. Ada PRA, ideal ga juga, tapi ga langsung. Ada beberapa materi yang dipake seperti kelender musim, tapi ga langsung tapi lewat dialog aja. Tim survey yang menentukan, tapi kami sudah ada data awal. Sebelumnya ada need</p>

	<p>assessment dari DD. Dari analisa masalah dan tujuan, kita siapkan konsep dan blueprint program. Problem social map, Cuma dialog aja. Awal Maret survey – sebulan lah yaa, sekitar April sudah dapat mitra. Kita lakukan LWK, bentuk kelompok, pertemuan warga untuk sosialisasi program .- studi kelayakan mitra sebelum pembentukan kelompok. Mata pencaharian sudah memenuhi syarat. – tempat lain door to door. Ini karena sudah ada lembaga local sebelumnya yang kelola dari BNI syariah (nama lembaga KPDR). Kita rekomendasikan apa programnya.”</p>
	<p>Pendekatan apa yang dipakai</p> <p>“Pendekatan partisipatif. Juga pendekatan tokoh lokal. Person-person yang bisa dioptimumkan. Ada FGD, silaturahmi, pertemuan di tempat-tempat informal dan seterusnya. Dengan adanya kelompok, ada beberapa mitra yang kita didik untuk menjadi seorang kader, akan muncul figur-figur yang bisa jadi kader. Yang pada akhirnya untuk membentuk lembaga lokal.”</p>
	<p>Ada tantangan dari masyarakat ?</p> <p>“Prokontra itu sudah pasti. Di mitra sendiri , jangankan masyarakat umum, ada juga yang kesal gitu, namanya kita sebuah lembaga, untuk akomodasi mereka juga ada aturan dan prosedur jadikan mereka agak keberatan, lho koq ribet banget. Harus ngisi data, ditanyanya dulu, LWK dulu, ribet mereka bilang. ...enakan bank keliling, begitu ketemu langsung cair. Kalo kita kan ga.”</p>
	<p>Bagaimana fungsi mbak sebagai pendamping</p> <p>“Pendamping itu semua harus bisa. Jadi kita bisa buka jaringan keluar untuk mereka, promosikan mitra kita. Intinya, pendamping mesti serba bisa, tuntutannya seperti itu. Gimana pendamping bisa bersinergi dengan semua pihak, dengan kelompok, mitra, kader, dan pihak lain. Sejauh mana mereka keluar dari masalah mereka. Bisa setiap saat, bisa dikata 24 jam. Harus siap dari sisi waktu dengan berbagai potensi yang ada. Bagaimana merekayasa semua kondisi, kita ga bisa kerja sendiri, karena ini tugas orang banyak, tugas Negara.”</p>
	<p>Setiap pertemuan apa aja yang dilakukan</p> <p>“Pendamping ada bagi-bagi informasi, transfer informasi, ilmu yang dikasi lebih pada saran tentang bahan makanan berbahaya, wirausaha, keuangan, motivasi pasti lah ya”.</p>
	<p>Bagaimana dengan hasil sertifikasi atau penyuluhan makanan sehat</p> <p>“Itu kembali ke orangnya lagi yaa, tergantung komitmen mereka untuk menjaga kehalalan dan keamanan produk. Kata LPOM yah itu tergantung mereka, bisa berubah tiap produksi, tergantung mereka yang usaha</p>
	<p>Apa saja kendala yang ditemui</p> <p>“Tiap pertemuan, kita optimalkan 1 jam pertemuan. Jika ada kasus-kasus, kita spesialkan waktunya. Jika pengurus ga bisa, baru pendamping yang urus. Karena mereka sering pulang kampung, biaya mereka tersedot disitu, juga harga-harga, apalagi minyak tanah.</p>

	<p>Ada dualism pembiayaan ga</p> <p>"Pada saat kita survey, mereka bilang ga minjam bank keliling. Kita memastikan jangan ada dualisme pembiayaan. Begitu kita datangi, kadang ada juga bank keliling. Mereka jadi ga enak gitu. Yah susah yah, merubah kebiasaan mereka. Yang sudah terbiasa instant juga akhirnya instant. Kita harus komitmen, kalo mo mundur silahkan, itu lebih bagus, daripada merusak yang lain".</p>
	<p>Apa indicator kemacetan</p> <p>"Indikator kemacetan diukur setelah 3 bulan ga ngangsur secara berturut-turut. Itu kategori macet. Slama ini sih ga ada. Komitmen awal mereka, setiap 2 minggu akan mengangsur. Meskipun demikian kita melihat setelah berjalan 3 bulan."</p>
	<p>Apa factor pendukung</p> <p>"Faktor pendukung dari pemerintah lokal, yah dukungan moril dari kelurahan. Belum ada yang sifatnya membantu secara langsung cuma bilang, program itu bagus untuk masyarakat."</p>
	<p>Apa factor penghambat</p> <p>"Banyak aturan dari pemerintah, katanya Perda tentang ketertiban umum. Jadi gerobak mitra dibawa oleh Trantib, padahal mereka sudah bayar retribusi. Tapi jika ada pengangkutan/pembersihan dari pihak trantib, mereka ga mau tahu. Yah, mau ga mau kita carikan jalan gimana gerobaknya bisa diadakan lagi supaya bisa jualan lagi."</p>
	<p>Apa sih tujuannya MM ke pedaganag jajanan</p> <p>Kita pengen dampingi mereka pedagang kecil itu, makanya kita ingin mereka punya standar kualitas tsb. Fasilitasi untuk mendapat legalitas sertifikasi halal dan sehat. Seperti bakso, mie ayam, es puter, batagor, soto. Target grup kita pendatang (urban) dan juga pribumi. Ada beberapa kriteria, terutama pendapatan mereka tidak lebih dari Rp.30.000,- perhari.</p>
	<p>Maslah ktp gmn</p> <p>Itu juga kita usahakan, t put dpt ktp terlalu mahal, ut jalan pntas bs 500rb. Jd mrk ga diakui sbg penduduk. Punya identitas itu awalnya, tp stlh rekrutmen sebagian besar tdk punya. Jd standar kita turunkan lagi, menerima mrk yg jg ga pny ktp.</p> <p>Model pemberdayaan juga, baru menangani rural. 2006 MM coba maju ke wilayah rural. Urban sangat unik, berbeda sekali kondisinya dg desa, dimana mudah cari sosok kader ut lanjutkan program, smtra di urban sgt sulit.</p>
	<p>Kemiskinan : ga bs dilihat dr satu sisi, ada structural, ada cultural. Di urban sulit untuk menyimpulkan apa berada di structural atau cultural. Kebijakan makro membuat mrk miskin, spt mitra kita yg kita damping, kita berharap mrk dpt t4 strategis tp pmda tidak membolehkan krn ada perda tertentu yg ga boleh di jalur hijaulah, ga boleh tempat umum pdhal itu potensial bagi pedagang kita ut dpt omset yg lbh besar. Namun krn adanya kebijakan2 birokrat tadi jd miskin scr structural. Nah, cultural, mrk jg kyk gitu krn etos</p>

	<p>juga, dg posisi birokrasi dan kebijakan makro ga berpihak, mrk ga punya alternatif? mrk miskin bgt, ga punya ide2 alternatif, misal saya ga bs jualan disini, mungkin gerobak ganti pikulan atau bagaimana, gitu. Alih lokasi gitu. Itu masih minim. Jd jk ada kebijakan, mrk ga punya alternative. Misal minyak tanah, stlh itu bs pake apa? Jd mrk ga punya.</p> <p>Pendatang jiwa pejuang tinggi, km tantangan, namun ketrbatasan ide2 kreatif km pendidikan jg skill, jd ga ada. Jd mitra saya ada di manggarai, daganag sayur 40 tahun, jd gerobaknya itu Cuma satu aja. Misal buat batagor, smp mati batagor aja yg diusahain. Ga mikir bs tambah gerobak.</p>
	<p>Pertama survey dulu, kita juga ketika masuk ke komunitas berkordinasi dg pihka aparat RT RW dan kelurahan, yg cukup memudahkan ketika kita menemui lembaga local yang ada. Paguyuban KPDR (kelompok pemberdayaan dhuafa remaja) lahir km peduli banjir. Pemuda2 yg pnya kepedulian pd masyarakat ut nangani banjir, pendidikan,-beasiswa, kesehatan, ekonomi juga. Mrk akses BNI syariah, elnusa, rumah zakat dan LKC, terakhir MM. yang memudalikan saat kita mencari sasaran. Jd mrk sdh punya informasi tentang sasaran. Mrk sendiri yang kasi info, jk MM punya program pendamping makanan, dengan kriteria sbb, mrk punya informasi. Jadi mrk yg fasilitasi.</p>
	<p>Panduan2 ada, teknis ada. Menetapkan sasaran juga ada.</p> <p>Criteria untuk urban karena berangkat dari isyu formalin, jadi pedagang makanan yang rentan isyu BBB, dibawah 30 ribu pendapatannya perhari. Juga kepemilikan harta meskipun pendapatan diatas 30ribu, studi kelayakan mitra, yah disesuaikan juga.</p>
	<p>Comdev = kelompok-komunitas-orang-orang yang nantinya kita fasilitasi dengan kepentingan mereka yang berbeda gimana kita fasilitasi sesuai dengan tujuan program dari lembaga, gimana tujuan ini bisa kita transfer ke mereka dan bisa menjadi tujuan mereka juga. Dengan berbagai kepentingan Akan menyulitkan kita coba nawarkan program kita, tapi dengan pendekatan td kelompok- kader insya Allah melalui proses mrkakan bisa memahami ternyata disamping kepentingan mrk, ternyata ada tugas lembaga yang juga mrk wujudkan.</p>
	<p>Teknik apa yang diterapkan dalam perekrutan masyarakat</p> <p>Sangat sulit di urban, dengan kondisi mrk yg sibuk dan td tinggal yang sangat sempit, KONDISI RUMAH 2 X 2, itu kan kita susah. Apalagi kalo kita dtg pagi, mrk lg buat makanan, silaturahmi jg terbatas. Waktu itu dg pendekatan lembaga local yg adaa, mrk yang mempromosikan. mereka biasa ada pertemuan, dalm mengoptimalkan pertemuan2, arisan, pngajian, kegiatan RT. kita masuk dari situ. Ada moment2 penting seperti itu kita masuk.</p>
	<p>Bentuk program</p> <p>Setelah mereka lulus LWK, salah satu fasilitas yang mereka bisa dapatkan adalah pembiayaan. Disitu juga ada formnya juga. Peraturan pembiayaan, dikomitekan ditingkat mitra diketahui oleh ketua kelompok dan anggotanya. Jadi bisa dicairkan. Syarat programnya berkelompok, kita ga seperti perbankan, yang bisa menjaminkan dana kita, melalui kelompok. Jadi ada tanggungjawab bersama, ada komitmen. Awalnya kita</p>

		tawarkan tanggungrenteng, tapi dalam perjalanannya tidak bisa dioptimalkan, karena tidak mendidik, mereka juga punya kebutuhan, tiap pertemuan talangin temen, ya akhirnya manja. Tapi tetap kekuatan kelompok kita bangun. Mereka disebut Mitra – kelompok mitra - (KM) (1 KM minimal 5 anggota) – kumpulan KM (kelompok mitra) – Rembug mitra (RM) – ISM (iktiar swadaya mitra).. 2 KM jd Skim 1 ut pemulihan krn saat banjir terjadi. 10 bln tiap skim/tahapan. Pada prinsipnya pake akad – ekonomi syariah, system jual beli (murobahah). Kalaupun ambil keuntungan Skim 2 sebesar 7,5jt – akad tergantung usaha mrk. Kalo mrk jualan uduk, ga mungkin kita kasi lebih besar.
		skim 10 bulan pinjaman, pertemuan tiap 2 minggu. Margin rata2 min 10%. Skim 1 – 2. dana dikembalikan ke MM sementara aja, pembiayaan regular Cuma sirkah ada 8 , itulah yg membedakan dg dana GB krn kita nirlaba, dan zakat, jd kembali ke umat. Kalo zakat kita ga berharap byk, krn hrs kembali ke masyarakat. MM bukan amil, kita Cuma kontrak aja. Jual beli , krn tiap hari mrk menjual. Jd ga bs bagi hasil. Ada jg yg telat, tambah wkt smp 2 mgg, atau malah smpp 12 bln. Kelompok lebh byk laki2 drpd prp, pdagang keliling lebh byk bapak2. Mrk jg kerjasama sbg suami istri.
		Sebagai pedagang kecil, banyak masalah dengan preman, sering dipajakin. Juga harga-harga naik akibat BBM naik, akibatnya margin usaha yang diterima jadi menurun.
18	Bapak AH/ Mitra MM	Mengapa Bapak bergabung dengan MM Yang buat saya tertarik ikut program MM karena saya percaya dengan programnya. Saya bisa jualan lagi meskipun sudah kena musibah banjir, gerobak dan bahan-bahan saya sudah hancur. Alhamdulillah MM masih mau bantu lagi
		Pinjaman berapa pak pertama 750 ribu, sekarang dapat 2 juta waktu abis banjir
		Sering ikut kumpulan ga pak Saya ikut pertemuan tapi ga rutin, karena ngantuk dan capek.
		Setoran gimana pak Untuk setoran tentu ada, kadang-kadang terpake karena kebutuhan, pulang kampung, bayar kontrakan, sakit dan kalo hujan jadi ga datang.
		bagaimana pendapat Bapak tentang peran pendamping yah, Bu Ieni sudah baik sama kita. Banyak kasi informasi tentang bahan tambahan makanan yang berbahaya. Cara melayani pembeli. Alhamdulillah, kami ikuti. Kalo ketemu pembeli ga boleh cemberut, masaknya dan tempatnya harus bersih.
		ada yang berubah ga setelah masuk jadi Mitra MM Yah, dari segi mental, karena ikut latihan dengan MM tentang keberadaan makanan harus dijaga. Jangan menggunakan bahan pengawet seperti formalin. Penampilan harus bersih, perabot juga harus bersih. Jangan cemberut kalo melayani pembeli.”
		ada Saran untuk perbaikan program LSM - MM ke depan pak Yah, kalo bisa usaha diperbesar lagi, tambah gerobak dan anak buah. Jualan di tempat lain. Bapak harus punya pikiran maju, mesti punya pegetahuan. tapi bingung caranya. Cari lokasi baru, MM siap modal aja.
19	Bapak ST/ Mitra MM	Mengapa Bapak bergabung dengan MM saya gabung karena saya butuh mbak.
		sudah berapa lama pak sudah dua tahun. Saya kelompok pertama, dari dulu minjam pertama 500 ribu, sekarang dapat 1,5 juta
		Sering ikut kumpulan ga pak Saya ikut pertemuan tapi ga bisa hadir selalu, maklum mbak, kerja seharian jadi ngantuk

		dan capek. Tapi saya cukup rajin datang. Untuk setoran slalu bayar lancer. Ada juga yang macet-macet. Tapi saya bayarnya lumayan lancer, mbak.
		Gimana pean pendamping selama ini menurut bapak Untung ada Bu Leni, kami dikasi pinjaman dana sejak pertama MM kesini. Meskipun ada yang macet, tapi kami masih bisa mendapatkan tambahan pembiayaan. Aku rajin ke pertemuan. Banyak dapat informasi tentang usaha. Lumayanlah.
		ada manfaat setelah masuk jadi Mitra MM Yah, lumayan mbak. Bisa kasi makan anak istri, bayar kontrakan, pulang kampung. Tapi sekarang smua harga naik, bingung juga mbak . Dulu sebelum naik BBM, kalo belanja 150 ribu, bisa dapat 250ribu per hari. Sckarang yah bisa dapat 200ribu juga sudah syukur mbak.
		ada Saran untuk perbaikan program LSM - MM ke depan pak MM Cuma kasi modal aja, tentang perluasan pangkalan belum dilakukan MM. Bagusnya MM jika bisa nyediain pangkalan yang luas biar kita bisa jualan lebih besar.
20	Ibu IR/ Mitra MM	Mengapa ibu bergabung dengan MM saya dengar MM mau kasi modal usaha, jadi saya gabung karena saya butuh mbak. sudah dua tahun. Sejak pertama MM kesini, saya masuk kelompok pembiayaan pertama 750 ribu, sekarang dapat 2 juta tuh waktu kemarin banjir. Rumah dan tempat dagang saya habis terbawa banjir. Untung MM kasi bantuan, jadi saya bisa usaha lagi dan dananya sudah lunas.
		Sering ikut pertemuan bu Saya selalu ikut pertemuan, bagi saya janji itu yang utama. Biarpun kerja seharian. Setoran lancer mbka. Tahap kedua seduah beres juga. Saya mesti penuhin janji.
		apa manfaat yang ibu rasakan setelah masuk jadi Mitra MM "Saya senang menjadi mitra MM, yah senang aja gitu. Sayanya butuh, jadi bisa kerjasama dengan MM. sudah 2 tahun ini saya kerjasama dengan MM. lumayan mbak bisa buat bayar sekolah anak-anak. Bapaknya ga kerja, jadi bantuin disini.
		ada masalah selama jadi mitra MM bagi saya ga ada masalah mbak. Smua sudah kita komitmenkan. Jadi harus kita laksanakan.ga da kesulitan isi formulir, saling bantu dan mbak leni juga bantu kami dalam mengisi formulir juga pada awalnya
		ada Saran untuk perbaikan program LSM - MM ke depan bu yah, saya ingin usaha bisa meningkat lagi. Terserah orang-orang bilang saya terlalu ngoyo cari duit. Saya kreatifin aja mbak. Ini jualan dulu modalnya Cuma 25ribu, ini usaha sudah lama sekali sebelum gabung ke MM. sekarang sehari sudah dapat banyak.

STUDI Kelayakan Mitra/SKM



Nama		
Alamat sekarang		
Alamat asal		
KM :	Pembug :	ISM :

Program :
 Data ke- :
 Tanggal input :

INDEKS RUMAH ASAL		Indek Rumah Tinggal Sekarang(di kota)		KEPEMILIKAN ASET PRIBADI	
Ukuran Rumah (m ² /orang)	Sangat kecil (<4m ²)	Sangat kecil (<4m ²)	Kebun/Sawah	Tidak Ada	
	Kecil (4 - 6 m ²)	Kecil (4 - 6 m ²)		< 1000 m ²	
	Sedang (6 - 8 m ²)	Sedang (6 - 8 m ²)		1000 - 5000 m ²	
	Besar (>8 m ²)	Besar (>8 m ²)		> 5000 m ²	
Dinding	Bilik bambu/Kayu	Bilik bambu/Kayu	Elektronik	Radio	
	Semi	Semi		Tape	
	Tembok/Beton	Tembok/Beton		Televisi	
Lantai	Tanah	Tanah		CD. Player	
	Panggung	Panggung	Kendaraan	Tidak Ada	
	Semen	Semen		Sepeda Kayu	
Keramik	Keramik	Sepeda Motor			
Atap	Kirai/Juk	Kirai/Juk	Ternak	Mobil	
	Genteng/Seng	Genteng/Seng		Unggas (...ekor)	
	Asbes/Berglazur	Asbes/Berglazur		Kambing/Domba (...ekor)	
Kepemilikan Rumah	Mentumpang	Mentumpang		Sapi/Kerbau (...ekor)	
	Kontrak	Kontrak	Simpanan	Ada (Rp)	
	Keluarga	Keluarga		Tidak Ada	
Dapur	Sendiri	Sendiri	ASET PRODUKTIF		
	Tungku	Tungku	Sebutkan jenisnya :		
	Kompor Minyak	Kompor Minyak	Penggunaan aset produktif	Bertambahnya aset produktif	
Kompor Gas/Listrik	Kompor Gas/Listrik	Investasi usaha lain			
Kursi	Lesahan	Lesahan		Investasi usaha lunaran	
	Balai Bambu	Balai Bambu			
	Kayu	Kayu			
	Sofa	Sofa			

PROFIL KELUARGA

NO	NAMA	UMUR	HUBUNGAN DALAM KELUARGA	STATUS	PEKERJAAN		PENDIDIKAN	KET
					UTAMA	SAMPINGAN		
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								

Berikan keterangan lokasi tempat tinggal anggota keluarga di kota / di desa

III. DATA USAHA (HARIAN)

A. PENERIMAAN (PENDAPATAN)		B. BIAYA PRODUKSI (PENGLUARAN)		C. DATA PENJUALAN, 6 hari terakhir (hari ke-)		
- Penjualan Perhari	Rp	- Pembelian Bahan Baku	Rp	1	Rp	
- Penerimaan Lain-lain	Rp	- Operasional Usaha	Rp	2	Rp	
		- Pengeluaran Lain-lain	Rp	3	Rp	
JUMLAH A	Rp	JUMLAH B	Rp	4	Rp	
KEUNTUNGAN USAHA (A-B)			Rp	5	Rp	
Rasio A/B				6	Rp	
					Rata-rata	Rp

KEUANGAN KELUARGA

A. PENDAPATAN KELUARGA		Jumlah (Rp/hari/bulan)	B. PENGELUARAN RUTIN		Jumlah (Rp/hari/bulan)
1	Penghasilan Usaha Pokok		1	Kebutuhan Dapur	
2	Penghasilan Usaha Sampingan		2	Pendidikan	
3	Penghasilan Istri/Suami		3	Kesehatan	
4	Penghasilan Anak/Menanak		4	Transportasi	
5	Penghasilan Lainnya (Sebutkan)		5	Iuran Rutin (Listrik, Siskamling, PAM)	
6		6	Lain-lain	
7		7	
TOTAL (A)			TOTAL (B)		

SISA PENDAPATAN PER BULAN (A-B) = Rp Bila minus, ditelusuri penyebabnya. Bila plus dan nilai plusnya lebih besar sama dengan pengeluaran rutin maka calon mitra tersebut tidak layak (sudah lebih dari mampu)

~~Coret yang tidak perlu~~

PENDAPATAN PER KAPITA PER BULAN
(total pendapatan dibagi dengan jumlah langganan)

Pendapatan Per hari :

Rp.

Rp = Rp

REKAPITULASI KELAYAKAN (coret yang tidak perlu)

NO	PARAMETER	KELAYAKAN	KETERANGAN
1	Indeks Rumah	Layak / Tidak	
2	Kepemilikan Harta	Layak / Tidak	
3	Pendapatan	Layak / Tidak	
REKOMENDASI		LAYAK / TIDAK	

....., Tgl, bulan tahun 200.....

Surveyor

(.....)
Nama dan tanda tangan

.....
Keterangan :



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN (SPP)
UNTUK KELOMPOK**

Kepada Yth.

.....
.....

Di Tempat

Perihal: *Permohonan Pembiayaan Usaha*

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Diisi oleh MM					
SKIM - 1 2 3 4 5					
Yang diajukan			Yang Disetujui		
Rp			Rp		
Ttd Pendamping			Ttd Koordinator Program		
Tgl Pencairan					

NAMA KELOMPOK :

IDENTITAS ANGGOTA			JADWAL DALAM KELOMPOK	ALAMAT TINGGAL (sesuai KTP)	PEKERJAAN
NAMA	UMUR	L/P	: Kelua		
1.			:		
2.			:		
3.			:		
4.			:		
5.			:		
6.			:		
7.			:		
8.			:		
9.			:		
10.			:		

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha dari Masyarakat Mandiri dengan keterangan sebagai berikut :

I. DATA PEMBIAYAAN

a. Rencananya digunakan untuk :		1. Investasi	Rp
- Modal Kerja = Belanja Barang/Bahan-bahan Baku		2. Modal Usaha	Rp
- Investasi = Pembelian Barang/Peralatan Usaha		JUMLAH	Rp
b. Jangka Waktu Pembiayaan		: Minggu/Bulan	
c: Periode angsuran		a. per minggu b.	
d. Akad Pembiayaan		1. BGA 2. Basil 3. QH	
e. Prosentase <input type="radio"/> Marjin (murabahah) <input type="radio"/> Bagi Hasil		:	
c. Rencana Pembayaran	- Angsuran Mitra Wajib (AMW)	Rp	
	- Marjin	Rp	
	- Infaq kelompok	Rp	
	- Tabungon Mitra (TAMI)	Rp	

II. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN MODAL

1. INVESTASI		2. MODAL USAHA	
•	Rp	•	Rp
•	Rp	•	Rp
•	Rp	•	Rp
•	Rp	•	Rp
•	Rp	•	Rp
•	Rp	•	Rp
Jumlah 1.		Jumlah 2.	

III. DATA USAHA (HARIAN) – untuk usaha baru diisi dengan data prediksi

A. PENERIMAAN (PENDAPATAN)		B. BIAYA PRODUKSI (PENGELUARAN)	
- Penjualan	Rp	- Pembelian Bahan Baku	Rp
- Penerimaan Lain-lain	Rp	- Operasional Usaha	Rp
		- Pengeluaran Lain-lain	Rp
JUMLAH	Rp	JUMLAH	Rp
		KEUNTUNGAN USAHA (A-B)	Rp
		Rasio A/B	

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi tersebut di atas adalah benar, dan dengan ini saya bersedia dan mengizinkan kepada untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang saya sampaikan. Bersama ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam program ini.

Dibuat di

Tgl Bulan Tahun

Pemohon,	Disetujui, Tanggal	Mengetahui, Tanggal
Ketua Kelompok	Ketua Induk	PM

Calatan ;

.....

REKOMENDASI DISETUIJI
Paraf
.....
Koordinator Program
DIPERDAIKI
Paraf
.....
Koordinator Program
DITOLAK
Paraf
.....
Koordinator Program

FORMULIR ANALISA PROPOSAL PINJAMAN BERGULIR PPMK T.A 200

A. DATA PRIBADI PEMINJAM

1. Proposal atas nama :
2. Alamat :
3. KTP dan KK Cocok : A. Ada / Ya B. Tidak
4. Beragama dengan baik : A. Ada / Ya B. Tidak
5. Dapat dipercaya : A. Ada / Ya B. Tidak
6. Peminjam masih bekerja/berusaha : A. Ada / Ya B. Tidak
7. Suami/Istri Peminjam bekerja : A. Ada / Ya B. Tidak
8. Pernah menerima kredit usaha : A. Ada / Ya B. Tidak
9. Ada sisa kredit masih berjalan : A. Ada / Ya B. Tidak

B. DATA PERSYARATAN

1. Foto Copy KTP Peminjam dan Penjamin : A. Ada / Ya B. Tidak
2. Foto Copy Kartu Keluarga : A. Ada / Ya B. Tidak
3. Foto Copy Buku Tabungan : A. Ada / Ya B. Tidak
4. Foto Copy Catatan Usaha : A. Ada / Ya B. Tidak

C. DATA USAHA

1. Jenis usaha sesuai dengan proposal : A. Ada/Ya B. Tidak
2. Jenis Usaha : A. Dagang B. Produksi C. Jasa
3. Lokasi usaha dirumah : A. Ada/Ya B. Tidak
4. Lokasi Usaha : A. Milik sendiri B. Kontrak C. Pinjam Gratis
5. Pengalaman Usaha : A. Lebih 6 bulan B. Lebih 1 thn C. Lebih 2 thn
6. Pemasaran : A. Lingkungan Rw B. Luar Wil C. Luar Daerah
7. Perijinan : A. Ada ijin usaha B. Brg perlu ijin C. Punya ijin Khusus
8. Administrasi usaha baik : A. Baik B. Kurang Baik C. Belum ada catatan

D. RATIO PINJAMAN

1. Modal yang terikat usaha :
 - Prasarana Usaha : Rp.
 - Barang Dagangan : Rp.
 - Jumlah : Rp.
2. Besarnya Pinjaman : Rp.
 - Jangka waktu pinjaman..... bln
 - Angsuran per bulan plus jasa : Rp.

E. RATIO ANGSURAN

1. Omset penjualan perbulan : Rp.
2. Harga pokok barang yang terjual : Rp.
3. Laba Kotor : Rp.(1-2)
4. Biaya Operasional : Rp.
5. Laba bersih : Rp.(3-4)
6. Ratio Max angsuran 30% x No.5 : Rp.

KOMITE SELEKSI, : Penjamin Jakarta, _____
Peminjam

(.....)(.....)(.....)(.....)(.....)

SURAT PERNYATAAN PENJAMIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____
Hubungan Keluarga : _____

Selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN.

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____
Hubungan Keluarga : _____

Selanjutnya disebut sebagai PEMINJAM.

Dengan ini PENJAMIN menyatakan bersedia dan sanggup untuk MENGEMBALIKAN Uang Pinjaman Dana Ekonomi bergulir PPMK kepada UPK-MK apabila :

1. Bahwa PEMINJAM tidak mengembalikan pinjaman tetapi PEMINJAM masih memiliki usaha yang besarnya melebihi pinjaman Dana Ekonomi bergulir PPMK.
2. Bahwa PEMINJAM tidak mampu membayar cicilan pengembalian pinjaman Dana Ekonomi bergulir PPMK dikarenakan besarnya pinjaman melebihi modal usaha yang akan dikembangkan.
3. Bahwa PEMINJAM Menunggak angsuran pengembalian pinjaman dana ekonomi bergulir PPMK selama 3 (tiga) bulan atau lebih.
4. Bahwa PEMINJAM Tidak mampu membayar cicilan pengembalian pinjaman dana ekonomi bergulir PPMK dikarenakan usahanya bangkrut atau mendapat bencana alam.
5. Bahwa PEMINJAM pindah alamat/domisili atau meninggalkan wilayah Kel.Duri Utara.
6. Bahwa PEMINJAM Meninggal Dunia.
7. Bahwa apabila PENJAMIN melalaikan, tidak memenuhi atau tidak melaksanakan sebagaimana surat pernyataan ini akan diselesaikan menurut aturan dan tata cara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pihak Penegak Hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani oleh para pihak di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dengan dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, _____

PEMINJAM

Yang Menyatakan
PENJAMIN

Materai
Rp.6.000,-